



Katalog BPS: 4103008

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2011



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 20II



STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2011

ISSN: 2086-1028

No. Publikasi/Publication Number: 04220.1201

Katalog BPS/BPS Catalogue: 4103008

Ukuran Buku/Book Size: 28 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/Pages: xxv + 190 halaman/pages

Naskah/Manuscript :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Subdirectorate of Education and Social Welfare Statistics

Gambar Kulit/Cover Design:

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub Directorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS - Statistics Indonesia

Dicetak oleh/Printed by:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Guna memenuhi harapan dan menjawab tantangan masa depan, pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data statistik mengenai pemuda yang akurat dan terpercaya. Oleh karenanya, perlu dibuat suatu publikasi yang secara khusus menggambarkan kondisi pemuda. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2011 merupakan kelanjutan dari publikasi serupa yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Stastistik (BPS). Sumber data untuk publikasi ini utamanya berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011. Adapun informasi terkait dengan ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011.

Publikasi ini menyajikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan situasi pemuda Indonesia baik tingkat nasional maupun provinsi pada tahun 2011 antara lain mencakup profil demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan pemuda. Publikasi ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya bidang kepemudaan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Suryamin, M.Sc

Ringkasan Eksekutif

PEMUDA adalah pelopor pembaruan dan penggerak pembangunan bangsa. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, mengingat catatan sejarah peran pemuda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Jumlah pemuda Indonesia (penduduk berusia 16-30 tahun) tahun 2011 diperkirakan sebanyak 61,95 juta jiwa atau 25,69 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 241,13 juta jiwa. Jumlah pemuda perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Hal ini ditandai dengan rasio jenis kelamin pemuda sebesar 98,24 yang berarti bahwa dalam 100 pemuda perempuan, ada sebanyak 98 pemuda laki-laki.

Komponen terbesar pemuda terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 35,98 persen, kelompok umur 16-20 tahun dengan persentase sebesar 32,06 persen, dan kelompok umur 21-25 tahun sebesar 31,97 persen. Di perkotaan, persentase pemuda terbesar terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun (35,25 persen), kelompok umur 16-20 tahun (33,07 persen) dan kelompok umur 21-25 tahun (31,68 persen). Sedangkan di

perdesaan, persentase pemuda kelompok umur 26-30 tahun sebesar 36,74 persen, diikuti kelompok umur 21-25 tahun (32,26 persen) dan kelompok umur 16-20 tahun (31,00 persen).

Berdasarkan status perkawinan, sebesar 51,98 persen pemuda belum kawin, 46,50 persen berstatus kawin dan sisanya berstatus cerai hidup/mati (1,52 persen). Terdapat pemuda kelompok usia relatif muda (usia 16-20 tahun) yang pernah kawin (berstatus kawin dan cerai hidup/mati), dengan persentase mencapai 11,94 persen. Keadaan ini terutama terjadi di perdesaan dengan persentase sebesar 16,64 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,76 persen.

Partisipasi sekolah pemuda menunjukkan sebesar 1,37 persen pemuda tidak/belum pernah bersekolah, sebesar 81,15 persen tidak bersekolah lagi dan sebanyak 17,48 persen sedang bersekolah (termasuk pemuda yang ikut Paket A, Paket B dan Paket C). Persentase pemuda di perkotaan yang masih bersekolah 21,40 persen dan di perdesaan sebesar 13,37 persen. Persentase pemuda di perdesaan yang tidak bersekolah lagi (84,38 persen) lebih besar dibandingkan pemuda di perkotaan (78,08 persen). Pemuda yang tidak/belum pernah sekolah di perdesaan sebesar 2,26 persen dan di perkotaan sebesar 0,52 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda laki-laki lebih tinggi daripada APS pemuda perempuan (18,37 persen berbanding 16,61 persen). APS pemuda yang berusia 16-18 tahun sebesar 57,85 persen. Pada kelompok umur 19-24 tahun sebesar 14,26 persen dan 1,77 persen pada pemuda usia 25-30 tahun.

Angka buta huruf pemuda tahun 2011 tercatat sebesar 1,44 persen. Angka buta huruf pemuda di perdesaan sebesar 2,42 persen, lebih besar dibandingkan di perkotaan sebesar 0,50 persen. Secara nasional, rata-rata lama sekolah pemuda pada tahun 2011 mencapai 9,47 tahun. Menurut tipe daerah, rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan mencapai 10,50 tahun. Sedangkan pemuda di perdesaan baru 8,40 tahun.

Secara umum pendidikan yang dicapai oleh pemuda hanya sampai jenjang SMP (31,86 persen) dan SM (31,33 persen). Pemuda yang tamat perguruan tinggi hanya 6,46 persen, tidak/belum pernah sekolah (1,37 persen) dan tidak/belum tamat Sekolah Dasar (6,17 persen). Penyebab utama pemuda

usia sekolah (16-24 tahun) tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi adalah karena tidak memiliki biaya (43,21 persen) dan bekerja mencari nafkah (20,78 persen).

Pada tahun 2011, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Data Sakernas 2011 menunjukkan bahwa TPAK pemuda sebesar 63,44 persen, yang berarti dari setiap 100 pemuda, sekitar 63 orang diantaranya aktif melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Dari keseluruhan pemuda, sekitar 55,07 persen diantaranya adalah pemuda yang bekerja. Persentase pemuda di perdesaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda di perkotaan (56,62 persen berbanding 53,56 persen). Persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM) sebesar 33,82 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 26,18 persen dan Sekolah Dasar (SD) sebesar 23,04 persen.

Sektor paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah pertanian (29,18 persen), perdagangan (22,32 persen) dan industri (17,13 persen). Sementara itu, sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas dan air (0,23 persen), pertambangan dan galian (1,72 persen) serta keuangan (3,43 persen). Dari keseluruhan jumlah pemuda yang bekerja, status pekerjaan yang banyak disandang pemuda adalah buruh/karyawan dengan persentase 46,83 persen, pekerja tidak dibayar 20,77 persen dan berusaha sendiri 12,62 persen.

Sebanyak 68,08 persen pemuda bekerja dengan jam kerja normal (lebih dari 35 jam seminggu). Sisanya 31,92 persen adalah pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu (setengah pengangguran). Pada tahun 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda tercatat sebesar 8,37 persen yang artinya dari setiap 100 orang pemuda angkatan kerja, 8 diantaranya belum mempunyai pekerjaan. Menurut tipe daerah, TPT pemuda perkotaan (9,66 persen) cenderung lebih tinggi daripada TPT pemuda di perdesaan (7,04 persen). Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT pemuda perempuan (7,23 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda laki-laki (9,52 persen).

Pada tahun 2011, sekitar 20,20 persen dari keseluruhan pemuda mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Pemuda di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan persentasenya lebih tinggi dibandingkan pemuda perkotaan (20,77 persen berbanding 19,66 persen). Jenis keluhan kesehatan yang banyak dirasakan adalah pilek (8,80 persen), batuk (8,64 persen) dan panas (6,32 persen). Sebanyak 9,52 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan menderita sakit. Proporsi pemuda perempuan yang sakit (9,78 persen) lebih tinggi dari pemuda laki-laki (9,26 persen). Sebanyak 61,89 persen pemuda yang sakit, mengalami sakit selama 1-3 hari.

Persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri sakitnya dengan pengobatan modern sebesar 78,45 persen, cara tradisional sebesar 6,09 persen, pengobatan campuran sebesar 14,49 persen dan lainnya 0,97 persen. Fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dikunjungi pemuda dalam mengobati sakitnya adalah praktek tenaga kesehatan (31,55 persen), puskesmas (30,39 persen), dan praktek dokter (29,73 persen).

Partisipasi pemuda perempuan dalam program KB cukup tinggi. Sebanyak 60,75 persen pemuda perempuan berstatus pernah kawin sedang mengikuti KB, 15,54 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak ikut lagi dan 23,72 persen tidak pernah mengikuti KB. Jenis/alat KB yang banyak digunakan adalah suntikan KB (69,73 persen) dan pil KB (20,98 persen). Di perkotaan dan perdesaan, kedua alat KB tersebut juga merupakan alat KB yang paling banyak digunakan.

Sebagian besar pemuda perempuan (53,13 persen) menikah pertama kali pada usia 19-24 tahun. Pemuda perempuan yang menikah pada usia muda (17-18 tahun) juga cukup banyak yaitu sebesar 24,91 persen. Bahkan 6,32 persen pemuda perempuan melakukan perkawinan pertama saat berusia kurang dari 16 tahun. Pemuda perempuan di perdesaan yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 16 tahun sebesar 8,10 persen atau dua kali lebih tinggi dibanding pemuda perempuan perkotaan (4,06 persen).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xv
DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN <i>SAMPLING</i>	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup	8
2.3 Konsep dan Definisi	8
2.4 Keterbatasan Data	14
2.5 Metode Analisis	14
BAB III PROFIL DEMOGRAFI	17
3.1 Jumlah Pemuda	18
3.2 Struktur Pemuda menurut Jenis Kelamin	19
3.3 Struktur Pemuda menurut Tipe Daerah	20

	Halaman
3.4 Struktur Pemuda menurut Kelompok Umur	23
3.5 Struktur Perkawinan	24
3.6 Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga	27
BAB IV PENDIDIKAN	31
4.1 Partisipasi Pendidikan	33
4.2 Angka Buta Huruf	36
4.3 Rata-rata Lama Sekolah	39
4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	40
BAB V KETENAGAKERJAAN	47
5.1 Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	48
5.2 Lapangan Usaha	53
5.3 Status Pekerjaan	55
5.4 Pengangguran	58
5.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	59
5.6 Pendapatan/Upah/Gaji Bersih	61
BAB VI KESEHATAN	65
6.1 Keluhan Kesehatan	67
6.2 Angka Kesakitan	70
6.3 Lama Sakit	71
6.4 Cara Berobat	73
6.5 Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)	78
6.6 Umur Perkawinan Pertama	80
TABEL LAMPIRAN	85
ESTIMASI KESALAHAN <i>SAMPLING</i>	153
DAFTAR PUSTAKA	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2011	23
3.2	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2011	24
3.3	Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	28
4.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Sekolah, 2011	34
4.2	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	39
4.3	Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2011	41
5.1	TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	49
5.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	51
5.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2011	58

Gambar	Halaman
5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	59
6.1 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	68
6.2 Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	71
6.3 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lama Sakit dan Jenis Kelamin, 2011	73
6.4 Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengobatan, 2011	75
6.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Partisipasi KB, 2011	79

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Perkiraan Jumlah dan Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	19
3.2	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2009 - 2011	20
3.3	Proporsi Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009 - 2011	21
3.4	Persentase Pemuda menurut Pulau dan Jenis Kelamin, 2011	22
3.5	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	25
3.6	Persentase Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	26
3.7	Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2011	28
4.1	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, 2009 - 2011	33
4.2	Angka Partisipasi Sekolah Formal dan Nonformal Pemuda menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011	36
4.3	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2009 - 2011	37

Tabel		Halaman
4.4	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011	38
4.5	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	41
4.6	Persentase Pemuda Usia 16-24 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Sekolah Lagi, 2011	43
5.1	TPAK Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Tahun), 2011	50
5.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	52
5.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2011	53
5.4	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2011	54
5.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2011	56
5.6	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2011	56
5.7	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	57

Tabel	Halaman
5.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2011	60
5.9 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Tipe Daerah dan Pendapatan/Upah /Gaji Bersih Sebulan, 2011	61
6.1 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan, 2011	69
6.2 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2011	72
6.3 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	74
6.4 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	77
6.5 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alat/Cara KB yang digunakan dan Tipe Daerah, 2011	80
6.6 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama, 2011	81

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1-3.1.3	Perkiraan Jumlah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011 (000)	85 - 87
3.2	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	88
3.3.1-3.3.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2011	89 - 91
3.4.1-3.4.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2011	92 - 94
4.1.1-4.1.3	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, 2011	95 - 97
4.2.1-4.2.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan, 2011	98 - 100
4.3	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011	101
4.4.1-4.4.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	102 - 104
4.5.1-4.5.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2011	105 - 107
5.1.1-5.1.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011	108 - 110
5.2.1-5.2.3	Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011	111 - 113

Tabel	Halaman	
5.3.1-5.3.3	Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011	114 - 116
5.4.1-5.4.3	Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011	117 - 119
5.5.1-5.5.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2011	120 - 122
5.6.1-5.6.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011	123 - 125
5.7.1-5.7.3	Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011	126 - 128
5.8.1-5.8.3	Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2011	129 - 131
6.1	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	132
6.2.1-6.2.3	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2011	133 - 135
6.3	Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	136
6.4.1-6.4.3	Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2011	137 - 139

Tabel	Halaman
6.5 Proporsi Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang dan Pernah Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011	140
6.6.1-6.6.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2011	141 - 143
6.7.1-6.7.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2011	144 - 146
6.8.1-6.8.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2011	147 - 149

DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

Tabel		Halaman
7.1	<i>Sampling Error Angka Buta Huruf Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	155
7.2	<i>Sampling Error Angka Buta Huruf Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	156
7.3	<i>Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	157
7.4	<i>Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	158
7.5	<i>Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	159
7.6	<i>Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	160
7.7	<i>Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	161
7.8	<i>Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	162
7.9	<i>Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	163
7.10	<i>Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	164
7.11	<i>Sampling Error Pemuda yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	165

Tabel	Halaman
7.12 <i>Sampling Error Pemuda yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	166
7.13 <i>Sampling Error Pemuda yang Tidak Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	167
7.14 <i>Sampling Error Pemuda yang Tidak Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	168
7.15 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	169
7.16 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	170
7.17 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SMP/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	171
7.18 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SMP/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	172
7.19 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SM/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	173
7.20 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat SM/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	174
7.21 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat PT menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	175
7.22 <i>Sampling Error Pemuda yang Tamat PT menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	176
7.23 <i>Sampling Error Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011</i>	177
7.24 <i>Sampling Error Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011</i>	178

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
IPM	Indek Pembangunan Manusia
KB	Keluarga Berencana
PT	Perguruan Tinggi
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Sensus Ekonomi
SLS	Satuan Lingkungan Setempat
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

PENDAHULUAN

http://www.bps.go.id



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pengertian Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, mengingat catatan sejarah peran pemuda senantiasa menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Peran penting pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan

bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan yang senantiasa memberikan pemikiran dan pergerakan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan demi kedaulatan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan (*agent of change*) sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Situasi pembangunan yang senantiasa tumbuh dan berkembang di era globalisasi ini, menuntut peran aktif pemuda untuk membawa perubahan bangsa menjadi lebih baik, lebih bersatu, lebih makmur, lebih demokratis, dan lebih madani. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945.

Sejalan dengan itu, pada Bab II Pasal 3 UU tentang Kepemudaan disebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berkebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan harus didukung oleh ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

Menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda telah menyusun Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yaitu "Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing". Di dalam visi tersebut, pemuda Indonesia harus

diberdayakan menjadi pemuda yang cerdas, bermoral baik, berkarakter, dan mandiri serta memiliki kemampuan berkompetisi di era globalisasi.

Guna memenuhi harapan dan menjawab tantangan masa depan, pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai bahan perencanaan, target/sasaran pembangunan, pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya pemuda. Publikasi Pemuda 2011 menyajikan gambaran makro mengenai kondisi dan situasi pemuda Indonesia baik tingkat nasional maupun provinsi pada tahun 2011.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2011 ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci dan menyeluruh tentang profil pemuda di Indonesia, baik tingkat nasional maupun regional. Kondisi dan perkembangan pemuda dalam publikasi ini dilihat dari sisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Indikator penting yang dicakup dalam aspek demografi menyangkut perkembangan jumlah pemuda, rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan yang menjadi beban pemuda. Aspek pendidikan digambarkan oleh partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka buta aksara. Aspek kesehatan menyangkut keluhan kesehatan, angka kesakitan, perkawinan dan penggunaan alat/cara KB yang sedang digunakan. Aspek ketenagakerjaan menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja, pemuda bekerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan, serta tingkat pengangguran. Selanjutnya aspek perumahan meliputi status kepemilikan bangunan tempat tinggal, dan kondisi fasilitas perumahan. Publikasi ini juga memberikan deskripsi kesenjangan potensi, kualitas, dan dinamika pemuda menurut wilayah (provinsi dan tipe daerah) serta jenis kelamin.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi statistik pemuda ini secara sistematis disajikan dalam enam bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh tentang keseluruhan isi publikasi. Uraian rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab I) menyajikan latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian. Metodologi mencakup sumber data, ruang lingkup, metode pengumpulan data, petugas lapangan, serta konsep dan definisi disajikan pada bagian kedua (Bab II). Bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran pemuda dari aspek kependudukan (Bab III), pendidikan (Bab IV), ketenagakerjaan (Bab V), dan kesehatan (Bab VI).

METODOLOGI



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2011 ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2011, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2011, yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan pemuda.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS-RI melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas

dilaksanakan secara triwulan (triwulan I-IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali. Data modul mencakup Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga, Modul Pendidikan dan Sosial Budaya serta Modul Perumahan dan Kesehatan.

Sesuai dengan gilirannya modul Susenas tahun 2011 adalah Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga. Untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk PDB/PDRB triwulan dan penghitungan kemiskinan, maka pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga mulai tahun 2011 dilaksanakan secara triwulan dan direncanakan setiap tahun akan dilakukan pengumpulan data kor dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas 2011 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 Kab/Kota di Indonesia, di mana setiap triwulan didistribusikan sebanyak 75.000 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan sampai level provinsi, sedangkan dari kumulatif hasil pencacahan selama empat triwulan datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Susenas tahun 2011 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa. Publikasi ini menggunakan data hasil pencacahan gabungan 4 (empat) triwulan.

2.3 Konsep dan Definisi

- a. **Pemuda** adalah penduduk berumur 16-30 tahun.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit

(indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

- c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Pemuda adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 16-30 tahun.

- d. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- f. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
- g. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- h. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.
- i. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- j. **Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM).
- k. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/sederajat dan SMP/sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya.

I. Pendidikan:

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- m. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- n. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- p. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- q. **Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16-30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

- r. **Bukan Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16-30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- s. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur dibatasi 16-30 tahun.

- t. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- u. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.
- v. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- w. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- x. **Angka Ketergantungan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif (Usia < 15 Tahun dan usia > 64 tahun) pada penduduk usia produktif (15-59 tahun).
- y. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.
- z. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

2.4 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS RI, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo tidak dicakup, diasumsikan karakteristiknya sama dengan rumah tangga biasa.

2.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai pemuda selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan Lampiran Tabel untuk melihat data pada tingkat provinsi.

PROFIL DEMOGRAFI



Profil Demografi

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu tujuan pokok dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Peningkatan kualitas SDM mendapat prioritas dalam program pemerintah karena merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, manusia ditempatkan bukan semata-mata menjadi obyek pembangunan tetapi juga merupakan subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, maka setiap orang harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, terutama generasi muda atau pemuda.

Sebagai bagian dari SDM, penduduk usia muda atau pemuda tidak bisa diabaikan. Kepedulian terhadap pembangunan pemuda cukup penting, karena disamping bagian dari SDM, dalam struktur demografis, penduduk usia muda (16-30 tahun) merupakan segmen paling besar dan masih berada pada usia produktif. Selain kuantitasnya yang besar, mereka juga mempunyai ciri

tersendiri, yaitu pemikiran, semangat dan kreativitasnya yang tinggi. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan utama sehingga peran pemuda semakin esensial dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Potensi pemuda yang besar baik dari sisi kuantitas maupun produktivitas tidak selamanya dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Hal tersebut dapat menjadi beban apabila sebagian besar pemuda tidak turut serta dalam proses pembangunan. Sejalan dengan itu, diperlukan perencanaan program dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pemuda sehingga mereka dapat berperan aktif dalam setiap gerak pembangunan.

Dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan bidang kepemudaan baik sektoral maupun lintas sektoral harus didukung oleh ketersediaan data kependudukan seperti jumlah, distribusi, dan struktur pemuda. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran kuantitas pemuda yang akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan.

Gambaran kuantitas pemuda di Indonesia secara rinci akan dilihat dari berbagai karakteristiknya. Dalam bab ini akan disajikan gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, tipe daerah, umur, status perkawinan dan peran sebagai kepala rumah tangga.

3.1 Jumlah Pemuda

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional (*human capital*). Suatu pembangunan akan berhasil atau tidak tergantung pada penduduknya, terlebih lagi jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Salah satu bagian dari jumlah penduduk yang besar tersebut adalah pemuda yang merupakan generasi penerus dan pelaku pembangunan di masa depan.

Pembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data hasil Susenas 2011, perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 241,13 juta jiwa. Dari

jumlah penduduk secara keseluruhan tersebut, sekitar 61,95 juta jiwa atau 25,69 persen di antaranya adalah pemuda, yaitu penduduk dengan kelompok umur 16 sampai dengan 30 tahun. Jumlah pemuda yang cukup besar ini merupakan aset bangsa yang perlu diperhatikan karena kualitas SDM Indonesia yang akan datang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Namun potensi pemuda tersebut tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pemuda.

Tabel 3.1

Perkiraan Jumlah dan Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perdesaan (K)	15.692,4	49,41	16.064,2	50,59	31.756,6	100,00
Perkotaan (D)	15.010,4	49,71	15.187,6	50,29	30.198,0	100,00
K+D	30.702,8	49,56	31.251,8	50,44	61.954,6	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pemuda perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemuda laki-laki (31,25 juta jiwa berbanding 30,70 juta jiwa). Kondisi yang serupa terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Apabila diperinci menurut daerah tempat tinggal, tampak bahwa pemuda yang bertempat tinggal di perdesaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan pemuda yang tinggal di perkotaan (31,76 juta jiwa berbanding 30,20 juta jiwa).

3.2 Struktur Pemuda menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu dinamakan dengan rasio jenis kelamin. Angka rasio jenis kelamin biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa jumlah pemuda perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki.

Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2011 tercatat sebesar 98,24. Hal ini berarti bahwa dalam 100 pemuda perempuan terdapat sekitar 98 pemuda laki-laki. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, rasio jenis kelamin pemuda di perkotaan tercatat sebesar 97,69. Sementara itu, rasio jenis kelamin pemuda di perdesaan tercatat sebesar 98,83.

Tabel 3.2
Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2009-2011

Tipe Daerah	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	98,03	97,66	97,69
Perdesaan (D)	97,97	99,64	98,83
K+D	98,00	98,57	98,24

Sumber: BPS RI -Susenas 2009-2011

Dilihat perkembangannya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, rasio jenis kelamin pemuda cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009, rasio jenis kelamin pemuda tercatat sebesar 98,00. Pada tahun 2010, angka ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,57 kemudian turun menjadi sebesar 98,24 pada tahun 2011.

Secara nasional, rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2011 kurang dari 100 atau dengan kata lain jumlah pemuda perempuan lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki. Namun bila dilihat sebarannya menurut provinsi, terdapat 14 (empat belas) provinsi memiliki rasio jenis kelamin pemuda lebih dari 100 atau jumlah pemuda perempuan sedikit lebih rendah dibanding laki-laki (Lampiran Tabel 3.2). Provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 diantaranya yaitu Provinsi Bangka Belitung (107,98), Lampung (106,96), Sumatera Selatan (105,75), Sulawesi Utara (105,68), dan Sumatera Barat (105,07).

3.3 Struktur Pemuda menurut Tipe Daerah

Bila dilihat dari tipe daerah, terdapat perbedaan pola kehidupan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan. Oleh

karena itu, pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di perkotaan. Dengan tingkat kemajuan ekonomi yang lebih tinggi, anggapan bahwa kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik, tersedianya lapangan kerja yang lebih luas, serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas lain yang lebih lengkap dibandingkan dengan di desa menyebabkan banyak penduduk pindah ke kota, termasuk para pemudanya. Namun, adanya perbedaan komposisi pemuda antara pedesaan dengan perkotaan, tidak mengurangi peran mereka dalam membangun daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil Susenas 2011, sekitar 25,69 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia adalah pemuda. Bila dilihat menurut tipe daerah, komposisi pemuda yang tinggal di perkotaan cenderung lebih besar persentasenya dibandingkan dengan pemuda yang tinggal di perdesaan. Persentase pemuda di perkotaan tercatat sebesar 26,45 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan, sebesar 24,94 persen dari jumlah penduduk perdesaan adalah pemuda. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa komposisi antara pemuda laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh berbeda. Dari keseluruhan penduduk perempuan, sekitar 26,12 persennya adalah pemuda perempuan. Sementara dari keseluruhan penduduk laki-laki terdapat 25,28 persen pemuda laki-laki.

Tabel 3.3
Proporsi Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2009-2011

Jenis Kelamin	2009			2010			2011		
	Per-kotaan	Per-desaan	K+D	Per-kotaan	Per-kotaan	K+D	Per-kotaan	Per-desaan	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki (L)	26,67	23,48	25,02	26,89	22,96	24,91	26,07	24,50	25,28
Perempuan (P)	26,69	23,53	25,06	27,51	23,38	25,45	26,83	25,40	26,12
L+P	26,68	23,50	25,04	27,20	23,17	25,18	26,45	24,94	25,69

Sumber: BPS RI - Susenas 2009-2011

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat juga perbandingan proporsi pemuda dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa proporsi pemuda mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, proporsi pemuda di Indonesia tercatat sebesar 25,04 persen. Angka tersebut naik menjadi sebesar 25,18 persen pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi sebesar 25,69 persen.

Pemuda sebagai salah satu unsur dari penduduk Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini menjadi penting mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga potensi yang dimiliki pemuda menjadi modal dalam membangun daerahnya masing-masing.

**Tabel 3.4
Persentase Pemuda menurut Pulau dan Jenis Kelamin, 2011**

Pulau	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	22,96	22,21	22,58
Jawa	55,86	56,20	56,03
Kalimantan	6,31	6,18	6,25
Sulawesi	7,07	7,21	7,14
Pulau Lainnya	7,80	8,20	8,00
Indonesia	100,00	100,00	100,00

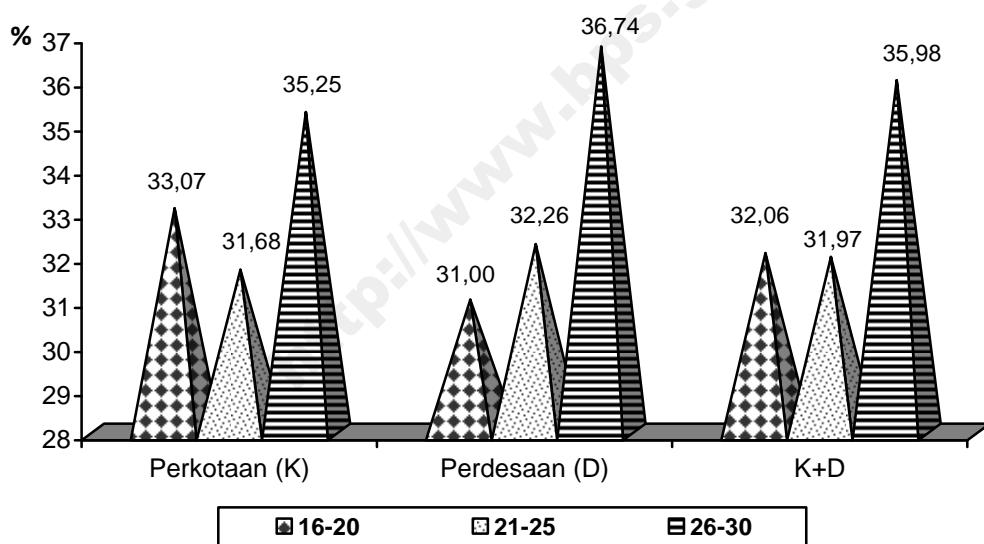
Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat distribusi pemuda menurut pulau. Dari tabel tersebut nampak bahwa lebih dari separuh pemuda (56,03 persen) terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di pulau Sumatera (22,58 persen), Sulawesi (7,14 persen), Kalimantan (6,25 persen) dan 8,00 persen tersebar di pulau-pulau lainnya seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Sebaran pemuda di seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1.3. Tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda terbanyak yaitu Jawa Barat (11,45 juta), Jawa Timur (8,75 juta) dan Jawa Tengah (7,39 juta). Sedangkan, tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda paling sedikit yaitu Papua Barat (0,23 juta), Gorontalo (0,27 juta) dan Maluku Utara (0,28 juta).

3.4 Struktur Pemuda menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk menurut umur memperlihatkan dampak pengendalian angka kematian bayi dan perkembangan usia harapan hidup yang biasa digambarkan dalam piramida penduduk. Kelompok umur pemuda yang berkisar 16-30 tahun menjadikan pemuda salah satu unsur penduduk yang berpotensi dan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan karena masih berada pada usia produktif.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

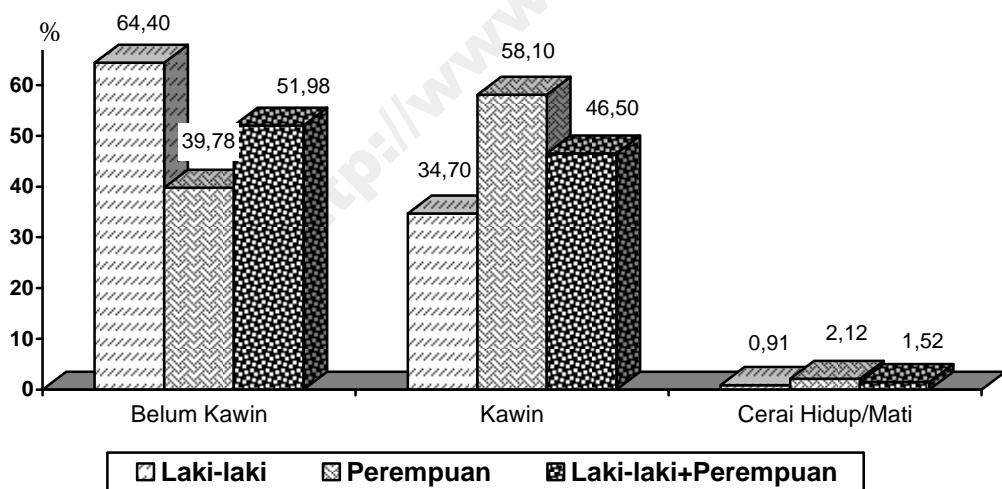
Gambar 3.1 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2011

Struktur umur pemuda pada tahun 2011 disajikan pada Gambar 3.1. Persentase terbesar pemuda terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 35,98 persen, diikuti pemuda pada kelompok umur 16-20 tahun sebesar 32,06 persen, dan kelompok umur 21-25 tahun sebesar 31,97 persen.

Jika diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan persentase tertinggi pemuda terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun (di perkotaan sebesar 35,25 persen dan di perdesaan sebesar 36,74 persen). Perbedaan komposisi pemuda terdapat pada kelompok umur 16-20 tahun dan 21-25 tahun. Di daerah perkotaan, urutan kedua terbesar pada kelompok umur 16-20 tahun (33,07 persen) dan selanjutnya pada kelompok umur 21-25 tahun (31,68 persen). Sebaliknya, di daerah perdesaan urutan kedua terbesar pada kelompok umur 21-25 tahun (32,26 persen) dan selanjutnya pada kelompok umur 16-20 tahun (31,00 persen).

3.5 Struktur Perkawinan

Dalam UU tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kenyataannya masih terdapat perkawinan usia muda yang umumnya terjadi di daerah perdesaan terutama pada penduduk perempuan.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 3.2 Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2011

Gambar 3.2 memperlihatkan adanya perbedaan pola status perkawinan antara pemuda laki-laki dan perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang belum kawin (64,40 persen) lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (39,78 persen). Sebaliknya, persentase pemuda perempuan dengan status

kawin (58,10 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (34,70 persen). Perbedaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemuda perempuan pada umumnya lebih banyak yang menikah di usia muda dibandingkan dengan pemuda laki-laki.

Selanjutnya, bila ditinjau berdasarkan tipe daerah dan jenis kelamin terdapat perbedaan pola status perkawinan pemuda laki-laki dan perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.5. Secara umum, pemuda yang berada di daerah perkotaan lebih banyak yang berstatus belum kawin (58,63 persen) dibanding pemuda yang berstatus kawin (39,98 persen). Keadaan yang berkebalikan terjadi di daerah perdesaan, dimana pemuda yang berstatus kawin persentasenya lebih tinggi dibanding dengan pemuda yang belum kawin (53,36 persen berbanding 44,99 persen).

Tabel 3.5
Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,
2011

Status Per-kawinan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L + P	Laki-laki	Perem-puan	L + P	Laki-laki	Perem-puan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belum Kawin	69,26	48,25	58,63	59,32	30,83	44,99	64,40	39,78	51,98
Kawin	30,01	49,72	39,98	39,59	66,96	53,36	34,70	58,10	46,50
Cerai Hidup /Mati	0,73	2,02	1,39	1,09	2,21	1,65	0,91	2,12	1,52

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Lebih jauh bila dilihat menurut jenis kelamin, baik pemuda laki-laki di perkotaan maupun perdesaan lebih banyak yang berstatus belum kawin dibanding dengan yang berstatus sudah kawin. Keadaan yang berkebalikan dialami oleh pemuda perempuan, dimana persentase pemuda perempuan yang telah kawin lebih besar dibanding dengan yang belum kawin. Sebanyak 66,96 persen pemuda perempuan di perdesaan menyandang status kawin, sedangkan yang belum kawin sebanyak 30,83 persen. Begitu pula dengan daerah perkotaan, sebanyak 49,72 persen perempuan sudah kawin dan 48,25 persen belum kawin.

Lampiran Tabel 3.4 menyajikan status perkawinan pemuda menurut provinsi. Dari lampiran tabel tersebut diperoleh gambaran bahwa sebagian besar provinsi memiliki lebih banyak pemuda yang berstatus belum kawin dibandingkan yang berstatus kawin. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi pemudanya yang berstatus belum kawin secara berturut-turut terdapat di Provinsi Aceh (64,87 persen), DKI Jakarta (63,03 persen) dan DI Yogyakarta (62,46 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase tertinggi pemuda berstatus kawin terdapat di Provinsi Papua (54,06 persen), Kalimantan Selatan (53,25 persen) dan Kalimantan Tengah (52,87 persen).

Tabel 3.6 menyajikan persentase pemuda yang pernah kawin (berstatus kawin, cerai hidup maupun cerai mati) menurut kelompok umur. Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa pemuda yang pernah kawin sebagian besar berada pada kelompok umur yang memang relatif sudah siap untuk berumah tangga (26-30 tahun). Namun, ternyata masih ada pemuda yang usianya relatif sangat muda bahkan masih layak untuk duduk di bangku sekolah (usia 16-20 tahun) dengan persentase mencapai 11,94 persen. Keadaan ini terutama terjadi di daerah perdesaan (16,64 persen), sedangkan di daerah perkotaan persentasenya sebesar 7,76 persen. Kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian, karena usianya yang relatif masih muda belum siap secara mental untuk memasuki bahtera rumah tangga.

Tabel 3.6
Persentase Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16-20	2,77	12,78	7,76	4,81	29,49	16,64	3,75	20,49	11,94
21-25	23,51	53,65	38,76	38,02	77,86	58,69	30,55	65,71	48,57
26-30	64,38	85,57	75,25	75,05	92,93	84,15	69,71	89,22	79,68

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

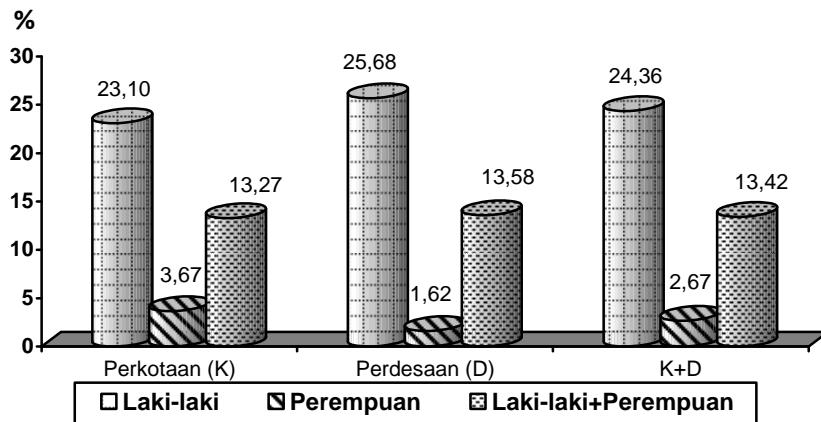
Berdasarkan Tabel 3.6 terlihat bahwa pada usia yang relatif muda (16-20 tahun), baik di perkotaan maupun perdesaan, pemuda perempuan yang pernah kawin jauh lebih besar dibandingkan pemuda laki-laki. Di daerah perkotaan, perbandingan antara pemuda perempuan yang pernah kawin dan laki-laki sebesar 12,78 persen berbanding 2,77 persen. Persentase pemuda perempuan umur 16-20 tahun di perdesaan yang pernah kawin sebesar 29,49 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya 4,81 persen.

3.6 Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga

Dalam suatu rumah tangga ada yang berperan sebagai anggota rumah tangga dan ada pula sebagai kepala rumah tangga. Sejalan dengan itu, di dalam sebuah rumah tangga, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian tidak terlepas dari peran serta seluruh anggota rumah tangga, terutama kepala rumah tangganya. Sosok kepala rumah tangga sangat berperan dalam menentukan arah dan kelangsungan sebuah rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah orang yang bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga. Oleh karena itu, kepala rumah tangga berperan sebagai pengambil keputusan di dalam rumah tangga.

Peran kepala rumah tangga sebagai pengambil keputusan rumah tangga memiliki hak istimewa dan otoritas yang besar dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai suami dan ayah merupakan figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri, dan status sosial ayah atau suami harus dijaga oleh anggota keluarga karena sangat menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat (Kusujarti, dalam Abdullah, 1997).

Hasil Susenas 2011 menunjukkan bahwa sekitar 13,42 persen pemuda berstatus sebagai kepala rumah tangga (Gambar 3.3). Persentase pemuda laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebesar 24,36 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang hanya sebesar 2,67 persen. Tingginya persentase pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga kemungkinan disebabkan budaya yang umum berlaku di masyarakat bahwa kepala rumah tangga diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Gambaran serupa juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 3.3 Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Tabel 3.7 menggambarkan bahwa seiring dengan meningkatnya umur terjadi peningkatan persentase pemuda yang menjadi kepala rumah tangga. Pada kelompok umur 16-20 tahun, pemuda yang berstatus sebagai kepala rumah tangga sebesar 2,11 persen. Angka tersebut naik menjadi sebesar 10,46 persen pada kelompok umur 21-25 tahun. Pada kelompok umur 26-30 tahun, persentase pemuda yang berstatus sebagai kepala rumah tangga meningkat menjadi 26,14 persen.

Tabel 3.7
Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga
menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16-20	3,00	2,92	2,96	1,64	0,63	1,16	2,35	1,86	2,11
21-25	17,12	5,10	11,04	18,84	1,53	9,86	17,95	3,32	10,46
26-30	47,97	3,09	24,95	53,07	2,49	27,33	50,52	2,79	26,14

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Besarnya pemuda pada kelompok umur 26-30 tahun yang menjadi kepala rumah tangga bisa dimengerti karena pada umumnya seseorang yang menjadi kepala rumah tangga diprioritaskan pada orang yang dituakan atau lebih tua umurnya di dalam keluarga.

PENDIDIKAN



Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), dan juga kemampuan analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan

menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi yang sarat dengan persaingan antar bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Pembangunan pendidikan merupakan pilar penting guna peningkatan kualitas manusia dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya: berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan penting untuk menciptakan sumber daya manusia intelektual yang efektif sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kekuatan suatu negara. Pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan mempunyai keahlian serta keterampilan. Pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemuda yang merupakan bagian dari kelompok usia produktif, diharapkan memiliki pendidikan yang berkualitas sebagai bekal agar mampu berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

Gambaran umum mengenai kondisi dan partisipasi pendidikan pemuda dibahas pada bagian ini. Indikator yang dicakup antara lain angka partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi serta penerimaan beasiswa/bantuan pendidikan.

4.1 Partisipasi Pendidikan

Berbagai upaya pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Namun sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk masih relatif rendah. Hal ini karena pembangunan pendidikan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, terutama berkaitan dengan perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada jalur formal dan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C). Peran aktif masyarakat guna meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pembangunan pendidikan. Demikian juga pemuda, mengingat perannya yang sangat dominan dalam keberhasilan pembangunan, sangat diharapkan partisipasi aktif mereka dalam dunia pendidikan. Partisipasi pendidikan pemuda, yaitu akses terhadap pendidikan formal maupun nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) dapat dilihat melalui indikator partisipasi sekolah, yang memberikan indikasi peran serta pemuda dalam pendidikan.

Tabel 4.1
Percentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin,
2009-2011

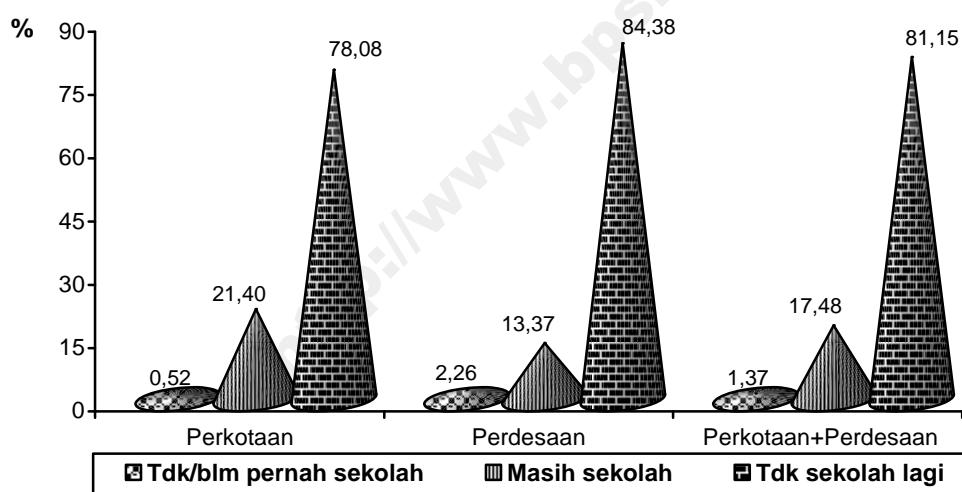
Partisipasi Sekolah	2009			2010			2011		
	Laki- laki	Perem- puan	L + P	Laki- laki	Perem- puan	L + P	Laki- laki	Perem- puan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk/Blm Prnh Sklh	1,03	1,48	1,25	1,21	1,48	1,35	1,19	1,54	1,37
Masih Sekolah	17,90	16,25	17,07	18,17	16,75	17,45	18,37	16,61	17,48
Tdk Sklh Lagi	81,07	82,27	81,68	80,62	81,77	81,20	80,44	81,85	81,15

Sumber: BPS RI - Susenas 2009-2011

Tabel 4.1 menyajikan partisipasi pemuda dalam pendidikan. Hasil Susenas 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 81,15 persen pemuda sudah tidak sekolah lagi, sebanyak 17,48 persen masih sekolah dan sebanyak 1,37 persen yang tidak/belum pernah sekolah.

Pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari partisipasi sekolah pemuda, dimana secara nasional persentase pemuda laki-laki yang masih sekolah lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (18,37 persen berbanding 16,61 persen). Sebaliknya untuk pemuda yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, persentasenya lebih tinggi pemuda perempuan dibanding pemuda laki-laki (Tabel 4.1).

Partisipasi pendidikan pemuda cenderung membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari perkembangan pendidikan pemuda selama periode tahun 2009-2011 dimana persentase pemuda yang masih bersekolah mengalami kenaikan. Pada tahun 2009, persentase pemuda yang masih bersekolah sebesar 17,07 persen. Pada tahun 2010 persentase pemuda yang masih bersekolah naik menjadi sebesar 17,45 persen. Kemudian mengalami kenaikan kembali menjadi 17,48 persen pada tahun 2011.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 4.1 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Sekolah, 2011

Bila dikaji menurut tipe daerah, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara partisipasi pendidikan pemuda di perkotaan dan perdesaan (Gambar 4.1). Hal ini memperlihatkan adanya indikasi belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1, partisipasi sekolah pemuda di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang tinggal di perdesaan.

Persentase pemuda di perkotaan yang masih sekolah sebesar 21,40 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 13,37 persen. Hal yang sebaliknya terjadi pada pemuda yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pemuda di perdesaan yang tidak sekolah lagi sebesar 84,38 persen, sedangkan pemuda di perkotaan persentasenya lebih rendah yaitu sebesar 78,08 persen. Sementara itu, pemuda di perdesaan yang tidak/belum pernah sekolah persentasenya mencapai 2,26 persen, empat kali lebih besar dibandingkan pemuda perkotaan yang hanya sebesar 0,52 persen.

Dilihat berdasarkan provinsi, partisipasi pendidikan pemuda menunjukkan persentase yang bervariasi (Lampiran Tabel 4.2.3). Persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah berkisar antara 0,51 persen hingga 4,43 persen kecuali di Provinsi Papua yang persentasenya mencapai 30,61 persen. Sementara persentase pemuda yang tidak sekolah lagi di berbagai provinsi sebarannya berkisar antara 54,59 persen hingga 88,15 persen.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada usia tertentu. Indikator ini dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan. Dalam publikasi ini, Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai persentase pemuda yang masih sekolah terhadap jumlah pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalannya.

Berdasarkan jenis kelamin, Angka Partisipasi Sekolah (APS) formal dan nonformal pemuda laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2, APS pemuda laki-laki sebesar 18,37 persen lebih tinggi dibandingkan APS pemuda perempuan sebesar 16,61 persen. Kecenderungan ini mungkin disebabkan budaya patriarkis. Orangtua terutama yang berasal dari keluarga miskin cenderung menyekolahkan anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan lebih baik menikah atau bekerja daripada bersekolah. (Ari Kristianawati, Kesetaraan: Pendidikan Berbasis Jender, 2010).

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Sekolah Formal dan Nonformal Pemuda
menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki	65,27	50,69	58,11
	Perempuan	62,49	51,85	57,57
	L+P	63,90	51,23	57,85
19-24	Laki-laki	20,55	8,71	14,94
	Perempuan	19,46	7,34	13,61
	L+P	20,00	8,01	14,26
25-30	Laki-laki	2,82	1,13	1,97
	Perempuan	1,88	1,26	1,57
	L+P	2,34	1,20	1,77
Jumlah (16-30)	Laki-laki	22,40	14,16	18,37
	Perempuan	20,42	12,58	16,61
	L+P	21,40	13,37	17,48

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Selain jenis kelamin, umur juga mempengaruhi angka partisipasi sekolah pemuda. Semakin tinggi umur pemuda angka partisipasi sekolah cenderung semakin menurun. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa APS pemuda yang berusia 16-18 tahun tercatat sebesar 57,85 persen. Persentase ini semakin menurun dengan meningkatnya umur. APS pemuda 19-24 tahun sebesar 14,26 persen dan APS pemuda usia 25-30 tahun hanya sebesar 1,77 persen. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi biaya pendidikan semakin mahal dan pemuda cenderung untuk menikah atau bekerja.

4.2 Angka Buta Huruf

Aksara adalah jendela dunia, pintu bagi pendidikan. Peran aksara sangat krusial dan sangat besar sumbangannya terhadap Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Indeks/HDI*). Jika buta aksara tinggi, maka IPM menjadi rendah. Sebaliknya, jika buta aksara rendah IPM akan meningkat. Kemampuan baca tulis atau melek aksara (*literacy*) penduduk dewasa, menjadi ukuran yang sangat mendasar bagi tingkat pendidikan

karena melek aksara merupakan salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan. Dengan semakin berkurangnya penduduk yang buta huruf, tingkat pendidikan masyarakat juga semakin maju sekaligus juga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

Usaha penuntasan buta aksara di Indonesia dilakukan secara terus-menerus sejak tahun 1997. Beberapa persoalan yang mendorong tingginya jumlah penduduk buta aksara antara lain disebabkan adanya penduduk yang sejak awal memang tidak sekolah karena berbagai alasan seperti keadaan ekonomi keluarga dan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Selain itu, terjadinya buta aksara juga akibat tingginya angka putus sekolah, sementara warga belajar yang telah mengikuti program pemberantasan buta aksara tidak memperoleh pemeliharaan secara intensif.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2011 yang disajikan pada Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa angka buta huruf pemuda pada tahun 2011 sebesar 1,44 persen. Apabila diperhatikan menurut tipe daerah, secara umum kemampuan baca tulis pemuda di perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan pemuda di perdesaan. Hal ini ditunjukkan dari angka buta huruf pemuda perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan pemuda perkotaan. Pada tahun 2011 angka buta huruf pemuda di daerah perkotaan sebesar 0,50 persen, sedangkan angka buta huruf pemuda di perdesaan sebesar 2,42 persen.

Tabel 4.3
**Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,
2009 - 2011**

Tipe Daerah	2009			2010			2011		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	L+P (4)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)	L+P (7)	Laki-laki (8)	Perempuan (9)	L+P (10)
(1)									
Perkotaan (K)	0,22	0,40	0,31	0,29	0,29	0,29	0,52	0,49	0,50
Perdesaan (D)	1,26	1,80	1,53	1,40	1,72	1,56	2,18	2,67	2,42
K+D	0,72	1,08	0,90	0,81	0,95	0,88	1,33	1,55	1,44

Sumber: BPS RI - Susenas 2009-2011

Hasil Susenas tahun 2011 juga menunjukkan bahwa angka buta huruf pemuda perempuan lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki. Angka buta huruf pemuda perempuan sebesar 1,55 persen dan laki-laki sebesar 1,33 persen.

Gambaran yang serupa terjadi di daerah perdesaan, dimana angka buta huruf pemuda perempuan sebesar 2,67 dan pemuda laki-laki sebesar 2,18 persen. Sedangkan di daerah perkotaan, angka buta huruf laki-laki lebih tinggi dibanding pemuda perempuan (0,52 persen berbanding 0,49 persen).

Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2009-2011, angka buta huruf pemuda cenderung fluktuatif. Angka buta huruf pemuda mengalami penurunan dari 0,90 persen di tahun 2009 menjadi 0,88 persen di tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 angka buta huruf pemuda meningkat menjadi 1,44 persen.

Tabel 4.4
Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2011

Kelompok Umur (Tahun)		Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
16-18	Laki-laki	0,51	1,93	1,21	
	Perempuan	0,36	1,62	0,94	
	L+P	0,44	1,79	1,08	
19-24	Laki-laki	0,57	1,98	1,24	
	Perempuan	0,54	2,51	1,49	
	L+P	0,55	2,25	1,37	
25-30	Laki-laki	0,47	2,47	1,47	
	Perempuan	0,52	3,21	1,86	
	L+P	0,49	2,84	1,67	
Total (16 - 30)	Laki-laki	0,52	2,18	1,33	
	Perempuan	0,49	2,67	1,55	
	L+P	0,50	2,42	1,44	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

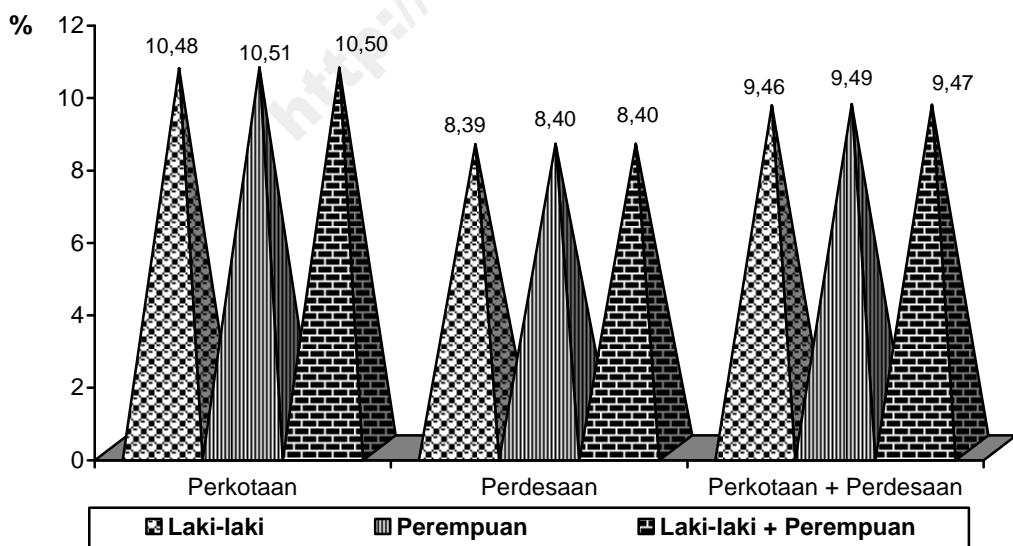
Angka buta huruf pemuda cenderung meningkat sejalan meningkatnya umur, atau dengan kata lain semakin tinggi umur pemuda maka semakin tinggi angka buta hurufnya. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, angka buta huruf pemuda pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 1,08 persen, kelompok umur 19-24 tahun sebesar 1,37 persen dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 1,67 persen. Kondisi semacam ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan serta untuk pemuda laki-laki maupun perempuan.

4.3 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yang digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Indikator rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan yang dikembangkan UNDP pada tahun 1990 dalam rangka penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang memerlukan waktu yang lebih cepat atau lebih lambat dalam menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Sesuai dengan konsep tersebut maka lama sekolah untuk seseorang yang tamat SD adalah 6 tahun, SMP kelas 1 adalah 7 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dicanangkannya gerakan nasional penuntasan wajib belajar 9 tahun. Pencapaian sasaran tersebut bagi para pemuda secara umum dapat dikatakan telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.



Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Gambar 4.2 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa secara nasional rata-rata lama sekolah pemuda telah mencapai 9,47 tahun. Angka ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah yang dicapai pemuda hingga tahun 2011 adalah tamat SMP. Dengan kata lain, program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah secara umum telah berhasil dituntaskan oleh pemuda pada tahun 2011.

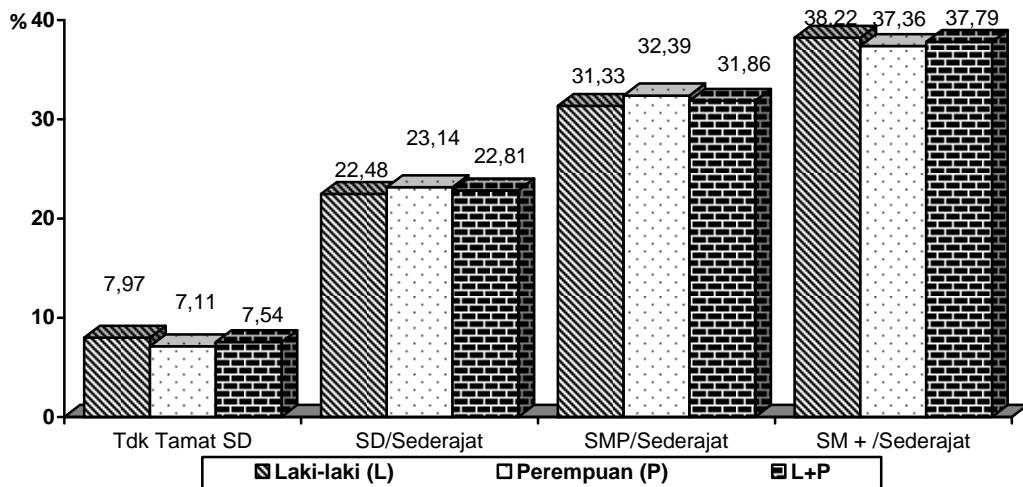
Namun bila dirinci menurut tipe daerah, pemerataan pendidikan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh pemuda. Hanya pemuda di daerah perkotaan saja yang telah berhasil melewati sasaran program wajib belajar 9 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pemuda di daerah perkotaan yang mencapai 10,50 tahun (Gambar 4.2). Sebaliknya, rata-rata lama sekolah pemuda di perdesaan baru mencapai 8,40 tahun.

Selain tipe daerah, pemerataan pendidikan juga harus memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini disebabkan masih ada perbedaan rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki dan pemuda perempuan meskipun perbedaannya relatif kecil (Gambar 4.2). Secara umum rata-rata lama sekolah pemuda perempuan mencapai 9,49 tahun, relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (9,46 tahun). Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rata-rata lama sekolah pemuda perempuan di perkotaan sebesar 10,51 tahun sedangkan pemuda laki-laki mencapai 10,48 tahun. Begitu pula di daerah perdesaan dimana rata-rata lama sekolah pemuda perempuan sebesar 8,40 tahun sedikit lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki sebesar 8,39 tahun.

4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Selain itu tingkat pendidikan juga menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat mengenyam pendidikan sampai level yang tinggi sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud.

Persentase pemuda menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 4.3.



Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Gambar 4.3 Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2011

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa secara umum pendidikan sebagian besar pemuda adalah sampai jenjang SMP/sederajat dan SM/sederajat ke atas dengan persentase masing-masing sebesar 31,86 persen dan 37,79 persen. Disamping itu masih terdapat pemuda yang tidak tamat Sekolah Dasar (7,54 persen). Keadaan ini secara umum mencerminkan tingkat pendidikan pemuda di Indonesia yang relatif masih rendah.

Tabel 4.5
Persentase Pemuda menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sede- rajat	SMP/ Sede- rajat	SM/ Sede- rajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)							
Laki-laki	0,50	3,80	14,62	30,02	43,22	7,83	100,00
Perempuan	0,53	3,02	15,25	31,19	39,22	10,79	100,00
L + P	0,52	3,41	14,94	30,61	41,20	9,33	100,00
Perdesaan (D)							
Laki-laki	1,91	9,89	30,69	32,70	22,12	2,67	100,00
Perempuan	2,59	8,28	31,47	33,66	19,80	4,19	100,00
L + P	2,26	9,08	31,09	33,18	20,96	3,44	100,00
K+D							
Laki-laki	1,19	6,78	22,48	31,33	32,91	5,31	100,00
Perempuan	1,54	5,57	23,14	32,39	29,78	7,58	100,00
L + P	1,37	6,17	22,81	31,86	31,33	6,46	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Dilihat menurut jenis kelamin, tampak bahwa pemuda perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/sederajat) persentasenya lebih besar daripada pemuda laki-laki. Persentase pemuda perempuan yang tamat SD/sederajat sebesar 23,14 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,39 persen. Persentase pemuda laki-laki yang tamat SD/sederajat sebesar 22,48 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 31,33 persen. Sebaliknya, pemuda laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang SM/sederajat (32,91 persen) persentasenya lebih besar daripada pemuda perempuan (29,78 persen).

Tingkat pendidikan pemuda di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan di perdesaan. Pemuda di daerah perkotaan yang tamat pendidikan Sekolah Menengah ke atas (SM dan PT) persentasenya lebih besar dibandingkan dengan pemuda di perdesaan. Pemuda perkotaan yang tamat SM sebesar 41,20 persen dan yang tamat PT sebesar 9,33 persen, sedangkan pemuda perdesaan yang tamat SM sebesar 20,96 persen dan yang tamat PT sebesar 3,44 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan yang lebih rendah berlaku sebaliknya. Persentase pemuda di perdesaan yang tamat SD sebesar 31,09 persen dan yang tamat SMP sebesar 33,18 persen, sedangkan pemuda di daerah perkotaan yang tamat SD sebesar 14,94 persen dan yang tamat SMP sebesar 30,61 persen. (Tabel 4.5).

Kekurangberdayaan dalam ekonomi masih menjadi alasan utama yang mempengaruhi partisipasi pendidikan. Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung, masih menjadi salah satu alasan utama rendahnya partisipasi pendidikan. Permasalahan tersebut juga dialami oleh pemuda yang sedang mengenyam pendidikan.

Data Susenas 2011 yang disajikan pada Tabel 4.6 mengungkapkan bahwa pemuda berusia 16-24 tahun yang tidak/belum sekolah atau tidak sekolah lagi karena alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (43,21 persen) maupun karena harus bekerja mencari nafkah (20,78 persen). Keadaan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 4.6
**Persentase Pemuda Usia 16-24 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan
Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Sekolah Lagi, 2011**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk Ada Biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Mengurus RT	Merasa Pddkn Cukup	Malu karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (K)								
Laki-Laki	43,31	31,28	1,72	9,50	0,55	0,22	0,83	12,59
Perempuan	39,04	23,53	18,22	9,83	0,40	0,32	0,52	8,14
L + P	41,13	27,33	10,13	9,67	0,47	0,27	0,67	10,32
Perdesaan (D)								
Laki-Laki	47,42	21,48	3,07	8,06	0,74	2,63	0,90	15,70
Perempuan	42,86	8,14	27,01	7,93	0,58	2,44	0,69	10,34
L + P	45,12	14,76	15,14	7,99	0,66	2,54	0,79	13,00
K+D								
Laki-Laki	45,47	26,14	2,43	8,74	0,65	1,49	0,86	14,22
Perempuan	41,02	15,55	22,78	8,85	0,49	1,42	0,61	9,28
L + P	43,21	20,78	12,74	8,80	0,57	1,45	0,74	11,72

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Satu hal menarik yang ditemui dari Tabel 4.6 adalah pemuda yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena alasan menikah/mengurus rumah tangga. Data Susenas 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 22,78 persen pemuda perempuan usia 16-24 tahun tidak bersekolah lagi karena menikah/mengurus rumah tangga, sedangkan persentase pemuda laki-laki hanya sebesar 2,43 persen. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan paradigma bahwa laki-laki masih memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan. Selain itu ada anggapan dari orang tua terutama yang berasal dari keluarga miskin bahwa anak perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan, mereka lebih baik menikah/mengurus rumah tangga.

KETENAGAKERJAAN



Ketenagakerjaan

Manusia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik materi maupun non materi. Pekerjaan itu sendiri merupakan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) tertera "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara terhadap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu diperlukan perencanaan di bidang ketenagakerjaan berkaitan dengan kewajiban negara tersebut.

Pemuda merupakan kelompok Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling potensial dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya. Sehingga perencanaan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari keberadaan pemuda yang merupakan kelompok penting dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kelompok pemuda mempunyai potensi yang cukup besar dalam dunia ketenagakerjaan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya bila dilihat dari faktor usia, tenaga dan kemampuan. Kelompok usia

kurang dari 16 tahun pada umumnya masih bersekolah, walaupun ada yang sudah bekerja namun keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tergolong masih rendah sehingga produktivitasnya juga cenderung rendah. Sedangkan kelompok usia lebih dari 30 tahun, khususnya lansia sebagian besar telah berkurang produktivitas dan kemampuannya disebabkan faktor usia. Tingkat produktivitas yang tinggi ini merupakan salah satu potensi pemuda sehingga pantaslah pemuda memiliki peluang yang lebih luas dan merupakan generasi pewaris masa depan bangsa.

Isu pemuda perlu menjadi pemikiran dan prioritas pembangunan melalui penyusunan kebijakan dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan, secara strategis dan efektif ditujukan pada pemberdayaan pemuda.

Kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda yang dibahas pada bab ini meliputi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, tingkat pengangguran dan kualitas pendidikan pekerja serta upah sebulan. Pembahasan kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda pada bagian ini memberikan gambaran secara makro mengenai peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Peranan dan kontribusi pemuda antara lain dilihat dari status pekerjaan, jumlah jam kerja seminggu dan besarnya sumber daya pemuda yang belum terpakai (tingkat pengangguran).

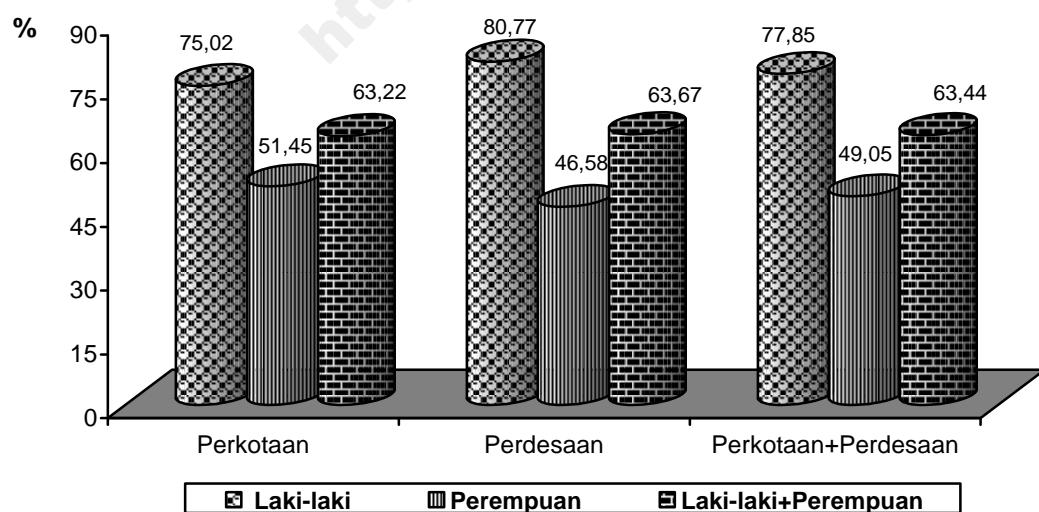
5.1 Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan dan termasuk mereka yang putus asa mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak bekerja, yaitu mereka yang memiliki kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, seperti tidak mampu

bekerja, pensiun, dsb. Bukan angkatan kerja juga didefinisikan sebagai tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Salah satu indikator yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok pemuda, TPAK merupakan proporsi pemuda (penduduk **usia 16-30 tahun**) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap pemuda itu sendiri.

Pada tahun 2011, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Berdasarkan data Sakernas 2011, TPAK pemuda sebesar 63,44 persen, seperti yang terlihat pada Gambar 5.1. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 pemuda, sekitar 63 orang diantaranya aktif melakukan kegiatan ekonomi. Tingginya TPAK pemuda terutama ada di daerah perdesaan yaitu sebesar 63,67 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 63,22 persen (Gambar 5.1). Perbedaan angka tersebut menggambarkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Gambar 5.1 TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Selain tipe daerah, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi tampak dipengaruhi pula oleh perbedaan jenis kelamin. Hal tersebut terlihat dari TPAK pemuda laki-laki yang lebih tinggi dari TPAK pemuda perempuan. TPAK pemuda laki-laki sebesar 77,85 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan sebesar 49,05 persen (Gambar 5.1). Di perkotaan, TPAK pemuda laki-laki sebesar 75,02 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan hanya sebesar 51,45 persen. Di daerah perdesaan, perbedaan TPAK pemuda laki-laki dan perempuan terlihat lebih mencolok, TPAK laki-laki tercatat sebesar 80,77 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan sebesar 46,58 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan antara TPAK pemuda perempuan dengan laki-laki adalah perempuan lebih banyak yang mengurus keluarga dan rumah tangga sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 5.1
TPAK Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Tahun), 2011

Jenis Kelamin (1)	Kelompok Umur (Tahun)			TPAK Pemuda (5)
	16 - 20 (2)	21 - 25 (3)	26 - 30 (4)	
Laki-laki	40,09	81,09	96,29	77,85
Perempuan	29,39	53,34	55,45	49,05
Laki-laki + Perempuan	34,93	66,92	75,82	63,44

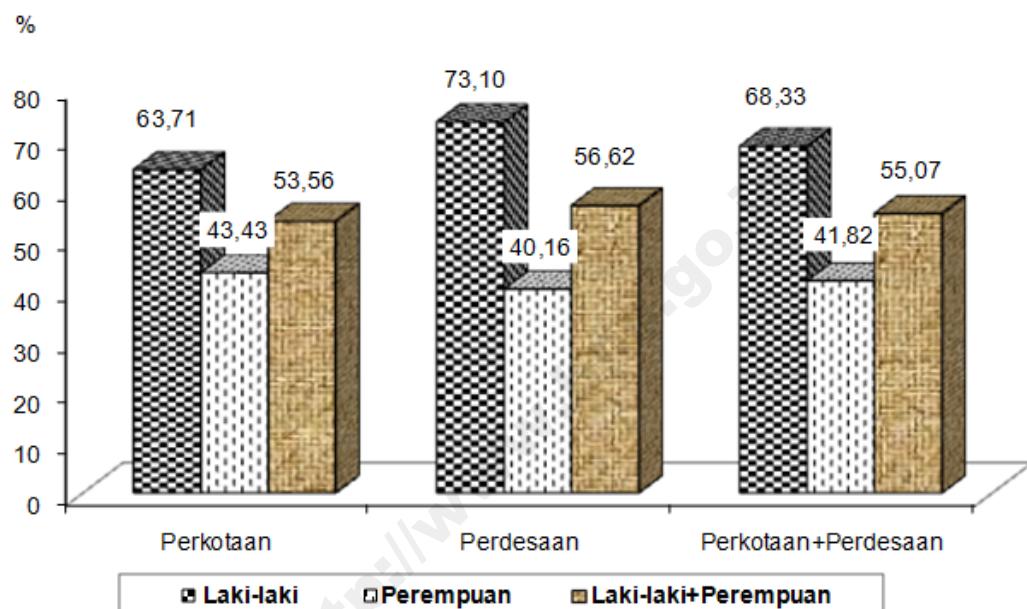
Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, pemuda pada kelompok umur 26-30 tahun memiliki TPAK paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, seperti yang disajikan pada Tabel 5.1. Berdasarkan Tabel 5.1 juga dapat dilihat adanya kecenderungan peningkatan TPAK pemuda seiring dengan meningkatnya usia pemuda. Pemuda kelompok umur 16-20 tahun memiliki TPAK paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya (34,93 persen), salah satu penyebabnya karena mereka merupakan kelompok usia sekolah dan bukan penanggung jawab utama rumah tangga.

Pola peningkatan TPAK seiring dengan peningkatan usia juga terlihat baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan. Peningkatan TPAK pemuda laki-laki lebih besar daripada TPAK perempuan, hal ini dapat dilihat pada TPAK pemuda laki-laki kelompok umur 16-20 tahun sebesar 40,09 persen,

meningkat menjadi sebesar 96,29 persen pada kelompok umur 26-30 tahun. Sementara TPAK pemuda perempuan, pada kelompok umur 16-20 tahun sebesar 29,39 persen, meningkat menjadi 55,45 persen pada kelompok umur 26-30 tahun (Tabel 5.1).

Kesenjangan TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan semakin besar seiring dengan meningkatnya umur. Pada kelompok umur 16-20 tahun kesenjangan TPAK pemuda laki-laki dengan pemuda perempuan sebesar 10 persen, kesenjangan ini meningkat menjadi lebih dari 40 persen pada kelompok umur 26-30 tahun.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Gambar 5.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Persentase pemuda berstatus bekerja berdasarkan data Sakernas tahun 2011 sebesar 55,07 persen (Gambar 5.2). Persentase pemuda di daerah perdesaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan (56,62 persen berbanding 53,56 persen). Tingginya persentase pemuda yang bekerja di perdesaan dibanding perkotaan diduga karena pekerjaan di perdesaan umumnya tidak memerlukan keahlian dan pendidikan khusus. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah perkotaan yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor sekunder (perdagangan, industri, konstruksi, dll) dimana kebanyakan pemuda di perkotaan kurang memiliki keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Selain itu, struktur perekonomian di daerah perdesaan masih didominasi oleh sektor pertanian, yang diduga menjadi faktor tingginya persentase pemuda bekerja. Hal ini disebabkan sektor pertanian tidak memerlukan kualifikasi atau persyaratan tertentu seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman maupun keahlian khusus.

Dilihat menurut jenis kelamin, Gambar 5.2 memperlihatkan persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (68,33 persen berbanding 41,82 persen). Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.2
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki	0,29	4,47	15,25	23,81	47,13	9,04
Perempuan	0,33	3,30	11,86	23,49	44,01	17,02
L+P	0,31	4,00	13,87	23,68	45,86	12,28
Perdesaan (D)						
Laki-laki	1,93	10,63	32,95	29,26	22,44	2,78
Perempuan	3,61	9,63	30,22	27,42	21,41	7,70
L+P	2,53	10,28	31,98	28,61	22,08	4,53
K+D						
Laki-laki	1,16	7,72	24,58	26,68	34,12	5,74
Perempuan	1,88	6,29	20,54	25,35	33,33	12,62
L+P	1,43	7,18	23,04	26,18	33,82	8,36

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Latar belakang tingkat pendidikan yang dimiliki pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap status pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM) sebesar 33,82 persen, selanjutnya diikuti oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 26,18 persen dan Sekolah Dasar (SD) sebesar 23,04 persen. Sedangkan pemuda yang bekerja tetapi tidak pernah mengenyam pendidikan persentasenya hanya sebesar 1,43 persen.

Bila diperhatikan menurut tipe daerah, terdapat perbedaan pola antara pemuda di perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja berturut-turut adalah mereka yang berpendidikan SM (45,86 persen), SMP (23,68 persen) dan SD (13,87 persen). Sebaliknya di daerah perdesaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan SD (31,98 persen), SMP (28,61 persen) dan SM (22,08 persen).

5.2 Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk melihat gambaran secara makro struktur perekonomian suatu wilayah serta perkembangannya.

**Tabel 5.3
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2011**

Lapangan Usaha	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	6,52	51,28	29,18
Perdagangan	30,65	14,19	22,32
Industri	23,08	11,33	17,13
Jasa	20,76	10,40	15,51
Transportasi & Komunikasi	5,72	3,64	4,67
Konstruksi	6,10	5,52	5,81
Keuangan	5,74	1,17	3,43
Pertambangan & Galian	1,09	2,33	1,72
Listrik, Gas, & Air	0,34	0,13	0,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Sektor pertanian masih memegang peran penting bagi ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sakernas 2011, dimana 29,18 persen pemuda Indonesia bekerja pada lapangan usaha pertanian. Sektor lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan dan

industri, masing-masing sebesar 22,32 persen dan 17,13 persen. Sektor-sektor yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas dan air (0,23 persen), pertambangan dan galian (1,72 persen) serta keuangan (3,43 persen).

Struktur pekerjaan pemuda menjadi berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah (Tabel 5.3). Di daerah perkotaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan, industri dan jasa dengan persentase masing-masing sebesar 30,65 persen, 23,08 persen dan 20,76 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, sektor pertanian masih menjadi primadona dalam kegiatan perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan persentase pemuda di perdesaan yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 51,28 persen. Persentase pemuda perdesaan yang bekerja pada sektor perdagangan sebesar 14,19 persen dan pada sektor industri sebesar 11,33 persen.

Tabel 5.4
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2011

Lapangan Usaha	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	32,17	24,31	29,18
Perdagangan	18,07	29,25	22,32
Industri	15,61	19,62	17,13
Jasa	12,03	21,20	15,51
Transportasi & Komunikasi	6,67	1,42	4,67
Konstruksi	8,98	0,64	5,81
Keuangan	3,63	3,08	3,43
Pertambangan & Galian	2,54	0,37	1,72
Listrik, Gas, & Air	0,31	0,11	0,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Berdasarkan jenis kelamin (Tabel 5.4), ada sedikit perbedaan jenis lapangan usaha yang dipilih oleh pemuda laki-laki dan perempuan. Pada lapangan usaha pertanian, konstruksi dan transportasi/komunikasi, tampak didominasi oleh pekerja pemuda laki-laki dibandingkan pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang bekerja di sektor pertanian, konstruksi dan transportasi/komunikasi masing-masing sebesar 32,17 persen, 8,98 persen dan

6,67 persen sedangkan pemuda perempuan masing-masing sebesar 24,31 persen, 0,64 persen dan 1,42 persen.

Pada sektor perdagangan, industri dan jasa terlihat bahwa pemuda perempuan lebih mendominasi sektor tersebut dibandingkan pemuda laki-laki. Persentase pemuda perempuan yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan industri masing-masing sebesar 29,25 persen, 21,20 persen dan 19,62 persen. Sedangkan pemuda laki-laki yang bekerja pada sektor yang sama persentasenya sebesar 18,07 persen, 12,03 persen dan 15,61 persen.

5.3 Status Pekerjaan

Pola penyebaran tenaga kerja sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. SDM yang berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, keahlian dan keterampilan akan mempunyai tingkat produktivitas yang jauh lebih baik. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan dibagi menjadi enam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

Dari keseluruhan pemuda yang bekerja, sebanyak 46,83 persen pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan (Tabel 5.5). Selanjutnya banyak pula pemuda yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar sebesar 20,77 persen dan yang berusaha sendiri sebesar 12,62 persen. Persentase pemuda yang bekerja dengan status buruh/karyawan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini tercermin dari persentase pemuda di perkotaan yang bekerja, sebanyak 65,27 persen diantaranya bekerja sebagai buruh/karyawan. Berbeda dengan daerah perdesaan, sebagian besar pemuda perdesaan bekerja sebagai pekerja tidak dibayar (32,12 persen). Selain pekerja tidak dibayar, status buruh/karyawan juga masih mendominasi pekerja pemuda di perdesaan (28,86 persen).

Tabel 5.5
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2011

Status Pekerjaan (1)	Perkotaan (K) (2)	Perdesaan (D) (3)	K+D (4)
	11,14	14,06	12,62
Berusaha Sendiri	11,14	14,06	12,62
Berusaha Dibantu Buruh	8,12	12,15	10,16
Buruh/Karyawan	65,27	28,86	46,83
Pekerja Bebas	6,34	12,81	9,62
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	9,13	32,12	20,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.6 memperlihatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemuda laki-laki maupun perempuan dalam status pekerjaan. Sebagian besar pemuda baik laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan. Hasil Sakernas 2011 menunjukkan persentase pemuda perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 49,85 persen, dan pemuda laki-laki sebesar 44,98 persen.

Tabel 5.6
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2011

Status Pekerjaan (1)	Laki-laki (L) (2)	Perempuan (P) (3)	L+P (4)
	14,21	10,02	12,62
Berusaha Sendiri	14,21	10,02	12,62
Berusaha Dibantu Buruh	11,75	7,59	10,16
Buruh/Karyawan	44,98	49,85	46,83
Pekerja Bebas	12,80	4,42	9,62
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	16,26	28,12	20,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Selain sebagai buruh/karyawan, status pekerjaan lainnya yang juga mempunyai persentase cukup tinggi adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Pemuda laki-laki yang berstatus sebagai pekerja keluarga sebesar 16,26 persen, sedangkan persentase pemuda perempuan hampir dua kali lipat

lebih tinggi yaitu sebesar 28,12 persen. Persentase pemuda laki-laki dan perempuan yang berusaha sendiri masing-masing sebesar 14,21 persen dan 10,02 persen.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja, diantaranya adalah keahlian, pengalaman kerja, usia dan pendidikan. Pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi, secara umum mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang berpendidikan rendah.

Tabel 5.7 menyajikan gambaran pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan pendidikan yang ditamatkan. Terlihat adanya fenomena yang menarik pada pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan dengan pendidikan. Persentase pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan meningkat seiring dengan tingginya jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda. Dengan kata lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak tenaga kerja yang terserap sebagai buruh/karyawan.

Tabel 5.7
Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Status Pekerjaan (1)	Tdk/Blm Pernah Sekolah (2)	Tdk/Blm Tamat SD (3)	SD/Sederajat (4)	SMP/Sederajat (5)	SM/Sederajat (6)	PT (7)	Jumlah (8)
Berusaha Sendiri	1,20	9,18	29,56	29,30	28,66	2,10	100,00
Dibantu Buruh	2,62	9,26	27,84	26,66	30,72	2,90	100,00
Buruh/Karyawan	0,29	3,71	13,11	21,90	45,03	15,96	100,00
Pekerja Bebas	1,89	16,91	46,78	25,58	8,63	0,22	100,00
Pekerja Keluarga /Tidak Dibayar	0,67	9,61	35,82	34,81	18,60	0,49	100,00

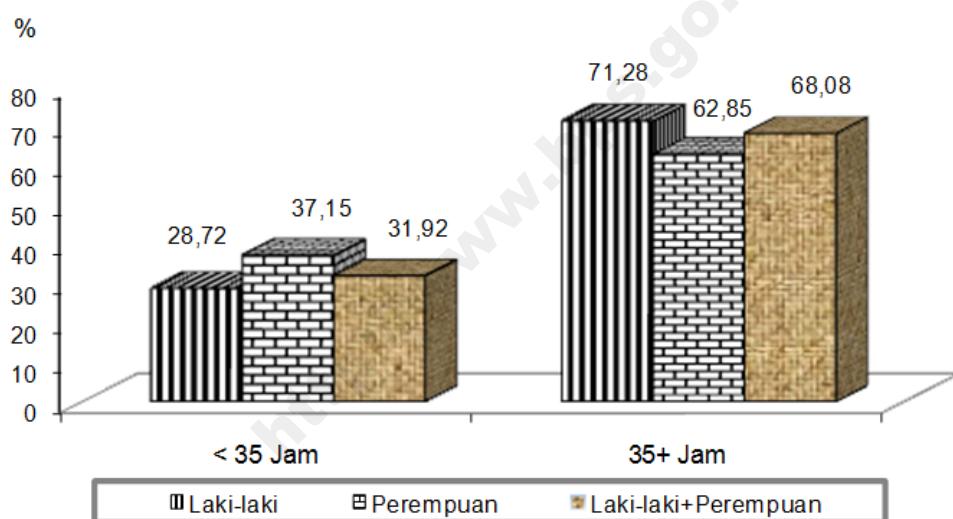
Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Berdasarkan Tabel 5.7 juga dapat diketahui bahwa dari 20,77 persen pemuda yang bekerja sebagai pekerja keluarga (Tabel 5.6), sebagian besar berpendidikan SD/sederajat (35,82 persen) dan SMP/sederajat (34,81 persen). Hal ini menjadi sesuatu yang menarik, karena dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, seharusnya para pemuda bisa memilih pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan bukan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

5.4 Pengangguran

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas pekerja adalah jam kerja. Pemuda yang bekerja dikelompokkan berdasarkan jumlah jam kerja, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu, dan pemuda yang bekerja 35 jam atau lebih selama seminggu. Pemuda dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam selama seminggu, termasuk dalam kategori setengah pengangguran.

Distribusi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 5.3. Sebanyak 68,08 persen pemuda bekerja dengan jam kerja 35 jam dan lebih selama seminggu, sedangkan sisanya sebesar 31,92 persen adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau termasuk dalam kategori setengah pengangguran.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Gambar 5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2011

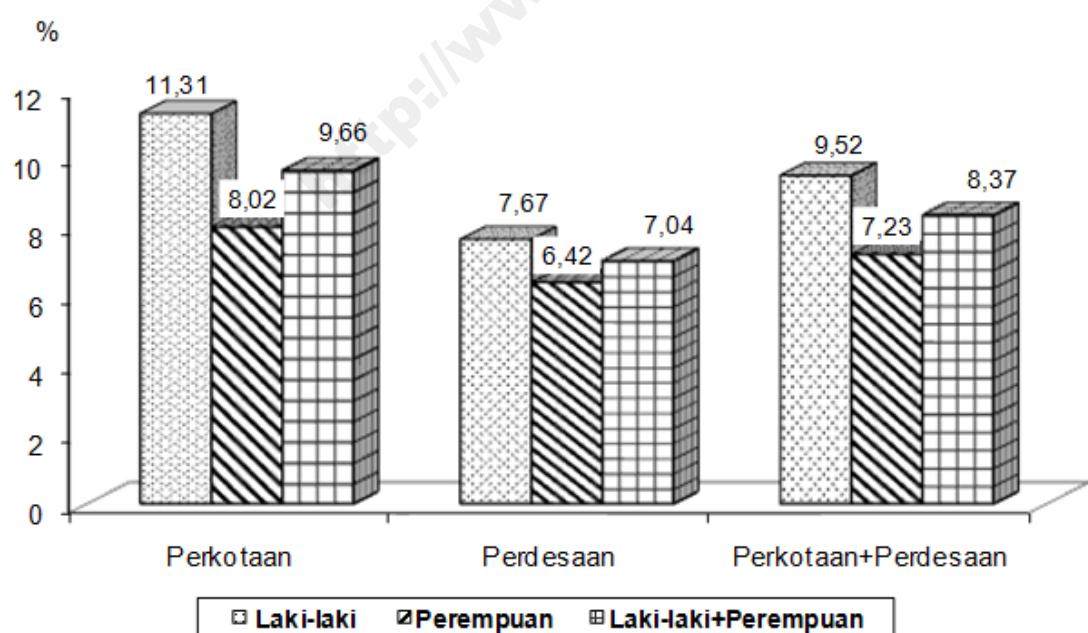
Lebih lanjut, jika ditinjau dari jenis kelamin terlihat produktivitas pekerja pemuda laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini tercermin dari persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Persentase pemuda perempuan yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu sebesar 37,15 persen, lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki yang sebesar 28,72 persen. Sebaliknya pemuda yang bekerja dengan jam kerja normal (35

jam atau lebih), persentase pemuda laki-laki (71,28 persen) lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (62,85 persen).

5.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan akibat dari ketidakmampuan lapangan kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia serta bertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam menyediakan lapangan kerja baru disinyalir menjadi penyebab munculnya masalah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Indikator ini merupakan perbandingan antara banyaknya pemuda yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap jumlah pemuda angkatan kerja. Gambar 5.4 menyajikan Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda tahun 2011 yang dirinci menurut tipe daerah dan jenis kelamin.



Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Pada tahun 2011, tingkat pengangguran pemuda di Indonesia tercatat sebesar 8,37 persen (Gambar 5.4). Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 pemuda angkatan kerja sebanyak 8 pemuda belum mempunyai pekerjaan. Bila dilihat menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Seperti yang disajikan pada Gambar 5.4, TPT pemuda daerah perkotaan sebesar 9,66 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda daerah perdesaan yang sebesar 7,04 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT pemuda laki-laki tercatat sebesar 9,52 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT pemuda perempuan yang sebesar 7,23 persen. TPT pemuda laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda perempuan juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe daerah, 2011

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk/BIm Pernah sekolah	11,35	2,77	4,51
Tdk/BIm Tamat SD	10,03	5,22	6,66
SD/Sederajat	6,36	4,58	5,12
SMP/Sederajat	7,36	6,30	6,81
SM/Sederajat	11,71	11,80	11,74
Akademi/PT	11,88	11,58	11,80
Jumlah	9,66	7,04	8,37

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tingkat pengangguran terbuka pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.8. Sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang berpendidikan tamat Akademi/PT (11,80 persen), tamat SM/Sederajat (11,74 persen) dan tamat SMP/Sederajat (6,81 persen). Tabel 5.8 menunjukkan komposisi pengangguran yang tinggal di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan, yaitu mayoritas penganggur adalah mereka yang tamatan SM/Sederajat dan Akademi/PT.

Persentase pengangguran yang tamat SM/Sederajat dan Akademi/PT di perkotaan sebesar 11,71 persen dan 11,88 persen, sedangkan di daerah perdesaan persentasenya sebesar 11,80 persen dan 11,58 persen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan pemuda menganggur adalah pemuda yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja, termasuk juga adalah pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Dilihat sebarannya menurut provinsi, persentase tertinggi pemuda yang mencari pekerjaan (Lampiran Tabel 5.2.3) terdapat di Provinsi Banten (22,04 persen), Sulawesi Utara (21,24 persen) dan Jawa Barat (18,77 persen). Sementara persentase pemuda pencari kerja terendah ada di Provinsi Kalimantan Tengah (5,22 persen), Bali (5,28 persen) dan Bengkulu (5,52 persen).

5.6 Pendapatan/Upah/Gaji Bersih

Tabel 5.9 memperlihatkan persentase pemuda yang bekerja dan berusaha menurut provinsi dan pendapatan/upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan terakhir. 23,52 persen pemuda yang bekerja dan berusaha, memperoleh pendapatan/upah/gaji bersih antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.499.999,- sebulan, 18,09 persen memperoleh pendapatan/upah/gaji bersih Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.999,- sebulan dan 17,19 persen memperoleh pendapatan/upah/gaji bersih Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 999.999,- sebulan.

Tabel 5.9

Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Tipe Daerah dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2011

Tipe Daerah	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah)						(8)
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)	7,04	9,74	16,70	17,08	26,71	16,18	6,57
Perdesaan (D)	13,32	14,71	20,50	17,38	17,98	12,30	3,81
K+D	9,33	11,56	18,09	17,19	23,52	14,76	5,56

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Menurut daerah tempat tinggal, tingkat penghasilan pemuda yang bekerja di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Sebagian besar pemuda di daerah perkotaan berpenghasilan antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.499.999,- sebulan dengan persentase sebesar 26,71 persen. Sedangkan di perdesaan, penghasilan yang diterima oleh pemuda yang bekerja adalah antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.999,- sebulan dengan persentase sebesar 20,50 persen.

Lampiran Tabel 5.8.3 memperlihatkan persentase terbesar pemuda dengan pendapatan sebulan antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.499.999,- berada di Provinsi Banten (39,29 persen), Kepulauan Riau (37,06 persen) dan DKI Jakarta (35,24 persen).

Jika dilihat menurut pendapatan/upah/gaji bersih yang tertinggi (Rp. 2.500.000,- ke atas perbulan), persentase terbesar pemuda yang bekerja dan mendapat penghasilan Rp 2.500.000,- ke atas berada di Provinsi Kalimantan Timur (17,81 persen), Papua (16,55 persen) dan Kepulauan Riau (14,43 persen). Sedangkan pemuda dengan pendapatan terendah (kurang dari Rp 300.000,- perbulan) persentase terbesar berada di Provinsi Sulawesi Barat (33,85 persen), Nusa Tenggara Timur (29,65 persen) dan Sulawesi Selatan (26,19 persen).

KESEHATAN



Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap manusia, karena kesehatan dapat mempengaruhi berbagai segi kehidupan manusia. Kesehatan juga merupakan harta yang tak dapat dinilai bagi setiap manusia di dunia. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatan sedang terganggu.

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia,

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan kesehatan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur kesehatan manusia Indonesia secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi dari pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kementerian Kesehatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki peranan yang penting dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Hal tersebut kemudian diwujudkan melalui visi Kementerian Kesehatan “**MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**” serta misi Kementerian Kesehatan yang terdiri dari:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Visi dan misi Kementerian Kesehatan tersebut tentunya membutuhkan upaya yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Usaha tersebut pun perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang handal dan kompeten dibidangnya serta perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

Bertitik tolak dari hal tersebut sudah sewajarnya kaum muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa serta generasi

pemegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan terampil. Peran yang dapat dilakukan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program penanganan kesehatan masyarakat serta upaya mewujudkan pencapaian sasaran *Millenium Development Goal's (MDG's)* adalah dengan turut berpartisipasi dan ikut berpola hidup sehat.

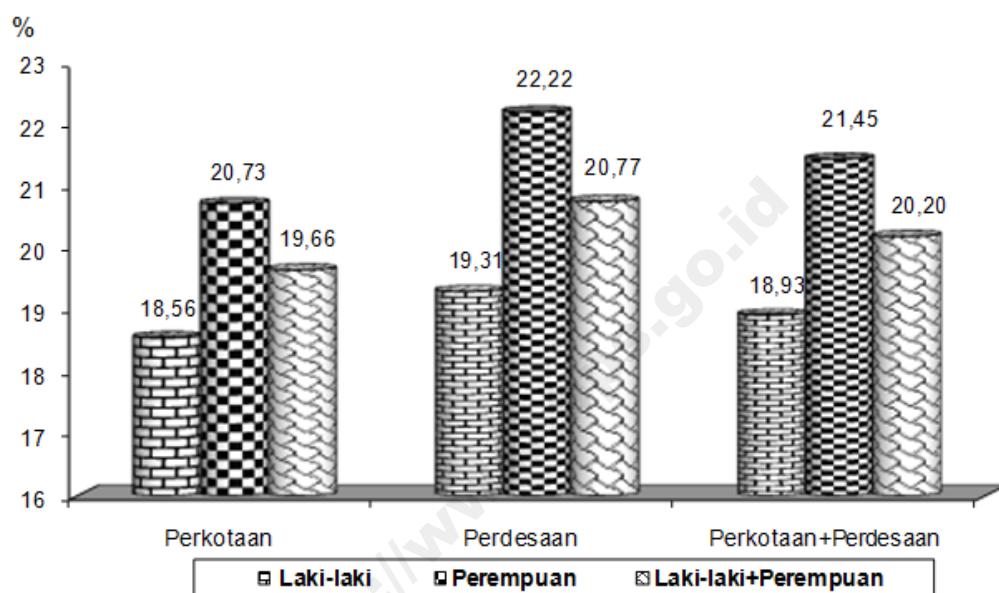
Pada bab ini akan dibahas beberapa indikator kesehatan seperti keluhan kesehatan, angka kesakitan (*morbidity rate*), rata-rata lama sakit, dan cara berobat dalam rangka memperoleh gambaran rinci mengenai kualitas atau derajat kesehatan pemuda. Angka kesakitan dan rata-rata lama sakit merupakan indikator kesehatan negatif yang artinya semakin tinggi angka kedua indikator tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin memburuk. Selain itu dibahas pula partisipasi pemuda dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kesehatan termasuk program Keluarga Berencana (KB).

6.1 Keluhan Kesehatan

Pemuda sebagai penggerak pembangunan adalah pemuda yang berada dalam kondisi sehat. Sebagai penggerak pembangunan, pemuda harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan mental, baik intrapersonal maupun sosial. Hal tersebut mutlak diperlukan agar pemuda dapat secara proaktif mengembangkan diri dan mengelola berbagai sumber daya pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk secara kasar adalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau hal lain. Secara umum, jumlah kejadian keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada dasarnya merupakan indikasi pola perilaku tidak sehat penduduk.

Gambar 6.1 menyajikan proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, sekitar 20,20 persen pemuda mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Jika diperhatikan menurut tipe daerah, tampak bahwa pemuda di daerah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan proporsinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemuda perkotaan (20,77 persen berbanding 19,66 persen).



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 6.1 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan untuk setiap provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 6.1. Pemuda yang mengalami keluhan kesehatan pada masing-masing provinsi proporsinya bervariasi antara 13,71 persen sampai dengan 30,84 persen. Provinsi dengan proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan cukup tinggi berturut-turut adalah Provinsi Gorontalo (30,84 persen), Nusa Tenggara Timur (29,94 persen) dan Sulawesi Tengah (26,80 persen). Sebaliknya provinsi dengan proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan relatif rendah adalah Provinsi Kalimantan Timur (13,71 persen), Maluku Utara (13,97 persen) dan Kepulauan Riau (15,11 persen).

Pola hidup yang kurang sehat dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan serta kekebalan tubuh sehingga akan menimbulkan berbagai masalah keluhan kesehatan. Gambaran mengenai keluhan kesehatan yang sering dialami oleh pemuda dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan, 2011

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Keluhan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ Napas Sesak/ Cepat	Diare/ Buang Air	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (K)								
Laki-laki	6,04	8,96	8,77	0,60	0,76	2,78	0,98	5,35
Perempuan	6,01	8,68	9,12	0,83	0,91	3,74	1,17	6,64
L+P	6,03	8,82	8,95	0,72	0,84	3,27	1,07	6,00
Perdesaan (D)								
Laki-laki	6,70	8,18	8,23	0,65	0,98	3,48	1,52	5,99
Perempuan	6,57	8,70	9,05	0,80	1,11	5,04	1,82	7,43
L+P	6,64	8,44	8,64	0,72	1,05	4,26	1,67	6,72
K+D								
Laki-laki	6,36	8,58	8,50	0,62	0,87	3,12	1,24	5,66
Perempuan	6,28	8,69	9,09	0,82	1,01	4,37	1,48	7,02
L+P	6,32	8,64	8,80	0,72	0,94	3,75	1,36	6,35

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Seseorang dapat mengalami keluhan kesehatan lebih dari satu jenis, baik dalam waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda selama satu bulan terakhir. Berdasarkan Tabel 6.1 dapat diketahui bahwa keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda adalah pilek (8,80 persen), batuk (8,64 persen) dan panas (6,32 persen). Pola jenis keluhan kesehatan serupa dialami oleh pemuda laki-laki maupun perempuan baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan.

Dilihat menurut daerah, proporsi pemuda di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan pada setiap jenis keluhan cenderung lebih tinggi dari pemuda di perkotaan, kecuali keluhan batuk dan pilek. Pemuda yang

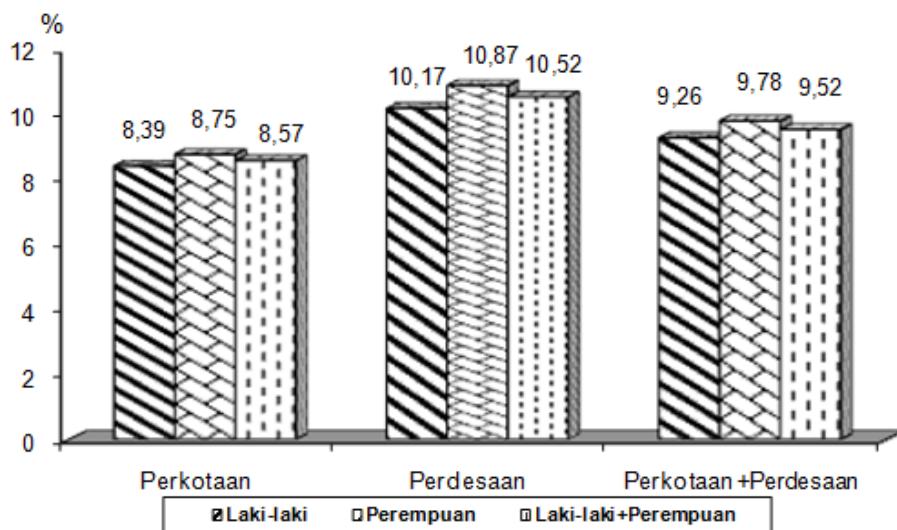
mengalami keluhan batuk dalam satu bulan terakhir di perkotaan sebanyak 8,82 persen dan pemuda di perdesaan sebanyak 8,44 persen. Untuk keluhan pilek, pemuda di perkotaan sebanyak 8,95 persen, sedangkan pemuda di perdesaan sebanyak 8,64 persen.

6.2 Angka kesakitan

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Apabila keluhan kesehatan yang dialami tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sakit. Angka kesakitan (*morbidity rate*) pemuda adalah proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Salah satu program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunkan angka kesakitan (RPJM 2010-2014). Angka kesakitan merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator negatif, sehingga semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Berdasarkan Gambar 6.2 terlihat bahwa sebanyak 9,52 persen pemuda menderita sakit. Bila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka kesakitan pemuda perempuan tercatat lebih tinggi dari pemuda laki-laki (9,78 persen berbanding 9,26 persen). Keadaan yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, angka kesakitan pemuda perempuan sebesar 8,75 persen lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki sebesar 8,39 persen. Sementara di perdesaan, angka kesakitan pemuda perempuan sebesar 10,87 persen lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki sebesar 10,17 persen.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 6.2 Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Angka kesakitan pemuda di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (10,52 persen berbanding 8,57 persen). Pola ini juga terjadi pada pemuda laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan pemuda di perdesaan lebih rendah dibanding derajat kesehatan pemuda di perkotaan.

Angka kesakitan pemuda untuk setiap provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 6.3. Angka kesakitan pemuda pada masing-masing provinsi persentasenya bervariasi antara 6,74 persen sampai dengan 17,15 persen. Provinsi dengan angka kesakitan pemuda yang cukup tinggi berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,15 persen), Sulawesi Tengah (15,96 persen) dan Gorontalo (15,77 persen). Sebaliknya provinsi dengan angka kesakitan yang relatif rendah adalah Provinsi Kepulauan Riau (6,74 persen), Kalimantan Timur (6,78 persen) dan Sumatera Selatan (7,89 persen).

6.3 Lama Sakit

Sakit dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas selama berhari-hari. Lama seseorang menderita sakit secara umum mencerminkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang

dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Pada sisi lain, lama seseorang menderita sakit juga mencerminkan kualitas kesehatan fisik seseorang yang direfleksikan melalui daya tahan tubuh. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya.

Tabel 6.2
Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2011

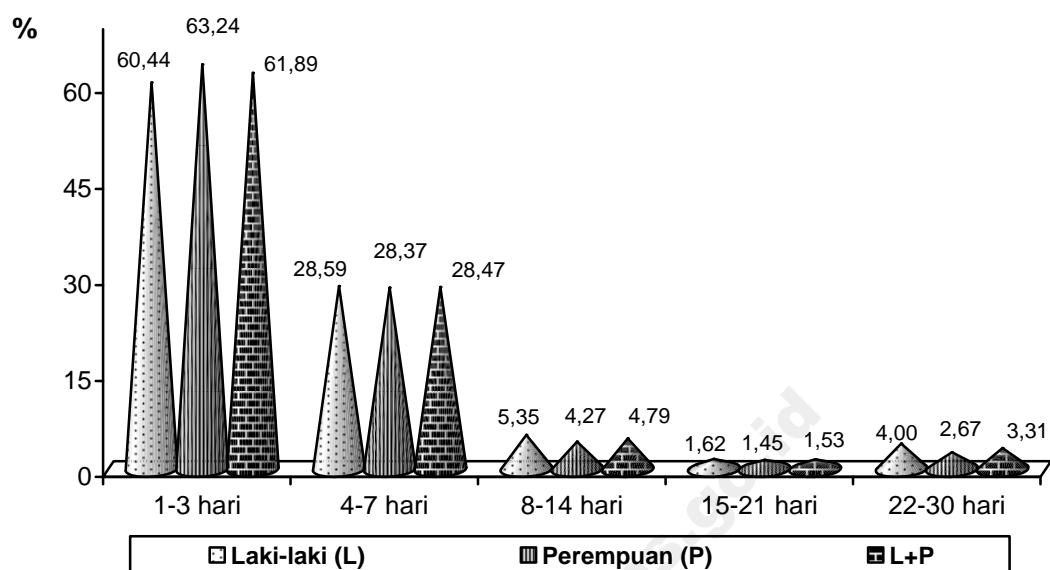
Lamanya Sakit (Hari)	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 3	65,71	58,61	61,89
4 - 7	26,49	30,18	28,47
8 - 14	4,04	5,43	4,79
15 - 21	0,95	2,03	1,53
22 - 30	2,81	3,74	3,31
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI – Susenas 2011

Secara umum, lama sakit yang diderita oleh pemuda berdasarkan hasil Susenas 2011 kurang dari satu minggu. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.2, dari keseluruhan pemuda yang mengalami sakit, sebanyak 61,89 persen menderita sakit selama 1-3 hari, sebanyak 28,47 persen menderita sakit selama 4-7 hari, selebihnya adalah pemuda yang menderita sakit lebih dari 7 hari. Data tersebut memberikan gambaran bahwa dari keseluruhan pemuda yang sakit, sebagian besar mengalami sakit yang tidak begitu berat sehingga hanya memerlukan sedikit waktu untuk penyembuhannya.

Lebih lanjut jika dilihat menurut tipe daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan terdapat pola yang sama dimana lamanya sakit kurang dari satu minggu. Hal yang menarik adalah adanya kecenderungan bahwa pemuda di perdesaan menderita sakit lebih lama dibandingkan dengan di perkotaan. Kondisi ini terlihat dari persentase pemuda dengan lama sakit lebih dari satu minggu, dimana persentase pemuda di perdesaan (11,20 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (7,80 persen). Sebaliknya, pemuda yang menderita sakit kurang dari satu minggu justru lebih banyak dialami pemuda di perkotaan (92,20 persen) dibandingkan di

perdesaan (88,79 persen). Hal ini diduga karena pemuda di perkotaan cenderung lebih peduli dan lebih mengerti tentang kesehatan, serta ketersediaan sarana kesehatan yang lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 6.3 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lama Sakit dan Jenis Kelamin, 2011

Seperti terlihat pada Gambar 6.3, persentase pemuda perempuan yang menderita sakit 1-3 hari lebih tinggi dibandingkan laki-laki (63,24 persen berbanding 60,44 persen). Pada kelompok lama sakit 4 hari atau lebih, persentase pemuda laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang menderita sakit 4 sampai 7 hari sebesar 28,59 persen dan yang lama sakitnya lebih dari 7 hari berkisar antara 1,62 sampai 5,35 persen. Sementara pemuda perempuan yang menderita sakit selama 4 sampai 7 hari sebesar 28,37 persen dan yang lebih dari 7 hari berkisar antara 1,45 sampai 4,27 persen.

6.4 Cara Berobat

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan akan melakukan upaya untuk memulihkan kesehatannya supaya dapat melakukan kembali aktivitas sehari-hari seperti biasa. Perawatan dan pengobatan sedini mungkin

merupakan salah satu upaya preventif berhubungan dengan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan perilaku hidup sehat, dimana penderita sakit akan menindaklanjutinya dengan tindakan pengobatan/berobat.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengobati penyakit, diantaranya adalah dengan berobat ke tempat pelayanan kesehatan, mendatangkan petugas kesehatan ke rumah ataupun dengan mencoba mengobati sendiri penyakitnya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengobati sendiri penyakitnya antara lain dengan menggunakan berbagai jenis obat, yaitu obat modern, tradisional, cara pengobatan lainnya maupun mencoba lebih dari satu jenis pengobatan (campuran).

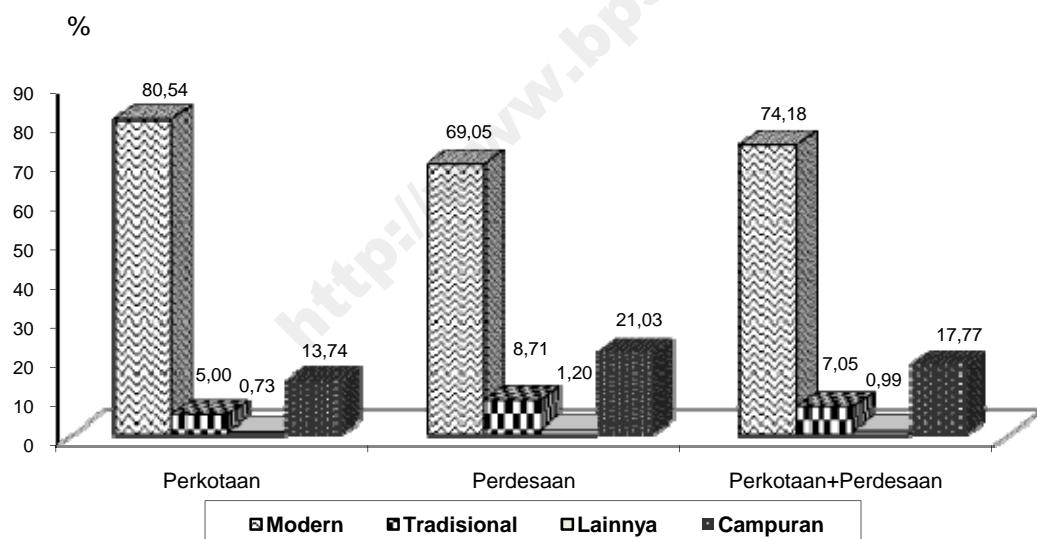
Tabel 6.3 memberikan gambaran tentang pemuda yang mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya. Secara umum tampak bahwa pengobatan modern lebih banyak dipilih oleh pemuda untuk mengobati keluhan kesehatannya. Persentase pemuda yang berobat sendiri dengan menggunakan obat modern mencapai 78,45 persen, obat tradisional sebesar 6,09 persen, dan obat lainnya sebesar 0,97 persen. Fakta yang menarik adalah persentase pemuda yang memilih pengobatan campuran cukup tinggi yaitu sebesar 14,49 persen, artinya sebesar 14,49 persen pemuda yang telah mencoba lebih dari satu jenis pengobatan (baik obat modern, obat tradisional maupun obat lainnya) untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya.

Tabel 6.3
Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri
menurut Jenis Obat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Jenis Obat yang Digunakan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki- laki	Perem- puan	L + P	Laki- laki	Perem- puan	L + P	Laki- laki	Perem- puan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Modern	82,75	84,48	83,65	72,67	73,91	73,32	77,70	79,14	78,45
Tradisional	5,15	4,19	4,65	7,74	7,31	7,52	6,45	5,77	6,09
Lainnya	0,91	0,73	0,81	0,99	1,25	1,12	0,95	0,99	0,97
Campuran	11,19	10,60	10,88	18,61	17,53	18,05	14,91	14,10	14,49
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Bila dilihat menurut jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan mempunyai preferensi yang relatif sama dalam memilih jenis obat untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.3, baik pemuda laki-laki maupun perempuan cenderung lebih banyak memilih obat modern dibandingkan obat tradisional untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya. Pemuda perempuan yang memilih obat modern persentasenya sedikit lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki (79,14 persen dibanding 77,70 persen). Sementara itu dalam memilih obat tradisional, persentase pemuda perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan pemuda laki-laki (5,77 persen berbanding 6,45 persen). Sementara pemuda yang memilih pengobatan campuran, persentase pemuda laki-laki lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (14,91 persen berbanding 14,10 persen). Pola ini relatif sama di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 6.4 Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengobatan, 2011

Apabila keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari, maka orang tersebut dikatakan sakit. Gambar 6.4 menunjukkan bahwa pengobatan modern cenderung lebih banyak dipilih oleh pemuda untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Hal ini ditandai

dengan persentase pemuda yang mengobati sendiri penyakitnya dengan menggunakan pengobatan modern sebesar 74,18 persen. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang memilih mengobati sendiri penyakitnya dengan cara tradisional (7,05 persen) dan pengobatan lainnya (0,99 persen). Sedangkan persentase pemuda memilih pengobatan campuran untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya sebesar 17,77 persen.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, jenis pengobatan modern lebih banyak digunakan oleh pemuda di perkotaan dengan persentase sebesar 80,54 persen dibandingkan dengan pemuda di perdesaan yang sebesar 69,05 persen. Pengobatan tradisional cenderung lebih banyak digunakan oleh pemuda di daerah perdesaan (8,71 persen) dibandingkan dengan pemuda di daerah perkotaan (5,00 persen). Kondisi yang sama terjadi dalam memilih pengobatan lainnya dan pengobatan campuran. Persentase pemuda yang memilih pengobatan lainnya di perdesaan (1,20 persen) lebih tinggi dibanding pemuda di perkotaan (0,73 persen). Dan persentase pemuda yang memilih pengobatan campuran di perdesaan (21,03 persen) lebih tinggi dibanding pemuda di perkotaan (13,74 persen).

Cara lain yang dapat digunakan oleh seseorang dalam mengobati sakit yang dideritanya selain mengobati sendiri adalah berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Berdasarkan Tabel 6.4 terlihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh pemuda dalam upaya mengobati sakit yang diderita adalah mendatangi tempat praktek tenaga kesehatan (31,55 persen), puskesmas (30,39 persen) dan praktek dokter (29,73 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada pemuda perempuan dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi adalah tempat praktek tenaga kesehatan (33,25 persen). Sedangkan pada pemuda laki-laki, fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi adalah praktek dokter (30,84 persen).

Tabel 6.4
**Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat,
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011**

Tempat Berobat	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah Sakit	18,85	15,73	17,19	10,98	6,80	8,72	14,88	11,16	12,89
Praktek Dokter	36,25	37,12	36,71	25,51	20,82	22,98	30,84	28,78	29,73
Puskesmas	25,00	29,96	27,64	34,45	31,84	33,04	29,76	30,93	30,39
Praktek Nakes	19,36	22,69	21,13	39,66	43,34	41,64	29,59	33,25	31,55
Praktek Batra	3,42	2,57	2,97	2,73	2,97	2,86	3,07	2,78	2,91
Dukun Bersalin	0,20	0,21	0,20	0,53	0,29	0,40	0,37	0,25	0,30
Lainnya	2,63	2,11	2,35	2,97	2,54	2,74	2,80	2,33	2,55

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Bila diperhatikan proporsi pemuda yang berobat, terlihat adanya perbedaan pola antara pemuda daerah perkotaan dengan perdesaan dalam memilih jenis/tempat berobat jalan. Tabel 6.4 memperlihatkan bahwa pemuda di perkotaan cenderung memilih berobat jalan ke tempat praktek dokter yaitu sebesar 36,71 persen sedangkan pemuda di perdesaan hanya sebesar 22,98 persen.

Sementara itu, jenis fasilitas berobat jalan yang paling banyak diakses oleh pemuda di perdesaan adalah praktek tenaga kesehatan (41,64 persen) dan Puskesmas (33,04 persen). Persentase ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemuda di perkotaan yang berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan (21,13 persen) dan Puskesmas (27,64 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda di perdesaan lebih banyak yang memilih untuk berobat ke tenaga kesehatan dan puskesmas karena fasilitas tersebut lebih mudah diakses sampai ke setiap desa dan biaya berobat yang lebih murah.

6.5 Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)

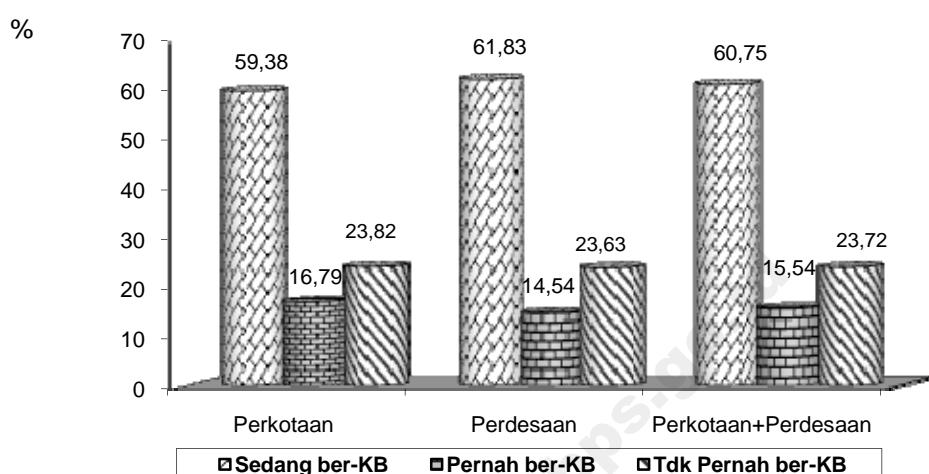
Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah yang berkaitan dengan kependudukan karena merupakan salah satu faktor yang terkait dengan pembangunan nasional. Masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, terutama jumlah penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk ini harus ditanggulangi, karena jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan bila berkualitas rendah dan persebarannya tidak merata. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi beban pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam berbagai bidang seperti pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga pertambahan penduduk harus diimbangi dengan pembangunan yang terencana diberbagai sektor dengan dukungan dana yang cukup.

Dalam usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak akhir tahun 60-an telah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, gerakan KB melangkah lebih maju lagi. KB dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta penduduk melalui berbagai upaya seperti batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Struktur umur pemuda yang merupakan usia produktif merupakan sasaran/target program Keluarga Berencana (KB) yang membatasi jumlah kelahiran. Sejalan dengan itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan KB merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas 2011, lebih dari separuh pemuda perempuan (60,75 persen) yang berstatus pernah kawin sedang mengikuti program KB, selanjutnya sebesar 15,54 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak lagi, dan sisanya 23,72 persen sama sekali tidak pernah mengikuti program KB (Gambar 6.5). Bila dilihat menurut tipe daerah, partisipasi pemuda dalam

program KB mempunyai pola yang relatif sama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun, proporsi pemuda perempuan di daerah perdesaan yang sedang mengikuti program KB (61,83 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (59,38 persen). Sebaliknya, pemuda perempuan di perkotaan yang pernah ikut KB tetapi sekarang tidak lagi (16,79 persen) lebih besar proporsinya dibandingkan di daerah perdesaan (14,54 persen).



Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Gambar 6.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Partisipasi KB, 2011

Ada berbagai macam jenis alat/cara KB yang dapat digunakan oleh pemuda. Berdasarkan Tabel 6.6 dapat diketahui bahwa jenis alat/cara KB yang banyak digunakan oleh pemuda perempuan berstatus pernah kawin adalah suntikan KB (69,73 persen) dan pil KB (20,98 persen). Alat KB ini paling banyak digunakan oleh pemuda perempuan baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Jenis alat/cara KB lainnya yang banyak digunakan oleh pemuda perempuan adalah Susuk KB (3,92 persen) dan AKDR/IUD/Spiral (3,32 persen). Terdapat pola yang berbeda terhadap penggunaan Susuk KB dan AKDR/IUD/Spiral antara pemuda perempuan di perkotaan dan perdesaan. Susuk KB lebih banyak digunakan oleh pemuda perempuan di perdesaan dengan persentase sebesar 4,79 persen, sedangkan pengguna susuk KB di

perkotaan hanya sebesar 2,77 persen. Sebaliknya, AKDR/IUD lebih banyak digunakan oleh pemuda perempuan di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan (5,17 persen berbanding 1,91 persen).

Tabel 6.5
Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alat/Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2011

Alat/Cara KB yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
MOW/ Tubektomi	0,57	0,39	0,47
MOP/ Vasektomi	0,15	0,13	0,14
AKDR/ IUD/ Spiral	5,17	1,91	3,32
Suntikan KB	67,91	71,11	69,73
Susuk KB/Norplan/ Implanon/Alwalit	2,77	4,79	3,92
Pil KB	21,51	20,58	20,98
Kondom / Karet KB	0,75	0,26	0,47
Intravag/Tisue/Kondom Wanita	0,14	0,04	0,08
Cara Tradisional	1,03	0,79	0,89
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

6.6 Umur Perkawinan Pertama

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia adalah umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama seorang perempuan mempengaruhi jumlah anak yang akan dilahirkan selama masa reproduksinya. Semakin muda umur perkawinan pertama, semakin panjang usia subur yang akan meningkatkan peluang memiliki anak.

Umur perkawinan pertama yang relatif muda dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Perkawinan perempuan usia muda dapat meningkatkan risiko kematian saat melahirkan. Seperti yang telah diketahui angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi. Perempuan yang kawin muda, belum cukup umur, dan berpendidikan rendah, relatif memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang kesehatan ibu dan bayi saat hamil dan melahirkan. Faktor ini

menyebabkan risiko kematian ibu saat melahirkan relatif tinggi dibandingkan dengan perempuan yang saat menikah sudah memasuki usia dewasa.

Tabel 6.6
Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama, 2011

Tipe Daerah	Umur Saat Perkawinan Pertama (Tahun)					Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)	4,06	4,86	19,76	59,35	11,97	100,00
Perdesaan (D)	8,10	9,22	28,98	48,21	5,48	100,00
K+D	6,32	7,29	24,91	53,13	8,35	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.6 memperlihatkan bahwa mayoritas pemuda perempuan (53,13 persen) menikah pada kelompok umur 19-24 tahun. Sementara itu, pemuda perempuan yang menikah pada usia muda (17-18 tahun) juga relatif cukup banyak (24,91 persen). Gambaran ini terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan, dimana sebagian besar pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 19-24 tahun. Persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia 19-24 tahun di daerah perkotaan mencapai 59,35 persen dan di daerah perdesaan sebesar 48,21 persen.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, pemuda perempuan yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 16 tahun cukup banyak yaitu sebesar 6,32 persen. Pemuda perempuan di perdesaan yang usia perkawinannya kurang dari 16 tahun sebesar 8,10 persen atau dua kali lebih tinggi dibanding pemuda perempuan di perkotaan (4,06 persen).

Perkawinan pertama perempuan usia muda tampak lebih banyak terjadi di daerah perdesaan. Sedangkan perkawinan yang dilakukan pada umur yang lebih matang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Hal ini

terlihat dari persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun di daerah perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Sebaliknya mereka yang menikah pada usia 19 tahun atau lebih, persentasenya cenderung lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Kedua gambaran tersebut memberikan indikasi bahwa menikah di usia muda lebih banyak dilakukan oleh pemuda perempuan di perdesaan dibandingkan dengan pemuda di perkotaan.

Persentase pemuda perempuan yang pernah kawin menurut kelompok umur perkawinan pertama untuk setiap provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 6.8.3. Di semua provinsi, sebagian besar pemuda perempuan menikah pada usia 19-24 tahun. Provinsi dengan persentase pemuda perempuan yang menikah pada kelompok umur 19-24 tahun yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 65,78 persen, Sumatera Utara sebesar 64,32 persen dan Kepulauan Riau sebesar 63,42 persen.

Sedangkan provinsi dengan persentase pemuda perempuan yang umur perkawinan pertamanya dibawah 16 tahun yang cukup tinggi berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 15,52 persen, Kalimantan Selatan sebesar 10,81 persen dan Gorontalo sebesar 10,30 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, kesadaran tentang pendewasaan usia perkawinan pada pemuda juga harus ditingkatkan.

TABEL

LAMPIRAN

**Tabel 3.1.1 Perkiraan Jumlah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011
(000 orang)**

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	182,98	195,13	378,11
Sumatera Utara	838,94	870,92	1.709,86
Sumatera Barat	235,64	232,49	468,13
Riau	323,04	321,77	644,81
Kepulauan Riau	209,65	257,92	467,56
Jambi	139,70	139,41	279,11
Sumatera Selatan	376,93	386,00	762,93
Bangka Belitung	94,99	84,74	179,73
Bengkulu	75,77	73,82	149,59
Lampung	262,33	266,83	529,15
DKI Jakarta	1.504,80	1.565,09	3.069,89
Jawa Barat	3.844,15	3.773,61	7.617,76
Banten	1.067,78	1.116,93	2.184,70
Jawa Tengah	1.710,35	1.737,27	3.447,63
DI Yogyakarta	287,31	300,71	588,02
Jawa Timur	2.108,28	2.135,22	4.243,49
Bali	272,14	289,79	561,94
Nusa Tenggara Barat	228,44	276,85	505,30
Nusa Tenggara Timur	107,96	129,23	237,20
Kalimantan Barat	176,29	191,47	367,76
Kalimantan Tengah	103,22	117,46	220,68
Kalimantan Selatan	207,12	218,77	425,89
Kalimantan Timur	327,12	321,32	648,44
Sulawesi Utara	119,92	121,09	241,01
Gorontalo	45,96	47,72	93,68
Sulawesi Tengah	84,20	92,20	176,39
Sulawesi Selatan	369,70	410,38	780,07
Sulawesi Barat	35,10	36,02	71,12
Sulawesi Tenggara	82,92	89,49	172,41
Maluku	75,40	79,25	154,64
Maluku Utara	39,62	40,94	80,55
Papua	117,43	110,26	227,69
Papua Barat	37,20	34,11	71,31
INDONESIA	15.692,36	16.064,21	31.756,57

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

**Tabel 3.1.2 Perkiraan Jumlah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011
(000 orang)**

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	460,28	479,17	939,45
Sumatera Utara	895,89	833,56	1.729,46
Sumatera Barat	370,92	344,81	715,73
Riau	484,63	497,64	982,27
Kepulauan Riau	49,06	47,61	96,67
Jambi	298,65	309,36	608,01
Sumatera Selatan	710,32	642,16	1.352,48
Bangka Belitung	92,47	88,87	181,34
Bengkulu	169,77	162,28	332,05
Lampung	778,48	706,23	1.484,71
DKI Jakarta			
Jawa Barat	1.926,63	1.906,41	3.833,04
Banten	511,11	496,20	1.007,31
Jawa Tengah	1.884,78	2.058,65	3.943,43
DI Yogyakarta	125,53	142,30	267,83
Jawa Timur	2.180,23	2.331,27	4.511,51
Bali	176,96	173,02	349,99
Nusa Tenggara Barat	308,28	376,98	685,26
Nusa Tenggara Timur	408,56	431,61	840,17
Kalimantan Barat	419,10	400,47	819,57
Kalimantan Tengah	217,16	204,50	421,66
Kalimantan Selatan	284,47	292,27	576,74
Kalimantan Timur	203,85	185,40	389,25
Sulawesi Utara	150,19	134,52	284,71
Gorontalo	86,01	87,36	173,36
Sulawesi Tengah	261,46	246,83	508,28
Sulawesi Selatan	612,80	654,25	1.267,06
Sulawesi Barat	111,07	116,87	227,93
Sulawesi Tenggara	209,85	216,79	426,63
Maluku	127,95	123,32	251,27
Maluku Utara	105,89	98,76	204,65
Papua	311,45	316,76	628,21
Papua Barat	76,57	81,42	157,99
INDONESIA	15.010,40	15.187,64	30.198,03

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

**Tabel 3.1.3 Perkiraan Jumlah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011
(000 orang)**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	643,26	674,30	1.317,56
Sumatera Utara	1.734,83	1.704,48	3.439,31
Sumatera Barat	606,56	577,30	1.183,86
Riau	807,67	819,41	1.627,08
Kepulauan Riau	258,71	305,52	564,23
Jambi	438,35	448,77	887,12
Sumatera Selatan	1.087,25	1.028,17	2.115,41
Bangka Belitung	187,46	173,61	361,08
Bengkulu	245,53	236,10	481,64
Lampung	1.040,81	973,06	2.013,87
DKI Jakarta	1.504,80	1.565,09	3.069,89
Jawa Barat	5.770,78	5.680,02	11.450,80
Banten	1.578,89	1.613,12	3.192,01
Jawa Tengah	3.595,13	3.795,92	7.391,05
DI Yogyakarta	412,84	443,01	855,85
Jawa Timur	4.288,51	4.466,49	8.755,00
Bali	449,10	462,82	911,92
Nusa Tenggara Barat	536,73	653,83	1.190,56
Nusa Tenggara Timur	516,52	560,85	1.077,37
Kalimantan Barat	595,39	591,94	1.187,33
Kalimantan Tengah	320,38	321,96	642,34
Kalimantan Selatan	491,59	511,04	1.002,63
Kalimantan Timur	530,97	506,72	1.037,69
Sulawesi Utara	270,11	255,61	525,72
Gorontalo	131,97	135,08	267,04
Sulawesi Tengah	345,65	339,02	684,68
Sulawesi Selatan	982,50	1.064,63	2.047,13
Sulawesi Barat	146,17	152,88	299,05
Sulawesi Tenggara	292,77	306,27	599,04
Maluku	203,35	202,56	405,92
Maluku Utara	145,51	139,69	285,20
Papua	428,88	427,02	855,90
Papua Barat	113,78	115,53	229,31
INDONESIA	30.702,75	31.251,85	61.954,60

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	93,77	96,06	95,40
Sumatera Utara	96,33	107,48	101,78
Sumatera Barat	101,35	107,57	105,07
Riau	100,39	97,39	98,57
Kepulauan Riau	81,28	103,05	84,68
Jambi	100,20	96,54	97,68
Sumatera Selatan	97,65	110,61	105,75
Bangka Belitung	112,10	104,05	107,98
Bengkulu	102,63	104,61	103,99
Lampung	98,31	110,23	106,96
DKI Jakarta	96,15	-	96,15
Jawa Barat	101,87	101,06	101,60
Banten	95,60	103,01	97,88
Jawa Tengah	98,45	91,55	94,71
DI Yogyakarta	95,54	88,22	93,19
Jawa Timur	98,74	93,52	96,02
Bali	93,91	102,27	97,04
Nusa Tenggara Barat	82,51	81,78	82,09
Nusa Tenggara Timur	83,54	94,66	92,10
Kalimantan Barat	92,07	104,65	100,58
Kalimantan Tengah	87,88	106,19	99,51
Kalimantan Selatan	94,67	97,33	96,19
Kalimantan Timur	101,81	109,95	104,79
Sulawesi Utara	99,04	111,65	105,68
Gorontalo	96,31	98,46	97,70
Sulawesi Tengah	91,32	105,93	101,96
Sulawesi Selatan	90,09	93,66	92,29
Sulawesi Barat	97,46	95,04	95,61
Sulawesi Tenggara	92,67	96,80	95,59
Maluku	95,14	103,76	100,39
Maluku Utara	96,78	107,22	104,16
Papua	106,50	98,32	100,43
Papua Barat	109,07	94,04	98,48
INDONESIA	97,69	98,83	98,24

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.3.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Perkotaan
	16 - 20	21 - 25	26 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,91	31,37	33,72	100,00
Sumatera Utara	35,54	30,70	33,76	100,00
Sumatera Barat	36,82	31,91	31,27	100,00
Riau	32,89	31,83	35,29	100,00
Kepulauan Riau	20,76	34,69	44,55	100,00
Jambi	33,92	31,00	35,08	100,00
Sumatera Selatan	32,82	33,92	33,26	100,00
Bangka Belitung	28,01	31,67	40,32	100,00
Bengkulu	33,63	35,73	30,64	100,00
Lampung	35,23	32,06	32,71	100,00
DKI Jakarta	27,63	34,70	37,67	100,00
Jawa Barat	33,85	30,84	35,30	100,00
Banten	33,85	30,94	35,22	100,00
Jawa Tengah	34,18	29,97	35,85	100,00
DI Yogyakarta	36,25	32,15	31,60	100,00
Jawa Timur	33,25	32,16	34,60	100,00
Bali	30,24	32,26	37,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,25	31,95	34,80	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,81	31,60	28,58	100,00
Kalimantan Barat	35,11	31,60	33,29	100,00
Kalimantan Tengah	31,70	33,59	34,71	100,00
Kalimantan Selatan	31,38	31,12	37,50	100,00
Kalimantan Timur	27,87	33,39	38,74	100,00
Sulawesi Utara	34,03	30,18	35,79	100,00
Gorontalo	40,34	26,33	33,33	100,00
Sulawesi Tengah	35,00	30,53	34,46	100,00
Sulawesi Selatan	36,04	31,54	32,42	100,00
Sulawesi Barat	37,45	28,13	34,42	100,00
Sulawesi Tenggara	35,60	31,62	32,78	100,00
Maluku	34,54	32,56	32,90	100,00
Maluku Utara	35,60	32,23	32,17	100,00
Papua	34,07	31,09	34,84	100,00
Papua Barat	32,65	30,70	36,65	100,00
INDONESIA	33,07	31,68	35,25	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Perdesaan
	16 - 20	21 - 25	26 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,50	33,58	32,92	100,00
Sumatera Utara	32,91	31,66	35,43	100,00
Sumatera Barat	33,83	31,68	34,49	100,00
Riau	29,20	32,35	38,45	100,00
Kepulauan Riau	21,81	33,63	44,56	100,00
Jambi	29,98	33,11	36,91	100,00
Sumatera Selatan	30,48	34,04	35,48	100,00
Bangka Belitung	26,78	34,44	38,79	100,00
Bengkulu	31,46	32,56	35,98	100,00
Lampung	32,15	31,94	35,91	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	31,07	31,38	37,55	100,00
Banten	29,86	37,36	32,78	100,00
Jawa Tengah	30,53	31,56	37,91	100,00
DI Yogyakarta	27,62	32,62	39,76	100,00
Jawa Timur	30,35	32,29	37,35	100,00
Bali	27,15	30,91	41,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,70	32,99	35,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,78	32,30	34,92	100,00
Kalimantan Barat	30,69	32,51	36,80	100,00
Kalimantan Tengah	29,84	32,11	38,05	100,00
Kalimantan Selatan	31,28	32,52	36,20	100,00
Kalimantan Timur	26,88	33,87	39,25	100,00
Sulawesi Utara	33,37	30,78	35,84	100,00
Gorontalo	34,93	29,91	35,17	100,00
Sulawesi Tengah	29,94	33,11	36,96	100,00
Sulawesi Selatan	32,05	33,02	34,93	100,00
Sulawesi Barat	33,57	31,41	35,03	100,00
Sulawesi Tenggara	31,64	31,18	37,18	100,00
Maluku	31,83	31,23	36,93	100,00
Maluku Utara	30,05	32,07	37,88	100,00
Papua	31,30	27,87	40,82	100,00
Papua Barat	30,93	32,58	36,50	100,00
INDONESIA	31,00	32,26	36,74	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.3.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Perkotaan+Perdesaan	
	16 - 20	21 - 25	26 - 30	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	33,91	32,95	33,15	100,00	
Sumatera Utara	34,22	31,18	34,60	100,00	
Sumatera Barat	35,01	31,77	33,22	100,00	
Riau	30,66	32,14	37,20	100,00	
Kepulauan Riau	20,94	34,51	44,55	100,00	
Jambi	31,22	32,45	36,33	100,00	
Sumatera Selatan	31,33	34,00	34,68	100,00	
Bangka Belitung	27,39	33,06	39,55	100,00	
Bengkulu	32,13	33,55	34,32	100,00	
Lampung	32,96	31,97	35,07	100,00	
DKI Jakarta	27,63	34,70	37,67	100,00	
Jawa Barat	32,92	31,02	36,06	100,00	
Banten	32,59	32,96	34,45	100,00	
Jawa Tengah	32,23	30,82	36,95	100,00	
DI Yogyakarta	33,55	32,30	34,15	100,00	
Jawa Timur	31,76	32,23	36,02	100,00	
Bali	29,06	31,74	39,20	100,00	
Nusa Tenggara Barat	32,36	32,55	35,09	100,00	
Nusa Tenggara Timur	34,33	32,15	33,52	100,00	
Kalimantan Barat	32,06	32,23	35,71	100,00	
Kalimantan Tengah	30,48	32,62	36,90	100,00	
Kalimantan Selatan	31,32	31,92	36,75	100,00	
Kalimantan Timur	27,50	33,57	38,93	100,00	
Sulawesi Utara	33,67	30,51	35,82	100,00	
Gorontalo	36,82	28,65	34,52	100,00	
Sulawesi Tengah	31,24	32,44	36,32	100,00	
Sulawesi Selatan	33,57	32,46	33,97	100,00	
Sulawesi Barat	34,49	30,63	34,88	100,00	
Sulawesi Tenggara	32,78	31,31	35,91	100,00	
Maluku	32,86	31,74	35,40	100,00	
Maluku Utara	31,62	32,11	36,27	100,00	
Papua	32,04	28,73	39,23	100,00	
Papua Barat	31,46	31,99	36,55	100,00	
INDONESIA	32,06	31,97	35,98	100,00	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perkotaan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	67,80	31,56	0,46	0,18	100,00
Sumatera Utara	63,23	35,52	1,03	0,22	100,00
Sumatera Barat	68,05	31,11	0,56	0,28	100,00
Riau	59,88	39,47	0,52	0,13	100,00
Kepulauan Riau	56,06	43,63	0,27	0,04	100,00
Jambi	60,21	38,56	0,87	0,36	100,00
Sumatera Selatan	59,88	39,30	0,66	0,16	100,00
Bangka Belitung	49,90	48,92	1,01	0,17	100,00
Bengkulu	61,67	36,94	1,20	0,19	100,00
Lampung	61,70	37,40	0,75	0,15	100,00
DKI Jakarta	63,03	35,72	1,09	0,16	100,00
Jawa Barat	55,76	42,43	1,62	0,19	100,00
Banten	57,52	41,04	1,21	0,24	100,00
Jawa Tengah	58,18	40,73	0,93	0,16	100,00
DI Yogyakarta	70,91	28,45	0,58	0,05	100,00
Jawa Timur	57,00	41,68	1,24	0,07	100,00
Bali	57,83	40,89	1,09	0,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,89	43,50	2,36	0,25	100,00
Nusa Tenggara Timur	69,07	29,75	0,92	0,26	100,00
Kalimantan Barat	60,20	38,67	0,84	0,29	100,00
Kalimantan Tengah	52,40	46,11	1,27	0,22	100,00
Kalimantan Selatan	48,73	48,98	1,87	0,41	100,00
Kalimantan Timur	52,85	45,68	1,40	0,07	100,00
Sulawesi Utara	57,92	40,31	1,36	0,41	100,00
Gorontalo	57,95	40,90	1,12	0,04	100,00
Sulawesi Tengah	58,04	39,63	1,93	0,39	100,00
Sulawesi Selatan	63,06	35,33	1,49	0,12	100,00
Sulawesi Barat	59,82	38,93	1,13	0,12	100,00
Sulawesi Tenggara	60,34	38,05	1,31	0,30	100,00
Maluku	61,79	36,33	1,76	0,13	100,00
Maluku Utara	55,60	42,55	1,48	0,37	100,00
Papua	59,36	39,56	0,95	0,13	100,00
Papua Barat	58,56	40,08	0,61	0,75	100,00
INDONESIA	58,63	39,98	1,21	0,17	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perdesaan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	63,69	35,41	0,63	0,27	100,00
Sumatera Utara	57,47	41,49	0,85	0,18	100,00
Sumatera Barat	56,30	42,17	1,23	0,30	100,00
Riau	46,51	52,48	0,80	0,21	100,00
Kepulauan Riau	41,82	57,51	0,67	0,00	100,00
Jambi	42,90	55,63	1,34	0,12	100,00
Sumatera Selatan	45,26	53,48	1,10	0,15	100,00
Bangka Belitung	42,23	56,30	1,08	0,39	100,00
Bengkulu	46,17	52,33	1,28	0,22	100,00
Lampung	46,36	52,70	0,80	0,14	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	38,99	58,33	2,46	0,22	100,00
Banten	43,51	54,31	2,06	0,12	100,00
Jawa Tengah	42,44	56,22	1,19	0,16	100,00
DI Yogyakarta	43,90	55,01	0,96	0,13	100,00
Jawa Timur	40,07	58,45	1,25	0,23	100,00
Bali	40,34	59,11	0,49	0,05	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,48	52,84	3,50	0,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	52,94	45,30	1,41	0,35	100,00
Kalimantan Barat	46,88	51,86	0,85	0,40	100,00
Kalimantan Tengah	42,13	56,41	1,11	0,35	100,00
Kalimantan Selatan	40,95	56,40	2,33	0,32	100,00
Kalimantan Timur	48,47	50,37	0,95	0,21	100,00
Sulawesi Utara	49,46	49,09	1,29	0,17	100,00
Gorontalo	44,45	54,04	1,24	0,28	100,00
Sulawesi Tengah	43,40	54,50	1,63	0,47	100,00
Sulawesi Selatan	49,35	48,61	1,78	0,26	100,00
Sulawesi Barat	47,99	49,81	1,96	0,23	100,00
Sulawesi Tenggara	45,49	52,47	1,69	0,34	100,00
Maluku	48,50	50,02	1,16	0,32	100,00
Maluku Utara	45,54	52,80	1,39	0,27	100,00
Papua	38,90	59,32	0,79	0,99	100,00
Papua Barat	46,33	51,71	1,06	0,90	100,00
INDONESIA	44,99	53,36	1,41	0,24	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 3.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2011

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perkotaan+Perdesaan	
					(1)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	64,87	34,30	0,58	0,25	100,00	
Sumatera Utara	60,34	38,53	0,94	0,20	100,00	
Sumatera Barat	60,95	37,79	0,97	0,29	100,00	
Riau	51,81	47,33	0,69	0,18	100,00	
Kepulauan Riau	53,62	46,00	0,34	0,03	100,00	
Jambi	48,34	50,26	1,20	0,20	100,00	
Sumatera Selatan	50,53	48,37	0,94	0,15	100,00	
Bangka Belitung	46,05	52,63	1,05	0,28	100,00	
Bengkulu	50,99	47,55	1,25	0,21	100,00	
Lampung	50,39	48,68	0,79	0,14	100,00	
DKI Jakarta	63,03	35,72	1,09	0,16	100,00	
Jawa Barat	50,15	47,75	1,90	0,20	100,00	
Banten	53,10	45,23	1,48	0,20	100,00	
Jawa Tengah	49,78	48,99	1,07	0,16	100,00	
DI Yogyakarta	62,46	36,76	0,70	0,08	100,00	
Jawa Timur	48,28	50,32	1,25	0,15	100,00	
Bali	51,12	47,88	0,86	0,14	100,00	
Nusa Tenggara Barat	47,90	48,88	3,01	0,21	100,00	
Nusa Tenggara Timur	56,49	41,88	1,30	0,33	100,00	
Kalimantan Barat	51,01	47,78	0,85	0,37	100,00	
Kalimantan Tengah	45,66	52,87	1,16	0,31	100,00	
Kalimantan Selatan	44,25	53,25	2,14	0,36	100,00	
Kalimantan Timur	51,21	47,44	1,23	0,12	100,00	
Sulawesi Utara	53,34	45,06	1,32	0,28	100,00	
Gorontalo	49,18	49,43	1,20	0,19	100,00	
Sulawesi Tengah	47,17	50,67	1,70	0,45	100,00	
Sulawesi Selatan	54,57	43,55	1,67	0,21	100,00	
Sulawesi Barat	50,81	47,22	1,76	0,21	100,00	
Sulawesi Tenggara	49,77	48,32	1,58	0,33	100,00	
Maluku	53,56	44,80	1,39	0,24	100,00	
Maluku Utara	48,39	49,90	1,42	0,29	100,00	
Papua	44,35	54,06	0,83	0,76	100,00	
Papua Barat	50,13	48,09	0,92	0,85	100,00	
INDONESIA	51,98	46,50	1,31	0,21	100,00	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.1.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, 2011

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*	Perkotaan	
			Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
16 - 18	0,43	65,27	34,30	100,00
19 - 24	0,55	20,55	78,89	100,00
25 - 30	0,50	2,82	96,69	100,00
Pemuda	0,50	22,40	77,10	100,00
Perempuan				
16 - 18	0,35	62,49	37,16	100,00
19 - 24	0,48	19,46	80,06	100,00
25 - 30	0,66	1,88	97,45	100,00
Pemuda	0,53	20,42	79,04	100,00
Laki-laki + Perempuan				
16 - 18	0,39	63,90	35,71	100,00
19 - 24	0,52	20,00	79,48	100,00
25 - 30	0,58	2,34	97,08	100,00
Pemuda	0,52	21,40	78,08	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.1.2 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, 2011

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*	Perdesaan	
			Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
16-18	1,51	50,69	47,80	100,00
19-24	1,76	8,71	89,53	100,00
25-30	2,23	1,13	96,64	100,00
Pemuda	1,91	14,16	83,93	100,00
Perempuan				
16-18	1,54	51,85	46,61	100,00
19-24	2,32	7,34	90,35	100,00
25-30	3,24	1,26	95,50	100,00
Pemuda	2,59	12,58	84,82	100,00
Laki-laki + Perempuan				
16-18	1,52	51,23	47,24	100,00
19-24	2,05	8,01	89,95	100,00
25-30	2,75	1,20	96,06	100,00
Pemuda	2,26	13,37	84,38	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.1.3 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, 2011

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*	Perkotaan+Perdesaan	
			Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
16-18	0,96	58,11	40,93	100,00
19-24	1,13	14,94	83,94	100,00
25-30	1,37	1,97	96,66	100,00
Pemuda	1,19	18,37	80,44	100,00
Perempuan				
16-18	0,90	57,57	41,53	100,00
19-24	1,37	13,61	85,02	100,00
25-30	1,95	1,57	96,48	100,00
Pemuda	1,54	16,61	81,85	100,00
Laki-laki + Perempuan				
16-18	0,93	57,85	41,21	100,00
19-24	1,25	14,26	84,49	100,00
25-30	1,66	1,77	96,57	100,00
Pemuda	1,37	17,48	81,15	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.2.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT		
		(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)						(8)
Aceh	0,37	0,00	2,88	45,56	51,56	66,50	100,00
Sumatera Utara	0,25	0,00	4,05	60,97	34,99	74,37	100,00
Sumatera Barat	0,65	0,08	5,67	47,47	46,78	65,70	100,00
Riau	0,28	0,00	5,01	47,61	47,38	74,79	100,00
Kepulauan Riau	0,38	0,09	8,76	58,34	32,80	89,05	100,00
Jambi	0,09	0,00	2,90	51,03	46,08	74,94	100,00
Sumatera Selatan	0,61	0,00	3,79	51,67	44,54	74,73	100,00
Bangka Belitung	0,62	0,00	7,38	62,81	29,81	84,23	100,00
Bengkulu	0,14	0,00	5,42	45,84	48,75	69,88	100,00
Lampung	0,56	0,00	4,12	56,15	39,73	76,36	100,00
DKI Jakarta	0,28	0,00	3,01	50,22	46,78	83,14	100,00
Jawa Barat	0,46	0,16	6,23	60,05	33,56	82,19	100,00
Banten	0,41	0,00	6,69	57,58	35,73	80,69	100,00
Jawa Tengah	0,50	0,06	6,36	60,09	33,49	79,10	100,00
DI Yogyakarta	0,23	0,00	1,81	33,57	64,62	58,27	100,00
Jawa Timur	0,55	0,00	5,39	59,76	34,85	78,14	100,00
Bali	1,12	0,00	2,56	53,09	44,35	75,74	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,21	0,00	3,68	57,51	38,80	73,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,06	0,00	5,54	50,68	43,79	61,62	100,00
Kalimantan Barat	1,78	0,13	8,27	52,91	38,69	74,08	100,00
Kalimantan Tengah	0,92	0,00	4,19	54,26	41,55	75,87	100,00
Kalimantan Selatan	0,40	0,23	6,89	51,02	41,85	78,66	100,00
Kalimantan Timur	0,36	0,06	5,98	51,10	42,86	79,28	100,00
Sulawesi Utara	0,40	0,00	2,27	50,26	47,48	75,90	100,00
Gorontalo	1,11	0,00	4,56	41,37	54,07	68,60	100,00
Sulawesi Tengah	0,66	0,00	1,27	45,24	53,49	68,25	100,00
Sulawesi Selatan	1,27	0,00	2,20	43,24	54,55	69,14	100,00
Sulawesi Barat	0,92	0,00	3,50	47,80	48,70	69,61	100,00
Sulawesi Tenggara	0,76	0,00	2,72	37,89	59,39	62,26	100,00
Maluku	0,45	0,17	2,06	40,33	57,44	63,52	100,00
Maluku Utara	0,58	0,00	3,00	50,73	46,27	67,76	100,00
Papua	2,27	0,00	6,88	55,11	38,02	70,99	100,00
Papua Barat	0,85	0,00	7,29	59,77	32,94	76,20	100,00
INDONESIA	0,52	0,05	4,99	54,83	40,14	78,08	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.2.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,71	0,00	6,75	55,47	37,78	74,85	100,00
Sumatera Utara	2,13	0,17	10,43	73,89	15,51	80,13	100,00
Sumatera Barat	0,59	0,08	15,15	63,63	21,15	80,14	100,00
Riau	0,83	0,19	14,35	69,81	15,65	84,79	100,00
Kepulauan Riau	2,66	0,00	21,83	64,32	13,86	83,80	100,00
Jambi	0,84	0,18	12,07	58,19	29,56	85,05	100,00
Sumatera Selatan	0,80	0,08	14,55	67,23	18,15	87,57	100,00
Bangka Belitung	1,65	2,07	12,24	62,34	23,35	88,75	100,00
Bengkulu	0,82	0,00	13,63	63,32	23,05	84,07	100,00
Lampung	0,61	0,00	15,87	69,96	14,17	86,42	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,61	0,00	13,69	68,32	17,99	90,12	100,00
Banten	0,74	0,72	13,42	63,29	22,57	88,74	100,00
Jawa Tengah	0,93	0,19	9,51	73,53	16,77	87,31	100,00
DI Yogyakarta	1,22	0,00	7,82	69,40	22,78	80,95	100,00
Jawa Timur	1,54	0,07	14,01	64,25	21,67	85,69	100,00
Bali	3,21	0,00	7,68	68,05	24,26	83,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,59	0,00	6,53	68,06	25,42	80,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,13	0,05	30,32	56,15	13,49	80,77	100,00
Kalimantan Barat	2,73	0,18	23,67	62,12	14,04	86,63	100,00
Kalimantan Tengah	0,55	0,31	17,35	65,96	16,38	88,90	100,00
Kalimantan Selatan	1,77	0,38	11,16	64,53	23,92	85,53	100,00
Kalimantan Timur	0,93	0,15	18,69	61,62	19,54	84,88	100,00
Sulawesi Utara	0,60	0,00	7,21	72,50	20,29	84,65	100,00
Gorontalo	1,77	0,31	14,02	58,72	26,95	81,22	100,00
Sulawesi Tengah	2,13	0,00	12,03	63,56	24,42	84,03	100,00
Sulawesi Selatan	2,83	0,05	8,87	61,45	29,63	81,53	100,00
Sulawesi Barat	3,74	0,00	12,45	68,13	19,42	81,11	100,00
Sulawesi Tenggara	1,28	0,00	10,57	63,33	26,09	82,14	100,00
Maluku	2,74	0,00	12,85	71,55	15,60	81,35	100,00
Maluku Utara	1,99	0,00	15,75	75,74	8,51	83,39	100,00
Papua	40,88	0,51	37,48	54,71	7,30	48,64	100,00
Papua Barat	6,04	0,19	14,49	48,44	36,89	75,18	100,00
INDONESIA	2,26	0,12	13,27	65,99	20,62	84,38	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.2.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah*				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah	
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,61	0,00	5,38	51,97	42,65	72,46	100,00	
Sumatera Utara	1,20	0,07	6,69	66,32	26,92	77,27	100,00	
Sumatera Barat	0,62	0,08	10,10	55,01	34,81	74,43	100,00	
Riau	0,61	0,09	9,38	57,99	32,54	80,83	100,00	
Kepulauan Riau	0,77	0,07	11,50	59,59	28,84	88,15	100,00	
Jambi	0,61	0,10	7,96	54,98	36,97	81,87	100,00	
Sumatera Selatan	0,73	0,04	8,69	58,75	32,52	82,94	100,00	
Bangka Belitung	1,14	0,81	9,28	62,62	27,29	86,50	100,00	
Bengkulu	0,61	0,00	9,75	55,07	35,18	79,66	100,00	
Lampung	0,60	0,00	11,31	64,60	24,09	83,78	100,00	
DKI Jakarta	0,28	0,00	3,01	50,22	46,78	83,14	100,00	
Jawa Barat	0,51	0,12	7,81	61,80	30,26	84,84	100,00	
Banten	0,51	0,15	8,06	58,75	33,04	83,23	100,00	
Jawa Tengah	0,73	0,11	7,61	65,43	26,85	83,48	100,00	
DI Yogyakarta	0,54	0,00	2,79	39,44	57,77	65,37	100,00	
Jawa Timur	1,06	0,03	8,75	61,51	29,72	82,03	100,00	
Bali	1,92	0,00	3,93	57,09	38,99	78,63	100,00	
Nusa Tenggara Barat	2,58	0,00	5,01	62,43	32,56	77,52	100,00	
Nusa Tenggara Timur	3,45	0,03	20,13	53,90	25,94	76,55	100,00	
Kalimantan Barat	2,43	0,16	15,90	57,47	26,47	82,74	100,00	
Kalimantan Tengah	0,68	0,15	10,31	59,70	29,85	84,42	100,00	
Kalimantan Selatan	1,18	0,30	8,82	57,12	33,76	82,61	100,00	
Kalimantan Timur	0,58	0,09	9,72	54,20	35,98	81,38	100,00	
Sulawesi Utara	0,51	0,00	4,36	59,68	35,96	80,64	100,00	
Gorontalo	1,54	0,16	9,38	50,21	40,25	76,79	100,00	
Sulawesi Tengah	1,75	0,00	7,31	55,53	37,15	79,96	100,00	
Sulawesi Selatan	2,23	0,02	5,28	51,65	43,04	76,81	100,00	
Sulawesi Barat	3,07	0,00	9,07	60,45	30,48	78,38	100,00	
Sulawesi Tenggara	1,13	0,00	6,85	51,27	41,88	76,42	100,00	
Maluku	1,86	0,10	6,57	53,37	39,96	74,55	100,00	
Maluku Utara	1,59	0,00	9,88	64,23	25,89	78,98	100,00	
Papua	30,61	0,26	22,78	54,90	22,06	54,59	100,00	
Papua Barat	4,43	0,12	11,93	52,47	35,48	75,50	100,00	
INDONESIA	1,37	0,07	8,07	58,99	32,87	81,15	100,00	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Keterangan: *) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,28	0,56	0,43	0,89	0,78	0,83	0,71	0,72	0,72
Sumatera Utara	0,51	0,29	0,39	1,92	3,03	2,46	1,24	1,63	1,43
Sumatera Barat	0,79	0,91	0,85	1,48	1,00	1,25	1,21	0,97	1,09
Riau	0,51	0,34	0,42	0,82	0,88	0,85	0,69	0,67	0,68
Kepulauan Riau	0,41	0,13	0,26	1,30	2,21	1,75	0,58	0,46	0,52
Jambi	0,14	0,11	0,13	1,34	1,32	1,33	0,96	0,95	0,95
Sumatera Selatan	0,80	0,79	0,80	0,88	0,82	0,85	0,86	0,81	0,83
Bangka Belitung	0,86	0,86	0,86	1,27	1,94	1,60	1,06	1,41	1,23
Bengkulu	0,01	0,12	0,07	1,65	1,04	1,35	1,15	0,75	0,95
Lampung	0,25	0,65	0,45	0,80	0,72	0,76	0,66	0,70	0,68
DKI Jakarta	0,22	0,31	0,27	-	-	-	0,22	0,31	0,27
Jawa Barat	0,44	0,33	0,39	0,35	0,63	0,49	0,41	0,43	0,42
Banten	0,28	0,16	0,22	0,70	0,82	0,76	0,41	0,37	0,39
Jawa Tengah	0,47	0,39	0,43	0,95	0,79	0,86	0,72	0,61	0,66
DI Yogyakarta	0,20	0,31	0,26	0,84	0,23	0,52	0,39	0,29	0,34
Jawa Timur	0,38	0,47	0,42	1,12	1,29	1,21	0,76	0,90	0,83
Bali	0,71	1,43	1,08	4,14	4,52	4,33	2,06	2,59	2,33
Nusa Tenggara Barat	1,22	0,65	0,90	2,61	3,75	3,23	2,01	2,43	2,25
Nusa Tenggara Timur	1,37	1,51	1,45	6,77	4,85	5,78	5,64	4,08	4,83
Kalimantan Barat	2,05	1,92	1,98	2,64	3,61	3,12	2,47	3,07	2,77
Kalimantan Tengah	0,56	1,22	0,91	0,68	0,64	0,66	0,64	0,85	0,75
Kalimantan Selatan	0,14	0,43	0,29	1,40	1,50	1,45	0,87	1,04	0,96
Kalimantan Timur	0,40	0,31	0,36	0,72	1,50	1,09	0,53	0,75	0,64
Sulawesi Utara	0,53	0,15	0,34	0,94	0,78	0,87	0,76	0,48	0,62
Gorontalo	1,58	1,10	1,34	4,80	4,04	4,42	3,68	3,00	3,34
Sulawesi Tengah	0,82	1,09	0,96	2,59	3,80	3,18	2,16	3,06	2,61
Sulawesi Selatan	2,18	1,65	1,90	5,04	3,46	4,22	3,96	2,76	3,34
Sulawesi Barat	2,54	2,05	2,29	4,02	6,52	5,30	3,66	5,46	4,58
Sulawesi Tenggara	1,08	1,00	1,04	1,89	2,26	2,08	1,66	1,89	1,78
Maluku	0,47	0,37	0,42	2,44	2,41	2,43	1,71	1,61	1,66
Maluku Utara	0,30	0,50	0,40	1,97	2,31	2,14	1,52	1,78	1,65
Papua	1,96	3,30	2,61	32,42	50,09	41,33	24,08	38,01	31,03
Papua Barat	2,01	0,66	1,36	3,84	9,49	6,75	3,24	6,88	5,07
INDONESIA	0,52	0,49	0,50	2,18	2,67	2,42	1,33	1,55	1,44

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Perkotaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,37	2,02	8,58	27,18	47,79	14,06	100,00
Sumatera Utara	0,25	3,70	11,17	32,24	44,13	8,52	100,00
Sumatera Barat	0,65	4,12	11,69	29,09	42,90	11,55	100,00
Riau	0,28	2,63	10,33	27,61	48,00	11,16	100,00
Kepulauan Riau	0,38	2,42	8,44	19,79	62,22	6,74	100,00
Jambi	0,09	4,71	10,31	29,10	44,41	11,39	100,00
Sumatera Selatan	0,61	5,19	12,80	27,73	42,44	11,24	100,00
Bangka Belitung	0,62	6,93	18,82	25,42	38,39	9,82	100,00
Bengkulu	0,14	2,48	10,98	28,25	43,17	14,99	100,00
Lampung	0,56	3,41	12,13	29,64	42,13	12,13	100,00
DKI Jakarta	0,28	1,84	9,83	25,24	49,64	13,17	100,00
Jawa Barat	0,46	3,91	20,52	32,88	35,20	7,04	100,00
Banten	0,41	3,35	15,30	31,18	41,35	8,42	100,00
Jawa Tengah	0,50	3,08	16,79	36,12	35,65	7,87	100,00
DI Yogyakarta	0,23	0,91	4,45	24,82	54,54	15,05	100,00
Jawa Timur	0,55	2,31	14,83	33,11	40,90	8,30	100,00
Bali	1,12	1,99	10,00	26,63	45,56	14,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,21	4,42	21,09	31,40	34,39	7,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,06	5,38	12,85	29,72	42,94	8,05	100,00
Kalimantan Barat	1,78	6,74	16,37	27,61	38,26	9,24	100,00
Kalimantan Tengah	0,92	4,87	16,56	29,53	37,14	10,98	100,00
Kalimantan Selatan	0,40	6,41	19,37	30,00	35,09	8,74	100,00
Kalimantan Timur	0,36	2,95	11,17	25,08	48,54	11,90	100,00
Sulawesi Utara	0,40	6,04	10,67	23,36	48,35	11,18	100,00
Gorontalo	1,11	9,42	16,86	23,13	40,43	9,06	100,00
Sulawesi Tengah	0,66	4,08	12,77	28,54	42,93	11,02	100,00
Sulawesi Selatan	1,27	6,17	13,34	25,59	42,40	11,23	100,00
Sulawesi Barat	0,92	13,02	15,62	24,53	31,64	14,27	100,00
Sulawesi Tenggara	0,76	4,30	7,84	25,47	48,66	12,97	100,00
Maluku	0,45	2,40	9,44	24,49	52,55	10,67	100,00
Maluku Utara	0,58	2,33	7,23	26,82	51,10	11,94	100,00
Papua	2,27	2,93	9,93	26,26	46,93	11,69	100,00
Papua Barat	0,85	4,49	9,00	28,44	46,51	10,71	100,00
INDONESIA	0,52	3,41	14,94	30,61	41,20	9,33	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perdesaan	
						Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,71	4,37	20,29	33,72	34,23	6,69	100,00
Sumatera Utara	2,13	7,43	21,21	34,90	30,61	3,73	100,00
Sumatera Barat	0,59	13,11	23,25	31,56	26,51	4,97	100,00
Riau	0,83	9,12	29,14	32,27	24,56	4,08	100,00
Kepulauan Riau	2,66	17,49	27,11	24,35	22,71	5,67	100,00
Jambi	0,84	8,54	31,08	31,23	24,00	4,31	100,00
Sumatera Selatan	0,80	11,04	34,77	30,45	20,36	2,59	100,00
Bangka Belitung	1,65	20,45	34,07	23,16	18,24	2,44	100,00
Bengkulu	0,82	10,06	25,81	33,61	25,26	4,44	100,00
Lampung	0,61	7,20	26,29	40,58	22,77	2,56	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,61	9,05	41,99	32,56	13,79	2,01	100,00
Banten	0,74	9,71	42,34	29,48	15,98	1,74	100,00
Jawa Tengah	0,93	4,58	30,75	41,51	18,75	3,48	100,00
DI Yogyakarta	1,22	1,07	11,95	42,79	37,40	5,56	100,00
Jawa Timur	1,54	6,48	31,31	36,45	21,06	3,16	100,00
Bali	3,21	8,08	23,15	30,20	28,95	6,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,59	10,26	24,95	33,11	23,42	4,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,13	18,36	36,54	21,61	15,73	3,62	100,00
Kalimantan Barat	2,73	17,30	37,00	25,72	15,55	1,69	100,00
Kalimantan Tengah	0,55	10,36	39,42	29,51	17,05	3,11	100,00
Kalimantan Selatan	1,77	12,66	32,80	32,44	17,43	2,91	100,00
Kalimantan Timur	0,93	8,31	28,14	30,51	28,54	3,57	100,00
Sulawesi Utara	0,60	12,66	23,36	31,42	28,55	3,42	100,00
Gorontalo	1,77	26,78	28,67	23,20	16,55	3,03	100,00
Sulawesi Tengah	2,13	11,34	34,56	27,80	20,15	4,03	100,00
Sulawesi Selatan	2,83	13,44	30,17	27,98	20,82	4,77	100,00
Sulawesi Barat	3,74	20,38	32,06	24,92	15,38	3,52	100,00
Sulawesi Tenggara	1,28	12,50	26,95	29,58	24,39	5,30	100,00
Maluku	2,74	8,92	24,32	29,73	29,90	4,38	100,00
Maluku Utara	1,99	11,83	29,38	27,71	22,86	6,24	100,00
Papua	40,88	9,06	18,49	16,49	12,54	2,53	100,00
Papua Barat	6,04	10,24	21,44	23,31	30,45	8,51	100,00
INDONESIA	2,26	9,08	31,09	33,18	20,96	3,44	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perkotaan+Perdesaan	
						Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,61	3,69	16,93	31,85	38,12	8,80	100,00
Sumatera Utara	1,20	5,57	16,21	33,58	37,33	6,11	100,00
Sumatera Barat	0,62	9,55	18,68	30,58	32,99	7,57	100,00
Riau	0,61	6,55	21,69	30,42	33,85	6,89	100,00
Kepulauan Riau	0,77	5,00	11,64	20,57	55,45	6,56	100,00
Jambi	0,61	7,33	24,55	30,56	30,42	6,53	100,00
Sumatera Selatan	0,73	8,93	26,84	29,47	28,32	5,71	100,00
Bangka Belitung	1,14	13,72	26,48	24,28	28,27	6,11	100,00
Bengkulu	0,61	7,70	21,20	31,95	30,82	7,71	100,00
Lampung	0,60	6,20	22,57	37,70	27,86	5,07	100,00
DKI Jakarta	0,28	1,84	9,83	25,24	49,64	13,17	100,00
Jawa Barat	0,51	5,63	27,71	32,77	28,03	5,36	100,00
Banten	0,51	5,36	23,83	30,64	33,34	6,31	100,00
Jawa Tengah	0,73	3,88	24,24	38,99	26,63	5,53	100,00
DI Yogyakarta	0,54	0,96	6,80	30,44	49,18	12,08	100,00
Jawa Timur	1,06	4,46	23,32	34,83	30,68	5,65	100,00
Bali	1,92	4,33	15,04	28,00	39,18	11,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,58	7,78	23,31	32,38	28,07	5,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,45	15,50	31,32	23,40	21,73	4,60	100,00
Kalimantan Barat	2,43	14,03	30,61	26,30	22,59	4,03	100,00
Kalimantan Tengah	0,68	8,47	31,57	29,52	23,95	5,82	100,00
Kalimantan Selatan	1,18	10,00	27,10	31,40	24,93	5,39	100,00
Kalimantan Timur	0,58	4,96	17,53	27,12	41,04	8,78	100,00
Sulawesi Utara	0,51	9,62	17,54	27,73	37,62	6,98	100,00
Gorontalo	1,54	20,69	24,53	23,17	24,93	5,14	100,00
Sulawesi Tengah	1,75	9,47	28,94	27,99	26,02	5,83	100,00
Sulawesi Selatan	2,23	10,67	23,76	27,07	29,04	7,23	100,00
Sulawesi Barat	3,07	18,63	28,15	24,83	19,25	6,08	100,00
Sulawesi Tenggara	1,13	10,14	21,45	28,40	31,38	7,51	100,00
Maluku	1,86	6,44	18,65	27,74	38,53	6,78	100,00
Maluku Utara	1,59	9,14	23,12	27,45	30,83	7,85	100,00
Papua	30,61	7,43	16,21	19,09	21,69	4,97	100,00
Papua Barat	4,43	8,45	17,57	24,91	35,45	9,20	100,00
INDONESIA	1,37	6,17	22,81	31,86	31,33	6,46	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.5.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2011

Provinsi	Tdk Ada Biaya	Bekerja/Mencari Nafkah	Menikah/Mengurus RT	Merasa Pddkn Cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Perkotaan		
							Cacat	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	36,59	24,37	13,98	9,80	0,20	0,08	0,65	14,32	100,00
Sumatera Utara	39,65	20,80	9,58	13,03	1,44	0,35	0,87	14,30	100,00
Sumatera Barat	37,15	20,29	8,75	8,21	0,32	0,42	0,46	24,40	100,00
Riau	33,70	28,27	11,67	8,73	0,59	0,23	0,61	16,20	100,00
Kepulauan Riau	19,64	45,19	10,89	13,25	0,11	0,02	0,12	10,78	100,00
Jambi	34,02	29,72	11,06	11,88	1,43	1,03	0,19	10,67	100,00
Sumatera Selatan	35,28	23,33	11,88	13,62	0,55	0,51	1,64	13,19	100,00
Bangka Belitung	27,67	31,31	10,82	8,61	0,20	0,41	0,74	20,24	100,00
Bengkulu	32,98	23,00	11,10	12,51	0,74	0,00	0,59	19,08	100,00
Lampung	46,06	21,81	10,30	8,94	0,37	0,24	0,39	11,89	100,00
DKI Jakarta	41,54	34,68	6,55	8,19	0,34	0,20	0,64	7,86	100,00
Jawa Barat	47,02	26,09	9,80	7,98	0,46	0,14	0,57	7,93	100,00
Banten	43,12	31,75	8,90	7,90	0,28	0,14	0,38	7,54	100,00
Jawa Tengah	45,12	24,76	8,73	9,50	0,46	0,24	0,76	10,44	100,00
DI Yogyakarta	33,49	32,67	9,49	10,61	0,25	0,28	0,98	12,23	100,00
Jawa Timur	39,13	27,52	11,34	12,40	0,19	0,24	0,77	8,41	100,00
Bali	41,60	36,04	8,81	5,51	0,36	0,33	0,95	6,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,61	15,15	14,88	5,54	0,74	0,28	0,57	14,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,82	18,76	10,51	6,38	1,20	0,33	0,75	20,25	100,00
Kalimantan Barat	35,26	28,47	9,26	10,67	1,31	0,71	0,70	13,61	100,00
Kalimantan Tengah	28,30	28,14	16,68	13,57	0,77	1,05	0,28	11,20	100,00
Kalimantan Selatan	27,14	26,08	17,68	11,06	0,23	0,75	0,56	16,52	100,00
Kalimantan Timur	25,18	33,25	18,25	14,47	0,49	0,53	0,68	7,15	100,00
Sulawesi Utara	22,37	22,31	13,45	14,98	0,37	0,09	0,46	25,95	100,00
Gorontalo	29,97	24,14	11,97	5,05	1,82	0,89	1,11	25,04	100,00
Sulawesi Tengah	32,01	27,48	16,37	7,69	0,60	0,44	0,37	15,05	100,00
Sulawesi Selatan	39,34	23,20	9,32	9,16	0,74	1,08	1,15	16,01	100,00
Sulawesi Barat	30,27	25,77	12,07	4,71	1,49	3,97	1,56	20,16	100,00
Sulawesi Tenggara	33,38	22,77	15,16	6,70	0,61	0,09	1,12	20,17	100,00
Maluku	26,94	18,88	16,02	18,12	0,13	0,63	1,57	17,72	100,00
Maluku Utara	28,81	18,84	19,28	10,07	0,00	0,00	0,95	22,05	100,00
Papua	24,10	23,07	12,21	20,28	0,52	0,25	0,30	19,26	100,00
Papua Barat	27,97	24,78	14,95	12,87	0,00	0,71	0,21	18,51	100,00
INDONESIA	41,13	27,33	10,13	9,67	0,47	0,27	0,67	10,32	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.5.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2011

Provinsi	Tdk ada biaya	Bekerja/Mencari nafkah	Menikah/Mengurus RT	Merasa pddkn cukup	Malu karena ekonomi	Sekolah jauh	Perdesaan		
							Cacat	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	51,28	11,65	12,42	8,38	0,97	1,79	0,89	12,60	100,00
Sumatera Utara	44,41	15,51	9,49	9,55	0,63	1,83	0,67	17,90	100,00
Sumatera Barat	43,74	10,55	10,89	7,84	0,86	1,35	0,79	23,97	100,00
Riau	39,33	14,47	15,90	9,11	1,39	3,05	0,26	16,48	100,00
Kepulauan Riau	32,57	17,69	20,13	8,69	0,29	2,42	0,17	18,05	100,00
Jambi	41,83	14,58	15,60	11,62	0,13	2,05	0,81	13,38	100,00
Sumatera Selatan	38,78	17,47	17,55	8,92	0,94	4,13	0,75	11,48	100,00
Bangka Belitung	36,46	15,44	9,67	5,98	1,39	4,48	0,38	26,19	100,00
Bengkulu	45,26	9,78	16,10	9,12	1,45	1,26	0,90	16,13	100,00
Lampung	55,74	10,11	11,39	8,92	0,54	1,92	0,77	10,60	100,00
DKI Jakarta									-
Jawa Barat	52,39	12,55	17,48	6,03	0,61	1,35	0,22	9,37	100,00
Banten	56,54	13,61	14,07	3,09	0,26	1,06	0,39	10,98	100,00
Jawa Tengah	50,08	15,70	13,74	8,14	0,55	1,02	1,04	9,72	100,00
DI Yogyakarta	44,24	27,07	8,48	9,37	0,24	0,81	1,02	8,76	100,00
Jawa Timur	41,54	15,42	18,57	12,23	0,24	1,52	1,22	9,27	100,00
Bali	54,92	15,39	11,24	6,11	0,11	0,57	1,36	10,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,40	7,75	13,15	6,14	0,92	1,02	1,03	13,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	46,62	10,26	9,12	3,56	1,77	2,31	1,35	25,03	100,00
Kalimantan Barat	37,82	19,85	14,19	6,37	0,65	6,41	0,83	13,89	100,00
Kalimantan Tengah	37,19	23,25	16,63	8,41	0,37	5,62	0,38	8,14	100,00
Kalimantan Selatan	34,32	18,30	17,17	7,08	0,83	6,35	0,57	15,38	100,00
Kalimantan Timur	32,36	22,20	19,49	10,29	0,49	5,47	0,40	9,31	100,00
Sulawesi Utara	33,45	16,53	15,59	9,90	1,21	2,16	1,10	20,05	100,00
Gorontalo	29,71	17,91	16,34	2,87	1,31	4,96	0,74	26,16	100,00
Sulawesi Tengah	40,73	15,42	17,09	3,94	0,83	3,93	0,88	17,18	100,00
Sulawesi Selatan	37,52	16,77	15,84	5,88	1,27	5,39	1,07	16,25	100,00
Sulawesi Barat	41,84	15,27	12,97	4,68	0,63	11,08	1,08	12,46	100,00
Sulawesi Tenggara	39,08	14,05	18,71	3,83	0,79	4,84	0,77	17,93	100,00
Maluku	34,25	13,61	16,52	11,86	0,99	1,73	1,02	20,02	100,00
Maluku Utara	27,45	14,15	15,26	9,81	0,56	2,54	1,33	28,90	100,00
Papua	29,24	17,43	14,51	4,44	0,18	10,35	0,16	23,69	100,00
Papua Barat	34,03	18,24	19,14	7,29	0,73	6,55	0,57	13,45	100,00
INDONESIA	45,12	14,76	15,14	7,99	0,66	2,54	0,79	13,00	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 4.5.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2011

Provinsi	Tdk ada biaya	Bekerja/Mencari nafkah	Menikah/Mengurus RT	Merasa pddkn cukup	Malu karena ekonomi	Sekolah jauh	Perkotaan + Perdesaan		
							Cacat	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	47,80	14,67	12,79	8,72	0,79	1,39	0,83	13,01	100,00
Sumatera Utara	42,19	17,97	9,53	11,17	1,01	1,14	0,76	16,22	100,00
Sumatera Barat	41,52	13,82	10,17	7,97	0,68	1,04	0,68	24,11	100,00
Riau	37,32	19,41	14,39	8,98	1,10	2,04	0,39	16,38	100,00
Kepulauan Riau	21,83	40,54	12,46	12,48	0,14	0,42	0,13	12,01	100,00
Jambi	39,66	18,78	14,34	11,70	0,49	1,76	0,64	12,63	100,00
Sumatera Selatan	37,68	19,31	15,77	10,39	0,82	2,99	1,03	12,01	100,00
Bangka Belitung	32,38	22,80	10,21	7,20	0,84	2,59	0,54	23,43	100,00
Bengkulu	42,05	13,24	14,79	10,01	1,27	0,93	0,82	16,90	100,00
Lampung	53,47	12,85	11,14	8,93	0,50	1,53	0,68	10,90	100,00
DKI. Jakarta	41,54	34,68	6,55	8,19	0,34	0,20	0,64	7,86	100,00
Jawa Barat	48,95	21,23	12,55	7,28	0,52	0,58	0,45	8,45	100,00
Banten	47,92	25,26	10,75	6,18	0,27	0,47	0,38	8,77	100,00
Jawa Tengah	47,95	19,60	11,58	8,73	0,51	0,69	0,92	10,03	100,00
DI. Yogyakarta	37,60	30,53	9,10	10,13	0,25	0,49	1,00	10,91	100,00
Jawa Timur	40,46	20,84	15,32	12,31	0,22	0,94	1,02	8,88	100,00
Bali	47,24	27,30	9,84	5,76	0,25	0,43	1,13	8,05	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,45	10,56	13,81	5,91	0,85	0,74	0,86	13,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,81	11,69	9,35	4,03	1,67	1,97	1,25	24,23	100,00
Kalimantan Barat	37,14	22,14	12,88	7,51	0,83	4,90	0,79	13,82	100,00
Kalimantan Tengah	34,57	24,70	16,65	9,93	0,49	4,27	0,35	9,05	100,00
Kalimantan Selatan	31,68	21,16	17,35	8,54	0,61	4,30	0,57	15,80	100,00
Kalimantan Timur	28,12	28,72	18,76	12,76	0,49	2,56	0,56	8,04	100,00
Sulawesi Utara	28,91	18,90	14,72	11,99	0,86	1,31	0,84	22,47	100,00
Gorontalo	29,79	19,77	15,03	3,53	1,46	3,74	0,85	25,82	100,00
Sulawesi Tengah	38,95	17,88	16,95	4,70	0,78	3,22	0,77	16,75	100,00
Sulawesi Selatan	38,11	18,86	13,72	6,95	1,10	3,99	1,10	16,17	100,00
Sulawesi Barat	39,52	17,37	12,79	4,69	0,80	9,66	1,18	14,00	100,00
Sulawesi Tenggara	37,88	15,89	17,96	4,43	0,75	3,84	0,84	18,41	100,00
Maluku	32,15	15,13	16,38	13,66	0,74	1,42	1,18	19,35	100,00
Maluku Utara	27,77	15,24	16,19	9,87	0,43	1,95	1,24	27,31	100,00
Papua	28,11	18,67	14,01	7,93	0,25	8,13	0,19	22,71	100,00
Papua Barat	32,17	20,24	17,86	9,00	0,51	4,76	0,46	15,00	100,00
INDONESIA	43,21	20,78	12,74	8,80	0,57	1,45	0,74	11,72	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 5.1.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perkotaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,22	7,79	24,59	16,28	4,12	100,00
Sumatera Utara	52,05	10,62	19,40	12,74	5,18	100,00
Sumatera Barat	53,87	9,34	20,97	14,15	1,67	100,00
Riau	51,80	9,12	21,79	15,68	1,61	100,00
Kepulauan Riau	58,30	7,65	14,67	18,48	0,90	100,00
Jambi	52,86	3,85	23,27	17,84	2,19	100,00
Sumatera Selatan	49,09	10,47	22,08	15,69	2,66	100,00
Bangka Belitung	59,42	5,97	14,99	17,39	2,23	100,00
Bengkulu	57,32	3,54	21,95	14,49	2,72	100,00
Lampung	50,71	11,83	16,52	16,90	4,04	100,00
DKI Jakarta	58,88	11,00	18,83	10,41	0,89	100,00
Jawa Barat	49,23	10,96	18,33	18,38	3,10	100,00
Banten	56,89	14,87	13,88	11,55	2,81	100,00
Jawa Tengah	56,41	8,73	17,57	13,53	3,75	100,00
DI Yogyakarta	53,92	7,17	25,87	10,87	2,17	100,00
Jawa Timur	56,97	6,65	18,02	15,64	2,72	100,00
Bali	64,77	4,72	18,91	9,89	1,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,70	5,00	15,85	21,73	4,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,87	7,85	31,53	13,89	1,88	100,00
Kalimantan Barat	51,58	7,87	22,72	16,38	1,45	100,00
Kalimantan Tengah	58,35	4,41	20,83	14,47	1,94	100,00
Kalimantan Selatan	50,48	9,02	10,72	20,97	8,81	100,00
Kalimantan Timur	52,43	13,99	15,38	16,70	1,50	100,00
Sulawesi Utara	46,41	16,79	20,17	13,89	2,74	100,00
Gorontalo	47,93	4,61	12,29	25,48	9,69	100,00
Sulawesi Tengah	46,39	5,56	13,13	27,91	7,01	100,00
Sulawesi Selatan	50,04	7,18	19,27	16,69	6,83	100,00
Sulawesi Barat	54,03	4,45	4,89	30,35	6,27	100,00
Sulawesi Tenggara	50,74	6,22	12,39	25,72	4,94	100,00
Maluku	44,21	13,87	28,71	10,43	2,78	100,00
Maluku Utara	46,90	10,83	16,98	21,77	3,53	100,00
Papua	49,07	11,09	25,69	12,66	1,48	100,00
Papua Barat	40,34	20,28	21,31	16,06	2,01	100,00
INDONESIA	53,56	9,66	18,38	15,36	3,04	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.1.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perdesaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	46,97	10,00	19,65	17,22	6,16	100,00
Sumatera Utara	66,07	6,63	13,21	11,29	2,80	100,00
Sumatera Barat	50,97	7,11	18,79	18,38	4,75	100,00
Riau	56,54	4,39	14,52	22,67	1,89	100,00
Kepulauan Riau	57,07	5,69	13,64	22,01	1,58	100,00
Jambi	59,07	5,49	13,39	19,72	2,32	100,00
Sumatera Selatan	62,54	6,00	10,63	18,28	2,55	100,00
Bangka Belitung	61,91	3,32	9,38	24,50	0,90	100,00
Bengkulu	64,63	3,69	12,47	15,63	3,58	100,00
Lampung	57,95	5,79	10,59	21,81	3,86	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	45,67	11,36	10,52	26,54	5,91	100,00
Banten	43,51	14,73	10,68	22,61	8,46	100,00
Jawa Tengah	55,94	7,62	12,20	18,99	5,25	100,00
DI Yogyakarta	54,92	4,71	26,75	9,85	3,77	100,00
Jawa Timur	55,94	6,04	13,91	20,09	4,02	100,00
Bali	71,40	2,19	14,37	8,28	3,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,66	5,88	15,89	20,72	2,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,68	2,68	16,10	14,26	2,28	100,00
Kalimantan Barat	68,57	5,07	10,81	14,53	1,02	100,00
Kalimantan Tengah	65,29	2,99	12,11	18,05	1,56	100,00
Kalimantan Selatan	66,69	5,52	6,08	18,18	3,52	100,00
Kalimantan Timur	54,49	9,51	11,68	22,06	2,27	100,00
Sulawesi Utara	45,24	8,48	18,20	24,72	3,36	100,00
Gorontalo	52,87	3,97	7,90	25,28	9,97	100,00
Sulawesi Tengah	64,71	4,88	4,39	22,25	3,77	100,00
Sulawesi Selatan	55,83	6,88	9,11	23,99	4,18	100,00
Sulawesi Barat	63,52	3,84	7,18	20,82	4,64	100,00
Sulawesi Tenggara	62,22	3,70	7,26	23,11	3,70	100,00
Maluku	55,38	8,09	14,53	17,61	4,39	100,00
Maluku Utara	56,48	6,36	12,67	23,16	1,33	100,00
Papua	74,73	3,61	9,12	11,05	1,49	100,00
Papua Barat	60,40	6,31	18,28	13,74	1,27	100,00
INDONESIA	56,62	7,04	12,41	19,82	4,10	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.1.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,04	9,39	21,02	16,96	5,60	100,00
Sumatera Utara	59,10	8,62	16,29	12,01	3,99	100,00
Sumatera Barat	52,12	8,00	19,66	16,70	3,53	100,00
Riau	54,67	6,26	17,39	19,91	1,78	100,00
Kepulauan Riau	58,08	7,31	14,49	19,09	1,02	100,00
Jambi	57,14	4,98	16,46	19,14	2,28	100,00
Sumatera Selatan	57,69	7,61	14,76	17,35	2,59	100,00
Bangka Belitung	60,67	4,64	12,17	20,96	1,56	100,00
Bengkulu	62,30	3,64	15,49	15,27	3,30	100,00
Lampung	56,09	7,34	12,11	20,55	3,90	100,00
DKI Jakarta	58,88	11,00	18,83	10,41	0,89	100,00
Jawa Barat	48,02	11,10	15,68	21,15	4,05	100,00
Banten	52,42	14,82	12,81	15,25	4,70	100,00
Jawa Tengah	56,16	8,13	14,68	16,48	4,56	100,00
DI Yogyakarta	54,23	6,40	26,15	10,55	2,67	100,00
Jawa Timur	56,44	6,33	15,90	17,94	3,39	100,00
Bali	67,32	3,75	17,17	9,27	2,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,83	5,51	15,88	21,15	3,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,80	3,69	19,12	14,19	2,20	100,00
Kalimantan Barat	63,34	5,93	14,48	15,10	1,15	100,00
Kalimantan Tengah	62,96	3,47	15,04	16,85	1,69	100,00
Kalimantan Selatan	59,81	7,01	8,05	19,37	5,77	100,00
Kalimantan Timur	53,22	12,28	13,97	18,74	1,79	100,00
Sulawesi Utara	45,79	12,35	19,12	19,68	3,07	100,00
Gorontalo	51,14	4,20	9,44	25,35	9,88	100,00
Sulawesi Tengah	60,22	5,05	6,53	23,64	4,56	100,00
Sulawesi Selatan	53,67	6,99	12,90	21,26	5,17	100,00
Sulawesi Barat	61,23	3,99	6,63	23,12	5,04	100,00
Sulawesi Tenggara	58,98	4,41	8,71	23,85	4,05	100,00
Maluku	51,10	10,30	19,96	14,86	3,77	100,00
Maluku Utara	53,79	7,61	13,88	22,77	1,95	100,00
Papua	68,12	5,54	13,39	11,47	1,49	100,00
Papua Barat	54,41	10,48	19,18	14,43	1,49	100,00
INDONESIA	55,07	8,37	15,44	17,56	3,57	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.2.1 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Perkotaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	85,83	14,17	100,00
Sumatera Utara	83,05	16,95	100,00
Sumatera Barat	85,23	14,77	100,00
Riau	85,03	14,97	100,00
Kepulauan Riau	88,40	11,60	100,00
Jambi	93,22	6,78	100,00
Sumatera Selatan	82,42	17,58	100,00
Bangka Belitung	90,87	9,13	100,00
Bengkulu	94,19	5,81	100,00
Lampung	81,08	18,92	100,00
DKI Jakarta	84,26	15,74	100,00
Jawa Barat	81,79	18,21	100,00
Banten	79,28	20,72	100,00
Jawa Tengah	86,59	13,41	100,00
DI Yogyakarta	88,26	11,74	100,00
Jawa Timur	89,55	10,45	100,00
Bali	93,20	6,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,33	8,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	85,12	14,88	100,00
Kalimantan Barat	86,76	13,24	100,00
Kalimantan Tengah	92,97	7,03	100,00
Kalimantan Selatan	84,84	15,16	100,00
Kalimantan Timur	78,94	21,06	100,00
Sulawesi Utara	73,44	26,56	100,00
Gorontalo	91,22	8,78	100,00
Sulawesi Tengah	89,30	10,70	100,00
Sulawesi Selatan	87,46	12,54	100,00
Sulawesi Barat	92,38	7,62	100,00
Sulawesi Tenggara	89,08	10,92	100,00
Maluku	76,12	23,88	100,00
Maluku Utara	81,24	18,76	100,00
Papua	81,56	18,44	100,00
Papua Barat	66,54	33,46	100,00
INDONESIA	84,71	15,29	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.2.2 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Perdesaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	82,44	17,56	100,00
Sumatera Utara	90,88	9,12	100,00
Sumatera Barat	87,75	12,25	100,00
Riau	92,80	7,20	100,00
Kepulauan Riau	90,93	9,07	100,00
Jambi	91,50	8,50	100,00
Sumatera Selatan	91,25	8,75	100,00
Bangka Belitung	94,91	5,09	100,00
Bengkulu	94,60	5,40	100,00
Lampung	90,91	9,09	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	80,08	19,92	100,00
Banten	74,72	25,28	100,00
Jawa Tengah	88,02	11,98	100,00
DI Yogyakarta	92,10	7,90	100,00
Jawa Timur	90,26	9,74	100,00
Bali	97,03	2,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,28	9,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,02	3,98	100,00
Kalimantan Barat	93,11	6,89	100,00
Kalimantan Tengah	95,62	4,38	100,00
Kalimantan Selatan	92,35	7,65	100,00
Kalimantan Timur	85,14	14,86	100,00
Sulawesi Utara	84,21	15,79	100,00
Gorontalo	93,01	6,99	100,00
Sulawesi Tengah	92,99	7,01	100,00
Sulawesi Selatan	89,02	10,98	100,00
Sulawesi Barat	94,30	5,70	100,00
Sulawesi Tenggara	94,38	5,62	100,00
Maluku	87,26	12,74	100,00
Maluku Utara	89,88	10,12	100,00
Papua	95,39	4,61	100,00
Papua Barat	90,55	9,45	100,00
INDONESIA	88,94	11,06	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.2.3 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah	Perkotaan+Perdesaan
				(1)
	(2)	(3)	(4)	
Aceh	83,36	16,64	100,00	
Sumatera Utara	87,28	12,72	100,00	
Sumatera Barat	86,70	13,30	100,00	
Riau	89,73	10,27	100,00	
Kepulauan Riau	88,82	11,18	100,00	
Jambi	91,98	8,02	100,00	
Sumatera Selatan	88,34	11,66	100,00	
Bangka Belitung	92,90	7,10	100,00	
Bengkulu	94,48	5,52	100,00	
Lampung	88,43	11,57	100,00	
DKI Jakarta	84,26	15,74	100,00	
Jawa Barat	81,23	18,77	100,00	
Banten	77,96	22,04	100,00	
Jawa Tengah	87,35	12,65	100,00	
DI Yogyakarta	89,44	10,56	100,00	
Jawa Timur	89,91	10,09	100,00	
Bali	94,72	5,28	100,00	
Nusa Tenggara Barat	90,71	9,29	100,00	
Nusa Tenggara Timur	94,28	5,72	100,00	
Kalimantan Barat	91,43	8,57	100,00	
Kalimantan Tengah	94,78	5,22	100,00	
Kalimantan Selatan	89,51	10,49	100,00	
Kalimantan Timur	81,25	18,75	100,00	
Sulawesi Utara	78,76	21,24	100,00	
Gorontalo	92,42	7,58	100,00	
Sulawesi Tengah	92,27	7,73	100,00	
Sulawesi Selatan	88,47	11,53	100,00	
Sulawesi Barat	93,89	6,11	100,00	
Sulawesi Tenggara	93,04	6,96	100,00	
Maluku	83,22	16,78	100,00	
Maluku Utara	87,60	12,40	100,00	
Papua	92,48	7,52	100,00	
Papua Barat	83,85	16,15	100,00	
INDONESIA	86,80	13,20	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perkotaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	54,66	36,18	9,16	100,00
Sumatera Utara	51,98	34,14	13,88	100,00
Sumatera Barat	57,01	38,45	4,53	100,00
Riau	55,76	40,12	4,12	100,00
Kepulauan Riau	43,09	54,26	2,65	100,00
Jambi	53,76	41,19	5,05	100,00
Sumatera Selatan	54,61	38,81	6,58	100,00
Bangka Belitung	43,31	50,24	6,45	100,00
Bengkulu	56,06	37,01	6,94	100,00
Lampung	44,10	45,13	10,78	100,00
DKI. Jakarta	62,49	34,57	2,94	100,00
Jawa Barat	46,04	46,18	7,79	100,00
Banten	49,15	40,90	9,96	100,00
Jawa Tengah	50,41	38,83	10,76	100,00
DI. Yogyakarta	66,50	27,93	5,57	100,00
Jawa Timur	49,54	42,98	7,48	100,00
Bali	62,00	32,41	5,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,48	51,37	11,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	66,67	29,36	3,97	100,00
Kalimantan Barat	56,03	40,40	3,57	100,00
Kalimantan Tengah	55,94	38,84	5,22	100,00
Kalimantan Selatan	26,46	51,78	21,76	100,00
Kalimantan Timur	45,80	49,75	4,46	100,00
Sulawesi Utara	54,81	37,75	7,45	100,00
Gorontalo	25,89	53,68	20,42	100,00
Sulawesi Tengah	27,33	58,07	14,60	100,00
Sulawesi Selatan	45,03	39,00	15,97	100,00
Sulawesi Barat	11,78	73,11	15,11	100,00
Sulawesi Tenggara	28,77	59,75	11,47	100,00
Maluku	68,49	24,88	6,64	100,00
Maluku Utara	40,16	51,50	8,34	100,00
Papua	64,49	31,78	3,72	100,00
Papua Barat	54,13	40,78	5,10	100,00
INDONESIA	49,97	41,76	8,27	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perdesaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	45,66	40,02	14,33	100,00
Sumatera Utara	48,38	41,35	10,27	100,00
Sumatera Barat	44,82	43,85	11,33	100,00
Riau	37,15	58,01	4,83	100,00
Kepulauan Riau	36,64	59,11	4,25	100,00
Jambi	37,78	55,66	6,56	100,00
Sumatera Selatan	33,79	58,09	8,11	100,00
Bangka Belitung	26,98	70,44	2,57	100,00
Bengkulu	39,36	49,34	11,30	100,00
Lampung	29,22	60,15	10,64	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	24,48	61,77	13,75	100,00
Banten	25,58	54,15	20,27	100,00
Jawa Tengah	33,49	52,11	14,40	100,00
DI. Yogyakarta	66,27	24,40	9,34	100,00
Jawa Timur	36,59	52,85	10,56	100,00
Bali	54,40	31,36	14,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,28	52,51	7,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,32	43,70	6,98	100,00
Kalimantan Barat	41,01	55,13	3,86	100,00
Kalimantan Tengah	38,17	56,91	4,92	100,00
Kalimantan Selatan	21,89	65,45	12,67	100,00
Kalimantan Timur	32,44	61,26	6,30	100,00
Sulawesi Utara	39,33	53,41	7,26	100,00
Gorontalo	18,31	58,58	23,11	100,00
Sulawesi Tengah	14,43	73,18	12,39	100,00
Sulawesi Selatan	24,43	64,35	11,22	100,00
Sulawesi Barat	21,99	63,79	14,22	100,00
Sulawesi Tenggara	21,30	67,83	10,87	100,00
Maluku	39,78	48,21	12,01	100,00
Maluku Utara	34,09	62,33	3,59	100,00
Papua	42,10	51,02	6,89	100,00
Papua Barat	54,90	41,28	3,82	100,00
INDONESIA	34,15	54,56	11,29	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perkotaan+Perdesaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	48,24	38,92	12,85	100,00
Sumatera Utara	50,45	37,20	12,35	100,00
Sumatera Barat	49,28	41,88	8,84	100,00
Riau	44,50	50,95	4,55	100,00
Kepulauan Riau	41,88	55,17	2,95	100,00
Jambi	43,45	50,53	6,02	100,00
Sumatera Selatan	42,54	49,99	7,47	100,00
Bangka Belitung	35,08	60,42	4,50	100,00
Bengkulu	45,47	44,83	9,70	100,00
Lampung	33,13	56,20	10,67	100,00
DKI. Jakarta	62,49	34,57	2,94	100,00
Jawa Barat	38,35	51,74	9,91	100,00
Banten	39,10	46,54	14,35	100,00
Jawa Tengah	41,10	46,14	12,76	100,00
DI. Yogyakarta	66,42	26,80	6,78	100,00
Jawa Timur	42,71	48,18	9,11	100,00
Bali	59,34	32,04	8,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,05	52,01	8,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,84	39,96	6,20	100,00
Kalimantan Barat	47,11	49,14	3,74	100,00
Kalimantan Tengah	44,79	50,18	5,03	100,00
Kalimantan Selatan	24,26	58,37	17,37	100,00
Kalimantan Timur	40,48	54,33	5,19	100,00
Sulawesi Utara	45,67	47,00	7,33	100,00
Gorontalo	21,14	56,75	22,11	100,00
Sulawesi Tengah	18,81	68,06	13,14	100,00
Sulawesi Selatan	32,80	54,05	13,15	100,00
Sulawesi Barat	19,05	66,47	14,48	100,00
Sulawesi Tenggara	23,78	65,15	11,07	100,00
Maluku	51,72	38,50	9,78	100,00
Maluku Utara	35,95	59,00	5,05	100,00
Papua	50,82	43,52	5,65	100,00
Papua Barat	54,64	41,11	4,24	100,00
INDONESIA	42,23	48,02	9,75	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.4.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Perkotaan
							(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,04	2,67	6,98	16,87	51,03	22,41	100,00
Sumatera Utara	0,06	3,40	8,82	24,07	51,44	12,20	100,00
Sumatera Barat	0,00	5,73	11,03	23,24	46,20	13,79	100,00
Riau	0,19	2,81	11,76	23,46	48,27	13,50	100,00
Kepulauan Riau	0,39	2,89	7,21	19,33	58,58	11,60	100,00
Jambi	0,44	4,59	11,16	19,21	48,54	16,05	100,00
Sumatera Selatan	0,03	6,38	12,41	17,82	42,82	20,55	100,00
Bangka Belitung	0,63	8,12	16,34	15,76	42,36	16,80	100,00
Bengkulu	0,22	3,69	8,15	18,92	49,00	20,02	100,00
Lampung	0,13	3,39	10,30	24,10	46,14	15,94	100,00
DKI. Jakarta	0,10	2,37	9,04	19,18	51,93	17,39	100,00
Jawa Barat	0,35	4,64	19,74	25,48	40,95	8,84	100,00
Banten	0,09	4,02	11,18	25,21	47,56	11,93	100,00
Jawa Tengah	0,13	3,57	16,87	29,42	41,03	8,98	100,00
DI. Yogyakarta	0,37	1,97	4,28	17,89	57,39	18,10	100,00
Jawa Timur	0,33	2,46	13,69	25,17	48,52	9,83	100,00
Bali	0,39	4,07	11,49	21,67	46,06	16,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,72	8,61	19,70	20,78	34,80	14,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,28	6,10	14,11	16,75	41,42	20,33	100,00
Kalimantan Barat	0,48	10,99	15,52	22,96	40,27	9,79	100,00
Kalimantan Tengah	0,36	5,41	15,64	22,30	40,71	15,57	100,00
Kalimantan Selatan	1,26	8,24	18,51	26,15	34,18	11,66	100,00
Kalimantan Timur	0,21	5,12	10,59	19,02	53,29	11,77	100,00
Sulawesi Utara	0,35	5,92	10,92	21,51	48,94	12,36	100,00
Gorontalo	0,68	8,50	13,97	19,26	42,34	15,25	100,00
Sulawesi Tengah	0,19	6,47	13,09	20,86	42,64	16,75	100,00
Sulawesi Selatan	0,52	5,04	14,96	21,23	42,34	15,91	100,00
Sulawesi Barat	3,49	10,36	13,52	22,07	34,37	16,20	100,00
Sulawesi Tenggara	1,35	4,18	7,37	15,79	50,09	21,22	100,00
Maluku	0,85	3,52	6,95	18,25	52,86	17,57	100,00
Maluku Utara	0,33	3,73	6,54	18,67	53,96	16,77	100,00
Papua	2,28	3,05	5,43	17,70	54,07	17,48	100,00
Papua Barat	0,90	6,98	12,65	18,64	46,31	14,52	100,00
INDONESIA	0,31	4,00	13,87	23,68	45,86	12,28	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

**Tabel 5.4.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir
menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011**

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Perdesaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,88	6,70	18,49	27,74	34,40	11,78	100,00
Sumatera Utara	2,34	7,38	22,56	31,95	31,69	4,08	100,00
Sumatera Barat	0,74	14,88	22,84	28,19	24,30	9,05	100,00
Riau	0,99	8,43	24,58	30,28	29,78	5,94	100,00
Kepulauan Riau	6,87	11,06	35,34	15,59	23,32	7,83	100,00
Jambi	0,44	11,71	32,57	25,02	23,14	7,12	100,00
Sumatera Selatan	0,94	14,75	30,54	27,89	22,70	3,18	100,00
Bangka Belitung	1,40	18,93	34,54	15,29	25,77	4,07	100,00
Bengkulu	0,70	12,25	24,10	25,34	31,35	6,27	100,00
Lampung	0,57	8,66	28,39	35,46	22,64	4,28	100,00
DKI. Jakarta						-	
Jawa Barat	0,21	9,74	44,77	28,17	14,37	2,73	100,00
Banten	0,75	8,56	41,95	25,46	20,27	3,02	100,00
Jawa Tengah	0,52	5,03	34,31	36,49	19,65	4,00	100,00
DI. Yogyakarta		3,02	7,79	37,09	45,54	6,57	100,00
Jawa Timur	1,18	7,63	34,19	32,02	21,42	3,56	100,00
Bali	1,67	8,33	23,49	30,86	29,93	5,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,14	10,94	28,09	25,52	23,37	5,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,67	21,10	38,94	15,38	15,86	4,05	100,00
Kalimantan Barat	1,96	18,49	36,98	22,48	17,58	2,51	100,00
Kalimantan Tengah	0,14	11,20	37,60	29,21	16,94	4,91	100,00
Kalimantan Selatan	0,35	14,10	34,47	27,94	18,46	4,68	100,00
Kalimantan Timur	1,83	11,83	27,49	23,04	31,11	4,70	100,00
Sulawesi Utara	0,24	12,86	23,36	25,96	30,17	7,42	100,00
Gorontalo	1,13	32,71	29,53	17,59	14,82	4,21	100,00
Sulawesi Tengah	2,27	13,77	33,79	22,57	22,15	5,46	100,00
Sulawesi Selatan	3,29	14,61	33,74	22,47	20,30	5,58	100,00
Sulawesi Barat	5,56	16,69	31,23	23,79	17,86	4,87	100,00
Sulawesi Tenggara	1,47	13,77	23,54	25,37	28,64	7,21	100,00
Maluku	1,89	10,54	32,90	22,68	25,88	6,11	100,00
Maluku Utara	1,18	12,57	27,24	24,50	25,40	9,11	100,00
Papua	42,30	8,89	17,09	15,28	13,71	2,73	100,00
Papua Barat	6,85	15,33	27,65	18,96	23,54	7,68	100,00
INDONESIA	2,53	10,28	31,98	28,61	22,08	4,53	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.4.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
		Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Perguruan Tinggi		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,65	5,58	15,28	24,71	39,04	14,74	100,00	
Sumatera Utara	1,34	5,63	16,54	28,50	40,34	7,64	100,00	
Sumatera Barat	0,43	11,13	18,00	26,16	33,29	10,99	100,00	
Riau	0,69	6,33	19,78	27,73	36,70	8,77	100,00	
Kepulauan Riau	1,50	4,29	12,02	18,69	52,55	10,95	100,00	
Jambi	0,44	9,67	26,42	23,35	30,43	9,68	100,00	
Sumatera Selatan	0,66	12,18	24,97	24,80	28,88	8,51	100,00	
Bangka Belitung	1,03	13,66	25,68	15,52	33,85	10,27	100,00	
Bengkulu	0,56	9,74	19,42	23,46	36,52	10,30	100,00	
Lampung	0,47	7,44	24,19	32,82	28,09	6,99	100,00	
DKI. Jakarta	0,10	2,37	9,04	19,18	51,93	17,39	100,00	
Jawa Barat	0,30	6,29	27,82	26,35	32,37	6,87	100,00	
Banten	0,27	5,28	19,72	25,28	39,98	9,46	100,00	
Jawa Tengah	0,33	4,36	26,24	33,22	29,54	6,31	100,00	
DI. Yogyakarta	0,25	2,30	5,39	23,96	53,65	14,45	100,00	
Jawa Timur	0,77	5,10	24,18	28,67	34,66	6,62	100,00	
Bali	0,91	5,81	16,38	25,42	39,48	12,00	100,00	
Nusa Tenggara Barat	4,31	9,97	24,61	23,55	28,11	9,44	100,00	
Nusa Tenggara Timur	4,18	18,93	35,35	15,58	19,55	6,40	100,00	
Kalimantan Barat	1,58	16,61	31,59	22,60	23,27	4,34	100,00	
Kalimantan Tengah	0,21	9,40	30,77	27,06	24,34	8,23	100,00	
Kalimantan Selatan	0,68	12,00	28,75	27,30	24,09	7,18	100,00	
Kalimantan Timur	0,84	7,74	17,19	20,59	44,63	9,01	100,00	
Sulawesi Utara	0,29	9,58	17,49	23,86	39,03	9,75	100,00	
Gorontalo	0,98	24,75	24,42	18,14	23,86	7,84	100,00	
Sulawesi Tengah	1,88	12,39	29,88	22,24	26,02	7,59	100,00	
Sulawesi Selatan	2,32	11,28	27,20	22,04	27,98	9,18	100,00	
Sulawesi Barat	5,12	15,34	27,47	23,42	21,37	7,28	100,00	
Sulawesi Tenggara	1,44	11,44	19,61	23,04	33,85	10,62	100,00	
Maluku	1,54	8,22	24,30	21,21	34,82	9,91	100,00	
Maluku Utara	0,97	10,41	22,18	23,07	32,39	10,98	100,00	
Papua	34,88	7,81	14,93	15,73	21,20	5,47	100,00	
Papua Barat	5,53	13,48	24,33	18,89	28,58	9,20	100,00	
INDONESIA	1,43	7,18	23,04	26,18	33,82	8,36	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.5.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Perta-nian	Pertam-bangan dan Galian	Indus-tri	Listrik, Gas dan Air	Kons-truksi	Perda-gangan	Perkotaan				Jumlah
							(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
Aceh	11,38	0,49	5,28	0,49	7,14	29,95	3,57	4,70	37,00	100,00	
Sumatera Utara	9,83	0,31	16,53	0,17	9,31	31,30	5,81	5,31	21,43	100,00	
Sumatera Barat	9,60	1,35	8,71	0,70	10,15	32,40	8,82	5,03	23,23	100,00	
Riau	5,86	2,45	7,32	0,39	10,38	35,49	8,03	6,25	23,83	100,00	
Kepulauan Riau	2,48	1,21	39,13	1,15	6,35	26,17	4,38	3,85	15,28	100,00	
Jambi	12,08	0,84	4,35	0,26	8,92	36,58	7,64	4,28	25,04	100,00	
Sumatera Selatan	7,92	2,01	10,05	0,31	8,66	29,50	7,75	5,14	28,64	100,00	
Bangka Belitung	4,14	19,56	9,10	0,77	5,27	27,63	2,46	3,75	27,32	100,00	
Bengkulu	8,25	0,87	5,21	0,50	6,74	37,34	4,85	6,35	29,89	100,00	
Lampung	6,56	0,30	12,03	0,07	6,89	33,41	7,04	6,67	27,05	100,00	
DKI. Jakarta	0,64	0,29	17,52	0,44	2,16	36,49	8,05	11,39	23,01	100,00	
Jawa Barat	5,63	0,75	34,20	0,22	5,06	28,50	4,75	5,04	15,83	100,00	
Banten	2,48	0,40	36,64	0,29	3,61	24,40	5,16	5,71	21,31	100,00	
Jawa Tengah	7,72	0,34	31,94	0,36	6,61	27,86	4,04	3,81	17,31	100,00	
DI. Yogyakarta	2,37	0,76	19,35	0,22	3,89	37,52	6,92	5,61	23,35	100,00	
Jawa Timur	9,70	0,25	23,57	0,28	7,42	31,42	4,11	5,31	17,95	100,00	
Bali	2,89	0,14	14,52	0,49	6,23	39,37	3,23	6,50	26,63	100,00	
Nusa Tenggara Barat	20,90	1,99	11,20	0,19	7,75	26,21	4,56	3,71	23,50	100,00	
Nusa Tenggara Timur	7,63	0,34	6,98	0,50	4,37	23,38	15,12	5,24	36,43	100,00	
Kalimantan Barat	11,84	0,63	8,20	0,45	10,30	35,38	5,27	3,49	24,44	100,00	
Kalimantan Tengah	13,40	4,53	5,47	1,25	9,15	29,45	5,13	5,50	26,12	100,00	
Kalimantan Selatan	6,68	4,04	10,09	0,37	7,11	35,90	5,63	6,62	23,57	100,00	
Kalimantan Timur	7,17	13,23	6,41	0,61	5,37	32,66	6,94	6,20	21,41	100,00	
Sulawesi Utara	7,53	1,40	7,29	0,69	11,93	27,38	9,97	6,98	26,82	100,00	
Gorontalo	3,63	1,97	8,94	0,00	5,44	23,35	11,32	3,12	42,22	100,00	
Sulawesi Tengah	6,19	1,84	5,85	0,68	7,07	24,87	8,01	5,47	40,02	100,00	
Sulawesi Selatan	5,81	0,70	8,46	0,32	8,01	35,11	9,30	4,72	27,56	100,00	
Sulawesi Barat	19,47	0,62	6,15	1,07	6,43	21,27	6,76	3,97	34,26	100,00	
Sulawesi Tenggara	5,56	3,34	4,31	0,66	9,04	27,20	12,41	4,71	32,78	100,00	
Maluku	6,76	0,68	5,79	0,36	6,28	30,97	13,07	4,70	31,37	100,00	
Maluku Utara	5,96	1,07	2,00	0,81	5,80	32,26	16,77	3,58	31,75	100,00	
Papua	9,68	3,43	1,80	0,00	7,14	28,31	16,04	5,25	28,35	100,00	
Papua Barat	10,01	2,80	4,89	0,00	7,38	35,12	12,91	2,57	24,32	100,00	
INDONESIA	6,52	1,09	23,08	0,34	6,10	30,65	5,72	5,74	20,76	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.5.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Perta-nian	Pertam-bangan dan Galian	Indus-tri	Listrik, Gas dan Air	Kons-truksi	Perda-gangan	Perdesaan				Jumlah
							(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Aceh	54,41	0,95	2,90	0,17	7,30	12,45	3,56	1,14	17,13	100,00	
Sumatera Utara	61,00	1,13	6,69	0,03	4,54	13,50	2,04	0,99	10,08	100,00	
Sumatera Barat	44,67	2,32	8,41	0,30	5,75	16,39	5,13	2,54	14,49	100,00	
Riau	60,54	1,51	5,47	0,59	1,82	12,64	2,53	1,89	13,00	100,00	
Kepulauan Riau	44,67	3,29	8,37	0,24	7,74	12,92	2,14	1,10	19,52	100,00	
Jambi	65,49	2,44	3,10	0,26	2,33	10,03	2,65	1,13	12,58	100,00	
Sumatera Selatan	74,10	1,25	4,18	0,10	1,58	8,84	2,51	0,75	6,70	100,00	
Bangka Belitung	30,12	41,35	2,34	0,12	1,83	13,60	1,31	0,69	8,64	100,00	
Bengkulu	61,20	1,35	1,82	0,18	3,33	15,93	3,16	1,30	11,74	100,00	
Lampung	56,58	1,52	11,98	0,11	4,29	13,06	3,24	0,23	8,98	100,00	
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	28,81	1,13	19,76	0,30	8,51	21,95	7,17	0,94	11,44	100,00	
Banten	25,34	3,45	23,94	0,00	5,02	19,53	6,90	1,14	14,67	100,00	
Jawa Tengah	36,38	0,42	21,26	0,10	7,92	19,14	3,12	1,32	10,33	100,00	
DI. Yogyakarta	24,44	0,72	17,50	0,00	10,63	22,86	2,73	2,30	18,82	100,00	
Jawa Timur	48,40	1,47	15,09	0,02	7,13	14,67	2,18	1,90	9,15	100,00	
Bali	32,87	0,65	15,58	0,08	10,48	24,94	2,80	3,06	9,55	100,00	
Nusa Tenggara Barat	54,58	3,94	9,00	0,00	4,02	11,48	4,18	1,14	11,67	100,00	
Nusa Tenggara Timur	70,35	1,16	6,72	0,07	2,84	4,21	6,39	0,67	7,59	100,00	
Kalimantan Barat	71,27	7,45	2,14	0,09	3,22	7,89	1,50	0,56	5,88	100,00	
Kalimantan Tengah	68,67	10,45	1,82	0,02	3,49	6,84	1,22	0,36	7,13	100,00	
Kalimantan Selatan	56,10	5,79	5,43	0,05	3,78	15,06	2,43	1,23	10,14	100,00	
Kalimantan Timur	52,44	9,59	3,84	0,17	3,37	11,78	5,03	1,00	12,78	100,00	
Sulawesi Utara	35,47	5,93	6,27	0,81	7,89	14,61	11,56	1,61	15,85	100,00	
Gorontalo	39,69	7,56	10,39	0,15	5,46	11,34	9,87	1,82	13,72	100,00	
Sulawesi Tengah	57,79	3,56	4,49	0,21	4,95	11,54	3,89	0,91	12,65	100,00	
Sulawesi Selatan	57,42	1,28	8,40	0,15	5,90	11,47	4,08	0,66	10,64	100,00	
Sulawesi Barat	63,03	1,84	7,05	0,10	4,26	11,75	2,27	0,60	9,10	100,00	
Sulawesi Tenggara	53,65	4,71	4,96	0,00	5,16	11,21	5,49	1,27	13,56	100,00	
Maluku	62,21	0,60	10,06	0,08	2,76	6,59	6,96	0,19	10,55	100,00	
Maluku Utara	64,86	2,78	1,79	0,00	2,79	5,06	6,66	0,35	15,71	100,00	
Papua	85,97	1,78	1,47	0,12	1,19	4,15	1,23	0,29	3,80	100,00	
Papua Barat	64,81	2,18	2,87	0,00	4,57	10,40	3,31	1,31	10,54	100,00	
INDONESIA	51,28	2,33	11,33	0,13	5,52	14,19	3,64	1,17	10,40	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2011

Provinsi	Perta-nian	Pertam-bangan dan Galian	Indus-tri	Listrik, Gas dan Air	Kons-truksi	Perda-gangan	Trans-portasi dan Komu-nikasi	Perkotaan+Perdesaan			
								(1)	(2)	(3)	(4)
								(5)	(6)	(7)	(8)
								(9)	(10)	(11)	
Aceh	42,43	0,82	3,56	0,26	7,25	17,32	3,56	2,13	22,66	100,00	
Sumatera Utara	38,59	0,77	11,00	0,09	6,63	21,30	3,69	2,88	15,06	100,00	
Sumatera Barat	30,28	1,93	8,53	0,46	7,56	22,96	6,64	3,56	18,07	100,00	
Riau	40,08	1,86	6,16	0,51	5,02	21,19	4,59	3,52	17,05	100,00	
Kepulauan Riau	9,69	1,57	33,88	0,99	6,59	23,91	4,00	3,38	16,00	100,00	
Jambi	50,16	1,98	3,46	0,26	4,22	17,65	4,08	2,03	16,16	100,00	
Sumatera Selatan	53,80	1,48	5,98	0,16	3,75	15,18	4,12	2,10	13,43	100,00	
Bangka Belitung	17,47	30,74	5,64	0,44	3,50	20,43	1,87	2,18	17,73	100,00	
Bengkulu	45,69	1,21	2,81	0,27	4,33	22,20	3,65	2,78	17,06	100,00	
Lampung	44,97	1,24	11,99	0,10	4,89	17,78	4,12	1,73	13,17	100,00	
DKI. Jakarta	0,64	0,29	17,52	0,44	2,16	36,49	8,05	11,39	23,01	100,00	
Jawa Barat	13,11	0,87	29,54	0,25	6,18	26,39	5,53	3,71	14,41	100,00	
Banten	8,83	1,25	33,11	0,21	4,00	23,05	5,64	4,44	19,47	100,00	
Jawa Tengah	23,12	0,38	26,21	0,22	7,31	23,17	3,55	2,48	13,56	100,00	
DI. Yogyakarta	9,34	0,75	18,77	0,15	6,02	32,89	5,60	4,56	21,92	100,00	
Jawa Timur	29,50	0,87	19,23	0,15	7,27	22,85	3,12	3,57	13,44	100,00	
Bali	15,10	0,35	14,95	0,32	7,96	33,49	3,06	5,10	19,67	100,00	
Nusa Tenggara Barat	40,61	3,13	9,91	0,08	5,56	17,59	4,33	2,21	16,58	100,00	
Nusa Tenggara Timur	61,29	1,04	6,76	0,13	3,06	6,98	7,65	1,33	11,76	100,00	
Kalimantan Barat	56,36	5,74	3,66	0,18	5,00	14,79	2,44	1,29	10,53	100,00	
Kalimantan Tengah	51,48	8,61	2,96	0,40	5,25	13,87	2,44	1,96	13,04	100,00	
Kalimantan Selatan	38,40	5,16	7,10	0,16	4,97	22,52	3,58	3,16	14,95	100,00	
Kalimantan Timur	24,84	11,81	5,41	0,44	4,59	24,51	6,20	4,17	18,04	100,00	
Sulawesi Utara	22,28	3,79	6,75	0,75	9,80	20,64	10,81	4,15	21,03	100,00	
Gorontalo	27,84	5,73	9,91	0,10	5,45	15,29	10,35	2,25	23,09	100,00	
Sulawesi Tengah	48,04	3,24	4,74	0,30	5,35	14,06	4,67	1,77	17,82	100,00	
Sulawesi Selatan	39,45	1,08	8,42	0,21	6,64	19,70	5,90	2,07	16,53	100,00	
Sulawesi Barat	53,77	1,58	6,86	0,30	4,72	13,77	3,23	1,31	14,45	100,00	
Sulawesi Tenggara	41,96	4,37	4,80	0,16	6,10	15,10	7,17	2,10	18,23	100,00	
Maluku	43,84	0,63	8,65	0,17	3,93	14,66	8,99	1,68	17,45	100,00	
Maluku Utara	50,46	2,36	1,84	0,20	3,52	11,71	9,13	1,14	19,64	100,00	
Papua	71,81	2,08	1,53	0,10	2,30	8,63	3,98	1,21	8,36	100,00	
Papua Barat	52,68	2,32	3,32	0,00	5,19	15,87	5,43	1,59	13,59	100,00	
INDONESIA	29,18	1,72	17,13	0,23	5,81	22,32	4,67	3,43	15,51	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.6.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Buruh/Karyawan Dibayar	Perkotaan		
					Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	11,80	3,65	2,76	66,07	4,11	11,60	100,00
Sumatera Utara	11,52	6,43	1,85	61,08	8,10	11,02	100,00
Sumatera Barat	12,35	8,26	2,44	58,23	7,60	11,12	100,00
Riau	13,74	4,84	1,93	67,29	4,24	7,96	100,00
Kepulauan Riau	5,75	0,94	1,86	89,38	0,43	1,64	100,00
Jambi	10,95	3,94	2,28	61,48	7,57	13,78	100,00
Sumatera Selatan	13,38	5,37	2,26	67,22	3,99	7,78	100,00
Bangka Belitung	13,16	1,82	3,38	73,31	4,13	4,20	100,00
Bengkulu	12,28	5,47	3,50	59,75	7,02	11,98	100,00
Lampung	11,24	8,37	2,08	59,01	8,59	10,71	100,00
DKI. Jakarta	10,30	3,93	1,58	78,13	1,73	4,32	100,00
Jawa Barat	12,55	7,49	1,15	63,51	7,56	7,74	100,00
Banten	11,14	2,60	0,91	76,57	4,28	4,51	100,00
Jawa Tengah	10,06	8,44	1,52	59,08	9,01	11,90	100,00
DI. Yogyakarta	5,59	3,53	2,20	76,05	4,29	8,35	100,00
Jawa Timur	9,02	8,94	1,38	60,10	8,08	12,48	100,00
Bali	7,98	8,51	2,04	69,94	5,02	6,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,10	4,88	2,59	42,90	21,35	16,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,06	3,52	1,67	65,01	2,61	12,12	100,00
Kalimantan Barat	8,81	6,08	2,52	67,45	2,76	12,38	100,00
Kalimantan Tengah	12,30	5,38	2,55	65,24	2,58	11,96	100,00
Kalimantan Selatan	13,76	9,11	2,81	57,33	5,17	11,82	100,00
Kalimantan Timur	11,40	5,96	1,95	70,19	1,66	8,84	100,00
Sulawesi Utara	16,51	4,47	1,38	64,70	6,88	6,06	100,00
Gorontalo	17,11	5,44	1,25	64,76	4,03	7,42	100,00
Sulawesi Tengah	10,58	8,79	2,00	65,49	4,14	8,99	100,00
Sulawesi Selatan	12,75	9,36	2,82	56,66	5,12	13,30	100,00
Sulawesi Barat	12,02	7,00	1,19	53,79	3,32	22,67	100,00
Sulawesi Tenggara	16,79	2,19	1,06	63,27	5,59	11,10	100,00
Maluku	20,44	7,89	0,97	51,65	2,78	16,28	100,00
Maluku Utara	16,74	3,13	3,00	60,96	2,33	13,83	100,00
Papua	20,74	2,92	1,20	62,39	2,29	10,45	100,00
Papua Barat	19,34	2,73	2,82	58,52	4,53	12,07	100,00
INDONESIA	11,14	6,52	1,60	65,27	6,33	9,13	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.6.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011

Provinsi	Perdesaan						
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,47	6,48	2,86	35,27	8,44	33,47	100,00
Sumatera Utara	13,53	10,25	1,77	29,31	10,69	34,45	100,00
Sumatera Barat	20,49	8,88	2,28	28,69	15,62	24,05	100,00
Riau	19,09	4,90	3,03	37,98	10,92	24,08	100,00
Kepulauan Riau	27,59	1,56	1,14	50,85	8,01	10,85	100,00
Jambi	14,41	7,13	1,50	41,20	10,31	25,46	100,00
Sumatera Selatan	13,87	12,03	1,48	26,04	7,76	38,82	100,00
Bangka Belitung	21,20	5,99	6,78	44,74	8,52	12,77	100,00
Bengkulu	13,66	14,55	1,72	28,14	8,19	33,76	100,00
Lampung	12,55	10,51	1,40	26,08	13,04	36,42	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	19,02	7,79	1,69	36,55	22,35	12,60	100,00
Banten	16,78	6,75	0,67	39,49	21,70	14,62	100,00
Jawa Tengah	11,58	10,74	1,11	28,48	16,47	31,62	100,00
DI. Yogyakarta	8,11	10,12	1,83	44,39	11,90	23,65	100,00
Jawa Timur	9,95	10,58	1,67	25,89	16,39	35,53	100,00
Bali	11,12	13,82	0,94	34,89	12,18	27,04	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,27	12,65	1,24	18,82	21,71	31,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,03	13,35	1,01	14,49	4,00	53,12	100,00
Kalimantan Barat	17,44	11,54	1,92	22,49	3,51	43,09	100,00
Kalimantan Tengah	13,36	9,82	1,09	39,64	3,60	32,48	100,00
Kalimantan Selatan	16,74	11,75	1,35	28,89	7,04	34,22	100,00
Kalimantan Timur	20,82	6,54	1,47	46,91	2,24	22,03	100,00
Sulawesi Utara	21,47	5,14	1,70	37,04	18,09	16,56	100,00
Gorontalo	20,27	11,11	3,37	29,59	12,86	22,80	100,00
Sulawesi Tengah	13,60	12,33	2,22	24,04	11,46	36,34	100,00
Sulawesi Selatan	10,80	14,57	2,18	24,99	8,70	38,76	100,00
Sulawesi Barat	11,03	15,77	0,95	23,52	9,55	39,17	100,00
Sulawesi Tenggara	14,66	9,31	1,42	28,00	6,15	40,46	100,00
Maluku	18,82	13,17	0,57	16,81	3,97	46,67	100,00
Maluku Utara	17,24	10,57	1,52	23,60	10,50	36,57	100,00
Papua	12,59	21,50	0,41	8,63	1,45	55,42	100,00
Papua Barat	14,31	13,08	0,65	31,25	1,69	39,03	100,00
INDONESIA	14,06	10,55	1,60	28,86	12,81	32,12	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.6.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,01	5,70	2,83	43,85	7,24	27,38	100,00
Sumatera Utara	12,65	8,58	1,81	43,23	9,56	24,18	100,00
Sumatera Barat	17,15	8,62	2,35	40,81	12,33	18,74	100,00
Riau	17,09	4,88	2,62	48,94	8,42	18,05	100,00
Kepulauan Riau	9,48	1,05	1,73	82,80	1,73	3,21	100,00
Jambi	13,41	6,21	1,72	47,02	9,52	22,11	100,00
Sumatera Selatan	13,72	9,99	1,72	38,67	6,60	29,30	100,00
Bangka Belitung	17,28	3,96	5,12	58,65	6,38	8,60	100,00
Bengkulu	13,25	11,89	2,24	37,40	7,84	27,38	100,00
Lampung	12,25	10,02	1,56	33,72	12,00	30,46	100,00
DKI. Jakarta	10,30	3,93	1,58	78,13	1,73	4,32	100,00
Jawa Barat	14,64	7,58	1,32	54,81	12,33	9,31	100,00
Banten	12,70	3,75	0,84	66,28	9,11	7,31	100,00
Jawa Tengah	10,88	9,67	1,30	42,64	13,02	22,49	100,00
DI. Yogyakarta	6,39	5,61	2,08	66,05	6,69	13,18	100,00
Jawa Timur	9,50	9,78	1,53	42,60	12,33	24,27	100,00
Bali	9,26	10,67	1,59	55,66	7,94	14,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,37	9,42	1,80	28,80	21,56	25,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,18	11,93	1,11	21,79	3,80	47,20	100,00
Kalimantan Barat	15,28	10,17	2,07	33,77	3,32	35,38	100,00
Kalimantan Tengah	13,03	8,44	1,55	47,60	3,28	26,10	100,00
Kalimantan Selatan	15,67	10,81	1,88	39,08	6,37	26,20	100,00
Kalimantan Timur	15,08	6,18	1,76	61,11	1,89	13,99	100,00
Sulawesi Utara	19,13	4,82	1,55	50,10	12,80	11,60	100,00
Gorontalo	19,23	9,24	2,67	41,15	9,96	17,75	100,00
Sulawesi Tengah	13,03	11,66	2,18	31,87	10,08	31,17	100,00
Sulawesi Selatan	11,48	12,76	2,40	36,02	7,45	29,89	100,00
Sulawesi Barat	11,24	13,90	1,01	29,96	8,22	35,66	100,00
Sulawesi Tenggara	15,18	7,58	1,33	36,57	6,02	33,32	100,00
Maluku	19,35	11,42	0,70	28,35	3,57	36,60	100,00
Maluku Utara	17,12	8,75	1,88	32,74	8,50	31,01	100,00
Papua	14,10	18,05	0,55	18,61	1,61	47,08	100,00
Papua Barat	15,42	10,79	1,13	37,29	2,32	33,06	100,00
INDONESIA	12,62	8,56	1,60	46,83	9,61	20,77	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.7.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)				Perkotaan
	0*)	1 - 14	15 - 34	35+	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,31	5,97	27,34	63,38	100,00
Sumatera Utara	0,97	3,22	14,14	81,67	100,00
Sumatera Barat	3,08	4,98	17,40	74,54	100,00
Riau	1,38	2,04	14,24	82,34	100,00
Kepulauan Riau	1,05	1,60	6,68	90,68	100,00
Jambi	1,82	3,52	19,83	74,83	100,00
Sumatera Selatan	1,60	1,89	14,23	82,29	100,00
Bangka Belitung	2,28	2,35	15,21	80,16	100,00
Bengkulu	2,28	3,28	15,94	78,51	100,00
Lampung	1,12	2,50	16,38	80,00	100,00
DKI Jakarta	0,26	1,32	6,39	92,03	100,00
Jawa Barat	1,30	2,76	10,30	85,64	100,00
Banten	0,49	1,98	7,77	89,76	100,00
Jawa Tengah	1,92	3,62	13,95	80,51	100,00
DI Yogyakarta	0,85	4,02	14,47	80,66	100,00
Jawa Timur	1,38	4,36	15,08	79,18	100,00
Bali	0,95	3,17	8,41	87,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,22	9,91	27,78	61,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,31	5,00	17,23	75,45	100,00
Kalimantan Barat	1,40	4,40	16,34	77,87	100,00
Kalimantan Tengah	0,63	2,98	18,92	77,47	100,00
Kalimantan Selatan	3,53	5,08	19,77	71,62	100,00
Kalimantan Timur	1,16	2,55	11,88	84,41	100,00
Sulawesi Utara	1,62	4,07	13,89	80,41	100,00
Gorontalo	4,64	2,84	17,99	74,53	100,00
Sulawesi Tengah	4,89	5,50	16,76	72,84	100,00
Sulawesi Selatan	4,20	4,55	12,28	78,97	100,00
Sulawesi Barat	10,48	14,63	28,15	46,74	100,00
Sulawesi Tenggara	6,50	6,60	19,58	67,32	100,00
Maluku	1,70	6,64	19,14	72,52	100,00
Maluku Utara	1,50	4,32	17,16	77,02	100,00
Papua	0,86	2,17	16,83	80,14	100,00
Papua Barat	1,88	4,60	13,90	79,63	100,00
INDONESIA	1,41	3,25	12,59	82,75	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

*) Sementara tidak bekerja

Tabel 5.7.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)				Perdesaan
	0*)	1 - 14	15 - 34	35+	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,61	12,61	44,09	39,68	100,00
Sumatera Utara	1,31	7,87	37,15	53,68	100,00
Sumatera Barat	2,77	12,78	37,21	47,24	100,00
Riau	0,82	10,25	38,46	50,47	100,00
Kepulauan Riau	1,94	3,03	29,68	65,34	100,00
Jambi	1,29	8,66	47,92	42,13	100,00
Sumatera Selatan	1,71	8,82	45,76	43,71	100,00
Bangka Belitung	1,72	4,39	30,43	63,46	100,00
Bengkulu	3,06	7,50	32,66	56,78	100,00
Lampung	1,25	9,42	36,10	53,22	100,00
DKI Jakarta					-
Jawa Barat	2,45	5,55	25,55	66,44	100,00
Banten	1,64	4,19	27,55	66,61	100,00
Jawa Tengah	1,70	8,75	28,39	61,16	100,00
DI Yogyakarta	2,60	10,63	22,65	64,12	100,00
Jawa Timur	1,12	10,31	34,05	54,51	100,00
Bali	1,59	8,50	28,27	61,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,94	17,25	38,43	42,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,14	12,87	45,38	40,61	100,00
Kalimantan Barat	1,27	7,83	44,62	46,29	100,00
Kalimantan Tengah	1,47	4,86	31,62	62,05	100,00
Kalimantan Selatan	4,69	8,84	39,95	46,52	100,00
Kalimantan Timur	1,71	2,98	26,91	68,41	100,00
Sulawesi Utara	2,49	5,21	26,95	65,35	100,00
Gorontalo	4,21	6,56	27,03	62,20	100,00
Sulawesi Tengah	5,38	12,16	36,84	45,61	100,00
Sulawesi Selatan	5,05	17,28	35,89	41,79	100,00
Sulawesi Barat	5,19	23,31	38,80	32,70	100,00
Sulawesi Tenggara	5,63	14,59	33,57	46,20	100,00
Maluku	2,71	11,83	43,17	42,29	100,00
Maluku Utara	1,65	11,58	40,70	46,07	100,00
Papua	0,41	3,30	39,61	56,68	100,00
Papua Barat	1,36	4,86	40,54	53,24	100,00
INDONESIA	2,03	9,32	34,88	53,77	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

*) Sementara tidak bekerja

Tabel 5.7.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2011

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)				Jumlah
	0*)	1 - 14	15 - 34	35+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,53	10,76	39,43	46,28	100,00
Sumatera Utara	1,16	5,83	27,07	65,94	100,00
Sumatera Barat	2,90	9,58	29,08	58,44	100,00
Riau	1,03	7,18	29,40	62,39	100,00
Kepulauan Riau	1,20	1,84	10,61	86,35	100,00
Jambi	1,44	7,18	39,86	51,52	100,00
Sumatera Selatan	1,68	6,69	36,08	55,55	100,00
Bangka Belitung	1,99	3,40	23,02	71,59	100,00
Bengkulu	2,83	6,26	27,76	63,15	100,00
Lampung	1,22	7,82	31,53	59,43	100,00
DKI Jakarta	0,26	1,32	6,39	92,03	100,00
Jawa Barat	1,67	3,66	15,22	79,45	100,00
Banten	0,81	2,59	13,26	83,33	100,00
Jawa Tengah	1,80	6,38	21,71	70,11	100,00
DI Yogyakarta	1,40	6,11	17,06	75,43	100,00
Jawa Timur	1,25	7,41	24,78	66,56	100,00
Bali	1,21	5,34	16,50	76,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,64	14,20	34,01	50,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,31	11,73	41,31	45,65	100,00
Kalimantan Barat	1,30	6,97	37,53	54,21	100,00
Kalimantan Tengah	1,21	4,28	27,67	66,84	100,00
Kalimantan Selatan	4,28	7,49	32,72	55,51	100,00
Kalimantan Timur	1,38	2,72	17,75	78,16	100,00
Sulawesi Utara	2,08	4,67	20,78	72,46	100,00
Gorontalo	4,35	5,34	24,06	66,25	100,00
Sulawesi Tengah	5,29	10,90	33,05	50,76	100,00
Sulawesi Selatan	4,75	12,85	27,67	54,73	100,00
Sulawesi Barat	6,31	21,46	36,54	35,68	100,00
Sulawesi Tenggara	5,85	12,65	30,17	51,33	100,00
Maluku	2,37	10,11	35,21	52,30	100,00
Maluku Utara	1,61	9,80	34,94	53,64	100,00
Papua	0,50	3,09	35,38	61,03	100,00
Papua Barat	1,48	4,80	34,64	59,08	100,00
INDONESIA	1,72	6,33	23,87	68,08	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

**) Sementara tidak bekerja*

Tabel 5.8.1 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2011

Provinsi	Perkotaan							
	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (Rp)							
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	6,06	7,90	16,77	12,68	19,27	27,32	9,99	100,00
Sumatera Utara	5,80	8,40	19,61	18,82	28,80	13,73	4,85	100,00
Sumatera Barat	3,34	6,56	13,67	18,24	27,72	23,52	6,96	100,00
Riau	2,04	5,98	15,09	12,54	29,31	23,83	11,22	100,00
Kepulauan Riau	0,69	2,23	3,25	8,63	37,73	31,67	15,80	100,00
Jambi	15,79	13,90	15,82	11,46	20,86	16,20	5,98	100,00
Sumatera Selatan	11,16	7,81	15,45	14,57	23,97	19,22	7,83	100,00
Bangka Belitung	2,11	3,73	11,52	16,44	28,51	26,54	11,14	100,00
Bengkulu	0,59	10,52	18,83	18,12	21,92	22,69	7,33	100,00
Lampung	21,55	18,06	22,64	11,49	11,99	9,32	4,96	100,00
DKI Jakarta	2,94	6,01	10,88	9,73	35,24	23,78	11,41	100,00
Jawa Barat	4,75	9,36	17,09	18,95	29,70	15,14	5,00	100,00
Banten	3,67	4,73	10,76	14,26	41,77	17,81	7,00	100,00
Jawa Tengah	7,08	15,10	25,10	26,57	13,90	9,39	2,86	100,00
DI Yogyakarta	2,39	10,80	26,84	29,40	15,56	11,78	3,22	100,00
Jawa Timur	14,14	14,08	19,94	19,85	20,11	8,92	2,96	100,00
Bali	4,50	9,08	14,01	19,27	31,34	15,78	6,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,63	20,39	23,29	10,53	11,41	8,43	3,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,84	15,40	20,24	12,02	12,55	13,78	5,18	100,00
Kalimantan Barat	9,42	9,39	17,47	16,14	26,61	15,43	5,54	100,00
Kalimantan Tengah	0,56	1,46	8,03	16,08	32,15	29,30	12,42	100,00
Kalimantan Selatan	6,81	9,98	14,54	13,67	27,97	17,46	9,57	100,00
Kalimantan Timur	1,44	4,21	13,26	12,33	26,32	23,54	18,91	100,00
Sulawesi Utara	3,33	5,53	11,96	18,15	30,78	23,23	7,02	100,00
Gorontalo	18,37	14,23	17,62	12,91	13,79	18,94	4,13	100,00
Sulawesi Tengah	27,86	15,67	17,66	6,54	11,50	13,63	7,13	100,00
Sulawesi Selatan	20,50	14,75	16,92	12,07	18,56	11,85	5,35	100,00
Sulawesi Barat	44,92	10,44	12,25	8,61	11,14	9,73	2,91	100,00
Sulawesi Tenggara	5,87	15,54	18,10	17,66	14,36	21,49	6,97	100,00
Maluku	10,23	21,66	11,78	11,88	18,98	17,39	8,07	100,00
Maluku Utara	0,73	2,47	11,80	14,95	19,63	37,05	13,36	100,00
Papua	3,39	5,88	13,74	9,41	25,04	24,69	17,84	100,00
Papua Barat	1,76	2,48	12,16	13,98	27,46	28,47	13,69	100,00
INDONESIA	7,04	9,74	16,70	17,08	26,71	16,18	6,57	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.8.2 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2011

Provinsi	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (Rp)								Perdesaan
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +	Jumlah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13,74	15,62	19,31	13,16	17,16	16,88	4,12	100,00	
Sumatera Utara	6,19	13,17	20,29	20,13	22,88	14,29	3,05	100,00	
Sumatera Barat	14,18	13,11	17,38	16,29	18,03	15,12	5,90	100,00	
Riau	3,63	7,73	13,28	14,50	32,53	22,21	6,12	100,00	
Kepulauan Riau	0,94	6,00	17,80	13,87	33,17	21,88	6,34	100,00	
Jambi	13,30	10,67	14,80	16,44	21,00	18,08	5,69	100,00	
Sumatera Selatan	6,06	11,81	21,15	18,97	20,21	16,89	4,91	100,00	
Bangka Belitung	6,57	6,00	13,29	14,65	22,48	23,75	13,26	100,00	
Bengkulu	8,33	14,69	24,10	13,91	14,70	19,49	4,79	100,00	
Lampung	22,58	16,20	25,09	13,49	12,17	8,46	2,01	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	9,80	14,25	22,40	20,80	20,42	9,95	2,37	100,00	
Banten	13,30	14,55	17,36	15,61	29,20	8,04	1,94	100,00	
Jawa Tengah	12,78	18,95	25,47	22,90	10,91	7,20	1,79	100,00	
DI Yogyakarta	8,44	13,04	23,77	24,87	20,70	5,80	3,37	100,00	
Jawa Timur	19,10	18,45	23,31	18,19	14,54	5,23	1,18	100,00	
Bali	8,08	6,49	22,73	21,00	24,09	15,38	2,23	100,00	
Nusa Tenggara Barat	21,14	25,03	21,05	11,62	9,86	7,00	4,29	100,00	
Nusa Tenggara Timur	33,83	21,07	19,18	11,28	4,53	7,87	2,23	100,00	
Kalimantan Barat	12,90	8,45	15,35	17,34	22,17	18,85	4,95	100,00	
Kalimantan Tengah	3,93	9,57	15,01	12,77	27,73	24,53	6,46	100,00	
Kalimantan Selatan	18,65	14,85	15,28	14,13	13,85	16,03	7,22	100,00	
Kalimantan Timur	1,51	2,62	9,49	17,19	29,56	23,90	15,73	100,00	
Sulawesi Utara	7,67	12,99	19,85	15,23	19,77	19,62	4,86	100,00	
Gorontalo	12,83	18,76	24,51	15,45	12,25	10,85	5,35	100,00	
Sulawesi Tengah	19,17	19,25	22,41	11,60	11,08	10,48	6,01	100,00	
Sulawesi Selatan	32,09	12,81	18,34	12,31	11,83	9,44	3,18	100,00	
Sulawesi Barat	28,16	17,90	15,64	14,17	11,60	9,98	2,56	100,00	
Sulawesi Tenggara	11,80	18,25	20,10	13,21	15,57	17,03	4,04	100,00	
Maluku	9,18	23,18	15,33	16,37	14,16	17,73	4,05	100,00	
Maluku Utara	14,51	13,90	23,88	11,08	11,98	18,56	6,10	100,00	
Papua	7,56	17,68	17,16	8,96	14,06	19,19	15,39	100,00	
Papua Barat	5,36	10,75	15,48	15,33	25,23	19,45	8,40	100,00	
INDONESIA	13,32	14,71	20,50	17,38	17,98	12,30	3,81	100,00	

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 5.8.3 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2011

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							
	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (Rp)							
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	10,81	12,68	18,34	12,97	17,97	20,87	6,36	100,00
Sumatera Utara	5,97	10,45	19,90	19,39	26,25	13,97	4,07	100,00
Sumatera Barat	8,76	9,84	15,53	17,26	22,87	19,31	6,43	100,00
Riau	2,90	6,93	14,11	13,60	31,05	22,95	8,46	100,00
Kepulauan Riau	0,73	2,78	5,37	9,39	37,06	30,24	14,43	100,00
Jambi	14,15	11,78	15,15	14,73	20,96	17,44	5,79	100,00
Sumatera Selatan	8,47	9,92	18,46	16,89	21,98	17,99	6,29	100,00
Bangka Belitung	4,10	4,74	12,31	15,64	25,83	25,30	12,08	100,00
Bengkulu	5,11	12,95	21,91	15,66	17,71	20,82	5,85	100,00
Lampung	22,21	16,86	24,22	12,78	12,11	8,76	3,06	100,00
DKI Jakarta	2,94	6,01	10,88	9,73	35,24	23,78	11,41	100,00
Jawa Barat	6,06	10,63	18,46	19,43	27,30	13,80	4,32	100,00
Banten	5,57	6,67	12,07	14,53	39,29	15,88	6,00	100,00
Jawa Tengah	9,37	16,65	25,25	25,09	12,70	8,51	2,43	100,00
DI Yogyakarta	3,78	11,32	26,14	28,36	16,74	10,41	3,25	100,00
Jawa Timur	15,89	15,62	21,12	19,27	18,15	7,62	2,33	100,00
Bali	5,53	8,33	16,53	19,77	29,25	15,67	4,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,95	22,52	22,26	11,03	10,70	7,77	3,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,65	19,25	19,52	11,52	7,11	9,77	3,18	100,00
Kalimantan Barat	11,55	8,81	16,18	16,87	23,90	17,51	5,18	100,00
Kalimantan Tengah	2,59	6,35	12,23	14,09	29,49	26,43	8,83	100,00
Kalimantan Selatan	13,14	12,59	14,93	13,92	20,41	16,69	8,31	100,00
Kalimantan Timur	1,47	3,66	11,95	14,01	27,44	23,66	17,81	100,00
Sulawesi Utara	5,26	8,86	15,48	16,85	25,87	21,62	6,06	100,00
Gorontalo	15,30	16,74	21,44	14,32	12,94	14,46	4,80	100,00
Sulawesi Tengah	21,95	18,10	20,89	9,98	11,21	11,49	6,37	100,00
Sulawesi Selatan	26,19	13,79	17,62	12,19	15,26	10,66	4,28	100,00
Sulawesi Barat	33,85	15,36	14,49	12,28	11,45	9,89	2,68	100,00
Sulawesi Tenggara	9,57	17,24	19,35	14,88	15,12	18,71	5,14	100,00
Maluku	9,71	22,42	13,55	14,12	16,57	17,56	6,06	100,00
Maluku Utara	9,26	9,54	19,28	12,56	14,90	25,61	8,87	100,00
Papua	5,60	12,12	15,55	9,17	19,24	21,78	16,55	100,00
Papua Barat	4,19	8,05	14,39	14,89	25,96	22,40	10,13	100,00
INDONESIA	9,33	11,56	18,09	17,19	23,52	14,76	5,56	100,00

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2011

Tabel 6.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	19,24	19,24	19,24
Sumatera Utara	15,86	18,55	17,21
Sumatera Barat	18,50	22,40	20,86
Riau	18,36	18,48	18,43
Kepulauan Riau	13,23	24,23	15,11
Jambi	12,44	18,09	16,31
Sumatera Selatan	22,99	18,15	19,90
Bangka Belitung	26,30	19,39	22,83
Bengkulu	21,19	22,87	22,35
Lampung	17,85	23,91	22,32
DKI Jakarta	22,22	-	22,22
Jawa Barat	18,31	21,87	19,50
Banten	25,88	26,20	25,98
Jawa Tengah	20,28	20,04	20,15
DI Yogyakarta	28,30	22,86	26,60
Jawa Timur	16,91	17,40	17,16
Bali	24,46	32,33	27,48
Nusa Tenggara Barat	27,13	25,26	26,05
Nusa Tenggara Timur	27,76	30,56	29,94
Kalimantan Barat	17,46	18,38	18,09
Kalimantan Tengah	18,78	19,15	19,02
Kalimantan Selatan	23,61	24,38	24,05
Kalimantan Timur	13,20	14,56	13,71
Sulawesi Utara	15,97	19,03	17,63
Gorontalo	23,16	34,98	30,84
Sulawesi Tengah	23,03	28,11	26,80
Sulawesi Selatan	19,69	17,90	18,58
Sulawesi Barat	30,23	25,71	26,79
Sulawesi Tenggara	18,70	19,32	19,14
Maluku	16,35	19,75	18,46
Maluku Utara	10,41	15,38	13,97
Papua	16,73	21,69	20,37
Papua Barat	14,96	19,43	18,04
INDONESIA	19,66	20,77	20,20

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.2.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2011

Provinsi	Perkotaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	7,01	7,41	8,55	0,77	0,73	2,52	1,31	5,53
Sumatera Utara	6,82	7,56	6,67	0,44	0,97	2,10	0,96	3,66
Sumatera Barat	6,97	6,53	6,52	0,40	1,01	3,36	1,29	5,20
Riau	9,05	10,11	10,95	0,73	0,56	3,65	1,19	3,95
Kepulauan Riau	5,53	5,62	5,47	0,15	0,25	1,95	1,07	3,49
Jambi	4,03	5,52	5,22	0,17	0,29	2,56	0,75	2,75
Sumatera Selatan	6,68	9,78	10,99	1,31	0,78	4,98	1,24	6,87
Bangka Belitung	7,97	11,20	11,37	1,44	0,82	6,42	1,50	8,98
Bengkulu	5,77	8,56	9,36	0,65	0,90	4,21	1,81	5,49
Lampung	3,63	7,19	6,44	0,46	0,90	4,35	0,89	6,71
DKI Jakarta	5,98	10,55	10,02	0,46	0,64	4,13	1,04	6,44
Jawa Barat	5,31	7,69	8,01	0,94	0,89	2,97	1,03	6,13
Banten	8,07	11,91	12,00	1,23	0,92	3,61	1,25	8,42
Jawa Tengah	4,86	9,27	9,70	0,53	0,96	3,26	0,98	6,51
DI Yogyakarta	8,47	14,15	15,63	0,48	0,92	3,45	0,94	9,40
Jawa Timur	5,24	8,19	8,18	0,54	0,74	2,16	1,00	4,74
Bali	10,39	11,36	11,65	1,27	1,15	5,20	1,10	6,44
Nusa Tenggara Barat	11,96	11,66	12,44	1,19	0,96	4,82	0,76	9,66
Nusa Tenggara Timur	10,26	16,36	16,66	0,80	0,97	4,79	1,62	7,86
Kalimantan Barat	5,31	6,45	6,12	0,57	0,65	3,69	1,03	5,37
Kalimantan Tengah	7,32	9,54	9,53	0,73	0,98	4,66	1,47	4,72
Kalimantan Selatan	4,37	9,82	10,64	0,82	0,93	3,99	1,28	6,70
Kalimantan Timur	2,95	6,30	6,01	0,34	0,31	1,87	0,83	3,61
Sulawesi Utara	5,27	6,01	6,33	0,69	0,37	2,02	1,36	4,85
Gorontalo	11,98	9,78	7,77	0,78	1,58	4,56	1,48	5,16
Sulawesi Tengah	8,34	9,54	7,99	1,22	1,77	5,36	1,99	9,10
Sulawesi Selatan	6,48	8,17	9,05	0,58	1,39	4,67	1,27	4,64
Sulawesi Barat	8,94	8,44	11,54	0,38	1,71	8,63	2,77	10,39
Sulawesi Tenggara	4,62	5,65	5,57	0,36	0,54	3,98	1,43	7,56
Maluku	3,66	5,50	4,80	0,67	0,49	2,45	1,19	6,86
Maluku Utara	2,50	3,24	2,41	0,19	0,25	1,51	0,69	3,48
Papua	6,34	7,08	6,13	0,47	0,66	3,21	1,04	5,73
Papua Barat	3,96	6,34	5,76	1,17	0,34	3,62	0,71	6,30
INDONESIA	6,03	8,82	8,95	0,72	0,84	3,27	1,07	6,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.2.2 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2011

Provinsi	Perdesaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	7,30	7,35	7,73	0,64	1,03	4,42	1,81	6,28
Sumatera Utara	7,18	8,71	8,23	0,50	1,31	3,75	1,63	5,05
Sumatera Barat	9,78	9,76	9,71	0,76	1,34	5,37	2,23	6,23
Riau	6,44	8,10	7,28	0,63	1,11	4,01	1,59	4,52
Kepulauan Riau	10,94	10,96	9,68	1,11	1,92	5,30	3,04	5,87
Jambi	5,81	6,78	6,39	0,46	0,68	2,87	1,25	6,12
Sumatera Selatan	5,06	7,24	7,53	0,62	0,92	4,62	1,87	5,32
Bangka Belitung	6,04	9,61	9,07	0,73	0,65	5,09	1,35	5,81
Bengkulu	6,98	7,80	8,42	0,80	0,90	3,62	1,72	8,73
Lampung	6,64	10,61	10,56	0,61	0,92	4,86	2,01	8,01
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	6,93	7,98	9,21	1,27	1,07	4,06	1,76	7,51
Banten	8,37	9,44	10,74	0,88	1,45	5,56	1,80	10,78
Jawa Tengah	5,17	8,77	9,70	0,52	0,89	3,55	1,26	6,53
DI Yogyakarta	4,01	12,91	12,29	0,69	0,72	3,70	1,43	6,04
Jawa Timur	4,57	6,78	6,62	0,47	0,88	2,98	1,35	5,52
Bali	14,57	14,49	13,58	1,07	1,81	7,02	2,18	12,21
Nusa Tenggara Barat	10,36	10,49	11,55	1,13	1,22	3,44	1,16	8,76
Nusa Tenggara Timur	13,77	16,48	15,56	0,97	1,86	8,75	2,38	10,34
Kalimantan Barat	6,02	7,75	7,25	0,69	1,21	5,14	1,62	5,07
Kalimantan Tengah	6,26	7,83	9,33	0,76	0,83	4,42	1,19	4,91
Kalimantan Selatan	6,79	10,30	11,25	0,71	1,29	6,15	2,25	6,73
Kalimantan Timur	4,16	6,06	6,24	0,41	0,82	3,40	1,88	4,74
Sulawesi Utara	6,94	8,72	8,63	0,65	0,56	4,00	1,92	4,95
Gorontalo	22,04	17,38	11,90	2,23	1,35	6,69	2,67	7,46
Sulawesi Tengah	10,91	8,92	8,50	0,94	1,27	6,71	3,23	9,99
Sulawesi Selatan	5,07	4,85	4,94	0,44	1,00	4,31	1,43	5,92
Sulawesi Barat	6,53	5,13	5,77	0,64	1,70	9,05	2,00	10,07
Sulawesi Tenggara	6,37	5,51	5,30	0,74	0,63	4,47	2,08	6,25
Maluku	5,68	8,41	7,39	0,84	0,60	3,95	1,81	7,34
Maluku Utara	5,98	6,09	4,40	0,60	0,56	4,23	1,56	4,76
Papua	5,69	9,20	9,11	0,99	1,21	3,71	1,82	7,72
Papua Barat	5,77	8,19	6,21	0,35	0,61	2,63	1,34	7,70
INDONESIA	6,64	8,44	8,64	0,72	1,05	4,26	1,67	6,72

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.2.3 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2011

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan																
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	7,22	7,37	7,97	0,68	0,94	3,87	1,66	6,07									
Sumatera Utara	7,00	8,13	7,45	0,47	1,14	2,93	1,30	4,36									
Sumatera Barat	8,67	8,48	8,45	0,62	1,21	4,57	1,86	5,82									
Riau	7,48	8,90	8,74	0,67	0,89	3,86	1,43	4,29									
Kepulauan Riau	6,46	6,54	6,19	0,31	0,54	2,53	1,41	3,90									
Jambi	5,25	6,38	6,02	0,37	0,56	2,77	1,10	5,06									
Sumatera Selatan	5,65	8,15	8,78	0,87	0,87	4,75	1,64	5,88									
Bangka Belitung	7,00	10,40	10,21	1,09	0,73	5,75	1,42	7,39									
Bengkulu	6,61	8,04	8,71	0,75	0,90	3,80	1,75	7,73									
Lampung	5,85	9,71	9,48	0,57	0,91	4,73	1,71	7,67									
DKI Jakarta	5,98	10,55	10,02	0,46	0,64	4,13	1,04	6,44									
Jawa Barat	5,85	7,79	8,41	1,05	0,95	3,33	1,28	6,59									
Banten	8,17	11,13	11,60	1,12	1,09	4,22	1,42	9,17									
Jawa Tengah	5,03	9,00	9,70	0,52	0,92	3,41	1,13	6,52									
DI Yogyakarta	7,07	13,77	14,58	0,54	0,86	3,53	1,09	8,35									
Jawa Timur	4,90	7,47	7,38	0,50	0,81	2,58	1,18	5,14									
Bali	11,99	12,56	12,40	1,19	1,40	5,90	1,52	8,65									
Nusa Tenggara Barat	11,04	10,99	11,93	1,16	1,11	4,02	0,99	9,14									
Nusa Tenggara Timur	12,99	16,45	15,80	0,93	1,67	7,88	2,21	9,79									
Kalimantan Barat	5,80	7,35	6,90	0,65	1,03	4,69	1,44	5,16									
Kalimantan Tengah	6,63	8,42	9,40	0,75	0,88	4,50	1,29	4,85									
Kalimantan Selatan	5,76	10,10	10,99	0,76	1,14	5,23	1,84	6,72									
Kalimantan Timur	3,41	6,21	6,10	0,36	0,50	2,45	1,22	4,03									
Sulawesi Utara	6,17	7,48	7,58	0,67	0,47	3,10	1,67	4,91									
Gorontalo	18,52	14,71	10,45	1,72	1,43	5,95	2,25	6,65									
Sulawesi Tengah	10,24	9,08	8,37	1,01	1,40	6,37	2,91	9,76									
Sulawesi Selatan	5,61	6,12	6,51	0,50	1,14	4,45	1,37	5,44									
Sulawesi Barat	7,10	5,92	7,14	0,58	1,70	8,95	2,18	10,15									
Sulawesi Tenggara	5,87	5,55	5,38	0,63	0,60	4,33	1,89	6,63									
Maluku	4,91	7,30	6,41	0,77	0,56	3,38	1,58	7,15									
Maluku Utara	4,99	5,29	3,84	0,48	0,47	3,46	1,31	4,40									
Papua	5,86	8,64	8,32	0,85	1,06	3,58	1,61	7,19									
Papua Barat	5,21	7,62	6,07	0,60	0,53	2,94	1,15	7,27									
INDONESIA	6,32	8,64	8,80	0,72	0,94	3,75	1,36	6,35									

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.3 Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	8,49	9,11	8,93
Sumatera Utara	8,72	10,20	9,47
Sumatera Barat	7,75	12,15	10,41
Riau	8,48	9,31	8,99
Kepulauan Riau	5,98	10,42	6,74
Jambi	7,23	9,89	9,06
Sumatera Selatan	7,90	7,89	7,89
Bangka Belitung	12,46	8,22	10,33
Bengkulu	7,69	12,85	11,25
Lampung	7,72	10,57	9,82
DKI Jakarta	8,03	-	8,03
Jawa Barat	8,74	11,07	9,52
Banten	9,46	10,75	9,87
Jawa Tengah	8,40	8,63	8,52
DI Yogyakarta	9,42	9,58	9,47
Jawa Timur	7,90	9,05	8,49
Bali	11,62	21,69	15,48
Nusa Tenggara Barat	13,08	14,25	13,76
Nusa Tenggara Timur	10,57	19,00	17,15
Kalimantan Barat	8,01	10,61	9,81
Kalimantan Tengah	9,54	9,71	9,65
Kalimantan Selatan	6,51	9,40	8,17
Kalimantan Timur	5,83	8,36	6,78
Sulawesi Utara	9,29	12,05	10,79
Gorontalo	11,88	17,87	15,77
Sulawesi Tengah	12,32	17,23	15,96
Sulawesi Selatan	8,62	9,94	9,44
Sulawesi Barat	16,00	14,82	15,10
Sulawesi Tenggara	10,42	11,83	11,42
Maluku	8,01	10,50	9,56
Maluku Utara	5,45	10,01	8,72
Papua	9,33	10,55	10,23
Papua Barat	7,55	8,87	8,46
INDONESIA	8,57	10,52	9,52

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2011

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	59,91	32,51	4,52	0,57	2,47	100,00
Sumatera Utara	61,71	30,81	3,52	1,57	2,39	100,00
Sumatera Barat	62,26	31,03	2,44	1,13	3,13	100,00
Riau	72,43	20,30	2,12	1,56	3,59	100,00
Kepulauan Riau	72,53	22,05	2,46	0,18	2,78	100,00
Jambi	65,76	25,55	5,37	1,33	2,00	100,00
Sumatera Selatan	70,02	16,15	6,25	2,02	5,56	100,00
Bangka Belitung	66,87	26,50	3,03	1,09	2,51	100,00
Bengkulu	58,51	28,27	7,23	3,13	2,86	100,00
Lampung	63,39	30,75	2,97	1,13	1,76	100,00
DKI Jakarta	80,18	13,43	3,83	0,36	2,20	100,00
Jawa Barat	59,12	31,76	5,04	1,02	3,07	100,00
Banten	75,09	20,80	2,70	0,46	0,96	100,00
Jawa Tengah	64,06	29,24	3,60	0,99	2,12	100,00
DI Yogyakarta	68,41	25,12	2,58	0,84	3,06	100,00
Jawa Timur	66,84	24,41	3,47	1,13	4,15	100,00
Bali	72,08	20,85	3,38	0,54	3,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,62	35,73	5,23	0,72	1,70	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,61	28,17	4,55	0,00	2,66	100,00
Kalimantan Barat	68,85	21,76	5,68	1,65	2,06	100,00
Kalimantan Tengah	66,22	29,12	3,10	1,09	0,48	100,00
Kalimantan Selatan	68,28	25,88	1,76	0,94	3,13	100,00
Kalimantan Timur	59,14	35,42	2,20	0,76	2,49	100,00
Sulawesi Utara	58,14	28,86	5,87	3,25	3,88	100,00
Gorontalo	60,30	34,67	3,25	0,00	1,78	100,00
Sulawesi Tengah	59,29	31,19	6,39	0,00	3,13	100,00
Sulawesi Selatan	65,79	24,91	4,78	1,00	3,52	100,00
Sulawesi Barat	66,25	21,06	8,83	0,00	3,85	100,00
Sulawesi Tenggara	60,57	31,25	4,59	0,21	3,38	100,00
Maluku	70,47	19,20	4,64	0,00	5,69	100,00
Maluku Utara	59,56	31,49	5,29	0,00	3,66	100,00
Papua	57,04	31,05	7,04	1,26	3,60	100,00
Papua Barat	58,82	36,41	1,12	0,00	3,65	100,00
INDONESIA	65,71	26,49	4,04	0,95	2,81	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2011

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perdesaan
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,00	30,43	4,27	3,30	4,00	100,00
Sumatera Utara	64,43	25,16	4,12	1,69	4,60	100,00
Sumatera Barat	52,01	31,67	7,24	3,78	5,31	100,00
Riau	58,63	30,15	3,43	2,76	5,03	100,00
Kepulauan Riau	75,42	21,39	1,35	0,00	1,85	100,00
Jambi	60,09	29,88	3,81	2,24	3,97	100,00
Sumatera Selatan	60,90	31,21	2,67	2,21	3,01	100,00
Bangka Belitung	57,24	31,29	4,44	2,82	4,20	100,00
Bengkulu	58,38	31,41	4,79	1,68	3,74	100,00
Lampung	60,06	30,20	3,56	2,74	3,44	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	55,44	31,12	8,45	1,57	3,43	100,00
Banten	58,77	30,03	4,54	2,07	4,58	100,00
Jawa Tengah	61,92	27,06	5,02	2,54	3,46	100,00
DI Yogyakarta	76,90	11,09	0,32	0,54	11,15	100,00
Jawa Timur	59,56	28,23	4,74	2,40	5,06	100,00
Bali	63,51	25,33	6,68	0,92	3,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,20	32,74	5,94	1,94	3,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,00	41,43	6,68	0,89	3,01	100,00
Kalimantan Barat	64,14	27,28	4,53	0,74	3,31	100,00
Kalimantan Tengah	68,99	24,94	3,33	2,44	0,31	100,00
Kalimantan Selatan	61,84	29,87	2,75	3,20	2,34	100,00
Kalimantan Timur	62,73	28,72	5,74	1,10	1,71	100,00
Sulawesi Utara	49,46	40,94	5,29	1,28	3,03	100,00
Gorontalo	59,31	32,50	6,52	0,66	1,01	100,00
Sulawesi Tengah	54,53	35,39	5,48	1,94	2,66	100,00
Sulawesi Selatan	56,86	28,49	6,37	2,49	5,80	100,00
Sulawesi Barat	55,80	34,53	6,54	2,01	1,13	100,00
Sulawesi Tenggara	62,07	31,29	3,42	1,58	1,63	100,00
Maluku	47,53	41,45	7,58	0,47	2,97	100,00
Maluku Utara	49,28	37,02	8,86	1,29	3,55	100,00
Papua	56,39	32,13	9,30	1,42	0,76	100,00
Papua Barat	59,82	31,59	3,74	2,45	2,40	100,00
INDONESIA	58,61	30,18	5,43	2,03	3,74	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.4.3 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2011

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,52	31,00	4,34	2,56	3,58	100,00
Sumatera Utara	63,18	27,75	3,85	1,63	3,59	100,00
Sumatera Barat	55,03	31,48	5,82	3,00	4,67	100,00
Riau	63,79	26,47	2,94	2,31	4,49	100,00
Kepulauan Riau	73,29	21,87	2,17	0,13	2,54	100,00
Jambi	61,51	28,79	4,20	2,01	3,48	100,00
Sumatera Selatan	64,19	25,77	3,96	2,14	3,93	100,00
Bangka Belitung	63,03	28,42	3,59	1,78	3,18	100,00
Bengkulu	58,41	30,74	5,31	1,99	3,55	100,00
Lampung	60,75	30,31	3,44	2,41	3,09	100,00
DKI Jakarta	80,18	13,43	3,83	0,36	2,20	100,00
Jawa Barat	57,68	31,51	6,36	1,23	3,21	100,00
Banten	69,48	23,98	3,33	1,01	2,20	100,00
Jawa Tengah	62,91	28,06	4,37	1,82	2,84	100,00
DI Yogyakarta	71,09	20,67	1,87	0,75	5,62	100,00
Jawa Timur	62,84	26,51	4,17	1,83	4,65	100,00
Bali	67,47	23,26	5,15	0,75	3,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,37	33,95	5,65	1,45	2,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	50,26	39,63	6,39	0,76	2,96	100,00
Kalimantan Barat	65,33	25,88	4,82	0,97	2,99	100,00
Kalimantan Tengah	68,05	26,36	3,25	1,98	0,36	100,00
Kalimantan Selatan	64,02	28,52	2,42	2,43	2,61	100,00
Kalimantan Timur	60,80	32,32	3,83	0,92	2,13	100,00
Sulawesi Utara	52,89	36,17	5,52	2,06	3,37	100,00
Gorontalo	59,57	33,08	5,66	0,48	1,21	100,00
Sulawesi Tengah	55,48	34,55	5,66	1,55	2,75	100,00
Sulawesi Selatan	59,97	27,24	5,81	1,97	5,01	100,00
Sulawesi Barat	58,43	31,14	7,12	1,50	1,81	100,00
Sulawesi Tenggara	61,68	31,28	3,73	1,22	2,09	100,00
Maluku	54,86	34,34	6,64	0,32	3,84	100,00
Maluku Utara	51,09	36,05	8,23	1,06	3,57	100,00
Papua	56,54	31,87	8,75	1,38	1,45	100,00
Papua Barat	59,55	32,93	3,01	1,77	2,75	100,00
INDONESIA	61,89	28,47	4,79	1,53	3,31	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.5 Proporsi Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang dan Pernah Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	66,73	70,04	69,19
Sumatera Utara	64,20	58,82	61,34
Sumatera Barat	70,12	73,26	72,24
Riau	72,26	78,55	76,50
Kepulauan Riau	60,26	78,72	64,13
Jambi	78,96	82,97	81,99
Sumatera Selatan	75,29	81,78	79,82
Bangka Belitung	78,19	83,89	81,25
Bengkulu	79,21	84,57	83,27
Lampung	74,58	82,32	80,76
DKI Jakarta	71,59	-	71,59
Jawa Barat	82,89	86,97	84,55
Banten	80,70	84,92	82,35
Jawa Tengah	74,83	77,96	76,75
DI Yogyakarta	68,40	72,82	70,45
Jawa Timur	75,59	77,25	76,59
Bali	72,99	80,02	76,21
Nusa Tenggara Barat	79,05	72,60	75,06
Nusa Tenggara Timur	61,56	52,18	53,69
Kalimantan Barat	78,08	82,59	81,43
Kalimantan Tengah	84,80	84,61	84,67
Kalimantan Selatan	84,02	87,60	86,23
Kalimantan Timur	78,05	80,89	79,19
Sulawesi Utara	81,41	86,30	84,28
Gorontalo	77,09	83,10	81,37
Sulawesi Tengah	73,53	76,46	75,85
Sulawesi Selatan	68,51	66,86	67,38
Sulawesi Barat	63,07	63,33	63,28
Sulawesi Tenggara	66,99	69,88	69,22
Maluku	60,83	52,13	54,91
Maluku Utara	77,99	64,73	67,95
Papua	57,43	24,89	31,53
Papua Barat	62,99	42,58	48,05
INDONESIA	76,18	76,37	76,28

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.6.1 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2011

Provinsi	Perkotaan			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,27	50,26	16,47	
Sumatera Utara	35,80	47,87	16,33	
Sumatera Barat	29,88	53,95	16,17	
Riau	27,74	52,27	19,99	
Kepulauan Riau	39,74	45,77	14,49	
Jambi	21,04	61,96	16,99	
Sumatera Selatan	24,71	59,97	15,31	
Bangka Belitung	21,81	63,50	14,69	
Bengkulu	20,79	62,95	16,25	
Lampung	25,42	56,72	17,86	
DKI Jakarta	28,41	53,99	17,59	
Jawa Barat	17,11	64,47	18,42	
Banten	19,30	63,57	17,13	
Jawa Tengah	25,17	60,59	14,24	
DI Yogyakarta	31,60	56,83	11,57	
Jawa Timur	24,41	60,94	14,65	
Bali	27,01	54,38	18,61	
Nusa Tenggara Barat	20,95	54,33	24,72	
Nusa Tenggara Timur	38,44	46,75	14,81	
Kalimantan Barat	21,92	61,70	16,37	
Kalimantan Tengah	15,20	68,25	16,54	
Kalimantan Selatan	15,98	69,20	14,82	
Kalimantan Timur	21,95	59,22	18,83	
Sulawesi Utara	18,59	64,37	17,04	
Gorontalo	22,91	57,21	19,89	
Sulawesi Tengah	26,47	56,09	17,44	
Sulawesi Selatan	31,49	50,68	17,83	
Sulawesi Barat	36,93	49,42	13,65	
Sulawesi Tenggara	33,01	48,57	18,42	
Maluku	39,17	48,74	12,09	
Maluku Utara	22,01	59,49	18,51	
Papua	42,57	43,48	13,94	
Papua Barat	37,01	44,07	18,92	
INDONESIA	23,82	59,38	16,79	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.6.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2011

Provinsi	Perdesaan			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,96	53,72	16,31	
Sumatera Utara	41,18	45,02	13,79	
Sumatera Barat	26,74	55,18	18,08	
Riau	21,45	62,47	16,08	
Kepulauan Riau	21,28	66,79	11,92	
Jambi	17,03	70,34	12,63	
Sumatera Selatan	18,22	70,59	11,19	
Bangka Belitung	16,11	68,35	15,55	
Bengkulu	15,43	71,77	12,80	
Lampung	17,68	68,54	13,78	
DKI Jakarta	-	-	-	
Jawa Barat	13,03	69,62	17,35	
Banten	15,08	66,74	18,18	
Jawa Tengah	22,04	63,64	14,32	
DI Yogyakarta	27,18	57,65	15,18	
Jawa Timur	22,75	63,10	14,15	
Bali	19,98	68,51	11,52	
Nusa Tenggara Barat	27,40	53,08	19,52	
Nusa Tenggara Timur	47,82	42,15	10,03	
Kalimantan Barat	17,41	69,48	13,10	
Kalimantan Tengah	15,39	72,11	12,50	
Kalimantan Selatan	12,40	71,69	15,91	
Kalimantan Timur	19,11	67,79	13,10	
Sulawesi Utara	13,70	71,94	14,36	
Gorontalo	16,90	69,85	13,25	
Sulawesi Tengah	23,54	62,11	14,35	
Sulawesi Selatan	33,14	53,49	13,37	
Sulawesi Barat	36,67	50,43	12,89	
Sulawesi Tenggara	30,12	54,67	15,21	
Maluku	47,87	40,72	11,41	
Maluku Utara	35,27	51,68	13,05	
Papua	75,11	16,41	8,48	
Papua Barat	57,42	30,52	12,06	
INDONESIA	23,63	61,83	14,54	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.6.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2011

Provinsi	Perkotaan + Perdesaan			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,81	52,83	16,35	
Sumatera Utara	38,66	46,36	14,98	
Sumatera Barat	27,76	54,78	17,46	
Riau	23,50	59,14	17,35	
Kepulauan Riau	35,87	50,17	13,95	
Jambi	18,01	68,30	13,70	
Sumatera Selatan	20,18	67,39	12,43	
Bangka Belitung	18,75	66,10	15,15	
Bengkulu	16,73	69,63	13,64	
Lampung	19,24	66,15	14,60	
DKI Jakarta	28,41	53,99	17,59	
Jawa Barat	15,45	66,57	17,98	
Banten	17,65	64,81	17,54	
Jawa Tengah	23,25	62,46	14,29	
DI Yogyakarta	29,55	57,21	13,24	
Jawa Timur	23,41	62,24	14,35	
Bali	23,79	60,84	15,37	
Nusa Tenggara Barat	24,94	53,56	21,50	
Nusa Tenggara Timur	46,31	42,89	10,80	
Kalimantan Barat	18,57	67,49	13,94	
Kalimantan Tengah	15,33	70,93	13,73	
Kalimantan Selatan	13,77	70,74	15,49	
Kalimantan Timur	20,81	62,66	16,53	
Sulawesi Utara	15,72	68,80	15,47	
Gorontalo	18,63	66,21	15,16	
Sulawesi Tengah	24,15	60,85	15,00	
Sulawesi Selatan	32,62	52,61	14,77	
Sulawesi Barat	36,72	50,24	13,04	
Sulawesi Tenggara	30,78	53,27	15,95	
Maluku	45,09	43,28	11,63	
Maluku Utara	32,05	53,58	14,37	
Papua	68,47	21,94	9,59	
Papua Barat	51,95	34,15	13,90	
INDONESIA	23,72	60,75	15,54	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.7.1 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2011

Provinsi	Perkotaan										Jumlah
	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	Pil KB	Kon- dom/ Karet KB	Intravag/ Tissue/ Kondom Wanita	Tradi- sional		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Aceh	0,94	0,00	5,38	60,63	2,74	28,07	0,95	0,00	1,30	100,00	
Sumatera Utara	0,18	0,95	3,47	54,14	5,81	32,05	0,83	0,67	1,90	100,00	
Sumatera Barat	0,29	0,00	7,59	65,03	5,97	15,67	1,47	0,00	3,98	100,00	
Riau	0,00	0,00	4,85	63,13	4,26	24,57	0,68	0,12	2,38	100,00	
Kepulauan Riau	0,26	0,00	4,10	52,19	1,48	36,48	3,27	0,00	2,20	100,00	
Jambi	2,29	0,00	5,32	56,83	6,99	26,34	1,17	0,41	0,66	100,00	
Sumatera Selatan	0,37	0,09	1,49	72,43	3,80	19,50	1,11	0,00	1,20	100,00	
Bangka Belitung	0,89	0,00	1,79	57,10	3,38	34,26	0,75	0,32	1,50	100,00	
Bengkulu	0,00	0,00	4,90	69,82	6,46	16,17	1,88	0,00	0,77	100,00	
Lampung	0,09	0,00	3,41	71,23	3,67	21,08	0,53	0,00	0,00	100,00	
DKI Jakarta	0,72	0,00	6,75	64,05	2,62	23,13	1,23	0,00	1,49	100,00	
Jawa Barat	0,45	0,13	5,72	71,26	1,70	20,09	0,22	0,10	0,32	100,00	
Banten	0,17	0,10	2,32	73,94	1,05	21,49	0,19	0,30	0,45	100,00	
Jawa Tengah	0,86	0,09	5,15	77,00	3,00	11,78	1,02	0,20	0,89	100,00	
DI Yogyakarta	2,52	0,56	13,87	50,66	2,68	15,66	6,59	0,00	7,45	100,00	
Jawa Timur	0,67	0,22	4,88	68,89	3,03	20,70	0,73	0,04	0,83	100,00	
Bali	0,67	0,78	21,54	53,93	1,11	17,91	1,33	0,41	2,32	100,00	
Nusa Tenggara Barat	0,17	0,00	4,16	77,28	7,22	10,11	0,76	0,00	0,30	100,00	
Nusa Tenggara Timur	0,67	0,00	10,78	55,08	10,15	17,79	0,56	0,00	4,97	100,00	
Kalimantan Barat	2,15	0,00	3,38	61,50	1,44	29,76	0,85	0,00	0,92	100,00	
Kalimantan Tengah	0,10	0,00	0,40	60,68	1,59	35,57	0,80	0,00	0,85	100,00	
Kalimantan Selatan	0,00	0,00	1,79	55,82	1,47	39,25	0,79	0,00	0,86	100,00	
Kalimantan Timur	0,91	0,00	6,02	56,38	1,73	33,19	1,15	0,04	0,57	100,00	
Sulawesi Utara	0,63	0,00	4,93	63,64	9,96	19,75	0,40	0,00	0,70	100,00	
Gorontalo	0,00	0,00	9,41	54,40	6,87	26,88	0,00	0,92	1,52	100,00	
Sulawesi Tengah	1,21	0,00	3,12	55,32	6,84	30,18	0,00	0,00	3,34	100,00	
Sulawesi Selatan	0,30	0,15	3,13	60,38	2,19	31,06	0,52	0,53	1,73	100,00	
Sulawesi Barat	1,17	0,00	3,21	56,28	1,96	32,80	0,98	0,00	3,61	100,00	
Sulawesi Tenggara	1,32	0,00	2,23	41,75	6,54	38,98	0,00	0,73	8,45	100,00	
Maluku	0,00	0,00	2,24	74,32	5,37	16,42	0,00	0,00	1,65	100,00	
Maluku Utara	1,30	0,00	0,00	75,56	6,35	15,53	0,63	0,00	0,63	100,00	
Papua	0,39	0,00	1,27	65,06	3,92	27,37	0,23	0,00	1,77	100,00	
Papua Barat	0,00	0,00	3,82	52,51	2,87	37,89	0,00	1,24	1,67	100,00	
INDONESIA	0,57	0,15	5,17	67,91	2,77	21,51	0,75	0,14	1,03	100,00	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.7.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2011

Provinsi	Perdesaan										Jumlah
	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	Pil KB	Kon- dom/ Karet KB	Intravag/ Tissue/ Kondom Wanita	Tradi- sional		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,20	0,30	1,11	75,23	0,95	20,82	0,56	0,00	0,83	100,00	
Sumatera Utara	1,07	0,47	1,66	56,17	5,22	30,66	0,88	0,25	3,62	100,00	
Sumatera Barat	0,29	0,05	2,29	74,87	7,99	13,51	0,31	0,00	0,68	100,00	
Riau	0,00	0,00	0,28	70,53	2,20	25,90	0,69	0,00	0,39	100,00	
Kepulauan Riau	0,00	0,00	2,44	57,31	1,34	38,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
Jambi	0,32	0,20	1,34	68,20	5,43	24,08	0,08	0,12	0,23	100,00	
Sumatera Selatan	0,11	0,07	0,49	81,15	5,58	11,76	0,36	0,00	0,47	100,00	
Bangka Belitung	0,17	0,00	1,50	65,89	1,92	29,60	0,67	0,00	0,25	100,00	
Bengkulu	0,66	0,00	0,63	75,18	9,17	13,02	0,62	0,12	0,61	100,00	
Lampung	0,06	0,08	0,69	76,00	4,98	17,50	0,32	0,12	0,25	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	0,54	0,00	1,49	69,37	3,00	25,53	0,00	0,00	0,07	100,00	
Banten	0,00	0,43	1,81	79,74	2,73	14,92	0,00	0,00	0,37	100,00	
Jawa Tengah	0,57	0,30	2,48	80,41	6,69	8,92	0,37	0,04	0,21	100,00	
DI Yogyakarta	0,31	0,00	12,00	70,58	10,06	4,75	0,96	0,00	1,34	100,00	
Jawa Timur	0,43	0,04	2,46	73,47	3,87	19,12	0,22	0,00	0,39	100,00	
Bali	0,37	0,59	18,28	68,15	1,85	9,73	0,69	0,00	0,33	100,00	
Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	2,14	82,68	5,73	9,39	0,00	0,00	0,07	100,00	
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,92	3,97	72,41	11,58	8,71	0,00	0,00	2,01	100,00	
Kalimantan Barat	0,61	0,00	0,25	70,66	1,22	27,15	0,11	0,00	0,00	100,00	
Kalimantan Tengah	0,34	0,00	0,55	61,05	3,52	32,73	0,27	0,28	1,27	100,00	
Kalimantan Selatan	0,19	0,19	0,24	50,35	4,05	44,84	0,14	0,00	0,00	100,00	
Kalimantan Timur	0,04	0,00	0,81	54,50	1,44	41,92	0,90	0,00	0,39	100,00	
Sulawesi Utara	0,82	0,00	2,49	52,44	14,48	28,96	0,25	0,21	0,36	100,00	
Gorontalo	1,20	0,00	2,48	46,96	18,27	30,53	0,00	0,36	0,20	100,00	
Sulawesi Tengah	0,28	0,14	1,69	51,83	4,53	41,15	0,09	0,00	0,30	100,00	
Sulawesi Selatan	0,27	0,00	0,60	66,05	4,84	27,43	0,05	0,00	0,76	100,00	
Sulawesi Barat	0,41	0,00	1,28	49,06	4,85	43,83	0,00	0,00	0,57	100,00	
Sulawesi Tenggara	0,27	0,00	0,34	51,30	8,89	37,23	0,00	0,00	1,97	100,00	
Maluku	0,61	0,00	1,03	68,62	13,84	12,12	0,00	0,00	3,78	100,00	
Maluku Utara	0,00	0,00	0,47	74,78	12,10	11,56	0,10	0,00	0,99	100,00	
Papua	0,57	0,00	0,17	31,64	4,40	13,69	0,81	0,31	48,41	100,00	
Papua Barat	0,73	0,00	0,00	62,97	2,69	24,45	0,21	0,00	8,95	100,00	
INDONESIA	0,39	0,13	1,91	71,11	4,79	20,58	0,26	0,04	0,79	100,00	

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.7.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2011

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									
	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	Pil KB	Kon- dom/ Karet KB	Intravag/ Tissue/ Kondom Wanita	Tradi- sional	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,38	0,23	2,15	71,66	1,39	22,59	0,66	0,00	0,94	100,00
Sumatera Utara	0,64	0,70	2,54	55,19	5,50	31,33	0,86	0,45	2,79	100,00
Sumatera Barat	0,29	0,03	3,98	71,74	7,35	14,20	0,68	0,00	1,73	100,00
Riau	0,00	0,00	1,60	68,40	2,79	25,52	0,69	0,04	0,96	100,00
Kepulauan Riau	0,19	0,00	3,64	53,62	1,44	37,16	2,36	0,00	1,59	100,00
Jambi	0,75	0,15	2,22	65,68	5,78	24,58	0,32	0,19	0,33	100,00
Sumatera Selatan	0,18	0,08	0,76	78,82	5,11	13,83	0,56	0,00	0,67	100,00
Bangka Belitung	0,49	0,00	1,63	61,98	2,57	31,67	0,71	0,14	0,81	100,00
Bengkulu	0,52	0,00	1,56	74,00	8,57	13,71	0,89	0,09	0,65	100,00
Lampung	0,06	0,06	1,16	75,18	4,76	18,12	0,35	0,10	0,20	100,00
DKI Jakarta	0,72	0,00	6,75	64,05	2,62	23,13	1,23	0,00	1,49	100,00
Jawa Barat	0,49	0,08	3,91	70,45	2,25	22,41	0,13	0,06	0,21	100,00
Banten	0,10	0,23	2,11	76,26	1,72	18,86	0,11	0,18	0,42	100,00
Jawa Tengah	0,68	0,22	3,48	79,13	5,31	10,00	0,61	0,10	0,46	100,00
DI Yogyakarta	1,48	0,30	13,00	59,99	6,14	10,55	3,95	0,00	4,59	100,00
Jawa Timur	0,52	0,11	3,40	71,69	3,54	19,74	0,42	0,01	0,56	100,00
Bali	0,52	0,68	19,86	61,26	1,49	13,70	1,00	0,20	1,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,07	0,00	2,92	80,58	6,31	9,67	0,29	0,00	0,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,45	0,75	5,17	69,36	11,33	10,31	0,10	0,00	2,53	100,00
Kalimantan Barat	0,97	0,00	0,98	68,51	1,27	27,76	0,29	0,00	0,22	100,00
Kalimantan Tengah	0,27	0,00	0,51	60,94	2,95	33,56	0,42	0,20	1,15	100,00
Kalimantan Selatan	0,12	0,12	0,82	52,40	3,08	42,74	0,39	0,00	0,32	100,00
Kalimantan Timur	0,53	0,00	3,76	55,56	1,61	36,98	1,04	0,02	0,49	100,00
Sulawesi Utara	0,74	0,00	3,43	56,78	12,73	25,39	0,31	0,13	0,49	100,00
Gorontalo	0,90	0,00	4,20	48,81	15,43	29,62	0,00	0,50	0,53	100,00
Sulawesi Tengah	0,45	0,12	1,97	52,50	4,97	39,04	0,07	0,00	0,88	100,00
Sulawesi Selatan	0,28	0,05	1,37	64,34	4,04	28,52	0,19	0,16	1,05	100,00
Sulawesi Barat	0,55	0,00	1,64	50,43	4,30	41,74	0,19	0,00	1,14	100,00
Sulawesi Tenggara	0,49	0,00	0,73	49,30	8,40	37,59	0,00	0,15	3,33	100,00
Maluku	0,39	0,00	1,47	70,67	10,79	13,67	0,00	0,00	3,01	100,00
Maluku Utara	0,35	0,00	0,35	74,99	10,55	12,63	0,25	0,00	0,89	100,00
Papua	0,50	0,00	0,62	45,15	4,21	19,22	0,57	0,18	29,55	100,00
Papua Barat	0,48	0,00	1,32	59,35	2,75	29,10	0,14	0,43	6,43	100,00
INDONESIA	0,47	0,14	3,32	69,73	3,92	20,98	0,47	0,08	0,89	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.8.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2011

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Perkotaan
	<16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,27	3,02	15,63	64,10	14,99	100,00
Sumatera Utara	1,91	2,08	16,38	65,61	14,02	100,00
Sumatera Barat	1,08	2,37	13,37	61,52	21,68	100,00
Riau	2,17	1,79	13,70	65,76	16,57	100,00
Kepulauan Riau	1,17	0,99	9,77	64,65	23,42	100,00
Jambi	3,91	4,59	18,86	60,05	12,58	100,00
Sumatera Selatan	3,43	4,52	18,27	59,37	14,40	100,00
Bangka Belitung	4,32	4,93	20,80	60,05	9,90	100,00
Bengkulu	3,73	2,98	15,26	64,29	13,74	100,00
Lampung	1,99	1,93	16,95	64,37	14,77	100,00
DKI Jakarta	2,29	2,98	14,51	63,06	17,16	100,00
Jawa Barat	5,62	6,70	23,20	56,39	8,10	100,00
Banten	4,72	3,91	21,13	57,78	12,46	100,00
Jawa Tengah	2,25	4,10	18,23	62,26	13,17	100,00
DI Yogyakarta	2,10	1,48	13,20	65,47	17,76	100,00
Jawa Timur	4,53	5,61	21,16	58,48	10,22	100,00
Bali	2,44	1,77	14,47	67,53	13,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,76	7,10	23,57	55,95	9,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,20	3,75	21,21	59,90	11,93	100,00
Kalimantan Barat	6,63	4,28	20,76	56,99	11,34	100,00
Kalimantan Tengah	5,68	6,50	22,27	56,36	9,18	100,00
Kalimantan Selatan	7,06	8,05	26,41	51,43	7,05	100,00
Kalimantan Timur	3,43	4,78	19,92	59,46	12,41	100,00
Sulawesi Utara	3,70	5,15	25,59	52,64	12,92	100,00
Gorontalo	6,17	6,20	25,02	56,25	6,35	100,00
Sulawesi Tengah	5,71	6,28	26,12	52,65	9,24	100,00
Sulawesi Selatan	6,77	7,50	19,31	51,70	14,73	100,00
Sulawesi Barat	11,57	11,54	24,00	42,74	10,15	100,00
Sulawesi Tenggara	4,32	6,21	19,76	54,51	15,20	100,00
Maluku	3,24	6,37	13,26	66,04	11,09	100,00
Maluku Utara	4,41	5,92	24,04	53,37	12,25	100,00
Papua	6,52	5,10	15,86	57,05	15,47	100,00
Papua Barat	7,86	5,23	18,95	59,95	8,01	100,00
INDONESIA	4,06	4,86	19,76	59,35	11,97	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.8.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2011

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Perdesaan
	<16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,72	6,23	23,80	56,11	8,13	100,00
Sumatera Utara	2,24	4,12	19,05	63,19	11,41	100,00
Sumatera Barat	5,62	4,16	22,57	57,96	9,70	100,00
Riau	5,08	6,52	26,05	56,19	6,15	100,00
Kepulauan Riau	0,97	10,64	21,15	58,76	8,48	100,00
Jambi	9,82	11,04	30,91	43,05	5,17	100,00
Sumatera Selatan	8,57	7,52	29,47	48,79	5,65	100,00
Bangka Belitung	9,08	6,75	29,04	48,42	6,71	100,00
Bengkulu	8,72	9,95	28,06	47,70	5,56	100,00
Lampung	4,85	5,29	24,50	59,05	6,31	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13,55	12,14	33,79	37,71	2,81	100,00
Banten	10,77	11,46	34,56	40,61	2,59	100,00
Jawa Tengah	3,56	7,81	30,21	52,72	5,71	100,00
DI Yogyakarta	0,99	2,88	20,50	66,13	9,49	100,00
Jawa Timur	9,54	11,80	29,90	44,28	4,48	100,00
Bali	4,06	5,61	29,12	54,57	6,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,93	7,23	27,33	52,32	5,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,13	6,14	24,90	56,52	9,31	100,00
Kalimantan Barat	8,18	10,53	27,46	49,46	4,38	100,00
Kalimantan Tengah	10,21	11,60	34,01	40,14	4,04	100,00
Kalimantan Selatan	13,16	10,83	32,39	39,30	4,32	100,00
Kalimantan Timur	8,19	6,27	27,97	51,20	6,38	100,00
Sulawesi Utara	4,87	8,30	28,66	52,82	5,36	100,00
Gorontalo	11,97	12,50	28,86	42,68	3,99	100,00
Sulawesi Tengah	8,94	10,65	30,38	45,08	4,95	100,00
Sulawesi Selatan	10,12	10,38	28,19	44,60	6,72	100,00
Sulawesi Barat	16,47	11,78	28,18	38,68	4,89	100,00
Sulawesi Tenggara	9,42	11,61	28,90	44,78	5,29	100,00
Maluku	5,77	6,64	24,40	55,33	7,86	100,00
Maluku Utara	7,13	10,02	29,35	47,26	6,23	100,00
Papua	10,83	9,85	25,80	47,07	6,46	100,00
Papua Barat	7,91	7,44	25,95	52,93	5,77	100,00
INDONESIA	8,10	9,22	28,98	48,21	5,48	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

Tabel 6.8.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2011

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah
	<16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,84	5,41	21,70	58,16	9,89	100,00
Sumatera Utara	2,09	3,16	17,80	64,32	12,63	100,00
Sumatera Barat	4,15	3,58	19,59	59,11	13,57	100,00
Riau	4,13	4,98	22,03	59,31	9,55	100,00
Kepulauan Riau	1,13	3,01	12,15	63,42	20,29	100,00
Jambi	8,38	9,47	27,97	47,20	6,98	100,00
Sumatera Selatan	7,02	6,61	26,10	51,98	8,29	100,00
Bangka Belitung	6,88	5,91	25,23	53,80	8,19	100,00
Bengkulu	7,51	8,26	24,95	51,73	7,55	100,00
Lampung	4,27	4,61	22,97	60,13	8,02	100,00
DKI Jakarta	2,29	2,98	14,51	63,06	17,16	100,00
Jawa Barat	8,85	8,92	27,52	48,77	5,94	100,00
Banten	7,08	6,85	26,36	51,09	8,62	100,00
Jawa Tengah	3,06	6,38	25,58	56,40	8,59	100,00
DI Yogyakarta	1,59	2,13	16,59	65,78	13,91	100,00
Jawa Timur	7,55	9,34	26,42	49,93	6,76	100,00
Bali	3,18	3,53	21,17	61,60	10,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,33	7,18	25,89	53,71	6,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,14	5,76	24,30	57,06	9,74	100,00
Kalimantan Barat	7,78	8,93	25,75	51,38	6,16	100,00
Kalimantan Tengah	8,83	10,05	30,44	45,08	5,61	100,00
Kalimantan Selatan	10,81	9,77	30,10	43,96	5,37	100,00
Kalimantan Timur	5,34	5,38	23,15	56,14	9,99	100,00
Sulawesi Utara	4,39	6,99	27,39	52,75	8,49	100,00
Gorontalo	10,30	10,68	27,76	46,60	4,67	100,00
Sulawesi Tengah	8,26	9,74	29,49	46,66	5,85	100,00
Sulawesi Selatan	9,07	9,47	25,41	46,82	9,23	100,00
Sulawesi Barat	15,52	11,74	27,37	39,46	5,90	100,00
Sulawesi Tenggara	8,25	10,37	26,81	47,01	7,56	100,00
Maluku	4,96	6,55	20,84	58,75	8,89	100,00
Maluku Utara	6,47	9,03	28,07	48,75	7,69	100,00
Papua	9,95	8,88	23,77	49,10	8,30	100,00
Papua Barat	7,89	6,85	24,08	54,81	6,37	100,00
INDONESIA	6,32	7,29	24,91	53,13	8,35	100,00

Sumber : BPS RI - Susenas 2011

ESTIMASI
KESALAHAN
SAMPLING

ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING (*SAMPLING ERROR ESTIMATES*)

Estimasi sampel Susenas 2011 dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi dalam pengumpulan maupun pengolahan data, seperti kesalahan dalam menemukan dan mewawancara responden dalam rumah tangga terpilih, kesalahan petugas maupun responden dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner dan kesalahan dalam proses entri data.

Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* (galat baku) dari suatu angka estimasi, rata-rata, persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2011. Untuk mengukur presisi dari suatu angka tersebut digunakan *relative standard error* (kesalahan relatif), yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). *Standard error* dapat digunakan untuk menghitung selang kepercayaan yang dapat digunakan untuk melihat selang dari angka sebenarnya yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*.

Penghitungan *sampling error* pada variabel Susenas 2011 menggunakan *software* SPSS versi 13. Variabel yang dihitung *sampling error*-nya dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2011 ini antara lain meliputi angka buta huruf pemuda, angka partisipasi sekolah pemuda, pendidikan yang ditamatkan pemuda dan angkatan kerja pemuda.

Sampling error estimates dalam publikasi ini disajikan dalam 24 tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi yang dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan dan perdesaan), dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Tabel tersebut menyajikan nilai-nilai estimasi dari masing-masing indikator, *standard error* (galat baku), selang kepercayaan, dan *relative standard error*.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.1 Sampling Error Angka Buta Huruf Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan			
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	0,43	0,14	0,16	0,70	32,36	0,83	0,12	0,60	1,07	14,40	0,72	0,09	0,53	0,90	13,23	
Sumatera Utara	0,39	0,09	0,22	0,57	22,41	2,46	0,40	1,68	3,24	16,17	1,43	0,21	1,01	1,85	14,93	
Sumatera Barat	0,85	0,27	0,32	1,39	32,06	1,25	0,20	0,86	1,64	15,81	1,09	0,16	0,78	1,41	14,83	
Riau	0,42	0,15	0,12	0,72	36,05	0,85	0,14	0,57	1,13	16,87	0,68	0,11	0,47	0,89	15,73	
Kep. Riau	0,26	0,11	0,04	0,48	42,23	1,75	0,61	0,55	2,94	34,83	0,52	0,14	0,24	0,79	26,80	
Jambi	0,13	0,09	0,00	0,31	73,34	1,33	0,18	0,99	1,68	13,16	0,95	0,13	0,70	1,21	13,81	
Sumatera Selatan	0,80	0,18	0,44	1,16	22,83	0,85	0,12	0,61	1,09	14,42	0,83	0,10	0,63	1,03	12,28	
Kep. Bangka Belitung	0,86	0,27	0,34	1,38	30,89	1,60	0,34	0,94	2,26	21,06	1,23	0,22	0,80	1,66	17,67	
Bengkulu	0,07	0,05	0,00	0,16	72,54	1,35	0,24	0,88	1,82	17,67	0,95	0,18	0,61	1,30	18,52	
Lampung	0,45	0,17	0,12	0,79	37,85	0,76	0,13	0,51	1,01	16,76	0,68	0,11	0,47	0,89	15,45	
DKI Jakarta	0,27	0,07	0,12	0,41	27,98	-	-	-	-	-	0,27	0,07	0,12	0,41	27,98	
Jawa Barat	0,39	0,08	0,23	0,54	20,54	0,49	0,09	0,30	0,67	19,08	0,42	0,06	0,30	0,54	14,58	
Banten	0,22	0,09	0,05	0,39	39,33	0,76	0,20	0,37	1,15	26,04	0,39	0,09	0,22	0,56	22,17	
Jawa Tengah	0,43	0,07	0,29	0,57	16,55	0,86	0,10	0,67	1,06	11,46	0,66	0,06	0,54	0,79	9,46	
DI Yogyakarta	0,26	0,19	0,00	0,63	74,89	0,52	0,30	-0,07	1,10	57,61	0,34	0,16	0,02	0,65	47,42	
Jawa Timur	0,42	0,07	0,28	0,56	16,96	1,21	0,12	0,96	1,45	10,32	0,83	0,08	0,68	0,98	9,12	
Bali	1,08	0,23	0,64	1,53	21,00	4,33	0,85	2,66	6,00	19,69	2,33	0,39	1,56	3,09	16,79	
Nusa Tenggara Barat	0,90	0,24	0,44	1,37	26,38	3,23	0,39	2,47	4,00	12,11	2,25	0,25	1,75	2,74	11,29	
Nusa Tenggara Timur	1,45	0,33	0,79	2,10	22,98	5,78	0,55	4,70	6,87	9,59	4,83	0,46	3,93	5,72	9,46	
Kalimantan Barat	1,98	0,42	1,16	2,80	21,08	3,12	0,32	2,49	3,74	10,19	2,77	0,25	2,27	3,26	9,15	
Kalimantan Tengah	0,91	0,29	0,35	1,48	31,65	0,66	0,18	0,31	1,02	27,14	0,75	0,15	0,45	1,05	20,64	
Kalimantan Selatan	0,29	0,11	0,07	0,51	38,94	1,45	0,26	0,95	1,95	17,68	0,96	0,16	0,65	1,26	16,46	
Kalimantan Timur	0,36	0,14	0,09	0,63	37,96	1,09	0,22	0,67	1,52	19,96	0,64	0,12	0,40	0,87	18,60	
Sulawesi Utara	0,34	0,11	0,12	0,56	33,27	0,87	0,20	0,47	1,26	23,09	0,62	0,12	0,39	0,86	19,45	
Gorontalo	1,34	0,56	0,23	2,44	42,14	4,42	0,67	3,10	5,73	15,22	3,34	0,50	2,35	4,32	15,10	
Sulawesi Tengah	0,96	0,29	0,39	1,54	30,44	3,18	0,35	2,49	3,86	11,06	2,61	0,29	2,05	3,17	10,97	
Sulawesi Selatan	1,90	0,22	1,47	2,33	11,61	4,22	0,33	3,58	4,87	7,77	3,34	0,24	2,87	3,80	7,11	
Sulawesi Barat	2,29	0,40	1,50	3,08	17,52	5,30	0,78	3,77	6,83	14,75	4,58	0,61	3,38	5,79	13,41	
Sulawesi Tenggara	1,04	0,27	0,52	1,56	25,63	2,08	0,24	1,60	2,55	11,66	1,78	0,19	1,40	2,16	10,94	
Maluku	0,42	0,16	0,10	0,74	39,26	2,43	0,45	1,55	3,30	18,48	1,66	0,30	1,08	2,24	17,87	
Maluku Utara	0,40	0,19	0,02	0,78	48,51	2,14	0,33	1,49	2,78	15,51	1,65	0,25	1,15	2,14	15,38	
Papua	2,61	0,52	1,59	3,62	19,92	41,33	1,59	38,22	44,44	31,03	3,84	1,48	28,13	33,93	4,76	
Papua Barat	1,36	0,62	0,15	2,57	45,23	6,75	0,84	5,11	8,39	12,41	5,07	0,67	3,76	6,39	13,24	
INDONESIA	0,50	0,03	0,45	0,56	5,87	2,42	0,07	2,29	2,56	2,86	1,44	0,04	1,37	1,52	2,67	

Tabel 7.2 Sampling Error Angka Buta Huruf Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan			
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	0,71	0,12	0,49	0,94	16,19	0,72	0,14	0,45	0,99	19,31	0,72	0,09	0,53	0,90	13,23	
Sumatera Utara	1,24	0,19	0,86	1,62	15,49	1,63	0,27	1,09	2,16	16,86	1,43	0,21	1,01	1,85	14,93	
Sumatera Barat	1,21	0,21	0,81	1,62	16,90	0,97	0,20	0,57	1,36	20,74	1,09	0,16	0,78	1,41	14,83	
Riau	0,69	0,13	0,43	0,96	19,44	0,67	0,14	0,39	0,94	21,08	0,68	0,11	0,47	0,89	15,73	
Kep. Riau	0,58	0,21	0,17	1,00	36,53	0,46	0,17	0,13	0,79	36,95	0,52	0,14	0,24	0,79	26,80	
Jambi	0,96	0,17	0,62	1,30	18,06	0,95	0,18	0,59	1,31	19,23	0,95	0,13	0,70	1,21	13,81	
Sumatera Selatan	0,86	0,17	0,52	1,19	19,96	0,81	0,15	0,51	1,11	18,88	0,83	0,10	0,63	1,03	12,28	
Kep. Bangka Belitung	1,06	0,25	0,57	1,56	23,75	1,41	0,35	0,73	2,10	24,80	1,23	0,22	0,80	1,66	17,67	
Bengkulu	1,15	0,27	0,62	1,67	23,45	0,75	0,20	0,36	1,15	26,90	0,95	0,18	0,61	1,30	18,52	
Lampung	0,66	0,15	0,37	0,96	22,84	0,70	0,16	0,38	1,02	23,35	0,68	0,11	0,47	0,89	15,45	
DKI Jakarta	0,22	0,09	0,05	0,40	40,61	0,31	0,11	0,09	0,52	35,49	0,27	0,07	0,12	0,41	27,98	
Jawa Barat	0,41	0,08	0,25	0,56	20,02	0,43	0,08	0,29	0,58	17,40	0,42	0,06	0,30	0,54	14,58	
Banten	0,41	0,13	0,15	0,67	31,97	0,37	0,12	0,14	0,59	31,86	0,39	0,09	0,22	0,56	22,17	
Jawa Tengah	0,72	0,10	0,53	0,91	13,36	0,61	0,08	0,45	0,76	13,27	0,66	0,06	0,54	0,79	9,46	
DI Yogyakarta	0,39	0,22	0,00	0,83	56,35	0,29	0,16	0,00	0,61	56,46	0,34	0,16	0,02	0,65	47,42	
Jawa Timur	0,76	0,10	0,57	0,94	12,59	0,90	0,11	0,69	1,10	11,88	0,83	0,08	0,68	0,98	9,12	
Bali	2,06	0,41	1,26	2,85	19,68	2,59	0,48	1,64	3,54	18,70	2,33	0,39	1,56	3,09	16,79	
Nusa Tenggara Barat	2,01	0,32	1,40	2,63	15,68	2,43	0,34	1,76	3,11	14,07	2,25	0,25	1,75	2,74	11,29	
Nusa Tenggara Timur	5,64	0,61	4,45	6,83	10,79	4,08	0,41	3,27	4,89	10,17	4,83	0,46	3,93	5,72	9,46	
Kalimantan Barat	2,47	0,34	1,81	3,13	13,62	3,07	0,30	2,48	3,65	9,79	2,77	0,25	2,27	3,26	9,15	
Kalimantan Tengah	0,64	0,21	0,22	1,06	33,28	0,85	0,22	0,42	1,29	26,13	0,75	0,15	0,45	1,05	20,64	
Kalimantan Selatan	0,87	0,21	0,46	1,28	23,83	1,04	0,19	0,67	1,41	18,14	0,96	0,16	0,65	1,26	16,46	
Kalimantan Timur	0,53	0,14	0,26	0,79	25,93	0,75	0,17	0,42	1,08	22,14	0,64	0,12	0,40	0,87	18,60	
Sulawesi Utara	0,76	0,18	0,41	1,10	23,12	0,48	0,15	0,19	0,77	30,59	0,62	0,12	0,39	0,86	19,45	
Gorontalo	3,68	0,58	2,55	4,81	15,64	3,00	0,64	1,75	4,26	21,36	3,34	0,50	2,35	4,32	15,10	
Sulawesi Tengah	2,16	0,33	1,52	2,80	15,11	3,06	0,42	2,24	3,88	13,65	2,61	0,29	2,05	3,17	10,97	
Sulawesi Selatan	3,96	0,32	3,34	4,58	8,02	2,76	0,28	2,22	3,31	10,05	3,34	0,24	2,87	3,80	7,11	
Sulawesi Barat	3,66	0,54	2,60	4,73	14,83	5,46	0,87	3,76	7,17	15,95	4,58	0,61	3,38	5,79	13,41	
Sulawesi Tenggara	1,66	0,26	1,16	2,16	15,36	1,89	0,27	1,35	2,43	14,49	1,78	0,19	1,40	2,16	10,94	
Maluku	1,71	0,34	1,05	2,37	19,59	1,61	0,33	0,96	2,26	20,59	1,66	0,30	1,08	2,24	17,87	
Maluku Utara	1,52	0,29	0,94	2,09	19,45	1,78	0,31	1,16	2,40	17,68	1,65	0,25	1,15	2,14	15,38	
Papua	24,08	1,31	21,52	26,64	5,42	38,01	1,79	34,50	41,51	4,71	31,03	1,48	28,13	33,93	4,76	
Papua Barat	3,24	0,64	1,98	4,50	19,90	6,88	0,93	5,07	8,69	13,45	5,07	0,67	3,76	6,39	13,24	
INDONESIA	1,33	0,04	1,25	1,41	3,14	1,55	0,05	1,46	1,64	3,10	1,44	0,04	1,37	1,52	2,67	

Tabel 7.3 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Estimasi	Standard	Perkotaan				Perdesaan				Pertotaan+Perdesaan			
			Selang Kepercayaan		Batas Atas		Selang Kepercayaan		Batas Atas		Selang Kepercayaan		Batas Atas	
			Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard	Error	Estimasi	Standard	Estimasi	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	33,13	1,20	30,77	35,50	3,64	24,44	0,63	23,20	25,67	2,57	26,93	0,62	25,72	28,14
Sumatera Utara	25,38	0,82	23,77	26,98	3,23	17,73	0,48	16,79	18,68	2,72	21,53	0,59	20,38	22,69
Sumatera Barat	33,64	1,69	30,33	36,95	5,02	19,26	0,85	17,60	20,93	4,41	24,95	1,18	22,63	27,27
Riau	24,93	1,43	22,13	27,72	5,72	14,38	0,56	13,28	15,48	3,91	18,56	0,89	16,82	20,30
Kep. Riau	10,57	1,44	7,75	13,40	13,63	13,54	2,15	9,33	17,75	15,86	11,08	1,31	8,51	13,65
Jambi	24,97	1,89	21,27	28,67	7,55	14,11	0,72	12,69	15,52	5,13	17,52	0,93	15,70	19,35
Sumatera Selatan	24,66	1,07	22,57	26,75	4,32	11,63	0,53	10,59	12,66	4,54	16,33	0,85	14,66	17,99
Kep. Bangka Belitung	15,15	0,98	13,22	17,08	6,49	9,60	0,84	7,96	11,24	8,73	12,36	0,69	11,01	13,71
Bengkulu	29,98	1,66	26,72	33,24	5,55	15,11	0,64	13,86	16,36	4,21	19,73	0,93	17,90	21,55
Lampung	23,08	1,15	20,82	25,34	4,99	12,97	0,54	11,91	14,03	4,16	15,63	0,60	14,44	16,81
DKI Jakarta	16,57	0,66	15,28	17,87	4,00	-	-	-	-	-	16,57	0,66	15,28	17,87
Jawa Barat	17,36	0,54	16,29	18,42	3,13	9,27	0,42	8,44	10,10	4,56	14,65	0,40	13,87	15,43
Banten	18,91	0,80	17,34	20,48	4,24	10,51	0,80	8,55	12,07	7,57	16,26	0,59	15,10	17,42
Jawa Tengah	20,40	0,62	19,18	21,62	3,05	11,76	0,37	11,03	12,48	3,14	15,79	0,38	15,04	16,54
DI Yogyakarta	41,50	1,76	38,05	44,95	4,24	17,82	1,54	14,80	20,85	8,66	34,09	1,74	30,68	37,50
Jawa Timur	21,31	0,56	20,21	22,41	2,62	12,78	0,41	11,97	13,58	3,20	16,91	0,41	16,12	17,71
Bali	23,14	1,14	20,91	25,37	4,92	13,53	0,97	11,62	15,44	7,19	19,45	0,83	17,83	21,08
Nusa Tenggara Barat	25,03	1,29	22,51	27,55	5,14	16,12	0,69	14,77	17,47	4,27	19,90	0,71	18,50	21,30
Nusa Tenggara Timur	37,32	1,65	34,08	40,56	4,43	15,11	0,58	13,96	16,25	3,85	20,00	0,85	18,34	21,65
Kalimantan Barat	24,15	1,38	21,43	26,86	5,73	10,64	0,66	9,35	11,93	6,20	14,82	0,82	13,22	16,43
Kalimantan Tengah	23,22	1,58	20,12	26,32	6,81	10,55	0,66	9,26	11,84	6,24	14,90	0,84	13,25	16,55
Kalimantan Selatan	20,94	1,21	18,57	23,32	5,79	12,71	0,66	11,42	13,99	5,16	16,21	0,67	14,89	17,52
Kalimantan Timur	20,35	1,20	18,00	22,71	5,90	14,18	0,87	12,49	15,88	6,11	18,04	0,88	16,31	19,77
Sulawesi Utara	23,70	1,18	21,39	26,02	4,98	14,75	0,70	13,36	16,13	4,78	18,85	0,73	17,41	20,29
Gorontalo	30,29	1,76	26,85	33,74	5,80	17,01	1,04	14,97	19,05	6,12	21,67	1,16	19,40	23,94
Sulawesi Tengah	31,09	1,80	27,56	34,62	5,80	13,84	0,55	12,76	14,93	3,99	18,29	0,94	16,44	20,13
Sulawesi Selatan	29,59	0,88	27,86	31,32	2,98	15,64	0,48	14,71	16,58	3,05	20,96	0,76	19,48	22,45
Sulawesi Barat	29,47	2,18	25,20	33,75	7,40	15,15	1,12	12,96	17,34	7,38	18,55	1,08	16,44	20,67
Sulawesi Tenggara	36,98	1,48	34,09	39,88	4,00	16,58	0,78	15,05	18,11	4,71	22,45	1,09	20,31	24,60
Maluku	36,04	2,19	31,75	40,32	6,07	15,91	1,02	13,91	17,92	6,43	23,58	1,55	20,54	26,62
Maluku Utara	31,66	1,92	27,90	35,43	6,07	14,61	0,82	13,00	16,23	5,63	19,43	1,10	17,27	21,59
Papua	26,73	1,67	23,45	30,02	6,26	10,48	0,58	9,34	11,61	5,52	14,80	0,73	13,36	16,24
Papua Barat	22,95	2,11	18,81	27,09	9,21	18,77	1,25	16,32	21,23	6,68	20,07	1,11	17,90	22,25
INDONESIA	21,40	0,25	20,91	21,89	1,17	13,37	0,13	13,11	13,62	0,98	17,48	0,15	17,19	17,78

Tabel 7.4 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Batas Atas	Batas Bawah
Aceh	26,74	0,81	25,16	28,33	3,03	27,11	0,79	25,56	28,66	2,91	26,93	0,62	25,72	28,14	2,29			
Sumatera Utara	21,40	0,78	19,87	22,93	3,65	21,67	0,60	20,50	22,84	2,75	21,53	0,59	20,38	22,69	2,74			
Sumatera Barat	22,83	1,24	20,40	25,26	5,43	27,18	1,44	24,35	30,00	5,31	24,95	1,18	22,63	27,27	4,75			
Riau	18,71	1,09	16,57	20,85	5,83	18,41	0,90	16,65	20,17	4,88	18,56	0,89	16,82	20,30	4,78			
Kep. Riau	12,44	1,39	9,71	15,17	11,18	9,93	1,58	6,83	13,02	15,93	11,08	1,31	8,51	13,65	11,84			
Jambi	18,32	1,11	16,15	20,49	6,05	16,74	0,99	14,80	18,69	5,93	17,52	0,93	15,70	19,35	5,32			
Sumatera Selatan	16,97	1,05	14,92	19,02	6,16	15,65	0,87	13,94	17,35	5,57	16,33	0,85	14,66	17,99	5,21			
Kep. Bangka Belitung	12,45	0,96	10,58	14,33	7,70	12,27	0,94	10,42	14,11	7,69	12,36	0,69	11,01	13,71	5,57			
Bengkulu	19,95	1,06	17,88	22,03	5,31	19,49	1,11	17,31	21,68	5,72	19,73	0,93	17,90	21,55	4,72			
Lampung	15,23	0,66	13,94	16,51	4,31	16,05	0,82	14,45	17,66	5,10	15,63	0,60	14,44	16,81	3,86			
DKI Jakarta	17,82	0,95	15,95	19,69	5,35	15,38	0,72	13,98	16,78	4,66	16,57	0,66	15,28	17,87	4,00			
Jawa Barat	16,02	0,52	15,00	17,04	3,24	13,26	0,44	12,40	14,11	3,29	14,65	0,40	13,87	15,43	2,71			
Banten	17,56	0,89	15,81	19,30	5,06	14,99	0,62	13,78	16,20	4,12	16,26	0,59	15,10	17,42	3,63			
Jawa Tengah	17,35	0,50	16,36	18,34	2,90	14,31	0,43	13,47	15,14	2,98	15,79	0,38	15,04	16,54	2,42			
DI Yogyakarta	34,70	2,15	30,48	38,92	6,21	33,52	1,85	29,89	37,16	5,52	34,09	1,74	30,68	37,50	5,10			
Jawa Timur	18,33	0,50	17,35	19,31	2,73	15,55	0,48	14,61	16,49	3,07	16,91	0,41	16,12	17,71	2,40			
Bali	21,34	1,13	19,13	23,56	5,30	17,62	1,02	15,62	19,62	5,78	19,45	0,83	17,83	21,08	4,26			
Nusa Tenggara Barat	22,37	0,91	20,58	24,15	4,08	17,88	0,97	15,97	19,78	5,43	19,90	0,71	18,50	21,30	3,59			
Nusa Tenggara Timur	20,32	0,98	18,39	22,25	4,84	19,70	0,94	17,86	21,54	4,77	20,00	0,85	18,34	21,65	4,23			
Kalimantan Barat	14,79	0,96	12,91	16,67	6,48	14,86	0,91	13,08	16,64	6,11	14,82	0,82	13,22	16,43	5,53			
Kalimantan Tengah	15,55	0,94	13,71	17,39	6,04	14,25	1,01	12,28	16,23	7,06	14,90	0,84	13,25	16,55	5,64			
Kalimantan Selatan	16,39	0,78	14,85	17,92	4,78	16,03	0,86	14,34	17,71	5,36	16,21	0,67	14,89	17,52	4,13			
Kalimantan Timur	19,35	1,11	17,18	21,53	5,74	16,66	1,02	14,66	18,66	6,11	18,04	0,88	16,31	19,77	4,89			
Sulawesi Utara	18,02	0,97	16,12	19,92	5,38	19,73	0,91	17,96	21,50	4,59	18,85	0,73	17,41	20,29	3,90			
Gorontalo	20,16	1,56	17,11	23,22	7,73	23,14	1,29	20,61	25,68	5,59	21,67	1,16	19,40	23,94	5,35			
Sulawesi Tengah	18,93	1,20	16,57	21,28	6,35	17,63	0,95	15,77	19,49	5,38	18,29	0,94	16,44	20,13	5,16			
Sulawesi Selatan	20,68	0,87	18,99	22,38	4,19	21,22	0,94	19,36	23,07	4,45	20,96	0,76	19,48	22,45	3,61			
Sulawesi Barat	18,54	1,35	15,89	21,20	7,31	18,56	1,13	16,34	20,78	6,10	18,55	1,08	16,44	20,67	5,82			
Sulawesi Tenggara	23,00	1,31	20,43	25,56	5,70	21,93	1,08	19,81	24,06	4,94	22,45	1,09	20,31	24,60	4,88			
Maluku	22,99	1,60	19,84	26,13	6,98	24,17	1,78	20,68	27,67	7,38	23,58	1,55	20,54	26,62	6,58			
Maluku Utara	20,49	1,27	18,01	22,97	6,19	18,32	1,23	15,92	20,73	6,70	19,43	1,10	17,27	21,59	5,66			
Papua	17,18	0,89	15,42	18,93	5,21	12,41	0,83	10,79	14,03	6,66	14,80	0,73	13,36	16,24	4,95			
Papua Barat	22,04	1,98	18,15	25,93	9,00	18,14	1,16	15,86	20,42	6,41	20,07	1,11	17,90	22,25	5,53			
INDONESIA	18,37	0,19	18,00	18,73	1,01	16,61	0,17	16,28	16,94	1,01	17,48	0,15	17,19	17,78	0,86			

Tabel 7.5 Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan					
	Selang Kepercayaan			Batas Atas			Selang Kepercayaan			Batas Atas			Selang Kepercayaan			Batas Atas		
	Estimasi	Standard	Error	Estimasi	Standard	Error	Estimasi	Standard	Error	Estimasi	Standard	Error	Estimasi	Standard	Error	Estimasi	Standard	Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	11,44	0,12	11,22	11,67	1,01	9,91	0,07	9,78	10,04	0,67	10,35	0,07	10,22	10,49	0,67	10,49	0,67	10,49
Sumatera Utara	10,70	0,08	10,54	10,85	0,74	9,19	0,08	9,03	9,34	0,84	9,94	0,09	9,77	10,11	0,86	9,94	0,86	9,94
Sumatera Barat	10,90	0,14	10,62	11,18	1,29	8,90	0,09	8,72	9,09	1,04	9,69	0,13	9,44	9,94	1,32	9,93	1,32	9,93
Riau	11,10	0,11	10,89	11,32	1,00	8,74	0,09	8,57	8,91	0,99	9,68	0,13	9,43	9,93	1,32	9,93	1,32	9,93
Kep. Riau	11,03	0,10	10,83	11,23	0,92	8,16	0,29	7,60	8,72	3,50	10,54	0,16	10,23	10,85	1,49	10,85	1,49	10,85
Jambi	10,87	0,15	10,57	11,16	1,37	8,72	0,07	8,58	8,87	0,85	9,40	0,12	9,16	9,64	1,30	9,64	1,30	9,64
Sumatera Selatan	10,67	0,10	10,47	10,86	0,94	8,20	0,09	8,03	8,36	1,04	9,09	0,13	8,82	9,35	1,48	9,35	1,48	9,35
Kep. Bangka Belitung	10,00	0,16	9,69	10,30	1,56	7,45	0,14	7,18	7,73	1,87	8,72	0,14	8,45	8,99	1,56	8,99	1,56	8,99
Bengkulu	11,31	0,09	11,13	11,49	0,81	8,87	0,07	8,74	9,01	0,79	9,63	0,12	9,40	9,87	1,25	9,87	1,25	9,87
Lampung	10,84	0,13	10,59	11,09	1,19	8,81	0,06	8,68	8,93	0,72	9,34	0,09	9,16	9,52	0,98	9,52	0,98	9,52
DKI Jakarta	11,22	0,08	11,06	11,37	0,69	-	-	-	-	-	11,22	0,08	11,06	11,37	0,69	11,37	0,69	11,37
Jawa Barat	9,90	0,08	9,73	10,06	0,86	7,85	0,07	7,70	7,99	0,95	9,21	0,07	9,07	9,35	0,78	9,35	0,78	9,35
Banten	10,42	0,12	10,19	10,66	1,16	7,86	0,12	7,62	8,09	1,52	9,61	0,11	9,39	9,84	1,18	9,84	1,18	9,84
Jawa Tengah	10,16	0,09	9,99	10,33	0,84	8,68	0,06	8,57	8,79	0,65	9,37	0,06	9,26	9,48	0,62	9,48	0,62	9,48
DI Yogyakarta	12,08	0,12	11,85	12,32	1,00	10,22	0,19	9,84	10,60	1,89	11,50	0,14	11,23	11,77	1,20	11,77	1,20	11,77
Jawa Timur	10,48	0,06	10,37	10,59	0,53	8,58	0,08	8,42	8,74	0,95	9,50	0,07	9,37	9,63	0,72	9,63	0,72	9,63
Bali	11,14	0,11	10,93	11,35	0,96	8,97	0,18	8,61	9,33	2,03	10,31	0,14	10,03	10,58	1,35	10,58	1,35	10,58
Nusa Tenggara Barat	9,95	0,11	9,73	10,17	1,13	8,61	0,10	8,41	8,80	1,15	9,18	0,08	9,02	9,34	0,89	9,34	0,89	9,34
Nusa Tenggara Timur	10,63	0,14	10,35	10,91	1,34	7,44	0,09	7,26	7,62	1,24	8,14	0,11	7,92	8,37	1,41	8,37	1,41	8,37
Kalimantan Barat	10,09	0,10	9,90	10,28	0,96	7,39	0,07	7,26	7,53	0,93	8,23	0,11	8,02	8,44	1,31	8,44	1,31	8,44
Kalimantan Tengah	10,32	0,15	10,03	10,61	1,44	8,08	0,08	7,92	8,24	0,99	8,85	0,11	8,64	9,06	1,20	9,06	1,20	9,06
Kalimantan Selatan	10,00	0,12	9,77	10,22	1,17	8,05	0,08	7,89	8,22	1,05	8,88	0,09	8,69	9,06	1,07	9,06	1,07	9,06
Kalimantan Timur	11,04	0,10	10,85	11,22	0,86	8,89	0,11	8,68	9,09	1,20	10,23	0,11	10,02	10,44	1,05	10,44	1,05	10,44
Sulawesi Utara	10,96	0,13	10,71	11,21	1,15	8,94	0,11	8,72	9,17	1,27	9,87	0,13	9,62	10,11	1,27	10,11	1,27	10,11
Gorontalo	10,16	0,19	9,79	10,52	1,82	7,33	0,11	7,11	7,56	1,56	8,32	0,17	7,99	8,65	2,01	8,65	2,01	8,65
Sulawesi Tengah	10,90	0,13	10,64	11,15	1,19	8,22	0,10	8,03	8,42	1,21	8,91	0,13	8,66	9,17	1,45	9,17	1,45	9,17
Sulawesi Selatan	10,65	0,08	10,51	10,80	0,71	8,22	0,07	8,09	8,36	0,84	9,15	0,12	8,91	9,39	1,32	9,39	1,32	9,39
Sulawesi Barat	9,99	0,16	9,67	10,30	1,62	7,39	0,14	7,12	7,66	1,85	8,01	0,14	7,73	8,28	1,73	8,28	1,73	8,28
Sulawesi Tenggara	11,40	0,11	11,18	11,62	0,99	8,73	0,08	8,56	8,89	0,96	9,49	0,12	9,26	9,73	1,28	9,73	1,28	9,73
Maluku	11,42	0,13	11,18	11,67	1,10	8,96	0,10	8,76	9,17	1,15	9,90	0,15	9,61	10,19	1,49	10,19	1,49	10,19
Maluku Utara	11,41	0,13	11,16	11,66	1,12	8,59	0,11	8,38	8,81	1,28	9,39	0,16	9,08	9,70	1,70	9,70	1,70	9,70
Papua	10,93	0,13	10,67	11,19	1,21	4,94	0,15	4,65	5,23	2,97	6,53	0,19	6,17	6,90	2,86	6,90	2,86	6,90
Papua Barat	10,84	0,13	10,58	11,10	1,23	8,99	0,15	8,70	9,28	1,62	9,56	0,12	9,33	9,80	1,26	9,80	1,26	9,80
INDONESIA	10,50	0,03	10,44	10,55	0,28	8,40	0,02	8,35	8,44	0,26	9,47	0,02	9,43	9,52	0,25	9,52	0,25	9,52

Tabel 7.6 Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	10,21	0,07	10,07	10,36	0,72	10,48	0,08	10,33	10,64	0,77	10,35	0,07	10,22	10,49	0,67			
Sumatera Utara	9,84	0,09	9,67	10,02	0,93	10,03	0,09	9,85	10,21	0,91	9,94	0,09	9,77	10,11	0,86			
Sumatera Barat	9,22	0,14	8,93	9,50	1,57	10,19	0,13	9,95	10,44	1,24	9,69	0,13	9,44	9,94	1,32			
Riau	9,56	0,13	9,31	9,81	1,33	9,79	0,14	9,52	10,06	1,41	9,68	0,13	9,43	9,93	1,32			
Kep. Riau	10,31	0,18	9,95	10,67	1,77	10,73	0,17	10,39	11,07	1,61	10,54	0,16	10,23	10,85	1,49			
Jambi	9,39	0,12	9,15	9,63	1,29	9,40	0,14	9,14	9,67	1,44	9,40	0,12	9,16	9,64	1,30			
Sumatera Selatan	9,02	0,14	8,75	9,30	1,55	9,15	0,14	8,88	9,43	1,53	9,09	0,13	8,82	9,35	1,48			
Kep. Bangka Belitung	8,58	0,16	8,27	8,89	1,82	8,88	0,14	8,60	9,16	1,61	8,72	0,14	8,45	8,99	1,56			
Bengkulu	9,37	0,12	9,12	9,61	1,33	9,91	0,14	9,64	10,18	1,40	9,63	0,12	9,40	9,87	1,25			
Lampung	9,19	0,09	9,01	9,37	1,01	9,50	0,10	9,30	9,71	1,08	9,34	0,09	9,16	9,52	0,98			
DKI Jakarta	11,37	0,08	11,21	11,53	0,71	11,07	0,09	10,88	11,25	0,84	11,22	0,08	11,06	11,37	0,69			
Jawa Barat	9,29	0,08	9,15	9,44	0,81	9,13	0,08	8,98	9,28	0,83	9,21	0,07	9,07	9,35	0,78			
Banten	9,79	0,12	9,55	10,03	1,25	9,45	0,13	9,20	9,69	1,33	9,61	0,11	9,39	9,84	1,18			
Jawa Tengah	9,31	0,06	9,18	9,44	0,69	9,43	0,06	9,31	9,54	0,63	9,37	0,06	9,26	9,48	0,62			
DI Yogyakarta	11,44	0,16	11,12	11,76	1,42	11,56	0,14	11,28	11,84	1,22	11,50	0,14	11,23	11,77	1,20			
Jawa Timur	9,54	0,07	9,40	9,68	0,74	9,46	0,08	9,31	9,61	0,80	9,50	0,07	9,37	9,63	0,72			
Bali	10,48	0,15	10,19	10,76	1,41	10,14	0,15	9,84	10,45	1,52	10,31	0,14	10,03	10,58	1,35			
Nusa Tenggara Barat	9,35	0,09	9,17	9,54	1,00	9,03	0,10	8,83	9,23	1,13	9,18	0,08	9,02	9,34	0,89			
Nusa Tenggara Timur	7,89	0,13	7,63	8,15	1,71	8,38	0,12	8,15	8,60	1,38	8,14	0,11	7,92	8,37	1,41			
Kalimantan Barat	8,18	0,11	7,96	8,39	1,35	8,28	0,12	8,04	8,52	1,47	8,23	0,11	8,02	8,44	1,31			
Kalimantan Tengah	8,75	0,12	8,52	8,98	1,34	8,95	0,11	8,73	9,17	1,26	8,85	0,11	8,64	9,06	1,20			
Kalimantan Selatan	8,83	0,10	8,62	9,03	1,19	8,93	0,10	8,72	9,13	1,16	8,88	0,09	8,69	9,06	1,07			
Kalimantan Timur	10,24	0,12	10,01	10,47	1,16	10,22	0,12	9,99	10,46	1,17	10,23	0,11	10,02	10,44	1,05			
Sulawesi Utara	9,53	0,14	9,25	9,81	1,49	10,23	0,12	9,99	10,47	1,19	9,87	0,13	9,62	10,11	1,27			
Gorontalo	7,81	0,20	7,42	8,20	2,53	8,82	0,17	8,49	9,16	1,93	8,32	0,17	7,99	8,65	2,01			
Sulawesi Tengah	8,72	0,13	8,47	8,98	1,51	9,10	0,14	8,83	9,38	1,57	8,91	0,13	8,66	9,17	1,45			
Sulawesi Selatan	8,89	0,14	8,63	9,16	1,52	9,39	0,12	9,15	9,63	1,29	9,15	0,12	8,91	9,39	1,32			
Sulawesi Barat	7,99	0,15	7,69	8,29	1,89	8,02	0,17	7,70	8,35	2,06	8,01	0,14	7,73	8,28	1,73			
Sulawesi Tenggara	9,35	0,13	9,09	9,61	1,41	9,63	0,13	9,38	9,89	1,34	9,49	0,12	9,26	9,73	1,28			
Maluku	9,69	0,16	9,37	10,01	1,67	10,11	0,15	9,81	10,41	1,51	9,90	0,15	9,61	10,19	1,49			
Maluku Utara	9,47	0,16	9,16	9,79	1,69	9,30	0,18	8,96	9,65	1,89	9,39	0,16	9,08	9,70	1,70			
Papua	7,29	0,17	6,96	7,62	2,29	5,77	0,22	5,34	6,21	3,85	6,53	0,19	6,17	6,90	2,86			
Papua Barat	9,70	0,13	9,44	9,96	1,37	9,43	0,14	9,16	9,70	1,46	9,56	0,12	9,33	9,80	1,26			
INDONESIA	9,46	0,03	9,41	9,51	0,27	9,49	0,03	9,44	9,54	0,27	9,47	0,02	9,43	9,52	0,25			

Tabel 7.7 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan							
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Batas Atas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Aceh	19,24	0,91	17,45	21,03	4,75	19,24	0,81	17,65	20,83	4,21	19,24	0,63	18,00	20,48	3,30					
Sumatera Utara	15,86	0,83	14,23	17,49	5,23	18,55	0,66	17,25	19,85	3,58	17,21	0,54	16,16	18,26	3,12					
Sumatera Barat	18,50	1,29	15,97	21,04	6,99	22,40	1,02	20,40	24,40	4,55	20,86	0,87	19,16	22,56	4,15					
Riau	18,36	1,26	15,90	20,82	6,84	18,48	0,80	16,91	20,06	4,35	18,43	0,70	17,07	19,80	3,77					
Kep. Riau	13,23	0,84	11,58	14,88	6,38	24,23	3,83	16,73	31,73	15,79	15,11	1,04	13,07	17,16	6,90					
Jambi	12,44	1,10	10,29	14,59	8,81	18,09	0,84	16,44	19,73	4,64	16,31	0,74	14,86	17,76	4,54					
Sumatera Selatan	22,99	1,54	19,97	26,02	6,70	18,15	0,73	16,72	19,58	4,01	19,90	0,83	18,27	21,52	4,16					
Kep. Bangka Belitung	26,30	1,31	23,73	28,87	4,98	19,39	1,40	16,64	22,15	7,24	22,83	1,00	20,87	24,80	4,39					
Bengkulu	21,19	1,24	18,76	23,62	5,86	22,87	0,97	20,97	24,77	4,24	22,35	0,78	20,81	23,89	3,51					
Lampung	17,85	1,22	15,46	20,25	6,85	23,91	0,80	22,35	25,47	3,33	22,32	0,75	20,86	23,78	3,34					
DKI Jakarta	22,22	0,87	20,52	23,92	3,91	-	-	-	-	-	22,22	0,87	20,52	23,92	3,91					
Jawa Barat	18,31	0,74	16,86	19,77	4,05	21,87	0,71	20,48	23,27	3,26	19,50	0,54	18,44	20,57	2,78					
Banten	25,88	0,84	24,24	27,53	3,24	26,20	1,48	23,30	29,10	5,65	25,98	0,74	24,53	27,43	2,85					
Jawa Tengah	20,28	0,60	19,10	21,47	2,98	20,04	0,75	18,56	21,52	3,76	20,15	0,49	19,19	21,12	2,44					
DI Yogyakarta	28,30	1,34	25,67	30,93	4,73	22,86	1,98	18,98	26,74	8,65	26,60	1,11	24,41	28,78	4,19					
Jawa Timur	16,91	0,55	15,83	17,99	3,25	17,40	0,46	16,51	18,30	2,62	17,16	0,36	16,46	17,86	2,08					
Bali	24,46	1,07	22,35	26,56	4,39	32,33	1,55	29,29	35,37	4,80	27,48	0,96	25,59	29,37	3,50					
Nusa Tenggara Barat	27,13	1,37	24,43	29,82	5,06	25,26	1,13	23,04	27,48	4,48	26,05	0,87	24,34	27,76	3,35					
Nusa Tenggara Timur	27,76	1,27	25,26	30,26	4,59	30,56	0,92	28,77	32,36	3,00	29,94	0,77	28,44	31,45	2,57					
Kalimantan Barat	17,46	1,16	15,19	19,73	6,63	18,38	0,77	16,87	19,88	4,17	18,09	0,64	16,85	19,34	3,51					
Kalimantan Tengah	18,78	1,32	16,19	21,37	7,03	19,15	1,21	16,77	21,53	6,34	19,02	0,92	17,22	20,82	4,83					
Kalimantan Selatan	23,61	1,23	21,19	26,03	5,22	24,38	1,24	21,95	26,82	5,09	24,05	0,89	22,31	25,80	3,70					
Kalimantan Timur	13,20	0,76	11,72	14,69	5,75	14,56	1,17	12,26	16,85	8,05	13,71	0,65	12,45	14,98	4,71					
Sulawesi Utara	13,97	1,43	10,01	11,72	1,90	13,03	1,07	10,54	11,12	0,00	11,03	0,92	10,62	13,43	5,22					
Gorontalo	23,16	1,65	19,92	26,41	7,14	34,98	1,85	31,36	38,61	5,29	30,84	1,44	28,02	33,66	4,67					
Sulawesi Tengah	23,03	1,93	19,23	26,82	8,40	28,11	1,60	24,96	31,25	5,71	26,80	1,30	24,24	29,36	4,87					
Sulawesi Selatan	19,69	0,94	17,85	21,54	4,78	17,90	0,67	16,59	19,20	3,72	18,58	0,56	17,49	19,67	3,00					
Sulawesi Barat	30,23	2,17	25,98	34,48	7,17	25,71	1,35	23,06	28,36	5,26	26,79	1,16	24,51	29,06	4,34					
Sulawesi Tenggara	18,70	1,21	16,32	21,07	6,48	19,32	0,96	17,44	21,21	4,98	19,14	0,77	17,63	20,65	4,02					
Maluku	16,35	1,46	13,49	19,22	8,93	19,75	1,12	17,55	21,95	5,68	18,46	0,91	16,68	20,23	4,92					
Maluku Utara	10,41	1,24	7,97	12,85	11,96	15,38	0,99	13,44	17,32	6,43	13,97	0,82	12,37	15,58	5,86					
Papua	16,73	1,18	14,42	19,04	7,03	21,69	0,82	20,09	23,30	3,76	20,37	0,71	18,98	21,76	3,48					
Papua Barat	14,96	1,77	11,50	18,43	11,80	19,43	1,44	16,60	22,25	7,42	18,04	1,17	15,75	20,33	6,48					
INDONESIA	19,66	0,26	19,15	20,17	1,32	20,77	0,20	20,38	21,16	0,95	20,20	0,16	19,88	20,52	0,81					

Tabel 7.8 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	16,42	0,75	14,95	17,89	4,57	21,93	0,75	20,46	23,40	3,41	19,24	0,63	18,00	20,48	3,30			
Sumatera Utara	16,52	0,58	15,38	17,66	3,51	17,91	0,66	16,61	19,22	3,71	17,21	0,54	16,16	18,26	3,12			
Sumatera Barat	19,75	0,97	17,86	21,65	4,90	22,02	0,99	20,07	23,97	4,52	20,86	0,87	19,16	22,56	4,15			
Riau	18,05	0,83	16,42	19,68	4,60	18,81	0,83	17,19	20,44	4,40	18,43	0,70	17,07	19,80	3,77			
Kep. Riau	13,78	1,56	10,72	16,84	11,33	16,24	1,31	13,68	18,80	8,04	15,11	1,04	13,07	17,16	6,90			
Jambi	14,90	0,81	13,31	16,49	5,45	17,60	0,93	15,87	19,51	5,24	16,31	0,74	14,86	17,76	4,54			
Sumatera Selatan	19,21	0,94	17,36	21,06	4,91	20,63	0,89	18,89	22,37	4,30	19,90	0,83	18,27	21,52	4,16			
Kep. Bangka Belitung	22,31	1,25	19,87	24,75	5,58	23,40	1,23	20,98	25,82	5,28	22,83	1,00	20,87	24,80	4,39			
Bengkulu	21,45	1,01	19,48	23,43	4,70	23,28	0,90	21,52	25,05	3,87	22,35	0,78	20,81	23,89	3,51			
Lampung	20,20	0,78	18,68	21,72	3,84	24,59	0,96	22,69	26,48	3,92	22,32	0,75	20,86	23,78	3,34			
DKI Jakarta	20,46	1,00	18,50	22,43	4,89	23,90	1,16	21,62	26,19	4,87	22,22	0,87	20,52	23,92	3,91			
Jawa Barat	18,60	0,66	17,30	19,89	3,56	20,43	0,61	19,24	21,62	2,98	19,50	0,54	18,44	20,57	2,78			
Banten	24,85	0,99	22,92	26,79	3,97	27,09	0,94	25,25	28,93	3,46	25,98	0,74	24,53	27,43	2,85			
Jawa Tengah	18,33	0,55	17,25	19,42	3,02	21,88	0,58	20,73	23,02	2,67	20,15	0,49	19,19	21,12	2,44			
DI Yogyakarta	26,04	1,22	23,66	28,43	4,67	27,11	1,49	24,20	30,03	5,49	26,60	1,11	24,41	28,78	4,19			
Jawa Timur	16,23	0,47	15,30	17,16	2,92	18,06	0,44	17,20	18,92	2,42	17,16	0,36	16,46	17,86	2,08			
Bali	27,75	1,27	25,27	30,23	4,56	27,22	1,10	25,06	29,37	4,04	27,48	0,96	25,59	29,37	3,50			
Nusa Tenggara Barat	24,52	1,06	22,44	26,60	4,33	27,30	1,02	25,30	29,31	3,74	26,05	0,87	24,34	27,76	3,35			
Nusa Tenggara Timur	27,49	0,94	25,66	29,33	3,41	32,20	0,86	30,52	33,88	2,67	29,94	0,77	28,44	31,45	2,57			
Kalimantan Barat	15,42	0,75	13,95	16,88	4,85	20,78	0,84	19,12	22,44	4,07	18,09	0,64	16,85	19,34	3,51			
Kalimantan Tengah	18,18	1,12	15,98	20,39	6,19	19,86	1,03	17,84	21,88	5,19	19,02	0,92	17,22	20,82	4,83			
Kalimantan Selatan	21,88	0,89	20,15	23,62	4,05	26,14	1,16	23,87	28,41	4,43	24,05	0,89	22,31	25,80	3,70			
Kalimantan Timur	12,68	0,80	11,11	14,24	6,31	14,80	0,75	13,33	16,26	5,05	13,71	0,65	12,45	14,98	4,71			
Sulawesi Utara	18,15	1,10	16,00	20,31	6,05	17,08	1,03	15,05	19,10	6,04	17,63	0,92	15,82	19,43	5,22			
Gorontalo	29,86	1,73	26,47	33,25	5,79	31,79	1,66	28,53	35,06	5,24	30,84	1,44	28,02	33,66	4,67			
Sulawesi Tengah	25,28	1,43	22,48	28,08	5,65	28,34	1,46	25,48	31,21	5,15	26,80	1,30	24,24	29,36	4,87			
Sulawesi Selatan	17,69	0,61	16,50	18,88	3,44	19,40	0,74	17,95	20,85	3,81	18,58	0,56	17,49	19,67	3,00			
Sulawesi Barat	24,28	1,41	21,52	27,05	5,81	29,18	1,48	26,28	32,08	5,06	26,79	1,16	24,51	29,06	4,34			
Sulawesi Tenggara	16,45	0,84	14,81	18,09	5,03	21,72	0,97	19,81	23,62	4,48	19,14	0,77	17,63	20,65	4,02			
Maluku	15,88	1,02	13,87	17,88	6,43	21,04	1,31	18,47	23,62	6,24	18,46	0,91	16,68	20,23	4,92			
Maluku Utara	11,67	0,93	9,85	13,49	7,96	16,38	1,13	14,16	18,59	6,90	13,97	0,82	12,37	15,58	5,86			
Papua	18,54	0,79	16,99	20,09	4,27	22,22	0,84	20,56	23,87	3,80	20,37	0,71	18,98	21,76	3,48			
Papua Barat	15,25	1,23	12,84	17,66	8,06	20,79	1,48	17,88	23,69	7,12	18,04	1,17	15,75	20,33	6,48			
INDONESIA	18,93	0,20	18,54	19,31	1,04	21,45	0,19	21,07	21,83	0,90	20,20	0,16	19,88	20,52	0,81			

Tabel 7.9 Sampling Error Angka Kesakitan Femuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Pertotaan+Perdesaan						
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Batas Bawah	Batas Atas	(5)	(6)	(7)	(8)	Batas Bawah	Batas Atas	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	8,49	0,55	7,41	9,58	6,53	9,11	0,47	8,18	10,04	5,20	8,93	0,37	8,20	9,66	4,17				
Sumatera Utara	8,72	0,56	7,62	9,83	6,46	10,20	0,46	9,30	11,09	4,48	9,47	0,35	8,77	10,16	3,75				
Sumatera Barat	7,75	0,72	6,34	9,17	9,32	12,15	0,63	10,91	13,38	5,20	10,41	0,54	9,35	11,47	5,20				
Riau	8,48	0,76	7,00	9,97	8,92	9,31	0,50	8,33	10,30	5,39	8,99	0,43	8,15	9,82	4,77				
Kep. Riau	5,98	0,81	4,39	7,57	13,56	10,42	1,76	6,96	13,87	16,92	6,74	0,78	5,21	8,26	11,54				
Jambi	7,23	0,89	5,48	8,98	12,37	9,89	0,65	8,62	11,17	6,55	9,06	0,55	7,97	10,14	6,11				
Sumatera Selatan	7,90	0,58	6,77	9,04	7,32	7,89	0,47	6,96	8,82	6,00	7,89	0,37	7,17	8,62	4,66				
Kep. Bangka Belitung	12,46	0,97	10,55	14,36	7,80	8,22	0,68	6,88	9,56	8,33	10,33	0,62	9,10	11,55	6,04				
Bengkulu	7,69	0,94	5,84	9,53	12,25	12,85	0,77	11,34	14,36	6,00	11,25	0,66	9,95	12,55	5,89				
Lampung	7,72	0,91	5,93	9,51	11,81	10,57	0,46	9,67	11,46	4,33	9,82	0,43	8,97	10,67	4,41				
DKI Jakarta	8,03	0,43	7,18	8,88	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jawa Barat	8,74	0,40	7,95	9,54	4,62	11,07	0,48	10,13	12,01	4,32	9,52	0,31	8,91	10,13	3,27				
Banten	9,46	0,54	8,41	10,52	5,68	10,75	0,91	8,98	12,53	8,42	9,87	0,46	8,96	10,78	4,71				
Jawa Tengah	8,40	0,37	7,67	9,13	4,42	8,63	0,38	7,88	9,37	4,42	8,52	0,27	7,99	9,04	3,14				
DI Yogyakarta	9,42	0,81	7,84	11,00	8,56	9,58	1,57	6,50	12,65	16,40	9,47	0,74	8,02	10,92	7,82				
Jawa Timur	7,90	0,33	7,26	8,55	4,15	9,05	0,34	8,38	9,71	3,74	8,49	0,24	8,02	8,96	2,83				
Bali	11,62	0,66	10,31	12,92	5,72	21,69	1,54	18,67	24,71	7,11	15,48	0,84	13,83	17,13	5,44				
Nusa Tenggara Barat	13,08	1,08	10,97	15,20	8,26	14,25	0,86	12,56	15,94	6,05	13,76	0,68	12,43	15,08	4,92				
Nusa Tenggara Timur	10,57	0,85	8,90	12,25	8,06	19,00	0,70	17,64	20,37	3,67	17,15	0,61	15,95	18,34	3,55				
Kalimantan Barat	8,01	0,84	6,36	9,66	10,49	10,61	0,60	9,43	11,79	5,69	9,81	0,50	8,83	10,78	5,09				
Kalimantan Tengah	9,54	0,78	8,02	11,06	8,14	9,71	0,84	8,06	11,35	8,63	9,65	0,61	8,45	10,85	6,34				
Kalimantan Selatan	6,51	0,61	5,32	7,70	9,32	9,40	0,68	8,08	10,73	7,19	8,17	0,50	7,20	9,14	6,06				
Kalimantan Timur	5,83	0,47	4,90	6,76	8,14	8,36	0,72	6,95	9,76	6,78	6,78	0,41	5,98	7,58	6,03				
Sulawesi Utara	9,29	0,81	7,70	10,89	8,76	12,05	0,72	10,63	13,47	6,01	10,79	0,57	9,67	11,91	5,31				
Gorontalo	11,88	1,17	9,58	14,19	9,88	17,87	1,25	15,41	20,33	7,02	15,77	0,92	13,96	17,58	5,86				
Sulawesi Tengah	12,32	1,15	10,07	14,58	9,34	17,23	1,18	14,91	19,55	6,87	15,96	0,95	14,10	17,82	5,94				
Sulawesi Selatan	8,62	0,73	7,20	10,05	8,44	9,94	0,47	9,02	10,86	4,73	9,44	0,40	8,66	10,21	4,21				
Sulawesi Barat	16,00	1,97	12,14	19,87	12,31	14,82	1,01	12,85	16,79	6,79	15,10	0,90	13,34	16,86	5,95				
Sulawesi Tenggara	10,42	0,96	8,54	12,31	9,24	11,83	0,79	10,27	13,38	6,70	11,42	0,64	10,18	12,67	5,56				
Maluku	8,01	0,93	6,20	9,83	11,55	10,50	0,91	8,73	12,28	8,64	9,56	0,67	8,25	10,86	6,97				
Maluku Utara	5,45	0,78	3,93	6,97	14,23	10,01	0,79	8,47	11,55	7,86	8,72	0,63	7,48	9,95	7,23				
Papua	9,33	0,80	7,77	10,89	8,53	10,55	0,52	9,53	11,57	4,92	10,23	0,44	9,36	11,09	4,31				
Papua Barat	7,55	1,30	5,00	10,11	17,24	8,87	0,83	7,23	10,50	9,42	8,46	0,71	7,07	9,85	8,38				
INDONESIA	8,57	0,14	8,30	8,85	1,66	10,52	0,13	10,27	10,77	1,21	9,52	0,10	9,33	9,71	1,01				

Tabel 7.10 Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan			
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	7,96	0,45	7,07	8,85	5,70	9,86	0,47	8,93	10,79	4,80	8,93	0,37	8,20	9,66	4,17	
Sumatera Utara	9,51	0,43	8,67	10,34	4,50	9,42	0,45	8,54	10,31	4,78	9,47	0,35	8,77	10,16	3,75	
Sumatera Barat	10,28	0,68	8,95	11,61	6,58	10,54	0,65	9,27	11,81	6,14	10,41	0,54	9,35	11,47	5,20	
Riau	8,99	0,61	7,80	10,17	6,75	8,98	0,49	8,03	9,94	5,40	8,99	0,43	8,15	9,82	4,77	
Kep. Riau	5,91	0,96	4,02	7,79	16,28	7,44	1,02	5,45	9,43	13,66	6,74	0,78	5,21	8,26	11,54	
Jambi	8,64	0,65	7,37	9,91	7,52	9,46	0,68	8,14	10,79	7,15	9,06	0,55	7,97	10,14	6,11	
Sumatera Selatan	7,90	0,51	6,90	8,90	6,44	7,89	0,40	7,09	8,68	5,13	7,89	0,37	7,17	8,62	4,66	
Kep. Bangka Belitung	11,32	0,90	9,55	13,09	7,99	9,26	0,75	7,78	10,74	8,15	10,33	0,62	9,10	11,55	6,04	
Bengkulu	11,60	0,76	10,12	13,08	6,52	10,88	0,78	9,35	12,41	7,18	11,25	0,66	9,95	12,55	5,89	
Lampung	8,90	0,48	7,95	9,84	5,42	10,80	0,61	9,62	11,99	5,61	9,82	0,43	8,97	10,67	4,41	
DKI Jakarta	7,43	0,58	6,29	8,56	7,82	8,62	0,58	7,47	9,76	6,77	8,03	0,43	7,18	8,88	5,40	
Jawa Barat	9,68	0,41	8,87	10,49	4,25	9,36	0,38	8,61	10,11	4,07	9,52	0,31	8,91	10,13	3,27	
Banten	9,65	0,66	8,35	10,95	6,87	10,08	0,59	8,92	11,24	5,88	9,87	0,46	8,96	10,78	4,71	
Jawa Tengah	7,53	0,30	6,95	8,12	3,94	9,45	0,37	8,72	10,18	3,93	8,52	0,27	7,99	9,04	3,14	
DI Yogyakarta	9,58	0,93	7,76	11,41	9,71	9,36	0,94	7,52	11,19	10,00	9,47	0,74	8,02	10,92	7,82	
Jawa Timur	8,52	0,33	7,87	9,16	3,86	8,47	0,30	7,88	9,06	3,55	8,49	0,24	8,02	8,96	2,83	
Bali	16,28	1,13	14,06	18,50	6,95	14,71	0,94	12,86	16,55	6,41	15,48	0,84	13,83	17,13	5,44	
Nusa Tenggara Barat	13,75	0,84	12,11	15,40	6,09	13,76	0,86	12,07	15,45	6,26	13,76	0,68	12,43	15,08	4,92	
Nusa Tenggara Timur	16,38	0,73	14,95	17,81	4,45	17,85	0,73	16,42	19,29	4,11	17,15	0,61	15,95	18,34	3,55	
Kalimantan Barat	8,47	0,58	7,33	9,61	6,86	11,15	0,62	9,93	12,36	5,56	9,81	0,50	8,83	10,78	5,09	
Kalimantan Tengah	9,74	0,87	8,04	11,44	8,90	9,55	0,65	8,29	10,82	6,75	9,65	0,61	8,45	10,85	6,34	
Kalimantan Selatan	7,70	0,60	6,52	8,87	7,80	8,63	0,59	7,48	9,78	6,80	8,17	0,50	7,20	9,14	6,06	
Kalimantan Timur	5,94	0,50	4,96	6,92	8,41	7,66	0,58	6,52	8,80	7,59	6,78	0,41	5,98	7,58	6,03	
Sulawesi Utara	11,46	0,78	9,93	12,98	6,81	10,08	0,69	8,73	11,43	6,83	10,79	0,57	9,67	11,91	5,31	
Gorontalo	16,25	1,25	13,80	18,69	7,68	15,31	1,06	13,24	17,38	6,90	15,77	0,92	13,96	17,58	5,86	
Sulawesi Tengah	15,98	1,15	13,72	18,24	7,22	15,95	1,02	13,94	17,95	6,42	15,96	0,95	14,10	17,82	5,94	
Sulawesi Selatan	9,53	0,49	8,56	10,49	5,19	9,35	0,48	8,41	10,30	5,14	9,44	0,40	8,66	10,21	4,21	
Sulawesi Barat	13,94	1,01	11,96	15,92	7,24	16,21	1,18	13,90	18,52	7,27	15,10	0,90	13,34	16,86	5,95	
Sulawesi Tenggara	10,25	0,75	8,79	11,71	7,27	12,54	0,81	10,96	14,13	6,44	11,42	0,64	10,18	12,67	5,56	
Maluku	9,27	0,80	7,71	10,84	8,61	9,84	0,82	8,22	11,45	8,38	9,56	0,67	8,25	10,86	6,97	
Maluku Utara	7,37	0,73	5,94	8,80	9,91	10,13	0,85	8,47	11,79	8,36	8,72	0,63	7,48	9,95	7,23	
Papua	9,24	0,51	8,25	10,24	5,48	11,22	0,58	10,08	12,35	5,15	10,23	0,44	9,36	11,09	4,31	
Papua Barat	7,84	0,85	6,17	9,50	10,86	9,07	0,86	7,38	10,76	9,52	8,46	0,71	7,07	9,85	8,38	
INDONESIA	9,26	0,12	9,02	9,50	1,34	9,78	0,12	9,54	10,01	1,23	9,52	0,10	9,33	9,71	1,01	

Tabel 7.11 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	0,37	0,13	0,12	0,62	34,78	0,71	0,11	0,50	0,92	15,16	0,61	0,09	0,44	0,78	14,00			
Sumatera Utara	0,25	0,06	0,13	0,37	24,30	2,13	0,39	1,37	2,90	18,31	1,20	0,21	0,79	1,60	17,32			
Sumatera Barat	0,65	0,26	0,15	1,16	39,70	0,59	0,12	0,36	0,83	19,97	0,62	0,13	0,37	0,86	20,29			
Riau	0,28	0,10	0,09	0,47	35,12	0,83	0,15	0,54	1,12	17,76	0,61	0,10	0,41	0,81	16,60			
Kep. Riau	0,38	0,16	0,07	0,70	41,98	2,66	0,85	0,99	4,33	32,01	0,77	0,23	0,33	1,22	29,34			
Jambi	0,09	0,07	-0,04	0,23	74,97	0,84	0,17	0,51	1,17	20,19	0,61	0,12	0,37	0,84	20,03			
Sumatera Selatan	0,61	0,17	0,27	0,95	28,25	0,80	0,12	0,57	1,03	14,60	0,73	0,10	0,54	0,92	13,35			
Kep. Bangka Belitung	0,62	0,20	0,22	1,02	32,69	1,65	0,36	0,93	2,36	22,11	1,14	0,21	0,72	1,55	18,73			
Bengkulu	0,14	0,10	-0,05	0,34	69,95	0,82	0,18	0,48	1,17	21,30	0,61	0,13	0,36	0,87	21,03			
Lampung	0,56	0,18	0,20	0,92	33,04	0,61	0,12	0,38	0,84	19,40	0,60	0,10	0,40	0,79	16,75			
DKI Jakarta	0,28	0,10	0,10	0,47	33,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,80			
Jawa Barat	0,46	0,09	0,28	0,63	19,87	0,61	0,14	0,33	0,89	23,26	0,51	0,08	0,36	0,66	15,11			
Banten	0,41	0,11	0,18	0,63	27,76	0,74	0,23	0,29	1,20	31,25	0,51	0,11	0,30	0,72	20,86			
Jawa Tengah	0,50	0,08	0,35	0,64	15,15	0,93	0,10	0,73	1,14	11,09	0,73	0,07	0,60	0,86	8,99			
DI Yogyakarta	0,23	0,12	-0,02	0,47	54,44	1,22	0,51	0,23	2,22	41,41	0,54	0,18	0,18	0,90	34,09			
Jawa Timur	0,55	0,08	0,39	0,71	14,71	1,54	0,17	1,21	1,86	10,74	1,06	0,09	0,87	1,24	8,96			
Bali	1,12	0,23	0,66	1,57	20,95	3,21	0,67	1,90	4,52	20,82	1,92	0,31	1,30	2,53	16,34			
Nusa Tenggara Barat	1,21	0,25	0,73	1,69	20,26	3,59	0,46	2,69	4,50	12,85	2,58	0,29	2,01	3,15	11,29			
Nusa Tenggara Timur	1,06	0,29	0,49	1,64	27,66	4,13	0,42	3,30	4,96	10,26	3,45	0,35	2,77	4,14	10,14			
Kalimantan Barat	1,78	0,43	0,93	2,62	24,26	2,73	0,32	2,10	3,36	11,73	2,43	0,26	1,93	2,94	10,52			
Kalimantan Tengah	0,92	0,32	0,29	1,54	34,67	0,55	0,17	0,23	0,87	30,09	0,68	0,15	0,37	0,98	22,88			
Kalimantan Selatan	0,40	0,17	0,06	0,73	43,45	1,77	0,31	1,15	2,38	17,82	1,18	0,20	0,78	1,58	17,26			
Kalimantan Timur	0,36	0,14	0,09	0,63	38,19	0,93	0,21	0,52	1,35	22,75	0,58	0,12	0,35	0,80	20,07			
Sulawesi Utara	0,40	0,15	0,11	0,69	36,99	0,60	0,14	0,33	0,86	22,61	0,51	0,10	0,31	0,70	19,72			
Gorontalo	1,11	0,48	0,17	2,05	43,00	1,77	0,41	0,97	2,57	23,01	1,54	0,31	0,92	2,15	20,43			
Sulawesi Tengah	0,66	0,34	-0,01	1,33	51,80	2,13	0,37	1,40	2,86	17,50	1,75	0,30	1,17	2,33	16,88			
Sulawesi Selatan	1,27	0,19	0,89	1,64	15,06	2,83	0,25	2,33	3,32	8,88	2,23	0,18	1,87	2,59	8,18			
Sulawesi Barat	0,92	0,32	0,29	1,55	34,91	3,74	0,69	2,39	5,10	18,49	3,07	0,54	2,01	4,13	17,65			
Sulawesi Tenggara	0,76	0,26	0,25	1,26	33,98	1,28	0,21	0,87	1,69	16,24	1,13	0,17	0,80	1,46	14,88			
Maluku	0,45	0,14	0,17	0,72	31,76	2,74	0,49	1,77	3,70	17,97	1,86	0,32	1,24	2,49	16,99			
Maluku Utara	0,58	0,24	0,11	1,05	41,23	1,99	0,34	1,33	2,65	16,87	1,59	0,26	1,09	2,10	16,17			
Papua	2,27	0,48	1,33	3,22	21,23	40,88	1,59	37,76	44,01	30,61	1,47	27,72	33,50	4,82				
Papua Barat	0,85	0,38	0,10	1,59	44,77	6,04	0,87	4,34	7,74	14,34	4,43	0,68	3,09	5,76	15,43			
INDONESIA	0,52	0,03	0,46	0,58	6,17	2,26	0,07	2,12	2,39	3,12	1,37	0,04	1,29	1,44	2,86			

Tabel 7.12 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tidak/Belum Sekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	0,54	0,12	0,31	0,77	21,47	0,68	0,12	0,44	0,92	17,99	0,61	0,09	0,44	0,78	14,00			
Sumatera Utara	0,96	0,18	0,61	1,31	18,52	1,44	0,26	0,92	1,95	18,31	1,20	0,21	0,79	1,60	17,32			
Sumatera Barat	0,65	0,13	0,40	0,90	19,37	0,58	0,17	0,25	0,92	29,42	0,62	0,13	0,37	0,86	20,29			
Riau	0,48	0,11	0,26	0,70	23,44	0,75	0,17	0,41	1,09	23,10	0,61	0,10	0,41	0,81	16,60			
Kep. Riau	0,82	0,26	0,31	1,33	31,57	0,73	0,24	0,25	1,21	33,51	0,77	0,23	0,33	1,22	29,34			
Jambi	0,55	0,13	0,30	0,81	23,35	0,66	0,16	0,34	0,98	24,96	0,61	0,12	0,37	0,84	20,03			
Sumatera Selatan	0,69	0,13	0,44	0,95	18,94	0,77	0,16	0,47	1,08	20,32	0,73	0,10	0,54	0,92	13,35			
Kep. Bangka Belitung	1,14	0,28	0,59	1,68	24,42	1,13	0,35	0,45	1,81	30,62	1,14	0,21	0,72	1,55	18,73			
Bengkulu	0,54	0,17	0,20	0,88	31,79	0,69	0,17	0,35	1,03	25,31	0,61	0,13	0,36	0,87	21,03			
Lampung	0,49	0,13	0,23	0,75	27,34	0,72	0,16	0,41	1,03	21,96	0,60	0,10	0,40	0,79	16,75			
DKI Jakarta	0,27	0,10	0,08	0,47	36,08	0,29	0,13	0,04	0,54	43,17	0,28	0,10	0,10	0,47	33,80			
Jawa Barat	0,53	0,11	0,32	0,74	20,28	0,48	0,08	0,33	0,63	15,80	0,51	0,08	0,36	0,66	15,11			
Banten	0,47	0,16	0,16	0,78	33,94	0,56	0,15	0,25	0,86	27,87	0,51	0,11	0,30	0,72	20,86			
Jawa Tengah	0,64	0,09	0,47	0,81	13,84	0,81	0,09	0,63	1,00	11,49	0,73	0,07	0,60	0,86	8,99			
DI Yogyakarta	0,54	0,33	0,00	1,18	60,74	0,54	0,21	0,13	0,96	38,91	0,54	0,18	0,18	0,90	34,09			
Jawa Timur	0,95	0,12	0,72	1,18	12,36	1,16	0,13	0,90	1,41	11,22	1,06	0,09	0,87	1,24	8,96			
Bali	1,24	0,30	0,66	1,83	23,90	2,57	0,47	1,66	3,49	18,20	1,92	0,31	1,30	2,53	16,34			
Nusa Tenggara Barat	2,11	0,35	1,42	2,80	16,65	2,97	0,41	2,17	3,76	13,68	2,58	0,29	2,01	3,15	11,29			
Nusa Tenggara Timur	3,90	0,47	2,98	4,82	12,07	3,04	0,33	2,40	3,68	10,80	3,45	0,35	2,77	4,14	10,14			
Kalimantan Barat	2,21	0,34	1,55	2,87	15,25	2,66	0,28	2,11	3,20	10,43	2,43	0,26	1,93	2,94	10,52			
Kalimantan Tengah	0,60	0,21	0,18	1,02	35,39	0,75	0,21	0,33	1,17	28,56	0,68	0,15	0,37	0,98	22,88			
Kalimantan Selatan	1,18	0,26	0,68	1,69	21,84	1,18	0,22	0,75	1,62	18,84	1,18	0,20	0,78	1,58	17,26			
Kalimantan Timur	0,50	0,13	0,24	0,76	26,64	0,65	0,15	0,37	0,94	22,52	0,58	0,12	0,35	0,80	20,07			
Sulawesi Utara	0,65	0,16	0,34	0,97	24,54	0,35	0,13	0,10	0,60	35,98	0,51	0,10	0,31	0,70	19,72			
Gorontalo	1,22	0,36	0,52	1,92	29,44	1,85	0,48	0,91	2,78	25,77	1,54	0,31	0,92	2,15	20,43			
Sulawesi Tengah	1,33	0,25	0,84	1,81	18,62	2,18	0,44	1,33	3,04	20,01	1,75	0,30	1,17	2,33	16,88			
Sulawesi Selatan	2,51	0,24	2,04	2,97	9,41	1,98	0,24	1,51	2,45	12,11	2,23	0,18	1,87	2,59	8,18			
Sulawesi Barat	2,09	0,40	1,30	2,87	19,11	4,01	0,80	2,44	5,59	20,02	3,07	0,54	2,01	4,13	17,65			
Sulawesi Tenggara	1,00	0,20	0,60	1,39	20,04	1,25	0,24	0,78	1,73	19,25	1,13	0,17	0,80	1,46	14,88			
Maluku	1,74	0,33	1,09	2,39	19,11	1,99	0,38	1,24	2,75	19,28	1,86	0,32	1,24	2,49	16,99			
Maluku Utara	1,39	0,28	0,85	1,93	19,91	1,80	0,33	1,15	2,45	18,38	1,59	0,26	1,09	2,10	16,17			
Papua	23,80	1,30	21,26	26,34	5,45	37,45	1,79	33,95	40,96	4,77	30,61	1,47	27,72	33,50	4,82			
Papua Barat	2,55	0,50	1,58	3,53	19,51	6,27	0,95	4,41	8,12	15,11	4,43	0,68	3,09	5,76	15,43			
INDONESIA	1,19	0,04	1,11	1,28	3,57	1,54	0,05	1,44	1,63	3,20	1,37	0,04	1,29	1,44	2,86			

Tabel 7.13 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan						Perkotaan+Perdesaan					
	Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan		
	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Error	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Error	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	2,02	0,35	1,34	2,71	17,22	4,37	0,31	3,75	4,98	7,19	3,69	0,25	3,21	4,17	6,64			
Sumatera Utara	3,70	0,35	3,02	4,38	9,39	7,43	0,41	6,62	8,24	5,55	5,57	0,31	4,97	6,18	5,50			
Sumatera Barat	4,12	0,49	3,16	5,07	11,83	13,11	0,65	11,82	14,39	4,98	9,55	0,59	8,39	10,72	6,22			
Riau	2,63	0,33	1,99	3,27	12,40	9,12	0,63	7,87	10,36	6,96	6,55	0,47	5,62	7,47	7,21			
Kep. Riau	2,42	0,47	1,50	3,34	19,44	17,49	2,07	13,44	21,55	11,81	5,00	0,78	3,48	6,53	15,58			
Jambi	4,71	0,85	3,04	6,37	18,01	8,54	0,52	7,51	9,57	6,14	7,33	0,49	6,37	8,30	6,70			
Sumatera Selatan	5,19	0,62	3,97	6,40	11,93	11,04	0,59	9,87	12,20	5,38	8,93	0,50	7,95	9,90	5,57			
Kep. Bangka Belitung	6,93	0,84	5,29	8,57	12,09	20,45	1,28	17,95	22,96	6,25	13,72	0,89	11,97	15,48	6,52			
Bengkulu	2,48	0,50	1,49	3,47	20,36	10,06	0,65	8,77	11,34	6,51	7,70	0,58	6,57	8,84	7,53			
Lampung	3,41	0,58	2,28	4,53	16,89	7,20	0,47	6,29	8,12	6,48	6,20	0,38	5,47	6,94	6,06			
DKI Jakarta	1,84	0,27	1,31	2,37	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37	14,80			
Jawa Barat	3,91	0,33	3,25	4,56	8,50	9,05	0,70	7,67	10,43	7,79	5,63	0,33	4,98	6,27	5,86			
Banten	3,35	0,41	2,54	4,17	12,36	9,71	0,71	8,31	11,11	7,35	5,36	0,39	4,59	6,13	7,31			
Jawa Tengah	3,08	0,24	2,61	3,55	7,85	4,58	0,34	3,91	5,24	7,41	3,88	0,22	3,46	4,30	5,56			
DI Yogyakarta	0,91	0,27	0,37	1,45	30,20	1,07	0,35	0,39	1,76	32,54	0,96	0,22	0,53	1,39	22,67			
Jawa Timur	2,31	0,22	1,88	2,75	9,59	6,48	0,50	5,51	7,46	4,46	0,30	3,88	5,05	6,66				
Bali	1,99	0,34	1,33	2,65	16,91	8,08	1,05	6,02	10,14	13,02	4,33	0,53	3,29	5,37	12,27			
Nusa Tenggara Barat	4,42	0,50	3,43	5,40	11,38	10,26	0,69	8,90	11,62	6,76	7,78	0,48	6,83	8,73	6,23			
Nusa Tenggara Timur	5,38	0,73	3,94	6,81	13,62	18,36	0,86	16,68	20,04	4,67	15,50	0,76	14,01	16,99	4,90			
Kalimantan Barat	6,74	0,67	5,43	8,04	9,90	17,30	0,60	16,14	18,47	3,44	14,03	0,57	12,90	15,16	4,10			
Kalimantan Tengah	4,87	0,69	3,52	6,22	14,17	10,36	0,92	8,56	12,15	8,83	8,47	0,70	7,10	9,85	8,27			
Kalimantan Selatan	6,41	0,62	5,20	7,62	9,63	12,66	0,65	11,38	13,93	5,14	10,00	0,50	9,02	10,98	5,00			
Kalimantan Timur	2,95	0,35	2,25	3,64	12,05	8,31	0,85	6,65	9,97	10,20	4,96	0,40	4,18	5,73	7,98			
Sulawesi Utara	6,04	0,64	4,78	7,31	10,65	12,66	0,82	11,05	14,26	6,46	9,62	0,62	8,40	10,84	6,47			
Gorontalo	9,42	1,27	6,94	11,90	13,44	26,78	1,10	24,62	28,95	4,12	20,69	1,16	18,41	22,97	5,63			
Sulawesi Tengah	4,08	0,66	2,78	5,38	16,25	11,34	0,68	10,00	12,67	5,99	9,47	0,61	8,26	10,67	6,48			
Sulawesi Selatan	6,17	0,43	5,33	7,00	6,92	13,44	0,57	12,32	14,56	4,24	10,67	0,48	9,72	11,61	4,52			
Sulawesi Barat	13,02	1,61	9,86	16,19	12,39	20,38	1,27	17,88	22,88	6,25	18,63	1,08	16,52	20,75	5,79			
Sulawesi Tenggara	4,30	0,65	3,03	5,56	15,04	12,50	0,77	10,99	14,00	6,13	10,14	0,67	8,83	11,44	6,56			
Maluku	2,40	0,43	1,56	3,25	17,92	8,92	0,60	7,73	10,11	6,78	6,44	0,52	5,42	7,45	8,05			
Maluku Utara	2,33	0,53	1,29	3,38	22,79	11,83	0,99	9,88	13,77	8,40	9,14	0,84	7,50	10,79	9,16			
Papua	2,93	0,43	2,09	3,76	14,57	9,06	0,59	7,92	10,21	6,46	7,43	0,47	6,52	8,35	6,28			
Papua Barat	4,49	0,70	3,12	5,87	15,61	10,24	0,84	8,59	11,88	8,21	8,45	0,59	7,29	9,61	6,99			
INDONESIA	3,41	0,11	3,19	3,62	3,18	9,08	0,15	8,79	9,38	1,65	6,17	0,10	5,98	6,36	1,59			

Tabel 7.14 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tidak Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	4,08	0,36	3,37	4,78	8,78	3,33	0,28	2,79	3,87	8,32	3,69	0,25	3,21	4,17	6,64			
Sumatera Utara	6,04	0,38	5,29	6,79	6,35	5,10	0,36	4,40	5,80	7,01	5,57	0,31	4,97	6,18	5,50			
Sumatera Barat	11,25	0,74	9,80	12,71	6,58	7,76	0,61	6,57	8,95	7,82	9,55	0,59	8,39	10,72	6,22			
Riau	6,75	0,55	5,68	7,82	8,08	6,35	0,58	5,22	7,48	9,07	6,55	0,47	5,62	7,47	7,21			
Kep. Riau	6,04	0,98	4,12	7,95	16,21	4,13	0,84	2,48	5,78	20,42	5,00	0,78	3,48	6,53	15,58			
Jambi	6,95	0,59	5,79	8,10	8,47	7,71	0,58	6,57	8,85	7,53	7,33	0,49	6,37	8,30	6,70			
Sumatera Selatan	9,59	0,58	8,46	10,72	6,01	8,23	0,55	7,14	9,32	6,74	8,93	0,50	7,95	9,90	5,57			
Kep. Bangka Belitung	14,75	1,05	12,69	16,82	7,13	12,61	0,98	10,69	14,53	7,77	13,72	0,89	11,97	15,48	6,52			
Bengkulu	9,44	0,79	7,90	10,98	8,32	5,90	0,58	4,77	7,03	9,76	7,70	0,58	6,57	8,84	7,53			
Lampung	7,26	0,49	6,30	8,23	6,78	5,07	0,42	4,25	5,89	8,27	6,20	0,38	5,47	6,94	6,06			
DKI Jakarta	1,94	0,37	1,21	2,66	19,14	1,75	0,34	1,08	2,41	19,53	1,84	0,27	1,31	2,37	14,80			
Jawa Barat	5,85	0,36	5,14	6,57	6,23	5,39	0,38	4,65	6,14	7,06	5,63	0,33	4,98	6,27	5,86			
Banten	5,32	0,49	4,35	6,28	9,28	5,40	0,49	4,44	6,36	9,06	5,36	0,39	4,59	6,13	7,31			
Jawa Tengah	4,78	0,31	4,17	5,39	6,50	3,02	0,21	2,61	3,44	7,04	3,88	0,22	3,46	4,30	5,56			
DI Yogyakarta	1,11	0,32	0,49	1,73	28,51	0,82	0,23	0,37	1,28	28,28	0,96	0,22	0,53	1,39	22,67			
Jawa Timur	4,71	0,35	4,03	5,39	7,38	4,23	0,34	3,57	4,89	7,97	4,46	0,30	3,88	5,05	6,66			
Bali	4,94	0,64	3,70	6,19	12,87	3,73	0,57	2,61	4,85	15,33	4,33	0,53	3,29	5,37	12,27			
Nusa Tenggara Barat	7,96	0,69	6,60	9,31	8,67	7,63	0,65	6,36	8,90	8,47	7,78	0,48	6,83	8,73	6,23			
Nusa Tenggara Timur	18,34	0,99	16,41	20,28	5,38	12,89	0,77	11,38	14,40	5,97	15,50	0,76	14,01	16,99	4,90			
Kalimantan Barat	15,21	0,77	13,71	16,72	5,06	12,84	0,62	11,62	14,06	4,85	14,03	0,57	12,90	15,16	4,10			
Kalimantan Tengah	9,89	0,93	8,07	11,71	9,39	7,06	0,66	5,77	8,35	9,33	8,47	0,70	7,10	9,85	8,27			
Kalimantan Selatan	11,37	0,65	10,09	12,65	5,74	8,69	0,62	7,47	9,91	7,17	10,00	0,50	9,02	10,98	5,00			
Kalimantan Timur	5,23	0,49	4,26	6,19	9,45	4,67	0,48	3,73	5,62	10,28	4,96	0,40	4,18	5,73	7,98			
Sulawesi Utara	11,78	0,81	10,20	13,36	6,86	7,35	0,66	6,05	8,65	9,02	9,62	0,62	8,40	10,84	6,47			
Gorontalo	24,82	1,64	21,61	28,03	6,59	16,66	1,13	14,44	18,87	6,78	20,69	1,16	18,41	22,97	5,63			
Sulawesi Tengah	10,84	0,76	9,35	12,33	7,02	8,07	0,81	6,48	9,65	10,04	9,47	0,61	8,26	10,67	6,48			
Sulawesi Selatan	12,55	0,66	11,25	13,85	5,28	8,93	0,46	8,02	9,84	5,20	10,67	0,48	9,72	11,61	4,52			
Sulawesi Barat	20,38	1,44	17,56	23,20	7,05	16,96	1,22	14,57	19,36	7,20	18,63	1,08	16,52	20,75	5,79			
Sulawesi Tenggara	11,33	0,83	9,71	12,95	7,30	8,99	0,79	7,44	10,55	8,81	10,14	0,67	8,83	11,44	6,56			
Maluku	7,64	0,73	6,21	9,07	9,57	5,23	0,57	4,12	6,34	10,82	6,44	0,52	5,42	7,45	8,05			
Maluku Utara	9,17	0,94	7,32	11,01	10,26	9,12	0,97	7,23	11,01	10,59	9,14	0,84	7,50	10,79	9,16			
Papua	6,83	0,50	5,85	7,81	7,31	8,04	0,56	6,94	9,13	6,97	7,43	0,47	6,52	8,35	6,28			
Papua Barat	8,63	0,77	7,12	10,13	8,89	8,28	0,81	6,70	9,86	9,73	8,45	0,59	7,29	9,61	6,99			
INDONESIA	6,78	0,12	6,55	7,01	1,75	5,57	0,11	5,36	5,79	1,96	6,17	0,10	5,98	6,36	1,59			

Tabel 7.15 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	PerKotaan						PerDesaan						Perkotaan+Perdesaan							
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Relative Standard		Selang Kepercayaan		Relative Standard		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Batas Atas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Aceh	8,58	0,72	7,18	9,99	8,36	20,29	0,76	18,80	21,78	3,75	16,93	0,64	15,68	18,17	3,76					
Sumatera Utara	11,17	0,59	10,00	12,33	5,32	21,21	0,62	19,99	22,42	2,93	16,21	0,61	15,03	17,40	3,73					
Sumatera Barat	11,69	0,98	9,77	13,62	8,38	23,25	0,96	21,38	25,13	4,12	18,68	0,92	16,87	20,50	4,95					
Riau	10,33	0,77	8,82	11,83	7,42	29,14	0,91	27,36	30,93	3,12	21,69	1,03	19,66	23,71	4,77					
Kep. Riau	8,44	0,93	6,62	10,27	11,02	27,11	3,01	21,21	33,02	11,11	11,64	1,33	9,03	14,26	11,46					
Jambi	10,31	1,18	8,00	12,62	11,43	31,08	0,91	29,29	32,87	2,94	24,55	1,21	22,18	26,92	4,93					
Sumatera Selatan	12,80	0,71	11,41	14,18	5,53	34,77	1,14	32,54	37,00	3,27	26,84	1,31	24,28	29,41	4,88					
Kep. Bangka Belitung	18,82	1,38	16,12	21,52	7,33	34,07	1,47	31,18	36,95	4,32	26,48	1,12	24,28	28,68	4,24					
Bengkulu	10,98	0,80	9,41	12,55	7,29	25,81	0,81	24,21	27,41	3,16	21,20	0,85	19,53	22,88	4,02					
Lampung	12,13	0,96	10,25	14,01	7,89	26,29	0,70	24,92	27,65	2,65	22,57	0,75	21,10	24,03	3,31					
DKI Jakarta	9,83	0,55	8,76	10,90	5,55	-	-	-	-	-	-	-	9,83	0,55	8,76	10,90	5,55			
Jawa Barat	20,52	0,75	19,04	21,99	3,66	41,99	1,02	39,99	43,99	2,43	27,71	0,73	26,27	29,14	2,65					
Banten	15,30	1,00	13,34	17,26	6,54	42,34	1,85	38,71	45,97	4,38	23,83	1,20	21,47	26,19	5,05					
Jawa Tengah	16,79	0,78	15,26	18,32	4,66	30,75	0,80	29,19	32,32	2,60	24,24	0,62	23,03	25,45	2,54					
DI Yogyakarta	4,45	0,65	3,19	5,72	14,51	11,95	1,68	8,66	15,25	14,06	6,80	0,78	5,27	8,33	11,46					
Jawa Timur	14,83	0,52	13,81	15,84	3,49	31,31	0,94	29,46	33,16	3,01	23,32	0,67	22,00	24,64	2,89					
Bali	10,00	0,91	8,21	11,79	9,14	23,15	1,42	20,35	25,94	6,15	15,04	0,98	13,11	16,98	6,55					
Nusa Tenggara Barat	21,09	1,14	18,85	23,32	5,41	24,95	1,00	22,98	26,92	4,03	23,31	0,75	21,84	24,78	3,21					
Nusa Tenggara Timur	12,85	0,86	11,16	14,55	6,73	36,54	0,95	34,67	38,41	2,61	31,32	0,92	29,51	33,13	2,95					
Kalimantan Barat	16,37	0,91	14,59	18,16	5,57	37,00	0,89	35,25	38,76	2,42	30,61	0,97	28,71	32,52	3,18					
Kalimantan Tengah	16,56	1,24	14,13	18,98	7,47	39,42	1,08	37,30	41,55	2,75	31,57	1,03	29,56	33,58	3,25					
Kalimantan Selatan	19,37	1,21	17,00	21,75	6,26	32,80	0,97	30,90	34,70	2,96	27,10	0,90	25,32	28,87	3,34					
Kalimantan Timur	11,17	0,86	9,48	12,86	7,73	28,14	1,24	25,71	30,57	4,40	17,53	0,94	15,70	19,37	5,35					
Sulawesi Utara	10,67	1,08	8,55	12,78	10,10	23,36	1,19	21,03	25,70	5,10	17,54	0,98	15,63	19,45	5,56					
Gorontalo	16,86	1,59	13,74	19,97	9,42	28,67	1,18	26,36	30,99	4,11	24,53	1,11	22,34	26,71	4,54					
Sulawesi Tengah	12,77	1,05	10,71	14,83	8,23	34,56	1,05	32,49	36,62	3,04	28,94	1,11	26,77	31,11	3,83					
Sulawesi Selatan	13,34	0,76	11,85	14,84	5,71	30,17	0,94	28,33	32,01	3,11	23,76	1,00	21,79	25,72	4,22					
Sulawesi Barat	15,62	1,22	13,23	18,00	7,80	32,06	1,32	29,47	34,64	4,11	28,15	1,16	25,87	30,43	4,13					
Sulawesi Tenggara	7,84	0,83	6,21	9,46	10,57	26,95	0,86	25,26	28,64	3,20	21,45	0,89	19,70	23,20	4,15					
Maluku	9,44	0,90	7,67	11,21	9,57	24,32	1,12	22,12	26,53	4,62	18,65	1,05	16,60	20,71	5,63					
Maluku Utara	7,23	1,10	5,07	9,39	15,25	29,38	1,21	27,01	31,75	4,12	23,12	1,42	20,34	25,91	6,14					
Papua	9,93	0,85	8,26	11,59	8,55	18,49	0,74	17,04	19,95	4,01	16,21	0,64	14,96	17,46	3,94					
Papua Barat	9,00	1,23	6,59	11,42	13,66	21,44	1,25	18,99	23,90	5,83	17,57	0,99	15,64	19,51	5,63					
INDONESIA	14,94	0,25	14,44	15,44	1,70	31,09	0,27	30,55	31,62	0,88	22,81	0,22	22,37	23,25	0,98					

Tabel 7.16 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SD/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
	Laki-laki			Selang Kepercayaan			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	17,23	0,72	15,81	18,64	4,19	16,64	0,75	15,18	18,11	4,50	16,93	0,64
Sumatera Utara	16,99	0,79	15,44	18,53	4,64	15,43	0,63	14,18	16,67	4,10	16,21	0,61
Sumatera Barat	21,82	1,23	19,41	24,23	5,64	15,39	0,86	13,70	17,09	5,62	18,68	0,92
Riau	22,65	1,22	20,26	25,04	5,39	20,73	1,08	18,62	22,85	5,21	21,69	1,03
Kep. Riau	13,09	1,53	10,09	16,09	11,69	10,41	1,47	7,53	13,29	14,11	11,64	1,33
Jambi	24,19	1,29	21,67	26,71	5,32	24,90	1,31	22,33	27,46	5,26	24,55	1,21
Sumatera Selatan	26,84	1,50	23,91	29,77	5,57	26,85	1,28	24,35	29,35	4,75	26,84	1,31
Kep. Bangka Belitung	27,38	1,38	24,68	30,09	5,04	25,50	1,27	23,01	28,00	4,99	26,48	1,12
Bengkulu	21,40	0,94	19,55	23,25	4,40	21,00	1,16	18,72	23,28	5,54	21,20	0,85
Lampung	23,77	0,89	22,04	25,51	3,73	21,27	0,92	19,47	23,08	4,32	22,57	0,75
DKI Jakarta	6,99	0,50	6,02	7,96	7,10	12,55	0,87	10,85	14,26	6,92	9,83	0,55
Jawa Barat	26,83	0,83	25,20	28,46	3,10	28,59	0,80	27,02	30,16	2,80	27,71	0,73
Banten	21,73	1,26	19,25	24,20	5,81	25,89	1,47	23,00	28,78	5,69	23,83	1,20
Jawa Tengah	24,41	0,70	23,03	25,79	2,88	24,08	0,69	22,73	25,42	2,85	24,24	0,62
DI Yogyakarta	6,70	0,94	4,87	8,54	13,97	6,89	0,96	5,02	8,76	13,86	6,80	0,78
Jawa Timur	22,91	0,76	21,42	24,39	3,30	23,72	0,77	22,21	25,23	3,25	23,32	0,67
Bali	12,62	1,09	10,48	14,75	8,63	17,40	1,24	14,98	19,83	7,11	15,04	0,98
Nusa Tenggara Barat	21,06	0,87	19,36	22,76	4,12	25,16	0,97	23,25	27,06	3,87	23,31	0,75
Nusa Tenggara Timur	29,45	1,01	27,48	31,42	3,41	33,05	1,13	30,82	35,27	3,43	31,32	0,92
Kalimantan Barat	30,98	1,10	28,83	33,13	3,54	30,24	1,19	27,91	32,57	3,93	30,61	0,97
Kalimantan Tengah	30,82	1,10	28,67	32,98	3,57	32,31	1,27	29,83	34,79	3,92	31,57	1,03
Kalimantan Selatan	26,09	1,18	23,76	28,41	4,54	28,07	1,06	25,98	30,15	3,79	27,10	0,90
Kalimantan Timur	16,89	1,22	14,50	19,29	7,22	18,21	1,04	16,17	20,25	5,71	17,53	0,94
Sulawesi Utara	19,39	1,28	16,89	21,89	6,58	15,59	1,01	13,60	17,57	6,51	17,54	0,98
Gorontalo	26,79	1,53	23,80	29,79	5,70	22,31	1,31	19,75	24,88	5,86	24,53	1,11
Sulawesi Tengah	29,96	1,17	27,66	32,25	3,91	27,91	1,35	25,27	30,56	4,83	28,94	1,11
Sulawesi Selatan	23,44	1,05	21,39	25,50	4,47	24,04	1,11	21,86	26,22	4,63	23,76	1,00
Sulawesi Barat	26,67	1,37	23,99	29,35	5,12	29,56	1,43	26,76	32,36	4,83	28,15	1,16
Sulawesi Tenggara	22,14	1,13	19,93	24,35	5,09	20,79	1,01	18,81	22,77	4,86	21,45	0,89
Maluku	19,17	1,21	16,80	21,53	6,30	18,14	1,14	15,90	20,38	6,29	18,65	1,05
Maluku Utara	21,65	1,44	18,83	24,47	6,64	24,66	1,62	21,48	27,84	6,58	23,12	1,42
Papua	17,49	0,82	15,88	19,10	4,69	14,93	0,71	13,55	16,32	4,73	16,21	0,64
Papua Barat	17,50	1,14	15,27	19,73	6,51	17,65	1,13	15,43	19,87	6,41	17,57	0,99
INDONESIA	22,48	0,25	21,99	22,97	1,12	23,14	0,25	22,65	23,63	1,08	22,81	0,22
											22,37	0,22
											23,25	0,98

Tabel 7.17 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SMP/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan						
	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan				
			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
Aceh	27,18	1,14	24,94	29,41	4,19	33,72	0,59	32,57	34,88	1,75	31,85	0,58	30,72	32,97	1,81
Sumatera Utara	32,24	1,07	30,14	34,34	3,33	34,90	0,63	33,66	36,14	1,81	33,58	0,65	32,30	34,86	1,94
Sumatera Barat	29,09	1,05	27,02	31,15	3,62	31,56	0,76	30,08	33,05	2,40	30,58	0,65	29,31	31,86	2,13
Riau	27,61	0,95	25,75	29,46	3,43	32,27	0,79	30,71	33,82	2,46	30,42	0,67	29,11	31,73	2,20
Kep. Riau	19,79	1,39	17,06	22,52	7,05	24,35	2,90	18,66	30,04	11,92	20,57	1,33	17,96	23,18	6,47
Jambi	29,10	1,64	25,89	32,30	5,62	31,23	0,70	29,85	32,61	2,25	30,56	0,71	29,16	31,96	2,33
Sumatera Selatan	27,73	1,06	25,66	29,79	3,80	30,45	0,77	28,93	31,96	2,54	29,47	0,65	28,20	30,74	2,20
Kep. Bangka Belitung	25,42	1,05	23,36	27,47	4,12	23,16	1,22	20,76	25,55	5,28	24,28	0,81	22,69	25,88	3,35
Bengkulu	28,25	1,35	25,59	30,90	4,79	33,61	0,85	31,95	35,28	2,53	31,95	0,79	30,40	33,49	2,47
Lampung	29,64	1,26	27,18	32,11	4,24	40,58	0,67	39,27	41,88	1,64	37,70	0,75	36,24	39,17	1,99
DKI Jakarta	25,24	0,97	23,34	27,14	3,83	-	-	-	-	-	25,24	0,97	23,34	27,14	3,83
Jawa Barat	32,88	0,58	31,74	34,02	1,77	32,56	0,87	30,84	34,27	2,69	32,77	0,49	31,82	33,72	1,48
Banten	31,18	0,97	29,27	33,08	3,11	29,48	1,48	26,57	32,38	5,03	30,64	0,81	29,04	32,24	2,66
Jawa Tengah	36,12	0,77	34,61	37,62	2,13	41,51	0,76	40,01	43,01	1,84	38,99	0,56	37,90	40,09	1,43
DI Yogyakarta	24,82	1,47	21,95	27,69	5,90	42,79	2,51	37,88	47,70	5,86	30,44	1,63	27,25	33,63	5,35
Jawa Timur	33,11	0,69	31,75	34,47	2,09	36,45	0,81	34,86	38,04	2,22	34,83	0,55	33,76	35,90	1,57
Bali	26,63	0,98	24,72	28,55	3,66	30,20	1,42	27,42	32,98	4,70	28,00	0,83	26,37	29,64	2,98
Nusa Tenggara Barat	31,40	1,06	29,32	33,48	3,37	33,11	1,05	31,05	35,17	3,17	32,38	0,76	30,90	33,87	2,34
Nusa Tenggara Timur	29,72	1,53	26,73	32,71	5,13	21,61	0,59	20,46	22,76	2,71	23,40	0,54	22,35	24,45	2,29
Kalimantan Barat	27,61	0,92	25,81	29,42	3,34	25,72	0,70	24,35	27,08	2,70	26,30	0,55	25,22	27,39	2,10
Kalimantan Tengah	29,53	1,26	27,06	32,00	4,27	29,51	0,84	27,85	31,17	2,86	29,52	0,70	28,14	30,89	2,38
Kalimantan Selatan	30,00	1,11	27,82	32,17	3,70	32,44	0,87	30,73	34,15	2,69	31,40	0,69	30,05	32,75	2,19
Kalimantan Timur	25,08	1,06	22,99	27,16	4,24	30,51	1,46	27,66	33,37	4,78	27,12	0,90	25,34	28,89	3,34
Sulawesi Utara	23,36	1,05	21,31	25,41	4,47	31,42	1,08	29,29	33,54	3,45	27,73	0,83	26,09	29,36	3,01
Gorontalo	23,13	1,13	20,90	25,35	4,91	23,20	1,17	20,91	25,49	5,03	23,17	0,86	21,50	24,85	3,69
Sulawesi Tengah	28,54	1,21	26,17	30,91	4,23	27,80	0,72	26,38	29,21	2,60	27,99	0,62	26,77	29,20	2,22
Sulawesi Selatan	25,59	0,96	23,72	27,47	3,74	27,98	0,63	26,74	29,21	2,25	27,07	0,57	25,95	28,19	2,12
Sulawesi Barat	24,53	1,70	21,20	27,87	6,93	24,92	0,97	23,02	26,83	3,90	24,83	0,84	23,18	26,48	3,39
Sulawesi Tenggara	25,47	1,11	23,30	27,64	4,35	29,58	0,87	27,88	31,28	2,93	28,40	0,73	26,97	29,83	2,57
Maluku	24,49	1,07	22,40	26,59	4,37	29,73	1,10	27,58	31,88	3,68	27,74	0,85	26,06	29,41	3,08
Maluku Utara	26,82	1,51	23,86	29,77	5,62	27,71	0,98	25,79	29,62	3,52	27,45	0,83	25,84	29,07	3,01
Papua	26,26	1,48	23,36	29,16	5,64	16,49	0,69	15,14	17,83	4,16	19,09	0,62	17,87	20,31	3,26
Papua Barat	28,44	2,04	24,44	32,43	7,16	23,31	1,08	21,20	25,43	4,63	24,91	1,04	22,86	26,95	4,18
INDONESIA	30,61	0,24	30,13	31,09	0,80	33,18	0,22	32,74	33,62	0,68	31,86	0,17	31,53	32,19	0,53

Tabel 7.18 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SMP/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	32,46	0,77	30,96	33,97	2,36	31,25	0,73	29,82	32,69	2,34	31,85	0,58	30,72	32,97	1,81			
Sumatera Utara	33,68	0,79	32,13	35,23	2,35	33,47	0,77	31,96	34,98	2,30	33,58	0,65	32,30	34,86	1,94			
Sumatera Barat	30,83	0,79	29,28	32,38	2,56	30,33	0,97	28,42	32,23	3,21	30,58	0,65	29,31	31,86	2,13			
Riau	30,38	0,87	28,67	32,09	2,87	30,46	0,87	28,75	32,17	2,86	30,42	0,67	29,11	31,73	2,20			
Kep. Riau	23,02	1,48	20,12	25,92	6,44	18,50	1,70	15,16	21,84	9,21	20,57	1,33	17,96	23,18	6,47			
Jambi	31,94	0,95	30,09	33,80	2,97	29,21	0,85	27,54	30,87	2,90	30,56	0,71	29,16	31,96	2,33			
Sumatera Selatan	29,31	0,81	27,73	30,90	2,76	29,63	0,90	27,86	31,40	3,05	29,47	0,65	28,20	30,74	2,20			
Kep. Bangka Belitung	24,43	1,16	22,15	26,70	4,75	24,13	0,98	22,20	26,05	4,06	24,28	0,81	22,69	25,88	3,35			
Bengkulu	33,08	0,98	31,17	35,00	2,96	30,77	0,99	28,83	32,70	3,20	31,95	0,79	30,40	33,49	2,47			
Lampung	36,25	0,90	34,48	38,01	2,48	39,26	0,94	37,42	41,11	2,40	37,70	0,75	36,24	39,17	1,99			
DKI Jakarta	24,50	1,32	21,92	27,08	5,38	25,95	1,14	23,71	28,20	4,41	25,24	0,97	23,34	27,14	3,83			
Jawa Barat	31,60	0,58	30,47	32,73	1,83	33,96	0,63	32,72	35,21	1,87	32,77	0,49	31,82	33,72	1,48			
Banten	29,75	1,11	27,58	31,93	3,73	31,51	0,98	29,58	33,44	3,12	30,64	0,81	29,04	32,24	2,66			
Jawa Tengah	38,02	0,64	36,76	39,28	1,69	39,92	0,67	38,60	41,24	1,69	38,99	0,56	37,90	40,09	1,43			
DI Yogyakarta	31,15	1,93	27,37	34,93	6,19	29,78	2,01	25,85	33,72	6,74	30,44	1,63	27,25	33,63	5,35			
Jawa Timur	34,05	0,65	32,77	35,32	1,91	35,59	0,68	34,25	36,92	1,91	34,83	0,55	33,76	35,90	1,57			
Bali	27,80	1,12	25,61	29,99	4,02	28,20	1,07	26,12	30,29	3,78	28,00	0,83	26,37	29,64	2,98			
Nusa Tenggara Barat	32,68	1,09	30,55	34,82	3,34	32,14	0,95	30,28	34,00	2,95	32,38	0,76	30,90	33,87	2,34			
Nusa Tenggara Timur	23,57	0,72	22,15	24,99	3,07	23,23	0,71	21,83	24,63	3,07	23,40	0,54	22,35	24,45	2,29			
Kalimantan Barat	24,82	0,77	23,31	26,34	3,11	27,79	0,86	26,12	29,47	3,08	26,30	0,55	25,22	27,39	2,10			
Kalimantan Tengah	29,32	0,90	27,55	31,09	3,08	29,71	0,95	27,85	31,57	3,20	29,52	0,70	28,14	30,89	2,38			
Kalimantan Selatan	30,79	1,03	28,77	32,82	3,36	31,99	0,76	30,49	33,48	2,38	31,40	0,69	30,05	32,75	2,19			
Kalimantan Timur	27,00	1,22	24,61	29,39	4,52	27,24	1,00	25,28	29,19	3,66	27,12	0,90	25,34	28,89	3,34			
Sulawesi Utara	26,40	1,06	24,33	28,47	4,00	29,12	1,11	26,95	31,30	3,81	27,73	0,83	26,09	29,36	3,01			
Gorontalo	20,81	1,31	18,24	23,38	6,30	25,49	1,33	22,88	28,10	5,22	23,17	0,86	21,50	24,85	3,69			
Sulawesi Tengah	27,98	0,88	26,26	29,70	3,13	28,00	0,94	26,16	29,83	3,35	27,99	0,62	26,77	29,20	2,22			
Sulawesi Selatan	26,67	0,75	25,21	28,13	2,80	27,43	0,67	26,12	28,75	2,44	27,07	0,57	25,95	28,19	2,12			
Sulawesi Barat	25,55	1,34	22,93	28,17	5,24	24,14	1,07	22,04	26,24	4,44	24,83	0,84	23,18	26,48	3,39			
Sulawesi Tenggara	27,41	0,98	25,49	29,33	3,58	29,34	1,01	27,35	31,33	3,46	28,40	0,73	26,97	29,83	2,57			
Maluku	27,75	1,08	25,64	29,87	3,89	27,72	1,08	25,60	29,84	3,90	27,74	0,85	26,06	29,41	3,08			
Maluku Utara	27,90	0,92	26,10	29,70	3,29	26,99	1,16	24,71	29,27	4,31	27,45	0,83	25,84	29,07	3,01			
Papua	21,70	0,80	20,14	23,26	3,66	16,46	0,76	14,97	17,95	4,63	19,09	0,62	17,87	20,31	3,26			
Papua Barat	25,97	1,45	23,13	28,81	5,58	23,86	1,23	21,45	26,27	5,15	24,91	1,04	22,86	26,95	4,18			
INDONESIA	31,33	0,21	30,93	31,73	0,65	32,39	0,21	31,97	32,80	0,66	31,86	0,17	31,53	32,19	0,53			

Tabel 7.19 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SM/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan	
			Batas Atas	Batas Bawah			Batas Atas	Batas Bawah			Batas Atas	Batas Bawah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	47,79	1,42	44,99	50,58	2,98	34,23	0,70	32,85	35,60	2,05	38,12	0,73
Sumatera Utara	44,13	1,18	41,82	46,44	2,67	30,61	0,81	29,02	32,19	2,65	37,33	0,97
Sumatera Barat	42,90	1,59	39,77	46,02	3,71	26,51	0,95	24,64	28,38	3,60	32,99	1,26
Riau	48,00	1,46	45,13	50,86	3,04	24,56	0,84	22,91	26,20	3,42	33,85	1,33
Kep. Riau	62,22	2,26	57,79	66,65	3,63	22,71	3,08	16,67	28,76	13,57	55,45	3,01
Jambi	44,41	1,91	40,67	48,14	4,29	24,00	0,79	22,46	25,54	3,27	30,42	1,29
Sumatera Selatan	42,44	0,98	40,52	44,36	2,31	20,36	0,84	18,72	22,00	4,10	28,32	1,24
Kep. Bangka Belitung	38,39	1,74	34,97	41,81	4,54	18,24	1,22	15,85	20,64	6,70	28,27	1,20
Bengkulu	43,17	1,67	39,90	46,43	3,86	25,26	0,81	23,67	26,84	3,20	30,82	1,12
Lampung	42,13	1,05	40,08	44,18	2,48	22,77	0,67	21,46	24,08	2,93	27,86	0,84
DKI Jakarta	49,64	1,01	47,66	51,62	2,04	-	-	-	-	-	49,64	1,01
Jawa Barat	35,20	0,91	33,41	36,99	2,59	13,79	0,67	12,47	15,10	4,85	28,03	0,76
Banten	41,35	1,28	38,85	43,85	3,08	15,98	1,45	13,14	18,83	9,08	33,34	1,26
Jawa Tengah	35,65	1,08	33,53	37,78	3,04	18,75	0,60	17,56	19,93	3,23	26,63	0,68
DI Yogyakarta	54,54	1,66	51,28	57,80	3,05	37,40	2,96	31,60	43,20	7,91	49,18	1,74
Jawa Timur	40,90	0,71	39,51	42,29	1,73	21,06	0,71	19,66	22,45	3,37	30,68	0,71
Bali	45,56	1,15	43,30	47,82	2,53	28,95	1,75	25,52	32,37	6,04	39,18	1,22
Nusa Tenggara Barat	34,39	1,28	31,88	36,91	3,73	23,42	1,08	21,31	25,52	4,59	28,07	0,87
Nusa Tenggara Timur	42,94	2,23	38,58	47,31	5,19	15,73	0,72	14,31	17,16	4,60	21,73	1,13
Kalimantan Barat	38,26	1,14	36,02	40,51	2,99	15,55	0,76	14,05	17,05	4,91	22,59	1,01
Kalimantan Tengah	37,14	1,49	34,22	40,07	4,01	17,06	0,83	15,43	18,67	4,85	23,95	1,01
Kalimantan Selatan	35,09	1,27	32,59	37,58	3,63	17,43	0,80	15,87	18,99	4,57	24,93	0,95
Kalimantan Timur	48,54	1,38	45,84	51,24	2,84	28,54	1,52	25,56	31,53	5,33	41,04	1,20
Sulawesi Utara	48,35	1,33	45,73	50,96	2,76	28,55	1,40	25,80	31,30	4,91	37,62	1,26
Gorontalo	40,43	1,53	37,44	43,43	3,78	16,55	1,22	14,16	18,94	7,37	24,93	1,51
Sulawesi Tengah	42,93	1,51	39,98	45,88	3,51	20,15	0,93	18,33	21,98	4,62	26,02	1,13
Sulawesi Selatan	42,40	1,29	39,88	44,92	3,03	20,82	0,64	19,57	22,08	3,07	29,04	1,27
Sulawesi Barat	31,64	1,88	27,95	35,33	5,95	15,38	1,08	13,26	17,50	7,04	19,25	1,07
Sulawesi Tenggara	48,66	1,74	45,26	52,07	3,57	24,39	0,82	22,79	25,99	3,35	31,38	1,20
Maluku	52,55	1,60	49,41	55,68	3,04	29,90	1,16	27,63	32,18	3,87	38,53	1,45
Maluku Utara	51,10	2,21	46,76	55,44	4,33	22,86	1,11	20,67	25,04	4,87	30,83	1,76
Papua	46,93	1,62	43,75	50,10	3,45	12,54	0,69	11,20	13,89	5,46	21,69	1,17
Papua Barat	46,51	2,09	42,41	50,62	4,50	30,45	1,64	27,25	33,66	5,37	35,45	1,26
INDONESIA	41,20	0,35	40,52	41,88	0,84	20,96	0,21	20,54	21,37	1,01	31,33	0,26
											30,83	31,84
											0,82	

Tabel 7.20 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat SM/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan			
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	39,68	0,92	37,87	41,49	2,33	36,63	0,86	34,95	38,31	2,34	38,12	0,73	36,69	39,55	1,92	
Sumatera Utara	38,01	1,14	35,78	40,24	3,00	36,64	0,99	34,70	38,57	2,69	37,33	0,97	35,44	39,22	2,59	
Sumatera Barat	31,30	1,57	28,23	34,37	5,00	34,76	1,32	32,18	37,35	3,79	32,99	1,26	30,52	35,46	3,82	
Riau	35,36	1,61	32,21	38,51	4,54	32,35	1,28	29,85	34,85	3,94	33,85	1,33	31,24	36,46	3,93	
Kep. Riau	50,87	3,04	44,92	56,83	5,97	59,33	3,59	52,30	66,36	6,05	55,45	3,01	49,55	61,36	5,43	
Jambi	31,26	1,42	28,48	34,03	4,53	29,60	1,41	26,83	32,37	4,77	30,42	1,29	27,90	32,94	4,23	
Sumatera Selatan	29,30	1,33	26,70	31,91	4,53	27,29	1,35	24,64	29,94	4,96	28,32	1,24	25,89	30,76	4,39	
Kep. Bangka Belitung	27,08	1,42	24,30	29,87	5,25	29,56	1,42	26,77	32,34	4,80	28,27	1,20	25,91	30,63	4,26	
Bengkulu	29,89	1,26	27,43	32,35	4,20	31,78	1,34	29,16	34,41	4,21	30,82	1,12	28,63	33,01	3,62	
Lampung	28,26	1,04	26,22	30,31	3,69	27,42	0,91	25,63	29,21	3,33	27,86	0,84	26,21	29,50	3,00	
DKI Jakarta	54,76	1,36	52,10	57,42	2,48	44,71	1,17	42,41	47,01	2,62	49,64	1,01	47,66	51,62	2,04	
Jawa Barat	30,26	0,86	28,59	31,94	2,83	25,76	0,81	24,17	27,35	3,15	28,03	0,76	26,54	29,52	2,72	
Banten	37,18	1,50	34,24	40,12	4,03	29,59	1,28	27,09	32,09	4,32	33,34	1,26	30,88	35,81	3,77	
Jawa Tengah	27,57	0,79	26,03	29,11	2,85	25,75	0,70	24,36	27,13	2,74	26,63	0,68	25,29	27,97	2,56	
DI Yogyakarta	50,75	1,97	46,89	54,62	3,88	47,71	2,08	43,63	51,78	4,36	49,18	1,74	45,76	52,59	3,55	
Jawa Timur	32,61	0,85	30,93	34,28	2,62	28,82	0,72	27,40	30,24	2,51	30,68	0,71	29,29	32,06	2,30	
Bali	41,79	1,49	38,88	44,71	3,56	36,65	1,41	33,90	39,41	3,84	39,18	1,22	36,79	41,58	3,12	
Nusa Tenggara Barat	30,73	1,17	28,44	33,02	3,80	25,89	1,06	23,82	27,97	4,09	28,07	0,87	26,36	29,79	3,12	
Nusa Tenggara Timur	21,20	1,19	18,87	23,53	5,61	22,21	1,24	19,78	24,64	5,57	21,73	1,13	19,51	23,94	5,19	
Kalimantan Barat	23,13	1,09	21,00	25,26	4,69	22,04	1,16	19,76	24,31	5,27	22,59	1,01	20,61	24,56	4,45	
Kalimantan Tengah	24,67	1,07	22,56	26,77	4,35	23,24	1,21	20,87	25,60	5,19	23,95	1,01	21,97	25,94	4,23	
Kalimantan Selatan	26,05	1,13	23,84	28,25	4,32	23,86	1,07	21,76	25,95	4,48	24,93	0,95	23,07	26,79	3,81	
Kalimantan Timur	43,08	1,49	40,16	46,00	3,46	38,90	1,35	36,26	41,54	3,47	41,04	1,20	38,68	43,40	2,93	
Sulawesi Utara	36,28	1,54	33,26	39,31	4,25	39,04	1,40	36,30	41,78	3,58	37,62	1,26	35,16	40,09	3,35	
Gorontalo	23,02	1,73	19,63	26,40	7,50	26,79	1,76	23,34	30,25	6,58	24,93	1,51	21,96	27,89	6,07	
Sulawesi Tengah	25,92	1,31	23,34	28,49	5,06	26,13	1,24	23,70	28,55	4,73	26,02	1,13	23,80	28,24	4,35	
Sulawesi Selatan	29,89	1,51	26,93	32,85	5,06	28,27	1,23	25,86	30,67	4,34	29,04	1,27	26,55	31,54	4,38	
Sulawesi Barat	20,36	1,29	17,84	22,89	6,33	18,18	1,24	15,75	20,60	6,81	19,25	1,07	17,15	21,34	5,56	
Sulawesi Tenggara	31,89	1,34	29,27	34,52	4,20	30,89	1,31	28,33	33,45	4,23	31,38	1,20	29,02	33,74	3,84	
Maluku	39,04	1,66	35,78	42,29	4,26	38,02	1,56	34,96	41,08	4,11	38,53	1,45	35,68	41,38	3,77	
Maluku Utara	33,79	1,99	29,89	37,69	5,89	27,76	1,81	24,21	31,30	6,52	30,83	1,76	27,38	34,28	5,71	
Papua	25,31	1,30	22,76	27,86	5,14	18,05	1,19	15,72	20,39	6,60	21,69	1,17	19,40	23,98	5,39	
Papua Barat	37,92	1,52	34,94	40,90	4,00	33,01	1,42	30,23	35,79	4,30	35,45	1,26	32,97	37,92	3,56	
INDONESIA	32,91	0,30	32,32	33,49	0,90	29,78	0,27	29,25	30,32	0,91	31,33	0,26	30,83	31,84	0,82	

Tabel 7.21 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat PT/Sederajat menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Pertanyaan						Pendesaan						Perkotaan+Perdesaan						
	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan		Relative Standard	Estimasi	Standard	Selang Kepercayaan	
			Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas				(9)	(10)				(15)	(16)
Aceh	14,06	0,85	12,40	15,73	6,03	6,69	0,38	5,94	7,44	5,73	8,80	0,41	7,99	9,61	4,69				
Sumatera Utara	8,52	0,53	7,48	9,55	6,21	3,73	0,26	3,21	4,24	7,03	6,11	0,36	5,41	6,81	5,86				
Sumatera Barat	11,55	0,72	10,14	12,96	6,24	4,97	0,43	4,13	5,82	8,65	7,57	0,48	6,63	8,52	6,39				
Riau	11,16	0,89	9,41	12,91	8,01	4,08	0,33	3,43	4,74	8,19	6,89	0,51	5,89	7,88	7,40				
Kep. Riau	6,74	0,78	5,22	8,27	11,53	5,67	1,60	2,53	8,80	28,19	6,56	0,69	5,21	7,90	10,47				
Jambi	11,39	0,80	9,81	12,96	7,05	4,31	0,37	3,59	5,03	8,53	6,53	0,46	5,62	7,44	7,11				
Sumatera Selatan	11,24	0,80	9,67	12,80	7,12	2,59	0,26	2,08	3,09	10,02	5,71	0,54	4,66	6,76	9,38				
Kep. Bangka Belitung	9,82	0,99	7,88	11,76	10,07	2,44	0,40	1,64	3,23	16,57	6,11	0,61	4,92	7,30	9,95				
Bengkulu	14,99	1,31	12,41	17,56	8,76	4,44	0,45	3,56	5,31	10,07	7,71	0,69	6,36	9,07	8,96				
Lampung	12,13	1,05	10,06	14,20	8,69	2,56	0,23	2,11	3,00	8,93	5,07	0,51	4,07	6,08	10,10				
DKI Jakarta	13,17	0,76	11,68	14,66	5,77	-	-	-	-	-	13,17	0,76	11,68	14,66	5,77				
Jawa Barat	7,04	0,43	6,20	7,89	6,10	2,01	0,22	1,58	2,44	10,89	5,36	0,31	4,75	5,97	5,79				
Banten	8,42	0,67	7,11	9,73	7,93	1,74	0,31	1,13	2,36	17,91	6,31	0,48	5,37	7,25	7,60				
Jawa Tengah	7,87	0,47	6,94	8,80	6,03	3,48	0,24	3,01	3,95	6,83	5,53	0,27	4,99	6,06	4,95				
DI Yogyakarta	15,05	1,33	12,45	17,65	8,81	5,56	1,44	2,74	8,38	25,85	12,08	1,12	9,88	14,28	9,29				
Jawa Timur	8,30	0,38	7,55	9,05	4,61	3,16	0,23	2,71	3,60	7,24	5,65	0,26	5,15	6,15	4,52				
Bali	14,70	0,93	12,87	16,53	6,34	6,42	0,92	4,62	8,21	14,27	11,52	0,80	9,95	13,09	6,95				
Nusa Tenggara Barat	7,49	0,64	6,23	8,75	8,58	4,68	0,47	3,76	5,59	9,97	5,87	0,39	5,11	6,63	6,62				
Nusa Tenggara Timur	8,05	0,78	6,52	9,58	9,69	3,62	0,30	3,04	4,21	8,19	4,60	0,29	4,03	5,17	6,35				
Kalimantan Barat	9,24	0,68	7,90	10,58	7,40	1,69	0,20	1,30	2,08	11,76	4,03	0,37	3,30	4,76	9,24				
Kalimantan Tengah	10,98	0,83	9,35	12,62	7,57	3,11	0,33	2,47	3,75	10,52	5,82	0,43	4,97	6,66	7,45				
Kalimantan Selatan	8,74	0,63	7,50	9,98	7,24	2,91	0,31	2,30	3,52	10,67	5,39	0,35	4,69	6,08	6,57				
Kalimantan Timur	11,90	0,75	10,43	13,38	6,30	3,57	0,53	2,53	4,60	14,85	8,78	0,64	7,53	10,02	7,24				
Sulawesi Utara	11,18	0,99	9,23	13,13	8,88	3,42	0,42	2,59	4,24	12,31	6,98	0,66	5,69	8,26	9,39				
Gorontalo	9,06	1,02	7,06	11,05	11,24	3,03	0,51	2,03	4,03	16,90	5,14	0,56	4,05	6,24	10,88				
Sulawesi Tengah	11,02	0,86	9,34	12,70	7,77	4,03	0,37	3,30	4,76	9,26	5,83	0,45	4,95	6,71	7,68				
Sulawesi Selatan	11,23	0,48	10,29	12,18	4,31	4,77	0,29	4,19	5,34	6,17	7,23	0,36	6,53	7,94	4,98				
Sulawesi Barat	14,27	1,32	11,67	16,86	9,26	3,52	0,58	2,39	4,65	16,43	6,08	0,62	4,85	7,30	10,26				
Sulawesi Tenggara	12,97	0,86	11,30	14,65	6,60	5,30	0,46	4,41	6,20	8,60	7,51	0,49	6,54	8,48	6,56				
Maluku	10,67	0,70	9,29	12,05	6,59	4,38	0,40	3,60	5,17	9,14	6,78	0,49	5,82	7,73	7,20				
Maluku Utara	11,94	0,95	10,07	13,81	7,99	6,24	0,66	4,95	7,53	10,55	7,85	0,60	6,68	9,03	7,64				
Papua	11,69	0,88	9,96	13,42	7,55	2,53	0,28	1,98	3,08	11,18	4,97	0,39	4,20	5,73	7,85				
Papua Barat	10,71	1,05	8,64	12,77	9,85	8,51	0,71	7,13	9,90	8,31	9,20	0,59	8,04	10,35	6,39				
INDONESIA	9,33	0,17	8,99	9,67	1,85	3,44	0,07	3,30	3,58	2,07	6,46	0,10	6,25	6,66	1,60				

Tabel 7.22 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tamat PT/Sederajat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-Laki						Perempuan						Laki-Laki+Perempuan					
	Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan		Estimasi		Standard		Selang Kepercayaan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Aceh	6,01	0,41	5,21	6,81	6,77	11,47	0,57	10,36	12,58	4,93	8,80	0,41	7,99	9,61	4,69			
Sumatera Utara	4,32	0,36	3,62	5,03	8,32	7,92	0,48	6,99	8,85	6,00	6,11	0,36	5,41	6,81	5,86			
Sumatera Barat	4,15	0,36	3,46	4,85	8,55	11,17	0,75	9,70	12,64	6,72	7,57	0,48	6,63	8,52	6,39			
Riau	4,38	0,38	3,64	5,13	8,66	9,35	0,81	7,77	10,94	8,66	6,89	0,51	5,89	7,88	7,40			
Kep. Riau	6,16	0,98	4,24	8,08	15,90	6,90	0,63	5,66	8,13	9,11	6,56	0,69	5,21	7,90	10,47			
Jambi	5,11	0,47	4,18	6,04	9,29	7,93	0,68	6,60	9,26	8,56	6,53	0,46	5,62	7,44	7,11			
Sumatera Selatan	4,26	0,50	3,27	5,25	11,83	7,23	0,64	5,98	8,48	8,83	5,71	0,54	4,66	6,76	9,38			
Kep. Bangka Belitung	5,22	0,75	3,75	6,69	14,38	7,07	0,75	5,60	8,55	10,66	6,11	0,61	4,92	7,30	9,95			
Bengkulu	5,64	0,63	4,40	6,88	11,25	9,87	0,92	8,07	11,67	9,31	7,71	0,69	6,36	9,07	8,96			
Lampung	3,96	0,48	3,03	4,90	12,08	6,26	0,67	4,94	7,57	10,74	5,07	0,51	4,07	6,08	10,10			
DKI Jakarta	11,53	0,89	9,79	13,27	7,71	14,74	0,87	13,04	16,44	5,88	13,17	0,76	11,68	14,66	5,77			
Jawa Barat	4,92	0,32	4,30	5,54	6,43	5,81	0,38	5,06	6,55	6,51	5,36	0,31	4,75	5,97	5,79			
Banten	5,55	0,52	4,54	6,57	9,30	7,05	0,60	5,88	8,22	8,46	6,31	0,48	5,37	7,25	7,60			
Jawa Tengah	4,58	0,28	4,02	5,13	6,20	6,42	0,33	5,77	7,08	5,17	5,53	0,27	4,99	6,06	4,95			
DI Yogyakarta	9,75	1,45	6,90	12,60	14,92	14,26	1,23	11,84	16,67	8,64	12,08	1,12	9,88	14,28	9,29			
Jawa Timur	4,78	0,25	4,29	5,27	5,23	6,48	0,34	5,81	7,15	5,27	5,65	0,26	5,15	6,15	4,52			
Bali	11,61	0,97	9,70	13,51	8,37	11,44	0,87	9,74	13,14	7,59	11,52	0,80	9,95	13,09	6,95			
Nusa Tenggara Barat	5,45	0,57	4,34	6,57	10,40	6,22	0,49	5,25	7,18	7,92	5,87	0,39	5,11	6,63	6,62			
Nusa Tenggara Timur	3,53	0,34	2,87	4,20	9,55	5,58	0,40	4,80	6,36	7,11	4,60	0,29	4,03	5,17	6,35			
Kalimantan Barat	3,63	0,38	2,89	4,38	10,46	4,43	0,46	3,53	5,32	10,30	4,03	0,37	3,30	4,76	9,24			
Kalimantan Tengah	4,69	0,49	3,74	5,65	10,39	6,93	0,60	5,77	8,10	8,58	5,82	0,43	4,97	6,66	7,45			
Kalimantan Selatan	4,52	0,45	3,64	5,40	9,89	6,22	0,45	5,33	7,10	7,28	5,39	0,35	4,69	6,08	6,57			
Kalimantan Timur	7,30	0,79	5,75	8,84	10,80	10,33	0,72	8,92	11,73	6,93	8,78	0,64	7,53	10,02	7,24			
Sulawesi Utara	5,48	0,72	4,07	6,89	13,11	8,55	0,81	6,96	10,14	9,48	6,98	0,66	5,69	8,26	9,39			
Gorontalo	3,34	0,55	2,27	4,41	16,34	6,90	0,81	5,31	8,49	11,75	5,14	0,56	4,05	6,24	10,88			
Sulawesi Tengah	3,98	0,45	3,10	4,87	11,30	7,71	0,61	6,52	8,91	7,88	5,83	0,45	4,95	6,71	7,68			
Sulawesi Selatan	4,94	0,38	4,19	5,69	7,79	9,35	0,52	8,32	10,37	5,59	7,23	0,36	6,53	7,94	4,98			
Sulawesi Barat	4,95	0,65	3,67	6,23	13,18	7,15	0,87	5,44	8,86	12,19	6,08	0,62	4,85	7,30	10,26			
Sulawesi Tenggara	6,23	0,57	5,11	7,34	9,14	8,74	0,62	7,53	9,95	7,07	7,51	0,49	6,54	8,48	6,56			
Maluku	4,67	0,65	3,40	5,94	13,84	8,90	0,61	7,70	10,09	6,83	6,78	0,49	5,82	7,73	7,20			
Maluku Utara	6,10	0,62	4,88	7,32	10,23	9,67	0,86	7,99	11,36	8,91	7,85	0,60	6,68	9,03	7,64			
Papua	4,87	0,45	3,98	5,75	9,29	5,07	0,49	4,10	6,04	9,76	4,97	0,39	4,20	5,73	7,85			
Papua Barat	7,43	0,74	5,97	8,89	10,02	10,94	0,85	9,28	12,59	7,74	9,20	0,59	8,04	10,35	6,39			
INDONESIA	5,31	0,11	5,10	5,52	2,04	7,58	0,13	7,33	7,83	1,69	6,46	0,10	6,25	6,66	1,60			

Tabel 7.23 Sampling Error Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2011

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Perkotaan			Perdesselan			Perkotaan+Perdeselan		
			Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Atas	Batas Bawah		Batas Atas	Batas Bawah		Batas Atas	Batas Bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	55,01	1,26	52,53	57,49	2,30	56,97	1,02	54,98	58,96	1,78	56,43
Sumatera Utara	62,68	1,06	60,59	64,76	1,70	72,70	0,85	71,04	74,36	1,16	67,71
Sumatera Barat	63,21	1,49	60,29	66,14	2,36	58,08	1,10	55,93	60,23	1,89	60,12
Riau	60,92	1,52	57,93	63,91	2,50	60,93	1,18	58,62	63,24	1,93	60,93
Kep. Riau	65,95	2,27	61,50	70,39	3,44	62,77	1,92	59,01	66,53	3,05	65,39
Jambi	56,70	1,54	53,68	59,73	2,72	64,56	1,09	62,42	66,70	1,69	62,12
Sumatera Selatan	59,56	1,38	56,85	62,27	2,32	68,54	1,01	66,56	70,51	1,47	65,30
Kep. Bangka Belitung	65,38	1,45	62,54	68,23	2,22	65,23	1,56	62,16	68,29	2,40	65,31
Bengkulu	60,85	1,79	57,34	64,36	2,94	68,32	1,21	65,93	70,70	1,78	65,94
Lampung	62,54	1,39	59,81	65,27	2,23	63,74	0,98	61,83	65,66	1,54	63,44
DKI Jakarta	69,87	0,96	68,00	71,75	1,37	-	-	-	-	-	61,85
Jawa Barat	60,19	0,67	58,87	61,51	1,12	57,03	0,89	55,29	58,78	1,56	59,12
Banten	71,76	1,01	69,79	73,74	1,41	58,24	1,64	55,03	61,45	2,81	67,24
Jawa Tengah	65,14	0,71	63,75	66,53	1,09	63,56	0,79	62,02	65,10	1,24	64,29
DI Yogyakarta	61,09	1,85	57,47	64,71	3,02	59,63	2,41	54,91	64,35	4,04	60,63
Jawa Timur	63,62	0,73	62,19	65,05	1,15	61,98	0,76	60,49	63,46	1,22	62,77
Bali	69,49	1,38	66,80	72,19	1,98	73,59	1,97	69,73	77,44	2,67	71,07
Nusa Tenggara Barat	57,70	1,50	54,76	60,64	2,60	60,54	1,29	58,01	63,07	2,13	59,34
Nusa Tenggara Timur	52,71	1,43	49,91	55,52	2,71	67,36	1,03	65,34	69,37	1,52	64,49
Kalimantan Barat	59,46	1,40	56,72	62,19	2,35	73,64	1,06	71,56	75,73	1,44	69,27
Kalimantan Tengah	62,76	1,70	59,43	66,09	2,71	68,28	1,33	65,67	70,89	1,95	66,43
Kalimantan Selatan	59,50	1,59	56,39	62,61	2,67	72,22	1,18	69,91	74,53	1,63	66,82
Kalimantan Timur	66,42	1,16	64,16	68,69	1,74	63,99	1,48	61,10	66,89	2,31	65,50
Sulawesi Utara	63,20	1,48	60,30	66,10	2,34	53,72	1,26	51,25	56,19	2,35	58,14
Gorontalo	52,54	2,80	47,05	58,03	5,33	56,85	1,90	53,13	60,56	3,34	55,34
Sulawesi Tengah	51,95	2,43	47,19	56,70	4,67	69,59	1,13	67,38	71,80	1,62	65,27
Sulawesi Selatan	57,21	1,51	54,26	60,17	2,63	62,72	0,89	60,98	64,46	1,42	60,66
Sulawesi Barat	58,48	3,25	52,11	64,85	5,56	67,36	2,24	62,97	71,75	3,32	65,22
Sulawesi Tenggara	56,96	1,96	53,11	60,80	3,44	65,93	1,63	62,73	69,12	2,47	63,39
Maluku	58,07	2,49	53,20	62,95	4,28	63,47	1,95	59,65	67,29	3,07	61,40
Maluku Utara	57,73	3,01	51,83	63,63	5,21	62,84	1,61	59,68	65,99	2,56	61,40
Papua	60,16	1,68	56,88	63,45	2,79	78,34	1,66	75,10	81,58	2,11	73,66
Papua Barat	60,62	2,25	56,21	65,03	3,71	66,71	1,71	63,36	70,06	2,56	64,89
INDONESIA	63,22	0,27	62,70	63,74	0,42	63,67	0,24	63,19	64,14	0,38	63,44
											63,09
											63,79
											0,28

Tabel 7.24 Sampling Error Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2011

Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Laki-laki+Perempuan					
	Selang Kepercayaan			Selang Kepercayaan			Perempuan			Selang Kepercayaan			Batas Atas			Selang Kepercayaan		
	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Error	Estimasi	Standard	Error	Batas Bawah	Batas Atas	Error	Estimasi	Standard	Error	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Aceh	71,90	1,08	69,78	74,01	1,50	41,38	1,12	39,18	43,58	2,71	56,43	0,81	54,83	58,02	1,44			
Sumatera Utara	76,84	0,92	75,04	78,64	1,20	58,45	0,97	56,54	60,36	1,67	67,71	0,69	66,36	69,07	1,02			
Sumatera Barat	78,10	1,07	75,99	80,20	1,38	42,28	1,20	39,94	44,62	2,83	60,12	0,90	58,36	61,87	1,49			
Riau	79,23	1,09	77,09	81,37	1,38	42,77	1,37	40,09	45,46	3,20	60,93	0,93	59,10	62,76	1,53			
Kep. Riau	80,95	2,30	76,44	85,45	2,84	50,62	3,38	43,99	57,25	6,68	65,39	1,91	61,65	69,14	2,92			
Jambi	82,35	1,04	80,32	84,39	1,26	41,88	1,44	39,06	44,70	3,43	62,12	0,90	60,37	63,88	1,44			
Sumatera Selatan	81,01	0,94	79,17	82,85	1,16	49,11	1,30	46,57	51,65	2,64	65,30	0,83	63,68	66,92	1,26			
Kep. Bangka Belitung	82,84	1,32	80,25	85,44	1,60	47,24	1,84	43,63	50,85	3,90	65,31	1,07	63,21	67,40	1,63			
Bengkulu	79,94	1,20	77,59	82,29	1,50	51,69	1,63	48,49	54,88	3,15	65,94	1,02	63,94	67,94	1,55			
Lampung	81,95	0,92	80,14	83,76	1,13	43,83	1,20	41,48	46,18	2,74	63,44	0,81	61,85	65,02	1,28			
DKI Jakarta	79,08	1,32	76,50	81,66	1,67	60,96	1,37	58,27	63,65	2,25	69,87	0,96	68,00	71,75	1,37			
Jawa Barat	76,54	0,70	75,18	77,91	0,91	41,59	0,78	40,06	43,11	1,87	59,12	0,54	58,06	60,17	0,91			
Banten	80,39	1,14	78,15	82,64	1,42	53,50	1,33	50,90	56,11	2,49	67,24	0,88	65,52	68,97	1,31			
Jawa Tengah	75,21	0,71	73,82	76,59	0,94	53,55	0,79	52,00	55,11	1,48	64,29	0,54	63,24	65,34	0,83			
DI Yogyakarta	67,15	2,12	62,99	71,30	3,16	53,84	1,94	50,04	57,64	3,60	60,63	1,48	57,74	63,53	2,44			
Jawa Timur	77,29	0,64	76,04	78,53	0,82	48,45	0,75	46,97	49,93	1,55	62,77	0,53	61,74	63,80	0,84			
Bali	75,72	1,49	72,81	78,64	1,96	66,39	1,54	63,36	69,42	2,33	71,07	1,13	68,85	73,29	1,59			
Nusa Tenggara Barat	75,17	1,27	72,68	77,66	1,69	45,23	1,46	42,38	48,09	3,22	59,34	0,98	57,42	61,26	1,65			
Nusa Tenggara Timur	74,82	1,01	72,83	76,80	1,36	54,81	1,22	52,42	57,21	2,23	64,49	0,88	62,76	66,21	1,36			
Kalimantan Barat	82,78	0,94	80,95	84,62	1,13	55,58	1,35	52,93	58,22	2,43	69,27	0,88	67,56	70,99	1,26			
Kalimantan Tengah	83,02	1,22	80,62	85,41	1,47	48,66	1,56	45,60	51,72	3,21	66,43	1,06	64,35	68,50	1,60			
Kalimantan Selatan	82,60	1,38	79,90	85,30	1,67	51,27	1,48	48,37	54,16	2,88	66,82	0,99	64,89	68,75	1,47			
Kalimantan Timur	86,23	0,99	84,29	88,16	1,15	42,14	1,37	39,44	44,83	3,26	65,50	0,91	63,71	67,28	1,39			
Sulawesi Utara	73,88	1,22	71,49	76,27	1,65	41,61	1,55	38,64	44,59	3,64	58,14	0,98	56,21	60,07	1,69			
Gorontalo	72,83	2,35	68,23	77,43	3,22	38,36	2,08	34,29	42,43	5,42	55,34	1,59	52,22	58,45	2,87			
Sulawesi Tengah	81,97	1,45	79,13	84,81	1,77	48,02	1,64	44,82	51,23	3,41	65,27	1,11	63,09	67,44	1,70			
Sulawesi Selatan	78,90	1,06	76,82	80,98	1,35	43,48	1,19	41,16	45,81	2,73	60,66	0,80	59,10	62,22	1,31			
Sulawesi Barat	80,79	3,01	74,89	86,69	3,73	49,43	2,45	44,63	54,24	4,96	65,22	1,86	61,57	68,87	2,86			
Sulawesi Tenggara	82,86	1,23	80,45	85,27	1,48	45,05	1,68	41,76	48,33	3,72	63,39	1,29	60,86	65,92	2,04			
Maluku	72,40	2,09	68,30	76,51	2,89	50,47	1,98	46,59	54,35	3,92	61,40	1,55	58,37	64,43	2,52			
Maluku Utara	77,21	1,75	73,79	80,63	2,26	46,38	2,22	42,02	50,74	4,80	61,40	1,46	58,55	64,25	2,37			
Papua	81,97	1,30	79,41	84,52	1,59	65,48	2,01	61,53	69,42	3,07	73,66	1,27	71,17	76,14	1,72			
Papua Barat	76,83	1,63	73,64	80,02	2,12	51,50	2,07	47,44	55,56	4,02	64,89	1,37	62,21	67,58	2,11			
INDONESIA	77,85	0,23	77,40	78,30	0,30	49,05	0,26	48,53	49,57	0,54	63,44	0,18	63,09	63,79	0,28			

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bisnis.id

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Laporan Survei Buta Aksara*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Laporan Pendidikan Anak Usia Dini*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Buku III Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009, Pedoman Pencacahan Kor*, Jakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik, *Buku IV Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009, Pedoman Pencacahan MSBP*, Jakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2005*, Jakarta, 2006
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2006*, Jakarta, 2007
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2007*, Jakarta, 2008
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2008*, Jakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2009*, Jakarta, 2010
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2010*, Jakarta, 2011
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara Presiden Republik Indonesia
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Majalah Gerbang Pemuda, Jakarta, 2006
- Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014*, Jakarta, 2009
- Kementerian Kesehatan, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014*, Jakarta, 2009
- Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014*, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2010

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Rizki, Medio,2011, *Tingkat Pendidikan Pemuda Indonesia Masih Rendah*, <http://medionvalentine.blogspot.com>, 3 Oktober 2011 diakses 13 Juni 2012

Supenti, T., *Data dan Analisis Kondisi Tenaga Kerja Pemuda*, Jakarta, 2007

Wahyuningtyas, P., *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Vs MDGs*, Media Indonesia, Jakarta, 14 November 2007

Yuliani, Rindang, 2011, *Pemuda dan Pendidikan, Kunci Utama Indonesia Sejahtera*, <http://bintangpamungkas.blogspot.com>, 10 November 2011 diakses 13 Juni 2012

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

